



Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021



DICO M. GANINDUTO, B.Sc
BUPATI KENDAL

H. WINDU SUKO BASUKI, S.H.
WAKIL BUPATI KENDAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan. Peraturan Daerah ini disusun sebagai dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Harapan kami, Peraturan Daerah yang telah tersusun ini dapat dipergunakan dengan baik dan memberikan manfaat untuk semua kalangan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan Peraturan Daerah ini.

Kendal, 26 Agustus 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026	1
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang.....	15
1.2 Landasan Hukum.....	18
1.3 Hubungan Antar Dokumen	25
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN	25
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	25
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kendal	25
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Kendal	26
1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)	26
1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya	27
1.4 Maksud dan Tujuan	27
1.4.1 Maksud	27
1.4.2 Tujuan	28
1.5 Sistematika RPJMD Kabupaten Kendal	28
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KENDAL.....	30
2.1 Aspek Geografis dan Demografis.....	30
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	30
2.1.2 Pengembangan Wilayah.....	33
2.1.3 Demografi	48
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	50
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	50
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	57

2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	69
2.3	Aspek Pelayanan Umum	69
2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	69
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	90
2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	118
2.3.4	Urusan Penunjang Pemerintah	127
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	142
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	142
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur	143
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	145
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	147
2.5	Hasil Evaluasi RPJMD	147
2.5.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (<i>Impact</i>) Kabupaten Kendal Tahun 2020 ...	147
2.5.2	Capaian Kinerja Program dalam RPJMD 2021-2026 sampai dengan Tahun 2020	166
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		237
3.1	Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	237
3.2	Kondisi Perekonomian Daerah	240
3.3	Kinerja Keuangan Daerah	241
3.3.1	Pendapatan Daerah	241
3.3.2	Belanja Daerah	248
3.3.3	Pembiayaan Daerah	255
3.4	Analisis Keuangan Daerah	259
3.4.1	Derajat Desentralisasi Fiskal	259
3.4.2	Indeks Kinerja Keuangan	260
3.5	Kerangka Pendanaan	264
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....		269
4.1	Permasalahan Pembangunan	269
4.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	269
4.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	271
4.1.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	276
4.1.4	Urusan Penunjang Pemerintah	278
4.2	Telaahan KLHS Kabupaten Kendal	280

4.3 Isu Strategis	281
4.3.1 Isu Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024	282
4.3.2 Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023	285
4.3.3 Isu Pembangunan Kabupaten Kendal 2021-2026	285
4.3.4 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026	298
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	316
5.1 Visi	316
5.2 Misi	316
5.3 Tujuan dan Sasaran	320
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	327
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	327
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	334
6.3 Arah Kebijakan Pembangunan <i>mainstreaming</i>	350
6.4 Program Prioritas	350
6.5 Program RPJMD Kabupaten Kendal berbasis pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal	370
6.6 Agenda Prioritas	391
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	394
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	394
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	455
BAB IX PENUTUP	494
9.1 Pedoman Transisi	494
9.2 Kaidah Pelaksanaan	495

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kendal Tahun 2020	48
Tabel 2.2	Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kendal Tahun 2020	49
Tabel 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	51
Tabel 2.4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	52
Tabel 2.5	Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	65
Tabel 2.6	Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Kendal Tahun 2016-2019	67
Tabel 2.7	Kinerja Makro Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	69
Tabel 2.8	Capaian Indikator PAUD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	71
Tabel 2.9	Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	72
Tabel 2.10	Indikator Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan	73
Tabel 2.11	Capaian AKB, AKABA dan AKI Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	75
Tabel 2.12	Status Gizi Masyarakat di Kabupaten Kendal	75
Tabel 2.13	Kondisi Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Kendal	76
Tabel 2.14	Kondisi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Kendal	77
Tabel 2.15	Kondisi Standar Pelayanan Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kendal	77
Tabel 2.16	Kondisi Kualitas Lingkungan Sehat dan Industri Rumah Tangga Kabupaten Kendal	79
Tabel 2.17	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	79
Tabel 2.18	Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	81
Tabel 2.19	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82

Tabel 2.20	Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	84
Tabel 2.21	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	84
Tabel 2.22	Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020	85
Tabel 2.23	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	87
Tabel 2.24	Capaian Indikator Urusan Sosial tahun 2016-2020	89
Tabel 2.25	Capaian Indikator SPM Urusan Sosial tahun 2016-2020	90
Tabel 2.26	Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	92
Tabel 2.27	Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	93
Tabel 2.28	Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	95
Tabel 2.29	Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	95
Tabel 2.30	Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	97
Tabel 2.31	Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020	99
Tabel 2.32	Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020	100
Tabel 2.33	Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020..	102
Tabel 2.34	Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020	104
Tabel 2.35	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020	107
Tabel 2.36	Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020	109
Tabel 2.37	Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2016-2020	110

Tabel 2.38	Capaian Pembangunan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kendal	111
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020	114
Tabel 2.40	Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	115
Tabel 2.41	Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	116
Tabel 2.42	Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018	117
Tabel 2.43	Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	117
Tabel 2.44	Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	119
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020	120
Tabel 2.46	Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	123
Tabel 2.47	Kinerja Urusan ESDM Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020.	124
Tabel 2.48	Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	125
Tabel 2.49	Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	126
Tabel 2.50	Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	127
Tabel 2.51	Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	127
Tabel 2.52	Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	128
Tabel 2.53	Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	129
Tabel 2.54	Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	130
Tabel 2.55	Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	132
Tabel 2.56	Kategori Penilaian Skor IKM	133
Tabel 2.57	Capaian IKM Kecamatan di Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	133
Tabel 2.58	Rata-Rata Realisasi Dana Desa Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	134

Tabel 2.59	Alokasi Anggaran Fisik di Tingkat Desa Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	135
Tabel 2.60	Hasil Musrenbang yang diakomodir di Tingkat Kecamatan Tahun 2016-2020	136
Tabel 2.61	Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang	137
Tabel 2.62	Nilai SAKIP Kecamatan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	138
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	139
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	140
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020....	141
Tabel 2.66	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	142
Tabel 2.67	Jenis Izin dan Lama Proses Pengurusannya	146
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (<i>Impact</i>) Kabupaten Kendal Tahun 2020	148
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Kendal Periode 2016-2021	168
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	245
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	252
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	257
Tabel 3.4	Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021	260
Tabel 3.5	Ketergantungan Fiskal Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021	261
Tabel 3.6	Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	262
Tabel 3.7	Proporsi Belanja Modal Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021	262
Tabel 3.8	Kontribusi Sektor Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	263
Tabel 3.9	Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021	263
Tabel 3.10	Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026	266
Tabel 4.1	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 ...	298

Tabel 4.2	Analisis Faktor-Faktor Internal	301
Tabel 4.3	Analisis Faktor-Faktor Eksternal	304
Tabel 4.4	Isu Strategis Pembangunan Global, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal	313
Tabel 5.1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026	321
Tabel 6.1	Roadmap Pelaksana Program Prioritas Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026	337
Tabel 6.2	Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal	353
Tabel 6.3	Tabel Penyelarasan Program RTRW dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026	371
Tabel 7.1	Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026	397
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	425
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kendal	456
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Urusan Kabupaten Kendal	458
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kendal	478

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Keterkaitan Antara Dokumen RPJMD Kabupaten Kendal dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	27
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kendal	30
Gambar 2.2	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kendal	34
Gambar 2.3	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kendal	47
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	49
Gambar 2.5	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	50
Gambar 2.6	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	52
Gambar 2.7	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	53
Gambar 2.8	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%)	54
Gambar 2.9	Laju Inflasi Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah (%) Tahun 2016-2020	55
Gambar 2.10	PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	56
Gambar 2.11	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	56
Gambar 2.12	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020	57
Gambar 2.13	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	58
Gambar 2.14	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020	58
Gambar 2.15	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)	59

Gambar 2.16	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun)	59
Gambar 2.17	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)	60
Gambar 2.18	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun)	60
Gambar 2.19	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)	61
Gambar 2.20	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun)	61
Gambar 2.21	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)	62
Gambar 2.22	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)	62
Gambar 2.23	Perkembangan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	63
Gambar 2.24	Perbandingan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020	64
Gambar 2.25	Perkembangan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	65
Gambar 2.26	Perbandingan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019	66
Gambar 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	67
Gambar 2.28	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2020	68
Gambar 2.29	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	68

Gambar 2.30	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%)	69
Gambar 2.31	Angka Ketergantungan di Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	147
Gambar 3.1	Tren dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal.	242
Gambar 3.2	Tren dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan).....	243
Gambar 3.3	Tren dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal..	244
Gambar 3.4	Tren dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal (Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya).....	244
Gambar 3.5	Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020	246
Gambar 3.6	Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020	248
Gambar 3.7	Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	250
Gambar 3.8	Realisasi Modal Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	251
Gambar 3.9	Realisasi Belanja Tahun 2016-2020 (dalam Milyar)	254
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Kendal.....	281
Gambar 6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026..	334



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-

Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat

yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Hasil pilkada Tahun 2020 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN dengan memperhatikan :
 - a. RPJMD Provinsi;
 - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - c. RPJMD Daerah Sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- c. bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026.
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
 - i. BAB IX : Penutup
memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal RPJMD Tahun 2021-2026 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH : (7-187/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026

I. UMUM.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) daerah di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kendal memenangkan pasangan Dico M. Ganinduto, B.Sc dan H. Windu Suko Basuki, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2021-2026. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dikukuhkan dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026, maka kewajiban Pemerintah Daerah adalah segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi dasar dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD ini nantinya berfungsi sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyusunan RPJMD 2021-2026 perlu mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik regional maupun nasional, memperhatikan arahan dan kebijakan pembangunan nasional dan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kebijakan nasional yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD antara lain adalah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs), dan juga adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Selain itu penyusunan RPJMD 2021-2026 juga perlu memperhatikan perubahan kondisi perekonomian baik perekonomian

global, nasional maupun daerah, akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga pada periode 2021-2026, salah satu prioritas pemerintah adalah pemulihan perekonomian dan aspek lainnya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal ini mengacu arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kendal 2005–2025, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Penyusunan RPJMD disusun disesuaikan dengan tahap-tahap penyusunan RPJMD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahap tersebut mulai dari tahap persiapan, penyusunan draft rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud “pelaksanaan lebih lanjut” adalah Rencana Pembangunan Tahunan pada tahun berjalan mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 214



BAB I PENDAHULUAN



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7
TANGGAL : 26 Agustus 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bagi perangkat daerah, dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan perencanaan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD) serta selanjutnya dalam perencanaan penganggaran (APBD).

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal dilaksanakan dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan penting yaitu : pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan sesuai tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD

mengacu pada visi dan misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*Bottom-Up*) dan atas-bawah (*Top-Down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Dengan terpilihnya pasangan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020, telah terpilih Bupati Dico M Ganinduto, B.Sc dan Wakil Bupati Windu Suko Basuki, SH yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 dengan periode masa jabatan tahun 2021 – 2026. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal 2005 – 2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah) Tahun 2018 – 2023. Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yaitu “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal memperhatikan prioritas berdasarkan periode keempat (tahun 2021 – 2025) dalam RPJPD Kabupaten Kendal berdasarkan prioritas memantapkan peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing daerah, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance* dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan). Demikian pula dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2021 – 2026 dengan program prioritas yang merupakan perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi dan keunggulan daerah, pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19 sejalan dengan Kebijakan Nasional Pengembangan Ekonomi Nasional (PEN), mengurangi kemiskinan dan

pengangguran di daerah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing di pasar kerja dunia industri, meningkatkan kondusivitas wilayah, rasa nyaman dan tenteram dengan penyelenggaraan pembangunan daerah yang merata, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.

Demikian pula dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan non alam (termasuk Pandemi Covid-19) melalui tatakelola pemerintahan yang semakin baik di tahun-tahun mendatang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disampaikan bahwa penyusunan RPJMD terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan RPJMD meliputi :

- a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim RPJMD;
- b. Orientasi mengenai RPJMD;
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD;
- d. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- e. Penyusunan Rancangan Teknokratik, Rancangan Teknokratik merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Tahapan ini merupakan tahapan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan mempedomani visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih. Tahapan penyusunan Rancangan Awal ini meliputi :

- a. Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;

- c. Perumusan tujuan dan sasaran;
- d. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. Perumusan program pembangunan Daerah;
- f. Perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

Dari penyusunan rancangan awal ini kemudian di bahas dengan para pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk memperoleh masukan yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk penyepakatan yang selanjutnya diajukan untuk dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Penyusunan Rancangan RPJMD

Tahapan ini merupakan tahapan penyempurnaan Rancangan awal dengan mendasarkan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi.

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pelaksanaan musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

6. Penetapan

Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJMD. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14,

- dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, antara lain : RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Dokumen RPJPD Kabupaten Kendal dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal yang baru.

1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang ditetapkan dalam arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Kendal juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021-2026.

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal juga harus berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, kawasan strategis, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kendal

RPJMD tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran dari periode keempat dari RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang daerah adalah : “Kabupaten Kendal yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”, dimana dalam periode tersebut, sasaran pokok perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun

2021 – 2026 yaitu memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya Kabupaten Kendal aman dan damai;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Kendal

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, RKPD Provinsi dan pedoman penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.5. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh semua Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepemahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal periode tahun 2021-2026;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat maupun Renja Perangkat Daerah Daerah berupa Program beserta target dan pagu indikatif sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- d. Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum pembangunan daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 tahun (2016 – 2020);
- b. Tersajinya informasi dan analisis permasalahan atau isu strategis yang terjadi atau dialami oleh masyarakat Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun yang lalu dan masa yang akan datang.
- c. Tersajinya informasi mengenai potensi/ kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun lalu dan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah, serta sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja tahunan.

1.5. Sistematika RPJMD Kabupaten Kendal

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Rancangan RPJMD Kabupaten Kendal, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan pembangunan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan tentang strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KENDAL

Danau Cengkehan

Pantai Indah Kemangi

**ASPEK GEOGRAFIS DAN
DEMOGRAFIS**

**ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

**ASPEK PELAYANAN
UMUM**

**ASPEK
DAYA SAING DAERAH**

**HASIL EVALUASI
RDJMD 2021 - 2026**

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KENDAL

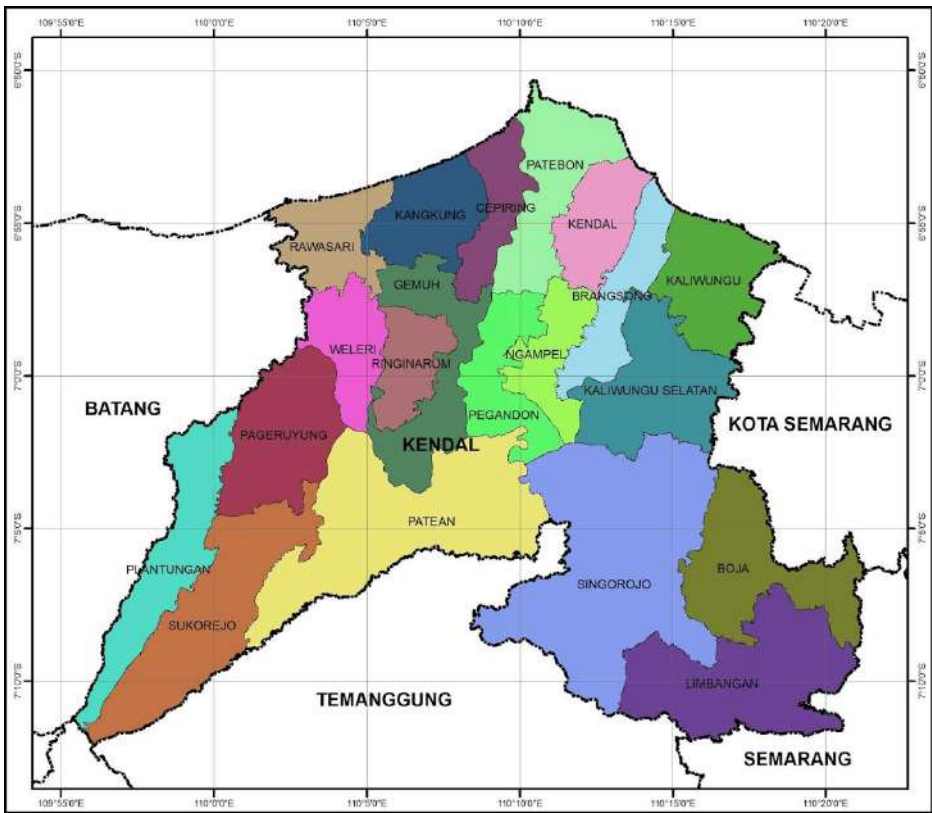
2.1 Aspek Geografis Dan Demografis

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.002,23 Km². Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Wonosobo.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kendal



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal

Jumlah kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 (dua puluh) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 286 (dua ratus delapan puluh enam) yang terdiri 266 desa dan 20 kelurahan. Terdiri dari 1.167 dusun, 1.508 RW dan 6.590 RT.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Kendal berada pada jalur penghubung Pulau Jawa bagian utara (PANTURA) sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Selain itu juga Kabupaten Kendal letaknya berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang

merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Kendal merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian, yaitu tanah sawah seluas 240,53 km² (24,00%), dan tanah tegalan 224,85 km² (22,44%). Sedangkan sisanya dipergunakan untuk peruntukan lain (hutan, perkebunan, lahan bukan pertanian dan lain-lain).

3. Topografi

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan titik tertinggi mencapai 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25^o C. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27^o C.

Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 697,992 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 524,256 mdpl. Kecamatan Weleri adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut yaitu 4,877 mdpl.

4. Geologi

Kondisi Geologi Kabupaten Kendal berdasarkan struktur geologinya terdiri atas dataran aluvial, perbukitan bergelombang, perbukitan berelief sedang, plato dan tubuh gunung api.

- Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara meliputi wilayah Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, sebagian Kaliwungu, Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon dan Ngampel merupakan dataran aluvial dengan kemiringan antara 3-5%.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi wilayah Kecamatan Pageruyung, Weleri, Ringinarum, dan Kaliwungu merupakan wilayah perbukitan bergelombang dengan kemiringan antara 3-10%, dan didominasi batu pasir, breksi, tufa, dan aliran lava.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi Kecamatan Patean dan Singorojo merupakan daerah berelief sedang dengan kemiringan 15-30%.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang meliputi sebagian kecamatan Plantungan, Sukorejo, Patean, Limbangan, dan Boja merupakan plato dengan kemiringan lebih dari 30%.

- Wilayah selatan lain yang meliputi Kecamatan Limbangan merupakan tubuh gunung api dengan kemiringan 15-30% didominasi lava andesit basal dan bongkah vulkanik lahar.
- Wilayah selatan lain yang meliputi sebagian wilayah Limbangan dan Singorojo merupakan daerah perbukitan berrelief kasar dengan kemiringan antara 30-70%.

5. Hidrologi

Suplai air tanah maupun air tawar seluruhnya datang dari hujan yang berasal dari penguapan air laut, yang merupakan bagian dari proses siklus hidrologi. Hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah, sebagian menjadi air tanah yang mengisi akuifer (formasi tanah yang mengandung dan menghantarkan air tanah dan sebagian besar mengalir di permukaan sebagai *run off*), dalam kenyataannya siklus hidrologi ini sangat rumit meskipun pada dasarnya hidrologi adalah bagian dari ilmu bumi.

Namun kenyataannya hidrologi harus berhubungan dengan atmosfer sebagai medium yang meneruskan air ke muka bumi maupun dari muka bumi. Kabupaten Kendal memiliki sekitar 20 mata air dengan debit yang beranekaragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Limbangan, dan Patean.

Kabupaten Kendal termasuk dalam wilayah Sub DAS Bodri, Sub DAS Besar Pemali-Comal-Jratun-Seluna. Sungai-sungai yang mengalir sebagian besar hulunya masih di lingkup Kabupaten Kendal yaitu bagian tengah dan selatan. Secara umum, bagian tengah dan selatan Kabupaten Kendal merupakan daerah resapan air hujan yang diharapkan dapat mengisi akuifer yang berguna sebagai sumber air. Wilayah daerah Aliran Sungai Kabupaten Kendal itu sendiri dilalui oleh 10 sungai, antara lain kali Aji/slembang, kali waridin, kali glodog, kali blorong, kali kendal, kali buntu, kali bodri, kali blukar, kali bulanan/pening, dan kali kuto yang sebagian besar digunakan untuk sistem irigasi teknis persawahan dan perkebunan.

Sungai dengan debit air terbesar di Kabupaten Kendal tahun 2017 yaitu sungai Kali Kuto. Debit air Kali Kuto pada musim penghujan bisa mencapai 504,9 m³/dt, sedangkan pada musim kemarau debit air terbesarpun ada di Kali Kuto berkisar 100,9 m³/dt dengan panjang sungai 52 km.

6. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang berdekatan dengan Laut Jawa (dataran rendah), kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas. Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan (dataran tinggi), kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk.

Selama Tahun 2018 di 5 (lima) wilayah pencatatan Kabupaten Kendal dapat dilihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari di wilayah pencatatan Boja yaitu sekitar 726 mm. Jumlah curah hujan pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Untuk tahun 2018 berkisar 2.055 mm sedangkan untuk tahun 2017 berkisar 2.610 mm.

7. Penggunaan Lahan

Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2020, dipergunakan untuk tanah sawah 240,88 km² (24,03%), tegalan 220,42 km² (21,99%), hutan 162,64 km² (16,23%), perkebunan 78,68 km² (7,85%), lahan bukan pertanian 252,00 km² (25,14%) dan Lain-lain sebesar 47,61 km² (4,75%).

2.1.2 Pengembangan Wilayah

Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 memiliki arah pengembangan sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang

a. Sistem perkotaan

Perwujudan sistem perkotaan meliputi :

- Penetapan herarki pusat pelayanan;
- Pengembangan sistem pusat pelayanan;
- Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.

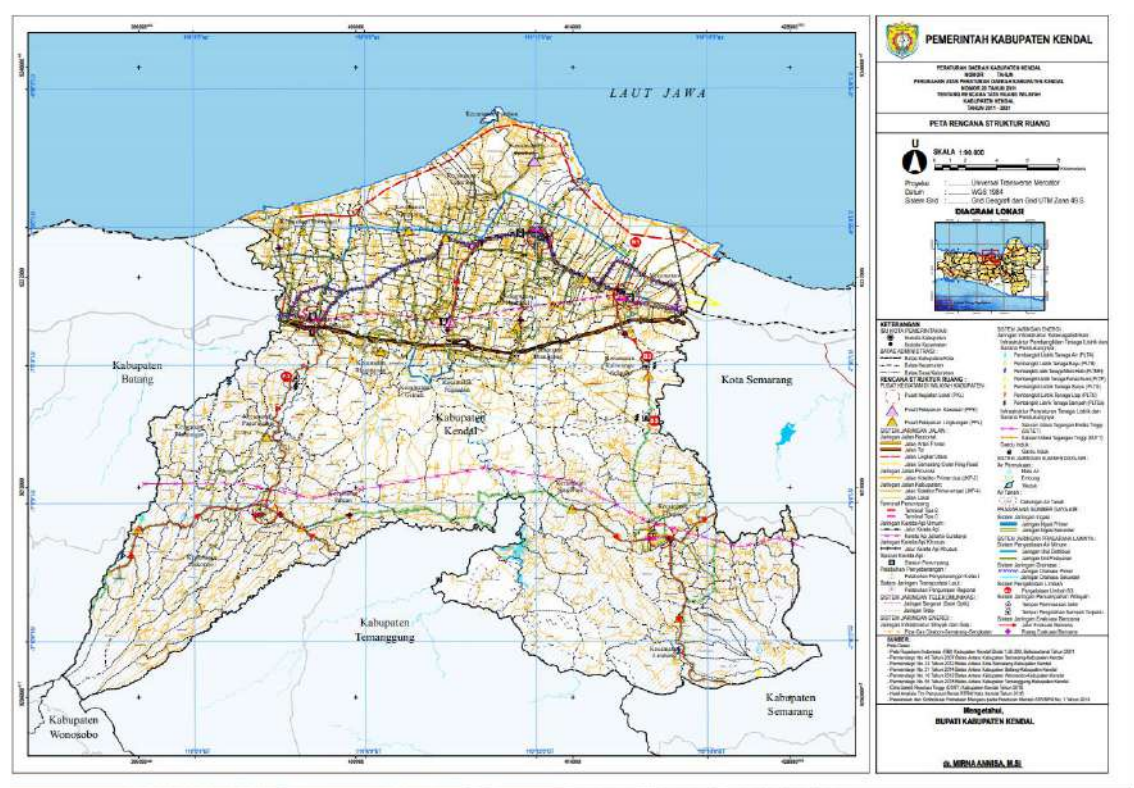
b. Sistem jaringan prasarana

Perwujudan sistem jaringan prasarana meliputi :

- Perwujudan sistem jaringan transportasi;
- Perwujudan sistem jaringan energi;
- Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

- Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kendal



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.

2. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan peruntukan lindung;

Kawasan peruntukan lindung terdiri atas :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas :

- a) Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.706 (seribu tujuh ratus enam) hektar meliputi :
 - (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (2) sebagian Kecamatan Boja;
 - (3) sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (4) sebagian Kecamatan Sukorejo
- b) Kawasan resapan air meliputi :
 - (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (2) sebagian Kecamatan Boja;
 - (3) sebagian Kecamatan Singorojo;
 - (4) sebagian Kecamatan Patean;
 - (5) sebagian Kecamatan Sukorejo;

- (6) sebagian Kecamatan Plantungan;
- (7) sebagian Kecamatan Pageruyung.

2. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- a) Kawasan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :
 - (1) Kecamatan Rowosari;
 - (2) Kecamatan Kangkung;
 - (3) Kecamatan Cepiring;
 - (4) Kecamatan Patebon;
 - (5) Kecamatan Kendal;
 - (6) Kecamatan Brangsong;
 - (7) Kecamatan Kaliwungu.
- b) Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 835 (delapan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:
 - (1) Kecamatan Kendal;
 - (2) Kecamatan Weleri;
 - (3) Kecamatan Kaliwungu;
 - (4) Kecamatan Boja;
 - (5) Kecamatan Sukorejo;
 - (6) Kecamatan Pegandon;
 - (7) Kecamatan Cepiring;
 - (8) Kecamatan Patebon;
 - (9) Kecamatan Gemuh;
 - (10) Kecamatan Rowosari;
 - (11) Kecamatan Kangkung;
 - (12) Kecamatan Pageruyung;
 - (13) Kecamatan Patean;
 - (14) Kecamatan Singorojo;
 - (15) Kecamatan Limbangan;
 - (16) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (17) Kecamatan Ringinarum;
 - (18) Kecamatan Ngampel;
 - (19) Kecamatan Brangsong;
 - (20) Kecamatan Plantungan.
- c) Kawasan sekitar danau/ waduk/ embung dengan luas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Singorojo;

- d) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan termasuk di dalamnya hutan kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, mikrolimat, ekosistem, dan habitat fauna dengan luas kurang lebih 1.608 (seribu enam ratus delapan) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan perkotaan.
- e) Kawasan sempadan rel kereta api dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar meliputi:
- (1) Kecamatan Weleri;
 - (2) Kecamatan Ringinarum;
 - (3) Kecamatan Gemuh;
 - (4) Kecamatan Pegandon;
 - (5) Kecamatan Ngampel;
 - (6) Kecamatan Brangsong;
 - (7) Kecamatan Kaliwungu
3. Kawasan konservasi;
- Kawasan konservasi berupa kawasan cagar alam Pagerwunung Darupono dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan.
4. Kawasan cagar budaya;
- Kawasan cagar budaya meliputi :
- a) Situs seloarjuno berada di Kecamatan Limbangan;
 - b) Tugu Gerbang Kabupaten Lama berada di Kecamatan Kaliwungu;
 - c) Tugu Gerbang Pasarean Berada di Kecamatan Kendal;
 - d) Candi Gunung Gentong berada di Kecamatan Limbangan.
5. Kawasan lindung geologi;
- Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
- a) Kawasan imbuhan air berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Kendal, Cekungan Air Tanah (CAT) Semarang – Demak, Cekungan Air Tanah (CAT) Subah dan Cekungan Air Tanah (CAT) Sumowono, yang meliputi:
 - (1) sebagian Kecamatan Weleri;
 - (2) sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - (3) sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (4) sebagian Kecamatan Pegandon;
 - (5) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;

- (6) sebagian Kecamatan Singorojo.
- b) Kawasan sempadan mata air ditetapkan selebar 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air.
6. Kawasan rawan bencana;
- Kawasan rawan bencana terdiri atas :
- a) kawasan rawan bencana banjir meliputi :
- (1) sebagian Kecamatan Brangsong;
 - (2) sebagian Kecamatan Cepiring;
 - (3) sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (4) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - (5) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (6) sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (7) sebagian Kecamatan Kendal;
 - (8) sebagian Kecamatan Ngampel;
 - (9) sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (10) sebagian Kecamatan Patean;
 - (11) sebagian Kecamatan Patebon;
 - (12) sebagian Kecamatan Pegandon;
 - (13) sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - (14) sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (15) sebagian Kecamatan Boja; dan
 - (16) sebagian Kecamatan Weleri.
- b) kawasan rawan bencana banjir bandang meliputi :
- (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
 - (4) sebagian Kecamatan Patebon;
 - (5) sebagian Kecamatan Kendal;
 - (6) sebagian Kecamatan Brangsong; dan
 - (7) sebagian Kecamatan Kaliwungu.
- c) kawasan rawan bencana kekeringan meliputi :
- (1) Kecamatan Boja;
 - (2) Kecamatan Gemuh;
 - (3) Kecamatan Kaliwungu
 - (4) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (5) Kecamatan Limbangan;
 - (6) Kecamatan Pageruyung;
 - (7) Kecamatan Patean;

- (8) Kecamatan Pegandon;
- (9) Kecamatan Plantungan;
- (10) Kecamatan Ringinarum;
- (11) Kecamatan Singorojo;
- (12) Kecamatan Sukorejo;
- (13) Kecamatan Weleri;
- (14) Kecamatan Brangsong;
- (15) Kecamatan Ngampel;
- (16) Kecamatan Rowosari;
- (17) Kecamatan Kangkung;
- (18) Kecamatan Cepiring;
- (19) Kecamatan Patebon; dan
- (20) Kecamatan Kendal

d) kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi :

- (1) sebagian Kecamatan Pageruyung;
- (2) sebagian Kecamatan Plantungan;
- (3) sebagian Kecamatan Gemuh;
- (4) sebagian Kecamatan Boja;
- (5) sebagian Kecamatan Singorojo;
- (6) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (7) sebagian Kecamatan Kaliwungu
- (8) sebagian Kecamatan Singorojo;
- (9) sebagian Kecamatan Limbangan;
- (10) sebagian Kecamatan Patean;
- (11) sebagian Kecamatan Sukorejo;
- (12) sebagian Kecamatan Weleri;
- (13) sebagian Kecamatan Ringinarum;
- (14) sebagian Kecamatan Pegandon; dan
- (15) sebagian Kecamatan Ngampel

e) kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi meliputi:

- (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
- (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
- (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
- (4) sebagian Kecamatan Patebon;
- (5) sebagian Kecamatan Kendal;
- (6) sebagian Kecamatan Brangsong; dan
- (7) sebagian Kecamatan Kaliwungu.

f) kawasan rawan bencana kebakaran hutan meliputi :

- (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
- (2) sebagian Kecamatan Sukorejo;
- (3) sebagian Kecamatan Plantungan;
- (4) sebagian Kecamatan Singorojo.
- (5) sebagian Kecamatan Limbangan;
- (6) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (7) sebagian Kecamatan Ringinarum;
- (8) sebagian Kecamatan Boja;
- (9) sebagian Kecamatan Pageruyung;
- (10) sebagian Kecamatan Kaliwungu
- (11) sebagian Kecamatan Gemuh; dan
- (12) sebagian Kecamatan Weleri.

7. Kawasan ekosistem mangrove.

- a) Kawasan ekosistem mangrove berupa kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :
 - 1) sebagian Kecamatan Rowosari;
 - 2) sebagian Kecamatan Kangkung;
 - 3) sebagian Kecamatan Cepiring.
- b) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau yang selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau.
- c) Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau berada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Patebon seluas kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar.
- d) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kawasan peruntukan budi daya.

Kawasan peruntukan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

1) kawasan hutan produksi;

Kawasan hutan produksi terdiri atas :

- a) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.193 (seribu seratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi :
 - (1) Kecamatan Limbangan;
 - (2) Kecamatan Sukorejo;
 - (3) Kecamatan Plantungan;
 - (4) Kecamatan Singorojo.
- b) Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 15.441 (lima belas ribu empat ratus empat puluh satu) hektar meliputi:
 - (1) Kecamatan Boja;
 - (2) Kecamatan Brangsong;
 - (3) Kecamatan Gemuh;
 - (4) Kecamatan Kaliwungu;
 - (5) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (6) Kecamatan Limbangan;
 - (7) Kecamatan Ngampel;
 - (8) Kecamatan Pageruyung;
 - (9) Kecamatan Patean;
 - (10) Kecamatan Pegandon;
 - (11) Kecamatan Plantungan;
 - (12) Kecamatan Ringinarum;
 - (13) Kecamatan Singorojo;
 - (14) Kecamatan Sukorejo;
 - (15) Kecamatan Weleri.

2) Kawasan pertanian

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas :

- a) Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 25.213 (dua puluh lima ribu dua ratus tiga belas) hektar meliputi
 - (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar meliputi:
 - (a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;
 - (b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar; dan

- (c) Lahan penunjang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.
- (2) Penunjang kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hektar.

Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

- (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
- (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
- (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
- (4) sebagian Kecamatan Patebon;
- (5) sebagian Kecamatan Kendal;
- (6) sebagian Kecamatan Brangsong;
- (7) sebagian Kecamatan Ngampel;
- (8) sebagian Kecamatan Pegandon;
- (9) sebagian Kecamatan Gemuh;
- (10) sebagian Kecamatan Weleri
- (11) sebagian Kecamatan Ringinarum;
- (12) sebagian Kecamatan Sukorejo;
- (13) sebagian Kecamatan Limbangan;
- (14) sebagian Kecamatan Singorojo;
- (15) sebagian Kecamatan Boja;
- (16) sebagian Kecamatan Patean;
- (17) sebagian Kecamatan Plantungan;
- (18) sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (19) sebagian kecamatan Pageruyung.

- b) Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 16.303 (enam belas ribu tiga ratus tiga) hektar meliputi:

- (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
- (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
- (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
- (4) sebagian Kecamatan Patebon
- (5) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
- (6) sebagian Kecamatan Brangsong;
- (7) sebagian Kecamatan Ngampel;
- (8) sebagian Kecamatan Pegandon;
- (9) sebagian Kecamatan Gemuh;
- (10) sebagian Kecamatan Weleri;
- (11) sebagian Kecamatan Ringinarum;
- (12) sebagian Kecamatan Sukorejo;

- (13) sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (14) sebagian Kecamatan Singorojo;
 - (15) sebagian Kecamatan Boja;
 - (16) sebagian Kecamatan Patean;
 - (17) sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (18) sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (19) sebagian kecamatan Pageruyung
- c) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 13.844 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat) hektar meliputi:
- (1) sebagian Kecamatan Limbangan
 - (2) sebagian Kecamatan Boja;
 - (3) sebagian Kecamatan Singorojo;
 - (4) sebagian Kecamatan Patean;
 - (5) sebagian Kecamatan Pageruyung;
 - (6) sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (7) sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (8) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - (9) sebagian Kecamatan Weleri;
 - (10) sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (11) sebagian Kecamatan Pegandon; dan
 - (12) sebagian Kecamatan Ringinarum.
- d) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- (1) sapi, kerbau dan kuda meliputi:
 - (a) Kecamatan Sukorejo;
 - (b) Kecamatan Pageruyung;
 - (c) Kecamatan Plantungan;
 - (d) Kecamatan Patean;
 - (e) Kecamatan Singorojo;
 - (f) Kecamatan Limbangan;
 - (g) Kecamatan Boja.
 - (h) Kecamatan Kaliwungu Selatan
 - (i) Kecamatan Kaliwungu
 - (j) Kecamatan Gemuh
 - (k) Kecamatan Pegandon
 - (l) Kecamatan Patebon

- (2) kambing, domba, itik, merpati dan ayam buras tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) kelinci meliputi:
 - (a) Kecamatan Cepiring;
 - (b) Kecamatan Plantungan;
 - (c) Kecamatan Limbangan;
 - (d) Kecamatan Gemuh;
 - (e) Kecamatan Boja;
 - (f) Kecamatan Pageruyung;
 - (g) Kecamatan Pegandon;
 - (h) Kecamatan Kaliwungu;
 - (i) Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - (j) Kecamatan Patean.
- (4) Ayam ras meliputi:
 - (a) Kecamatan Pageruyung;
 - (b) Kecamatan Plantungan;
 - (c) Kecamatan Sukorejo;
 - (d) Kecamatan Patean;
 - (e) Kecamatan Singorojo;
 - (f) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (g) Kecamatan Limbangan;
 - (h) Kecamatan Boja;
 - (i) Kecamatan Pegandon; dan
 - (j) Kecamatan Gemuh

3) Kawasan perikanan;

Kawasan perikanan terdiri dari

- a) Kawasan pengembangan perikanan tangkap terdiri dari :
 - (1) perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan pantai utara;
 - (2) perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi waduk, rawa, sungai, dan embung.
- b) Kawasan pengembangan perikanan budidaya seluas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar terdiri dari:
 - (1) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan.
 - (2) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau, sepanjang pesisir utara meliputi:
 - (a) Kecamatan Cepiring;

(b) Kecamatan Kangkung;

(c) Kecamatan Rowosari

4) Kawasan pertambangan dan energi;

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas :

a) Kawasan pertambangan mineral terdiri atas:

(1) Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi:

(a) Kecamatan Pegandon;

(b) Kecamatan Weleri;

(c) Kecamatan Pageruyung;

(d) Kecamatan Patean;

(e) Kecamatan Sukorejo;

(f) Kecamatan Singorojo;

(g) sepanjang Sungai Bodri.

(2) Kawasan pertambangan batuan, meliputi:

(a) Kecamatan Kaliwungu Selatan

(b) Kecamatan Kaliwungu;

(c) Kecamatan Brangsong;

(d) Kecamatan Ngampel;

(e) Kecamatan Pegandon;

(f) Kecamatan Weleri;

(g) Kecamatan Pageruyung;

(h) sepanjang Sungai Bodri.

b) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berskala kecil berada di Kecamatan Gemuh.

c) Kawasan panas bumi berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Ungaran dan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Dieng.

5) Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan peruntukan industri terdiri atas:

a) Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di:

(1) sebagian Kecamatan Kaliwungu;

(2) sebagian Kecamatan Brangsong;

(3) sebagian Kecamatan Kendal;

(4) sebagian Kecamatan Patebon.

b) Sentra industri kecil dan menengah berada di seluruh kecamatan.

6) Kawasan Pariwisata;

Pengembangan kawasan pariwisata terdiri atas:

a) Kawasan pariwisata budaya meliputi:

- (1) Makam Pangeran Juminah dan Makam Sunan Katong berada di Kaliwungu Selatan;
 - (2) Makam Nyai Dapu dan Makam Sunan Bromo berada di Kecamatan Boja;
 - (3) Situs Batu Seloarjuno dan Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan;
 - (4) Goa Maria berada di Kecamatan Weleri.
 - (5) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
- b) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- (1) Pantai Sendangkulon, Pantai Jungsemi, dan Pantai Tanjungmojo berada di KecamatanKangkung;
 - (2) Pantai Sendangsikucing berada di Kecamatan Rowosari;
 - (3) Wana Wisata berada di Kecamatan Ringinarum;
 - (4) Curug Semawur, Tuk Air Hangat Tirtomoyo, dan Agrowisata Ngebruk berada di KecamatanPatean;
 - (5) Goa Kiskendo dan Bendung Singorojo berada di Kecamatan Singorojo; dan
 - (6) Air Panas Gonoharjo, Goa Jepang, dan Air Terjun Panglebur gongso berada di KecamatanLimbangan; dan
 - (7) Pantai Muara Kencan di Kecamatan Patebon.
 - (8) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
- c) Kawasan pariwisata buatan meliputi:
- (1) Plantera berada di Kecamatan Patean;
 - (2) Agrowisata Ngadiwarno berada di Kecamatan Sukorejo;
 - (3) Wisata Kuliner Pemancingan berada di Kecamatan Weleri;
 - (4) Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba berada di Kecamatan Rowosari; dan
 - (5) Agrowisata Darupono, Agrowisata Kedungsuren, dan Agrowisata Jerukgiling berada diKecamatan Kaliwungu Selatan.
 - (6) Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan;
 - (7) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
- 7) Kawasan Permukiman;
- Kawasan permukiman meliputi :
- a) Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 5.485 (lima ribu empat ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:
- (1) Kecamatan Boja;

- (2) Kecamatan Brangsong;
- (3) Kecamatan Cepiring;
- (4) Kecamatan Gemuh;
- (5) Kecamatan Kaliwungu;
- (6) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (7) Kecamatan Kangkung;
- (8) Kecamatan Limbang;
- (9) Kecamatan Ngampel;
- (10) Kecamatan Pageruyung;
- (11) Kecamatan Patean;
- (12) Kecamatan Patebon;
- (13) Kecamatan Pegandon;
- (14) Kecamatan Plantungan;
- (15) Kecamatan Ringinarum;
- (16) Kecamatan Rowosari;
- (17) Kecamatan Singorojo;
- (18) Kecamatan Sukorejo;
- (19) Kecamatan Weleri;
- (20) Kecamatan Kendal.

b) Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 12.817 (dua belas ribu delapan ratus tujuh belas) hektar berada di seluruh kecamatan.

c) Fokus pengembangan kawasan permukiman berada pada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Pegandon, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

8) kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi :

- a) Komando Distrik Militer (Kodim) 0715 yang berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
- b) POSAL Kendal yang berada di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari;
- c) Kepolisian Resor (Polres) Kendal yang berada di Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal.

c. Kawasan Strategis

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan luas kurang lebih 123

2.1.3 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut BPS tahun 2020 tercatat sebanyak 1.018.505 jiwa terdiri dari 514.795 laki-laki dan 503.710 perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 82.443 jiwa dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 32.586 jiwa dari total penduduk di Kabupaten Kendal.

Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Kecamatan Weleri dan Kecamatan Kendal. Pada kedua kecamatan tersebut kepadatan penduduk mencapai 1.978 dan 2.177 jiwa setiap kilometer persegi.

Tabel 2.1
Proyeksi Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Kendal Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Plantungan	16.704	15.882	32.586	105,18	667
2	Sukorejo	30.871	29.528	60.399	104,55	795
3	Pageruyung	18.277	17.394	35.671	105,08	694
4	Patean	26.459	25.646	52.105	103,17	561
5	Singorojo	26.699	26.155	52.854	102,08	443
6	Limbangan	17.594	17.343	34.937	101,45	487
7	Boja	41.455	40.988	82.443	101,14	1.286
8	Kaliwungu	33.325	32.832	66.157	101,50	1.386
9	Kaliwungu Selatan	26.329	25.670	51.999	102,57	798
10	Brangsong	25.633	24.978	50.611	102,62	1.465
11	Pegandon	19.012	18.942	37.954	100,37	1.220
12	Ngampel	18.133	17.722	35.855	102,32	1058
13	Gemuh	26.454	25.955	52.409	101,92	1.373
14	Ringinarum	18.710	17.910	36.620	104,47	1.558
15	Weleri	30.249	29.636	59.885	102,07	1.978
16	Rowosari	27.050	26.516	53.566	102,01	1.641
17	Kangkung	25.063	24.820	49.883	100,98	1.280
18	Cepiring	26.314	26.340	52.654	99,90	1.750
19	Patebon	30.342	29.743	60.085	102,01	1.356
20	Kendal	30.122	29.710	59.832	101,39	2.177
Jumlah		514.795	503.710	1.018.505	102,20	1016

Sumber: BPS, "Buku Kabupaten Kendal Dalam Angka 2021", 2021

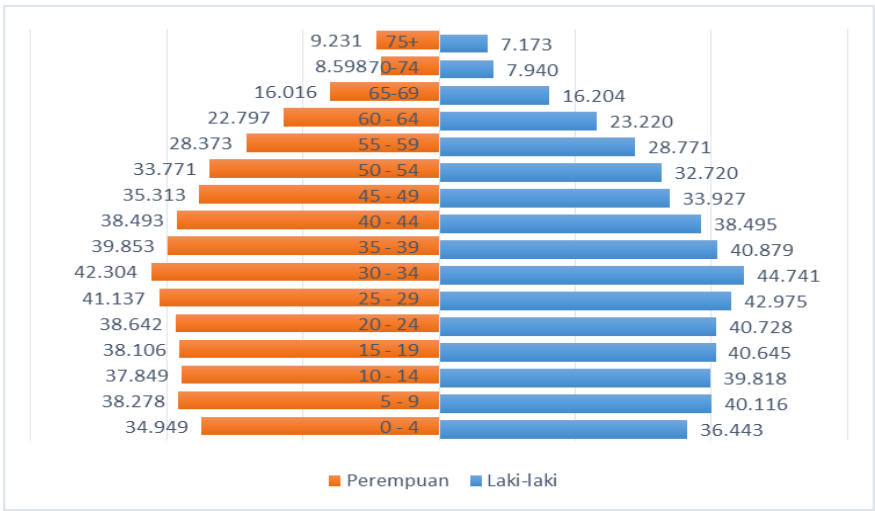
Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Kendal tahun 2020 menunjukkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 725.890 jiwa, sedangkan yang belum produktif (<15 tahun) sebesar 227.453 jiwa dan yang tidak produktif lagi (65 tahun keatas) sebesar 65.162 jiwa. Sehingga rasio beban ketergantungan sebesar 40,31% yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 40 orang usia tidak produktif.

Tabel 2.2
Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kendal Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	36.443	34.949	71.392
5 - 9	40.116	38.278	78.394
10 - 14	39.818	37.849	77.667
15 - 19	40.645	38.106	78.751
20 - 24	40.728	38.642	79.370
25 - 29	42.975	41.137	84.112
30 - 34	44.741	42.304	87.045
35 - 39	40.879	39.853	80.732
40 - 44	38.495	38.493	76.988
45 - 49	33.927	35.313	69.240
50 - 54	32.720	33771	66.491
55 - 59	28.771	28.373	57.144
60 - 64	23.220	22.797	46.017
65-69	16.204	16.016	32.220
70-74	7.940	8.598	16.538
75+	7.173	9.231	16.404
2020	514.795	503.710	1.018.505

Sumber: BPS,”Buku Kabupaten Kendal Dalam Angka 2021”, 2021

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

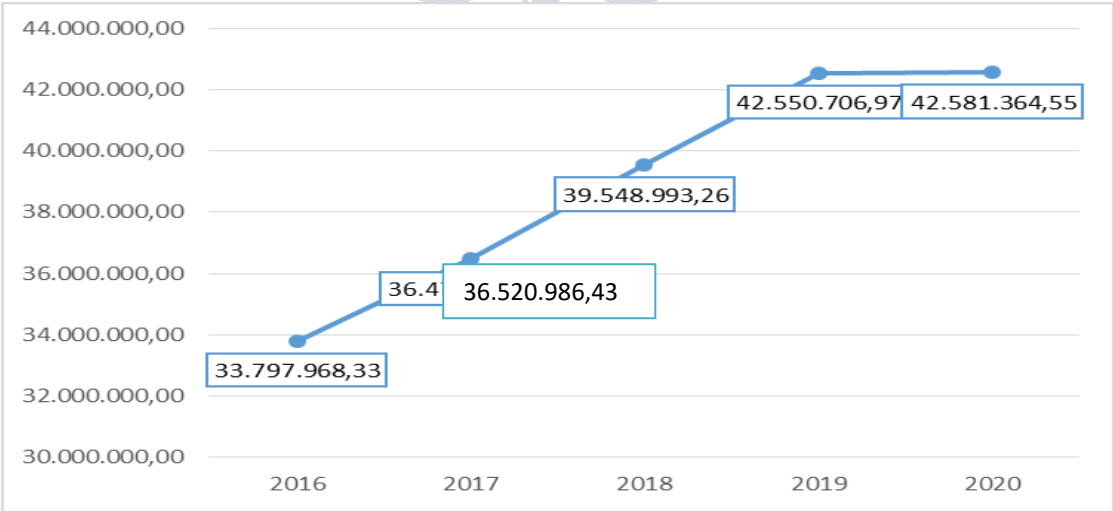
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.33.797.968,33 juta terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp.42.581.364,55 juta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.5
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021

Sektor penyumbang terbesar PDRB ADHB di Kabupaten Kendal didominasi oleh empat sektor, yaitu sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor dan Konstruksi. Kontribusi tertinggi pada sektor Industri pengolahan sebesar Rp.18.009.216,20 juta. Selengkapnya PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Kendal tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020
(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.883.213,26	7.180.063,43	7.608.852,28	8.122.142,28	8.191.422,28
B	Pertambangan dan Penggalian	359.800,27	481.107,56	528.800,00	566.240,00	590.690,00
C	Industri Pengolahan	14.053.610,81	15.118.015,20	16.528.279,11	17.787.788,20	18.009.216,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	59.162,49	66.610,90	71.812,78	75.738,78	75.173,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.144,59	24.371,25	25.691,25	26.941,25	29.091,25
F	Konstruksi	2.196.824,64	2.421.656,45	2.672.256,45	2.846.256,45	2757.251,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.151.263,86	4.484.357,29	4.829.957,29	5.190.107,29	5.065.357,29
H	Transportasi dan Pergudangan	639.534,27	696.891,25	753.861,30	829.557,40	581.472,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.097.555,91	1.186.730,28	1.293.740,28	1.426.360,28	1.384.360,28
J	Informasi dan Komunikasi	944.967,16	1.097.134,57	1.223.134,57	1.368.134,57	1.558.634,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	697.553,08	757.335,33	806.937,38	840.119,90	853.975,23
L	Real Estate	304.690,35	335.149,38	361.104,38	385.754,38	388.254,38
M,N	Jasa Perusahaan	96.317,87	108.476,02	121.056,02	136.106,02	130.756,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	730.051,48	773.014,67	810.114,67	854.264,67	862.364,67
P	Jasa Pendidikan	880.416,97	981.591,20	1.078.879,20	1.187.179,20	1.194.679,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	250.580,50	278.350,16	304.550,16	331.050,16	366.200,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	429.280,82	481.766,14	529.966,14	576.966,14	542.466,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		33.797.968,33	33.797.968,33	36.472.621,08	39.548.993,26	42.550.706,97

* Angka sementara

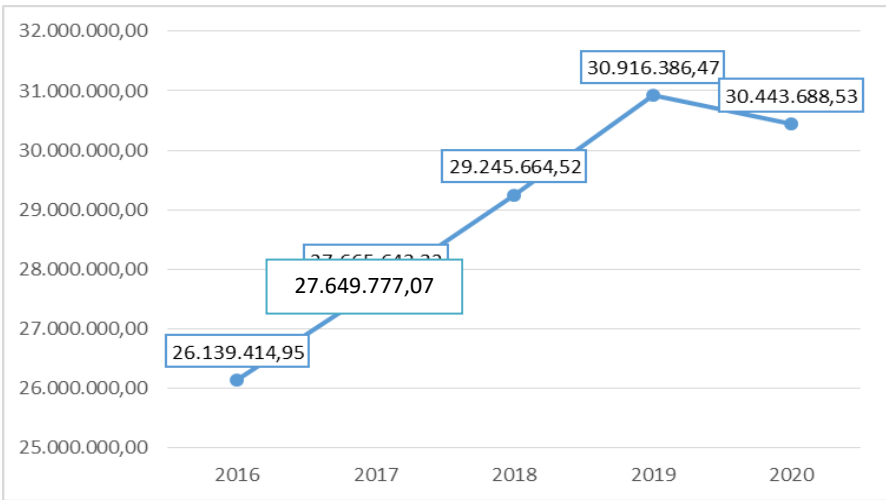
** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2021

Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.26.139.414,95 juta terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp.30.443.688,53 juta, selengkapnya

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.6
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021

Sektor penyumbang terbesar PDRB ADHK di Kabupaten Kendal mencakup empat sektor, yaitu sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi dan sektor Industri Pengolahan. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha Kabupaten Kendal tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.439.635,39	5.622.475,38	5.784.865,38	6.052.715,38	5.986.492,88
B	Pertambangan dan Pengalihan	221.683,34	279.651,58	290.601,58	307.101,58	313.608,32
C	Industri Pengolahan	10.505.620,53	11.076.050,47	11.763.810,92	12.445.172,22	12.338.134,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	56.202,05	58.778,90	61.548,43	64.819,93	64.617,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.512,95	22.520,15	23.620,15	24.370,15	24.881,20
F	Konstruksi	1.739.413,20	1.868.908,35	1.991.958,35	2.073.768,35	1.997.248,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.200.580,71	3.378.702,01	3.566.378,06	3.752.648,06	3.608.772,06
H	Transportasi dan Pergudangan	563.781,17	604.398,93	642.616,58	694.461,27	470.829,85
I	Penyediaan Akomodasi dan	886.876,39	948.148,64	1.022.048,64	1.107.313,64	1.059.587,63

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	1.060.960,28	1.199.100,15	1.337.651,10	1.476.151,10	1.679.231,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	486.262,35	511.388,41	527.539,48	541.355,94	550.129,03
L	Real Estate	252.709,43	272.415,49	287.415,49	303.365,49	302.932,49
M,N	Jasa Perusahaan	72.210,02	78.499,07	85.399,07	94.039,07	88.338,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	511.043,35	523.938,00	541.638,00	561.763,00	559.200,80
P	Jasa Pendidikan	609.025,27	660.174,07	710.224,07	763.124,07	760.627,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.392,66	181.985,25	196.840,25	209.700,25	226.845,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	345.505,86	378.508,47	411.508,97	444.516,97	412.211,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ADHK		26.139.414,95	27.649.777,07	29.245.664,52	30.916.386,47	30.443.688,53

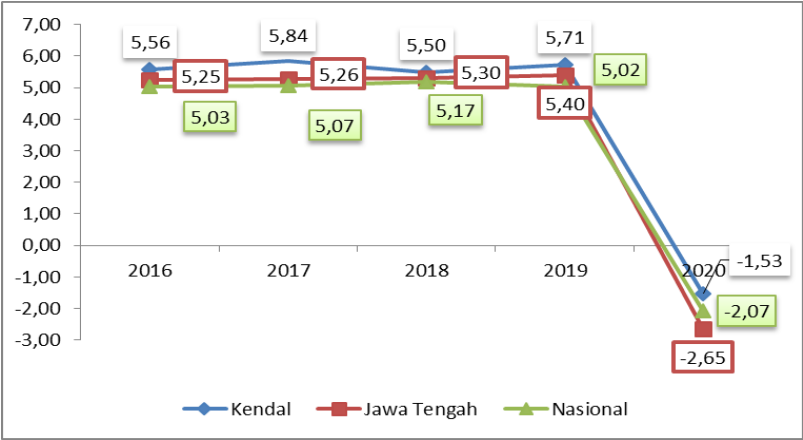
* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021



2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2016 hingga 2020 terjadi fluktuasi dengan penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi -1,53%. Hal ini terjadi disebabkan oleh pandemi Covid 19, sehingga aktifitas ekonomi jauh berkurang. Berdasarkan PDRB harga konstan penurunan terjadi hampir disemua sektor perekonomian, kecuali pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yaitu -32,20%. Penurunan ekonomi juga terjadi pada Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

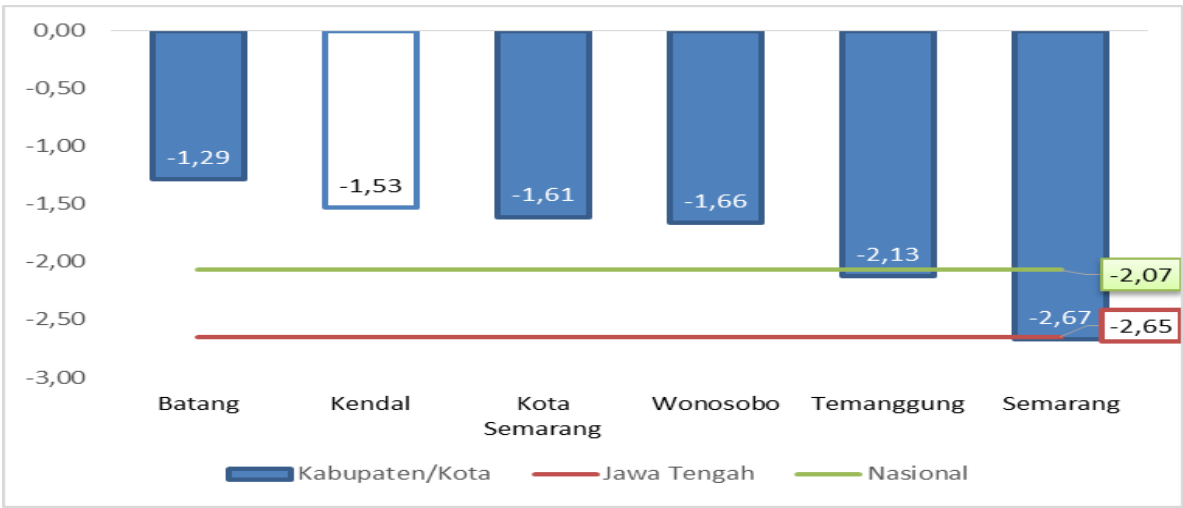
Gambar 2.7
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota Di Indonesia 2016-2020

Pada tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal terjadi penurunan sebesar -1,53%, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar -2,65% dan Nasional sebesar -2,07% serta berada di posisi ke-2 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%)



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

3. Laju Inflasi

Inflasi tahun 2020 menurun menjadi sebesar 1,68%, dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada pada angka 2,58%. Penurunan ini merupakan keberhasilan dari tim pengendali inflasi Kabupaten Kendal. Perkembangan laju inflasi dari tahun 2016-2020 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah (%) Tahun 2016-2020



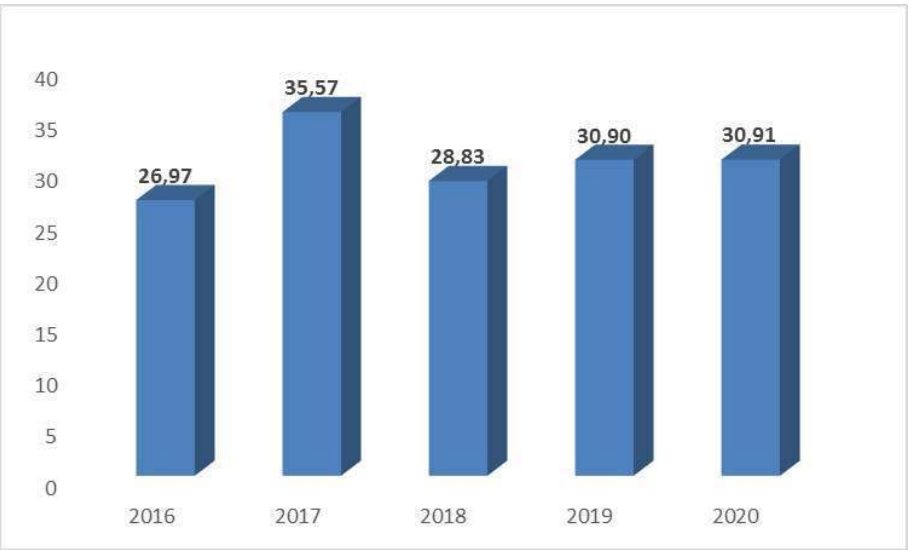
Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Kendal 2021

4. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan atas harga konstan dalam kurun 2016-2020 naik dari 26,97 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 30,91 juta rupiah di tahun 2020. Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut.

Gambar 2.10
PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2016– 2020(juta rupiah)



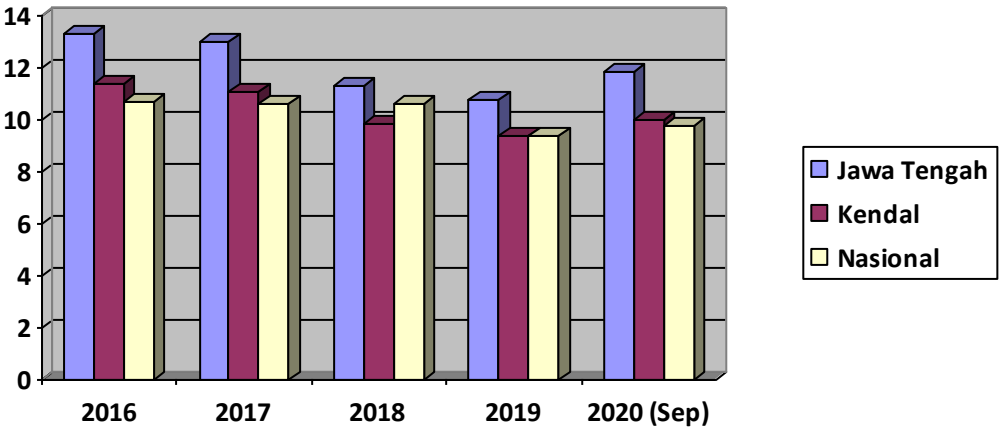
Sumber: Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2021

5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020, tahun 2016 sebesar 11,37% menurunmenjadi 9,41% pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,99%, hal ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat yang menurun yang disebabkan oleh terjadinya PHK, pekerja yang dirumahkan, pembatasan kegiatan masyarakat. Kondisi ini juga dialami oleh angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah dan nasional selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

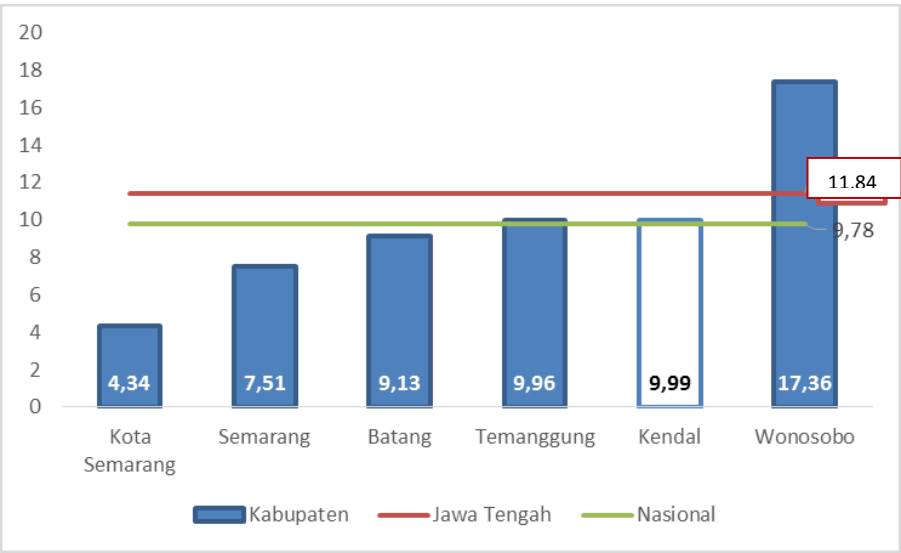


Sumber: bps.go.id, tahun 2021

Pada tahun 2020, Persentase penduduk miskin Kabupaten Kendal sebesar 9,99%, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,84% tetapi berada diatas Nasional sebesar 9,78% serta berada di posisi ke-5 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.12

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020



Sumber: bps.go.id, tahun 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

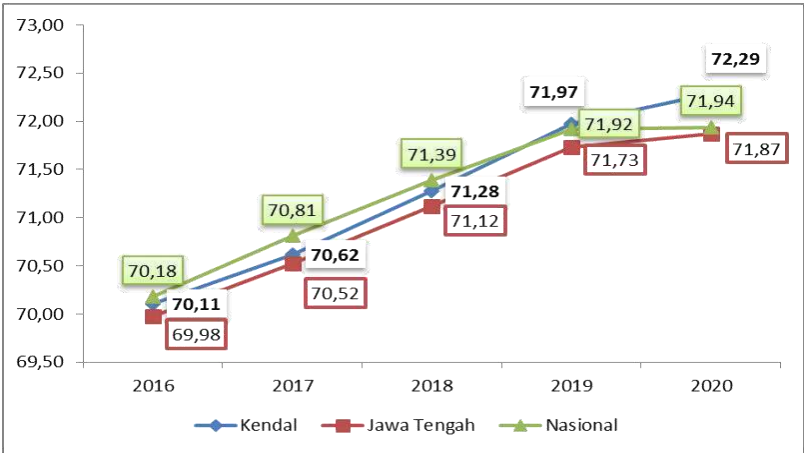
1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 capaian IPM Kabupaten Kendal sebesar 70,11 meningkat menjadi 72,29 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti terlihat pada gambar berikut:



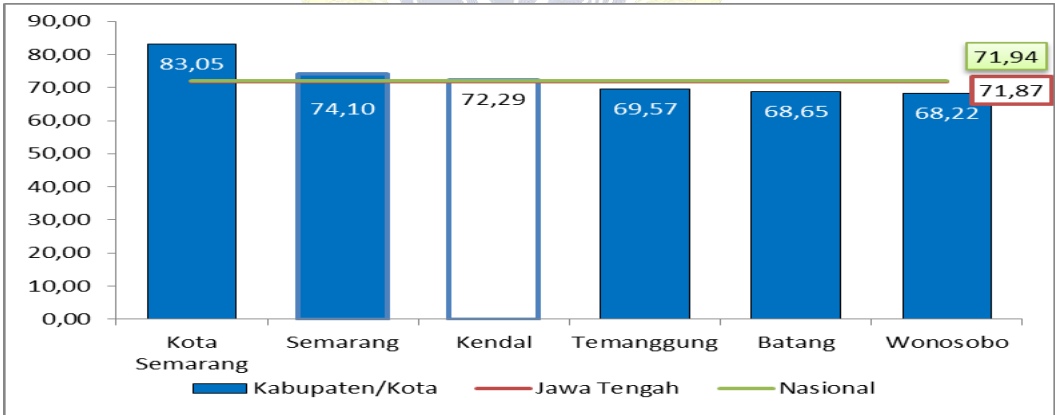
Gambar 2.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Kendal sebesar 72,29 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 71,84dan berada diatas Nasional sebesar 71,94 serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.14
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020



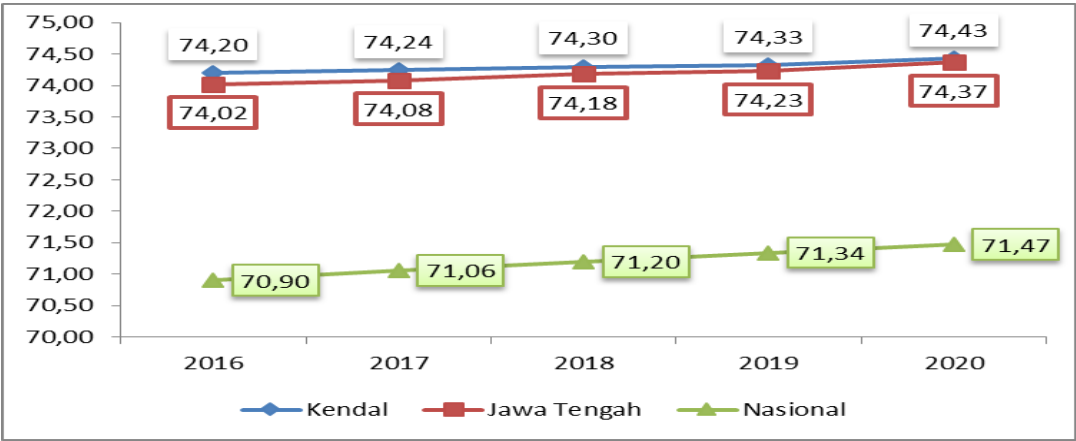
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Sementara itu, perkembangan indeks pembentuk IPM Kabupaten Kendal yang meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita uraiannya sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup atau disingkat AHH, merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan AHH Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,20 tahun meningkat menjadi 74,43 tahun pada tahun 2020. perkembangan tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

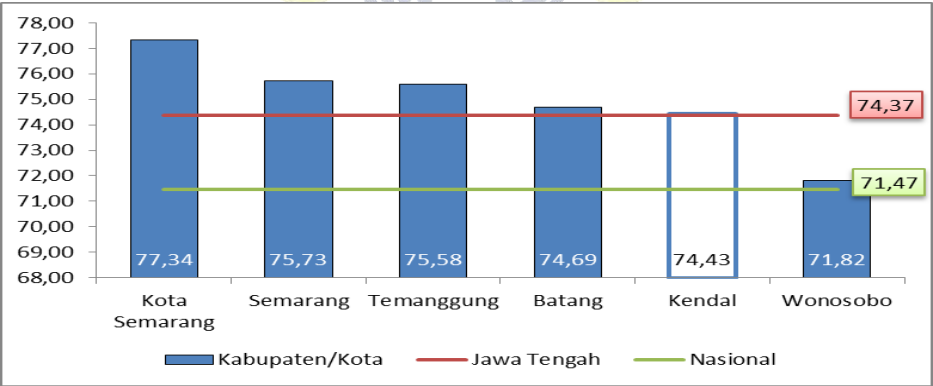
Gambar 2.15
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Kendal sebesar 74,43 tahun, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,37 tahun dan Nasional sebesar 71,47 tahun serta berada di posisi ke-5 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.16
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun)

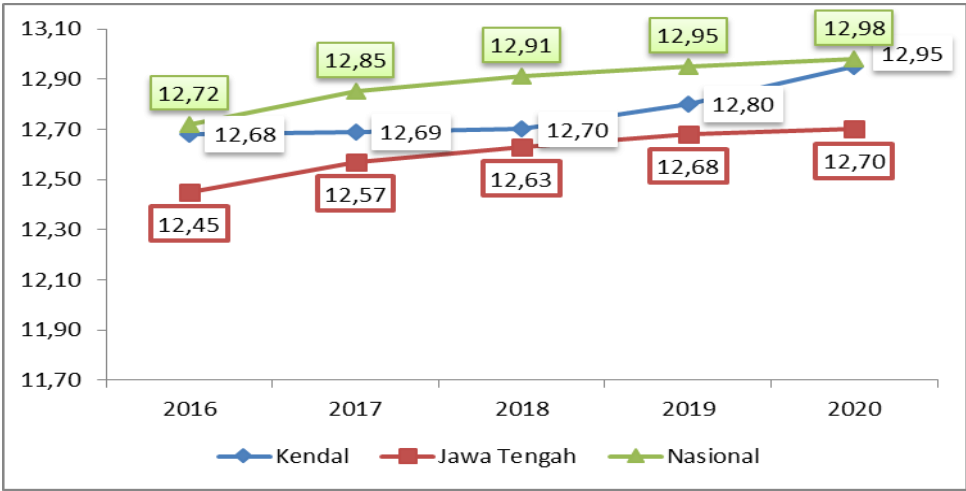


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,68 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 12,95 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

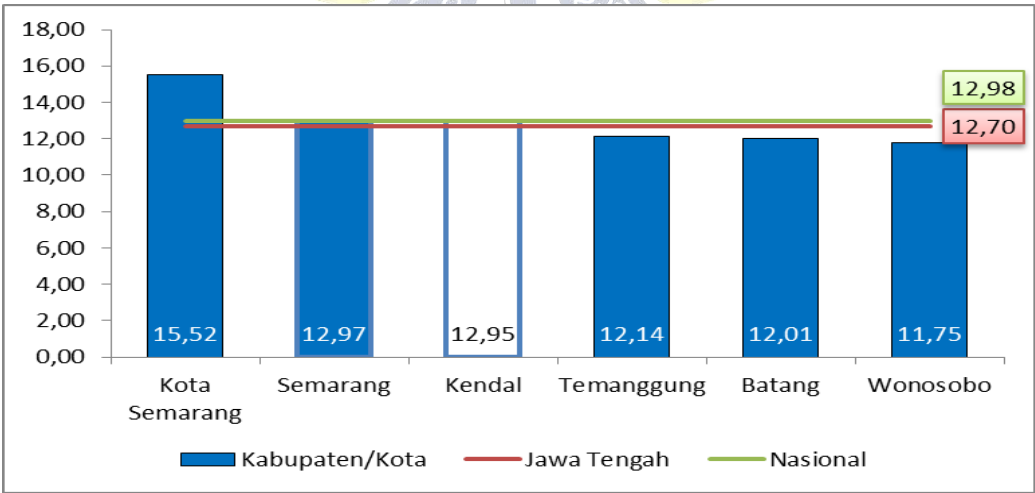
Gambar 2.17
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Kendal sebesar 12,95 tahun, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 12,70 tahun tetapi berada dibawah Nasional sebesar 12,98 tahun serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.18
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun)

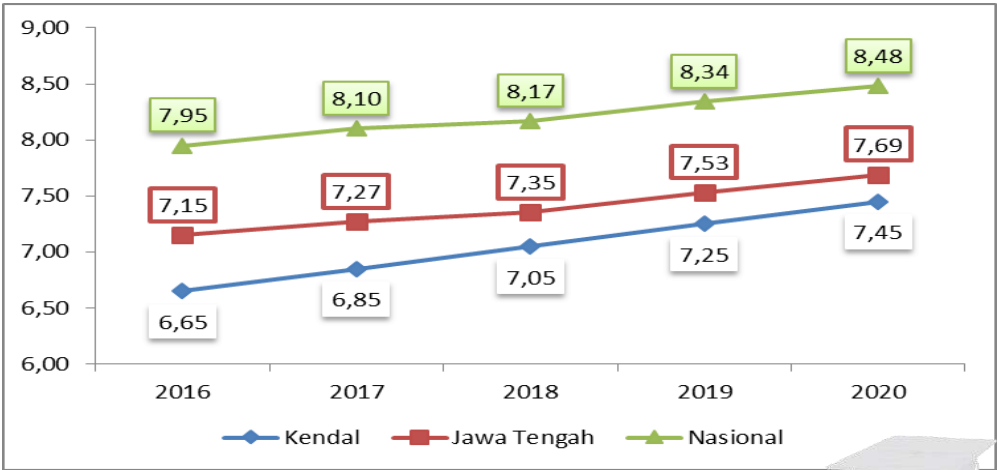


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 6,65 tahun menjadi sebesar 7,45 tahun pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

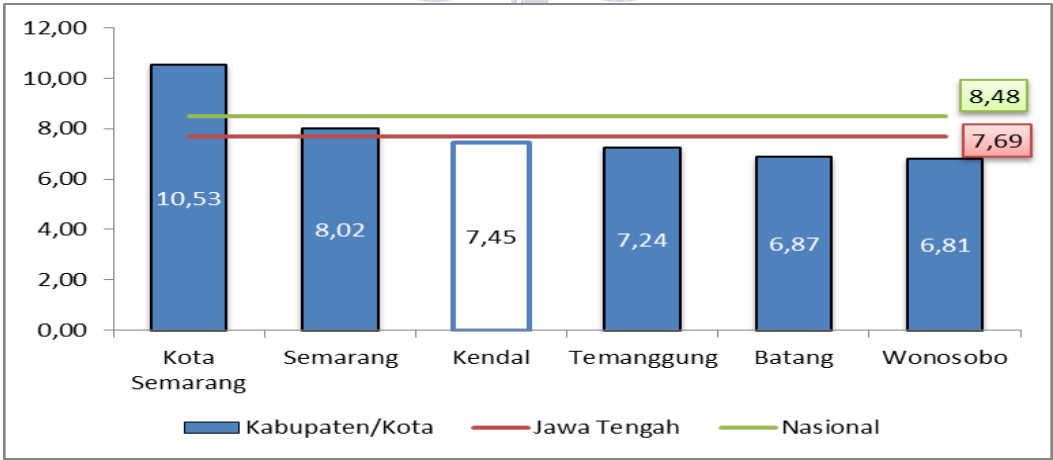
Gambar 2.19
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Kendal sebesar 7,45 tahun, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 7,69 tahun dan Nasional sebesar 8,48 tahun serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.20
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

d. Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.10.631 ribu dan tahun 2019 menjadi sebesar Rp.11.597 ribu, namun menurun pada tahun 2020 menjadi Rp.11.425 ribu. Penurunan pengeluaran perkapita terjadi karena adanya kebijakan PSBB pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid 19. Kondisi tersebut

relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2020.

Gambar 2.21

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribuan Rupiah)

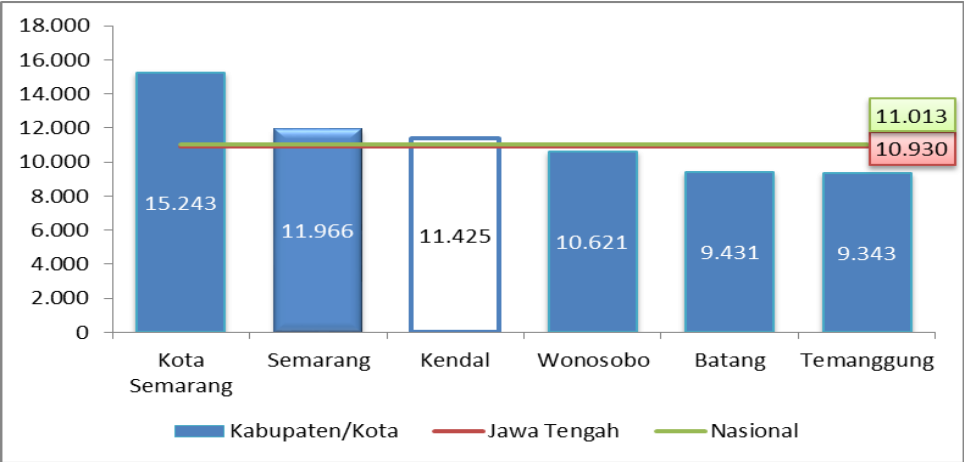


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pada tahun 2020, Pengeluaran Per kapita Kabupaten Kendal sebesar Rp.11.425 ribu, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.10.930 ribu dan Nasional sebesar Rp.11.013 ribu serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.22

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribuan Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

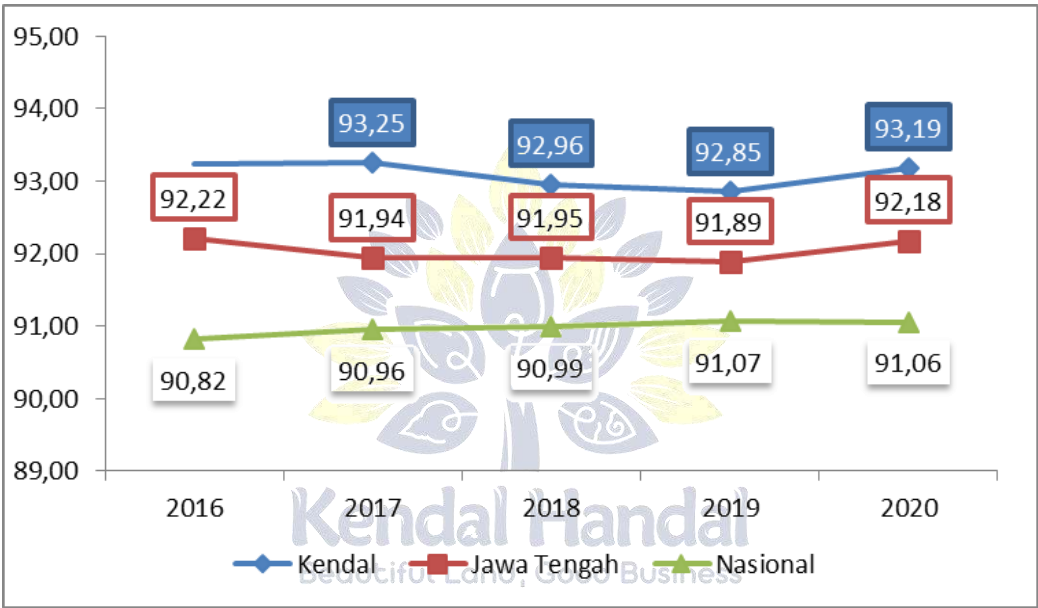
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG. IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari

perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100.

Perkembangan IPG Kabupaten Kendal tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2020, IPG Kabupaten Kendal meningkat menjadi 93,19 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah tetapi berbeda dengan Nasional yang mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

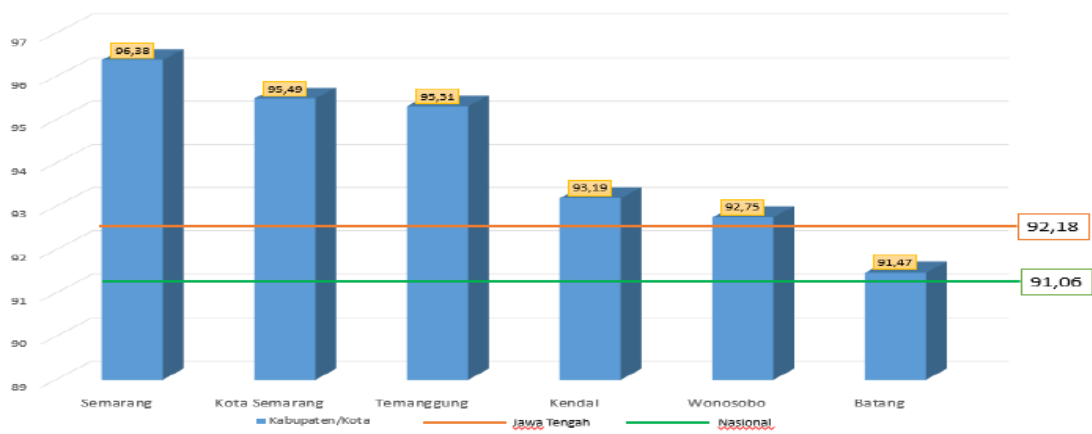
Gambar 2.23
Perkembangan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Pada tahun 2020, IPG Kabupaten Kendal sebesar 93,19, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18 dan Nasional sebesar 91,06 serta berada di posisi ke-4 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.24
Perbandingan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Dilihat pada Tabel2.5, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, angka harapan hidup perempuan tahun 2015 sebesar 76,05 tahun meningkat menjadi sebesar 76,26 tahun pada tahun 2020, sedangkan angka harapan hidup laki-laki tahun 2015 sebesar 72,16 tahun dan tahun 2020 sebesar 72,58 tahun.

Harapan Lama sekolah perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, dimana harapan lama sekolah perempuan tahun 2015 sebesar 12,54 tahun meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,17 tahun, sedangkan untuk laki-laki tahun 2015 sebesar 12,24 tahun dan tahun 2020 menjadi sebesar 12,81 tahun.

Sementara rata-rata lama sekolah laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 7,47 tahun dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 8,10 tahun, sedangkan untuk perempuan tahun 2015 sebesar 6,08 tahun dan tahun 2020 menjadi sebesar 6,84 tahun.

Dilihat dari Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal tahun 2015 hingga tahun 2020 laki-laki lebih baik dibandingkan dengan perempuan yaitu tahun 2015 sebesar Rp.13.660 ribu dan tahun 2020 menjadi sebesar Rp.14.842 ribu, sedangkan untuk perempuan tahun 2015 sebesar Rp.9.991 ribu dan tahun 2020 menjadi sebesar Rp.10.567 ribu. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kabupaten Kendal tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2020

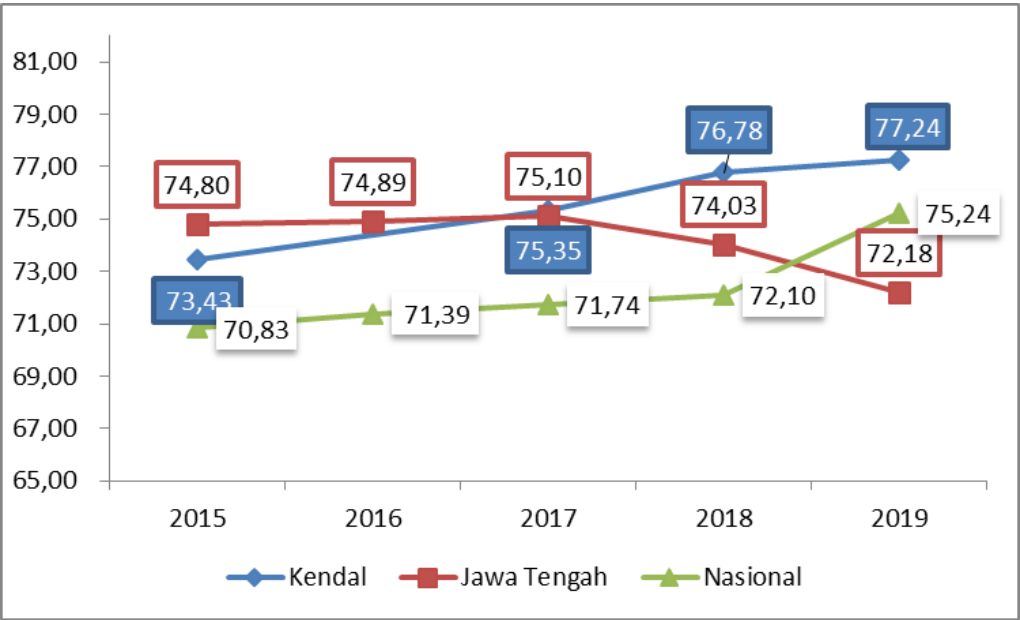
No.	Tahun	AHH		HLS		RRLS		Pengeluaran Per Kapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	2016	72,25	76,09	12,34	12,57	7,68	6,65	13.805	9.997
2	2017	72,33	76,10	12,64	12,81	7,42	6,3	14.262	10.303
3	2018	72,40	76,16	12,70	12,82	7,64	6,47	14.708	10.476
4	2019	72,43	76,16	12,80	12,92	7,91	6,63	15.077	10.738
5	2020	72,58	76,26	12,81	13,17	8,10	6,84	14.842	10.567

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 73,43 menjadi sebesar 77,24 pada tahun 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional tetapi berbeda dengan Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

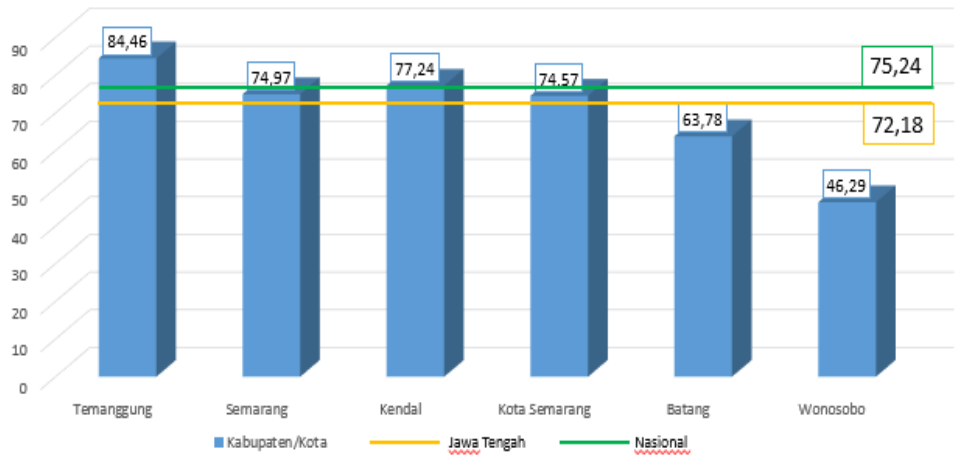
Gambar 2.25
Perkembangan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2019, IDG Kabupaten Kendal sebesar 77,24, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 72,18 dan Nasional sebesar 75,24 serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.26
Perbandingan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kendal tahun 2015-2019, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami perkembangan peningkatan, yaitu tahun 2015 sebesar 22,22% dan tahun 2019 sebesar 24,44%.

Kondisi perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu tahun 2015 sebesar 40,24% dan mengalami peningkatan 48,20% tahun 2019.

Sedangkan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Kendal terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu tahun 2015 sebesar 34,66% dan tahun 2019 sebesar 35,30%. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kabupaten Kendal dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2019

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	22,22	22,73	24,44	24,44	22,22
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	40,24	50,99	49,48	48,20	49,91
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	34,66	34,86	34,91	35,30	35,42

Sumber : Kementrian KPPA, Buku PMBG, BPS, 2021

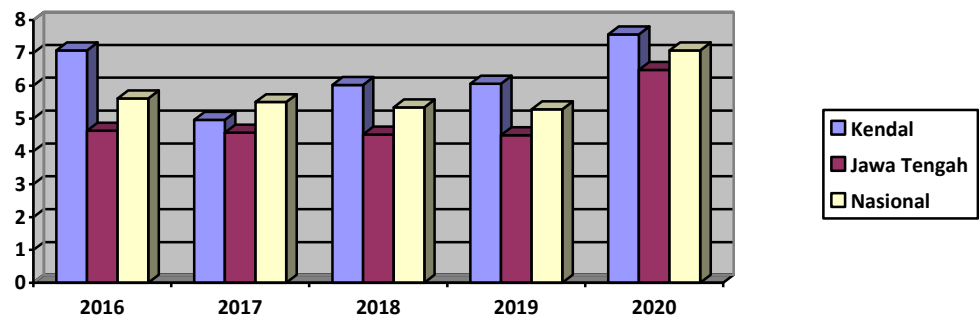
4. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Kendal masih tergolong tinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,07%, menurun menjadi 4,96% pada tahun 2017 kemudian meningkat hingga menjadi sebesar 7,56% pada tahun 2020. Adapun angka rata-rata TPT di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 6,48%. Peningkatan TPT di Kabupaten Kendal terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan industri dengan lulusan sekolah, selain itu adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, agar industri yang mulai masuk ke Kabupaten Kendal dapat menggunakan tenaga kerja dari Kabupaten Kendal.

Gambar 2.27

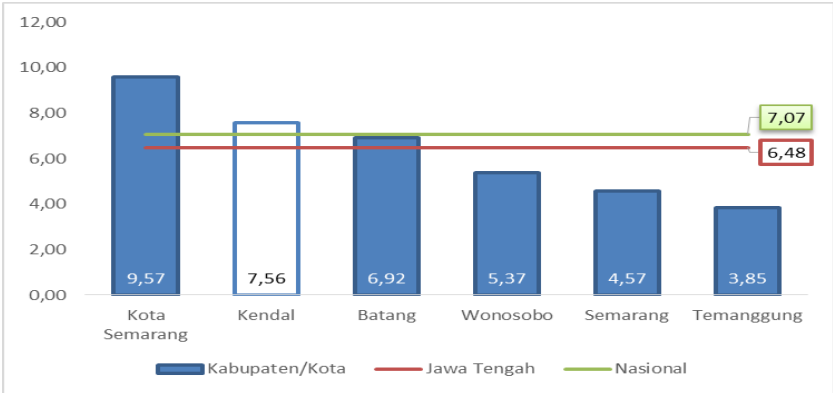
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2020, jateng.bps.go.id

Pada tahun 2019, TPT Kabupaten Kendal sebesar 7,56%, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 6,48% dan Nasional sebesar 7,07% serta berada di posisi ke-2 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.28
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2020

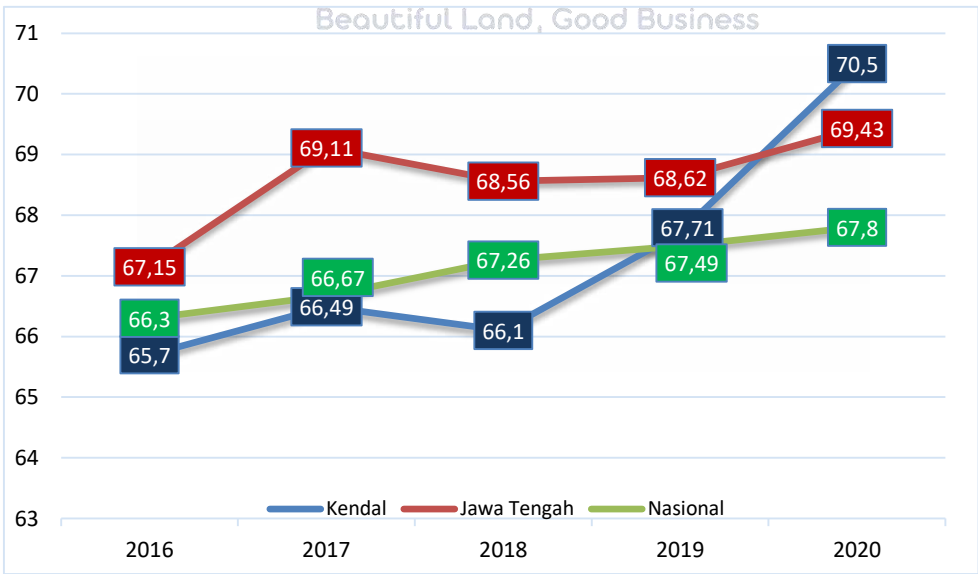


Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2021, jateng.bps.go.id

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 65,7% dan tahun 2020 sebesar 70,50%. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perkembangan fluktuatif dan Nasional yang mengalami perkembangan meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.29
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)



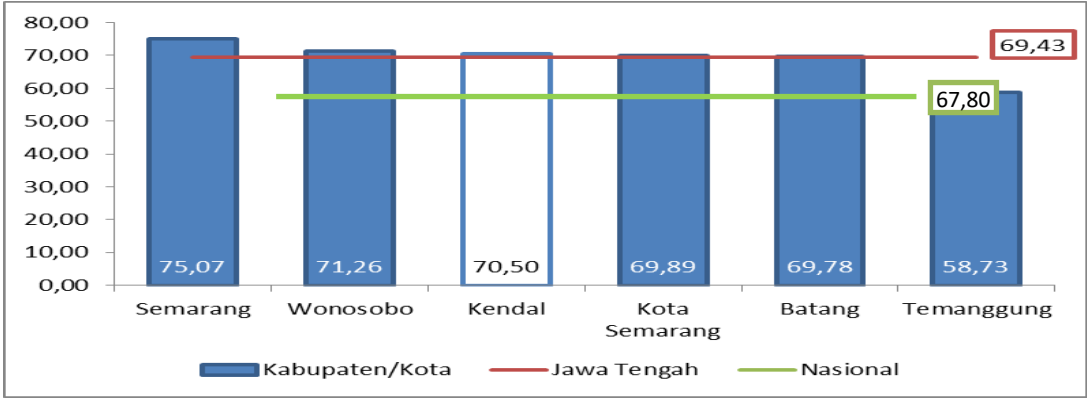
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pada tahun 2020, TPAC Kabupaten Kendal sebesar 70,50%, berada diatasrata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 69,43% serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.30

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi fokus seni budaya dan olahraga adalah untuk melihat sejauh mana prestasi olahraga di Kabupaten Kendal. Atlet berprestasi Kabupaten Kendal terus meningkatkan prestasinya, hal ini bisa dilihat dari jumlah atlet berprestasi yang terus bertambah setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga kompetisi olahraga ditiadakan.

Tabel 2.7

Kinerja Makro Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda yang yang dilatih pendidikan karakter	ORANG	NA	100	332	662	520
2	Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	ORANG	57	145	211	268	21
3	Prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional	ORANG	60	61	124	86	17

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan.

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh pada semua jenjang pendidikan. Di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pendidikan mengambil peran penting

dengan target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan harus juga memberhatikan kualitas pendidik atau guru. Target SDGs lain dalam bidang pendidikan Pada tahun 2030, adalah secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas. Pencapaian tujuan tersebut bagi Kabupaten Kendal harus diupayakan karena Kabupaten Kendal merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan urusan pendidikan bagi kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar. (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan.

Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase) PAUD sebesar 43,84% pada tahun 2020 meningkat menjadi 56,79% walaupun masih dalam kondisi yang relatif rendah namun capaian tersebut menunjukkan sedikit peningkatan. Apabila dibandingkan dengan target SDGs, maka capaian tersebut masih cukup jauh dari target SDGs 100% pada tahun 2030.

Kondisi pelayanan PAUD di Kabupaten Kendal juga menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2016 – 2020. Kualitas pelayanan PAUD diukur melalui indikator Persentase PAUD terakreditasi. Pada tahun 2016 – 2020 persentase PAUD terakreditasi menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga PAUD di Kabupaten Kendal semakin baik.

Capaian indikator PAUD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Capaian Indikator PAUD Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	43,84	43,84	48,07	56,79	59,01
2.	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	%	39	36,13	45,50	47,09	45,44
3	Persentase Penduduk usia 5-6 tahun sudah tamat atau sedang belajar PAUD	%	NA	NA	NA	NA	90.94

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, 2021

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Perkembangan ketersediaan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung turun. Pada tahun 2017 persentase ruang kelas SD/MI sebesar 78,78% dan pada tahun 2020 menjadi 71,33%. Demikian juga persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik. Selama kurun waktu 2016–2020 perkembangan ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2019 persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik sebesar 86,64% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 79,89%. Selain kondisi ruang kelas indikator lain dari ketersediaan adalah persentase kondisi perpustakaan dalam kondisi baik. SD dengan ruang perpustakaan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 40,56% pada tahun 2019 meningkat menjadi 86,04 dan di tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 70,01%. Sedangkan untuk SMP juga mengalami peningkatan persentase ruang perpustakaan

dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 71,57% meningkat menjadi 84,31 di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 75,25% pada tahun 2020.

c. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) (perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase)pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah.

Dalam mendukung pencapaian SDG’s pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kabupaten Kendal sudah mengembangkan PKBM dan juga pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2020 PKBM yang memiliki akreditasi sebesar 75,00% Angka kelulusan pendidikan Non Formal pada tahun 2020 sebesar 86,25% meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 81,45%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka kelulusan pendidikan non formal	%	81,45	81,96	84,83	86,25	86,25
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	108,04	110,03	109,83	100,33	106,67
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	99,22	99,97	98,57	106,19	89,86
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD dan SMP	%	103,63	105,00	104,20	103,26	98,27
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	%	84,22	88,01	88,59	88,61	94,56
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	62,76	69,79	68,9	74,47	73,88
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0,1	0,1	0,06	0,19	0,06
8.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0,71	1,23	0,58	0,98	0,14
9. .	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	100	100	100	100	100
10.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA	%	88,45	91,17	91,57	99,13	99,13

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
11.	Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	%	61,3	78,78	78,51	75,89	71,33
12.	Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	%	75,23	78,89	81,57	86,64	79,89
13.	Persentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	40,56	39,51	82,39	86,04	70,01
14.	Persentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	71,57	71,15	83	84,31	75,25
15.	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD		1	0,99	1,016	1,01	1,01
16.	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP		0,99	0,95	0,95	0,949	0,95
17.	Rasio Guru/Siswa SD		0,067	0,062	0,053	0,052	0,06
18.	Rasio Guru/Siswa SMP		0,059	0,058	0,055	0,056	0,06
19.	Persentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	%	96,58	96,73	96,76	96,77	93,93
20.	Persentase PKBM Memiliki Akreditasi	%	30	70	70	75	75
21.	Persentase pendidik yang memiliki sertifikasi	%	51,5	52	53,43	56,66	56,66
22.	Persentase Pendidik TK Memiliki Sertifikasi	%	42,95	40,36	40,76	44,92	44,92
23.	Persentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	%	55,75	55,8	54,92	60,52	60,52
24.	Persentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	%	57,8	58,6	61,07	61,07	61,07
25.	Persentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP	%	NA	NA	NA	NA	70

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal 2021

d. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Tabel 2.10
Indikator Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB).	%	NA	NA	NA	84,99	91,52
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	NA	NA	NA	32,41	18,17
3.	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	%	NA	NA	NA	80,99	87,66

Tabel capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan terbitnya ketiga peraturan tersebut, peraturan mengenai SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kendal mengalami peningkatan. UHH meningkat disebabkan oleh rendahnya angka kematian.

Urusan kesehatan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatnya UHH yaitu dengan menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian karena kesakitan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai 2020 fluktuatif. AKB tahun 2016 sebesar 8,05 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) meningkat menjadi 10,04 per 1.000 KH pada tahun 2020. Angka ini dibandingkan dengan target nasional, telah melampaui target yang ditentukan yaitu 23 per 1.000 KH. Sedangkan kematian balita juga fluktuatif, dari tahun 2016 AKABA sebesar 9,41 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan tahun 2020 menjadi 12,42 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian balita didominasi oleh angka kematian bayi. Masih ditemukannya kematian bayi dan balita disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang belum optimal, angka kesakitan pada bayi dan balita, lingkungan yang kurang sehat, kesadaran masyarakat yang masih belum baik.

Angka kematian ibu (AKI) dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. AKI tahun 2016 sebesar 122,47 per 100.000 KH menurun tahun 2020 menjadi 115,8 per 100.000 KH. Dibandingkan dengan target SDGs tahun 2030 masih diatasnya yaitu 70 per 100.000 KH. Kematian ibu disebabkan oleh kondisi dimana ibu tidak siap mengalami kelahiran yaitu mengalami 4 T (terlalu sering, terlalu banyak, terlalu muda dan terlalu tua) melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu melahirkan seperti Kasus pendarahan telah mengalami penurunan namun karena infeksi penyakit dan penyakit penyerta (jantung, hipertensi, kanker dll) mengalami peningkatan.

Tabel 2.11
Capaian AKB, AKABA dan AKI Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	8,05	9,28	8,87	9,6	10,04
2	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	9,41	10,92	9,90	11,1	12,42
3	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	122,47	163,50	115,77	104	115,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Status gizi masyarakat di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari kondisi gizi buruk dan balita stunting. Gizi buruk di Kabupaten Kendal mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 0,03% menjadi 0,05% pada tahun 2020. Gizi buruk terjadi karena asupan makan yang tidak memenuhi kebutuhan pertumbuhan. Hal ini karena kemiskinan dan ketidakpahaman penduduk dalam menyiapkan makanan yang seimbang. Balita gizi buruk yang meningkat diikuti dengan meningkatnya balita stunting. Hasil penimbangan serentak Tahun 2016 balita stunting sebanyak 6,25% menurun menjadi 5,60% pada tahun 2019, dan berdasarkan data EPPBGM tahun 2020 balita stunting sebesar 17,54%.

Tabel 2.12
Status Gizi Masyarakat di Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05
2	% Balita Stunting	%	6,25	5,22	5,14	5,6	17,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal telah tersedia di semua kecamatan. Dari sisi ketersediaan pelayanan kesehatan tidak menjadi permasalahan namun dari sisi kualitas pelayanan masih menjadi perhatian. Hal ini dapat dilihat dari rasio puskesmas melebihi 30.000 penduduk. Persentase puskesmas yang sesuai Permenkes No. 75 tahun 2014, pada tahun 2020 hanya sebesar 30% (9 Puskesmas). Hal ini dikarenakan dari sisi tenaga kesehatan sesuai peraturan masih belum terpenuhi dan dari tata bangunan juga masih perlu mendapat perhatian.

Tabel 2.13
Kondisi Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Kendal

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Puskesmas terhadap Penduduk	Rasio	1 : 32056	1 : 32559	1 : 32622	1 : 33.731	1 : 34.082
2	Rasio jumlah tempat tidur Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio	1 : 1825	1 : 1655	1 : 1744	1:1586	1:1587
3	Presentase Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai permenkes 75 tahun 2014	%	20	26,6	30	30	30
4	Persentaseapotek dan toko obat yang berizin	%	100	100	100	100	100
5	IKM Puskesmas	Skor	76,06 (10 PKM)	76,11 (8 PKM)	79,70 (10 PKM)	80,11 (17 Puskesmas)	84,28 (30 Puskesmas)
6	Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi sesuai standar	%	97,06	95,24	95,65	93,28	93,22
7	Rata – rata capaian SPM	%	NA	75,14	71,78	80	78,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Inovasi dan pelayanan yang dilakukan dalam upaya penanganan Covid-19 antara lain yaitu sosialisasi dan publikasi secara digital yang dilakukan pada situs dan media sosial pemerintah kabupaten kendal. Selanjutnya yaitu Pemerintah Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Admedika dalam penyediaan dan pengintegrasian Electronic Health Record (EHR) di seluruh fasilitas kesehatan di Kendal. Adapun salah satu bentuk pencegahan yaitu vaksinasi yang dilakukan secara keliling. Upaya untuk percepatan testing maka akan disediakan GeNose. Beberapa upaya lain yang dilakukan yaitu dengan Menyediakan dan Mengoperasikan. Situation Room di Command Center, Membuat Grand Design PPKM Mikro, Menyediakan dan Mengaktivasi Nomor Darurat (Call Center 112 dan 119).

Pelayanan kesehatan rujukan dilayani oleh RSUD Kabupaten Kendal, sampai dengan hari ini *Bed Occupancy Rate* (BOR) RSUD tahun 2020 sebesar 60,57 berada dibawah dari standar yang ada yaitu 75%. Artinya RSUD kekurangan pasien, hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19. Rata-rata lama tinggal atau AVLOS juga diatas target yaitu 3,44 hari dan kematian dirumah sakit juga belum memenuhi target yaitu 3,34%. Kepuasan masyarakat yang menggunakan pelayanan RSUD mencapai 83,17 tahun 2020, hal ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 79. Banyak hal yang

menyebabkan kepuasan masyarakat menurun terhadap pelayanan RSUD. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap baik dari segi jumlah dan spesifikasinya, maupun Tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang memberikan pelayanan dinilai kurang ramah terhadap masyarakat.

Tabel 2.14
Kondisi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	BOR (Bed Occupancy Rate)	%	75	68,74	87,34	82,1	60,57
2	AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	3.5	3,52	4,77	4,68	3,44
3	NDR (Net Death Rate)	%	2.5	2,6	2,59	3,06	3,34
4	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	Nilai	80	84,75	78,07	79	83,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Pelayanan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Kendal belum sebagaimana target yang ditentukan. Berdasarkan data yang disediakan Dinas Kesehatan, hanya indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang telah mencapai 100%. Sedangkan berdasarkan penilaian indeks keluarga sehat Kabupaten Kendal belum masuk kategori sehat. Pada tahun 2020 Indeks Keluarga sehat baru mencapai 0,22. Kategori keluarga sehat dibedakan menjadi 3 yaitu keluarga tidak sehat (0-0,5), keluarga prasehat (0,5-0,8) dan keluarga sehat (0,8-1) Penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan masih diangka 65,8%.

Tabel 2.15
Kondisi Standar Pelayanan Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kendal

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	%	56	58,85	65,8	73,6	73,2
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95,77	93,51	93,66	93,83	94,79
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	96,79	99,99	99,99	99,99	99,99
4	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	104,4	99,9	99,2	100	100
5	Pelayanan kesehatan balita	%	98,9	100,2	97,3	100	99,2
6	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	62,22
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	NA	4,1	28,1	62	57,2

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
8	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	23,26	98,98	62,44	62,68	77,06
9	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	NA	26,90	36,4	19,5	40,9
10	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	NA	20,1	21,1	69,2	87,4
11	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	NA	55,4	85	83	75,4
12	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	87	87	41,7	54,3	52,1
13	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	80,0	80,3	89,1	92,7	90,7
14	Indeks Keluarga Sehat	indeks	NA	NA	0,19	0,20	0,22
15	Rasio dokter terhadap jumlah penduduk		20,5	11,4	15,53	21,78	28,5
16	Rasio para medis terhadap jumlah penduduk		41	20,5	109,23	77,3	193,3
17	Rasio Rumah sakit tipe C dan terhadap jumlah penduduk		1:961.989	1:978.672	1:991.686	1:1.011.939	1:1.022.485
18	Rasio DPM (dokter Praktek Mandiri) terhadap jumlah penduduk		0	4,59	1,91	2,07	3,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Kualitas lingkungan Kabupaten Kendal cukup baik, hal ini dapat dilihat dari semua kelurahan dan desatelah bebas dari buang air besar sembarangan, Persentase PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 84,73%. Persentase desa siaga aktif telah mencapai 99,65% ditahun 2020. Namun demikian belum semua desa mencapai desa dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Industri rumah tangga di Kabupaten Kendal belum semua memiliki izin. Pada tahun 2020 perusahaan dengan IRT (Industri Rumah Tangga) baru mencapai 54,75% dan produk PIRT (Produk Industri rumah Tangga) yang terawasi post marketnya baru mencapai 34,7%.

Tabel 2.16
Kondisi Kualitas Lingkungan Sehat dan Industri Rumah Tangga
Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kelurahan/Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	%	0	0	0	30	51
2	PersentaseKelurahan/Desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	%	16,43	30,77	100	100	100
3	Persentase Desa siaga aktif minimal strata madya	%	50	50	50	96,85	99,65
4	Persentase Rumah ber PHBS	%	80	80	85	79	84,73
5	Persentaseperusahaan rumah tangga yang memiliki IRT	%	26,1	34,6	44,9	49,15	54,75
6	Persentase produk PIRT yang terawasi post marketnya	%	22,8	25,7	29,5	31,6	34,7
7	Persentase pembinaan mutu makanan dan minuman	%	15,2	10,8	13,5	9,7	15,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Tabel 2.17
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	NA	93,51	93,66	93,83	94,79
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	NA	99,80	99,99	99,99	99,99
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir	%	NA	101,47	99,18	100,00	100,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	%	NA	100,00	97,26	100,00	99,20
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	NA	100,00	100,00	100,00	62,22
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	NA	4,15	28,17	62,00	57,22
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	NA	99,52	62,44	62,68	77,06
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	NA	26,88	36,44	19,58	40,97
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	NA	20,98	21,08	69,24	87,44
10.	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	%	NA	55,40	85,04	83,03	75,49
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	%	NA	100,00	41,90	54,30	52,32
12.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang beresiko terinfeksi HIV	%	NA	80,30	89,10	92,70	90,70

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan yaitu 1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur berdasarkan 11 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Indeks kinerja sistem irigasi; 2) Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi; 3) Konservasi infrastruktur Alami Sumber Air; 4) Persentase akses air minum layak dan aman (termasuk akses perpipaan); 5) Persentase akses sanitasi layak; 6) Persentase drainase jalan kondisi baik (lancar dan tidak tersumbat); 7) Persentase kondisi mantap jalan; 8) Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah; 9) Persentase kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL; 10) Persentase rekomendasi IPR yang ditindaklanjuti; 11) Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi pada system informasi jasa konstruksi.

Capaian indikator Indeks kinerja sistem irigasi, pada tahun 2020 sebesar 1,02%. Indikator persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, dari 61,03 % di tahun 2016 menjadi 75,08% pada tahun 2020. Indikator konservasi infrastruktur alami sumber air juga mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, dari 34,27 % di tahun 2016 menjadi 47,92 % pada tahun 2020.

Capaian universal acces di bidang air minum dan sanitasi selama tahun 2016-2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Indikator persentase akses air minum layak dan aman (termasuk perpipaan) selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 83,46 % di tahun 2016 menjadi 93 % di tahun 2020. Meskipun mengalami trend peningkatan setiap tahun tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dimana capaian akses air minum layak dan aman harus 100 %. Indikator persentase akses sanitasi layak selama tahun 2016-2020 juga mengalami peningkatan, dari 78 % di tahun 2016 meningkat menjadi 92 % di tahun 2020, sama halnya dengan capaian indikator akses air minum layak, meskipun capaian akses sanitasi meningkat setiap tahun masih belum memenuhi target universal acces 100-0-100 yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.

Capaian indikator drainase jalan kondisi baik (lancar dan tidak tersumbat) tahun 2016-2020 mengalami trend meningkat, dari 40,39 % di tahun 2016 menjadi 75,13% di tahun 2020. Indikator persentase kondisi mantap jalan juga mengalami trend peningkatan, dari 51 % di tahun 2016 menjadi 88,28 % di tahun 2020. Infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemerintah mempunyai arti yang sangat penting, mengingat fungsinya untuk memperlancar arus barang dan orang dari satu tempat ketempat lain dan arus barang dari sumber-sumber produksi ke pusat-pusat pemasaran. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	NA	NA	NA	NA	1,02
2	Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	61,03	70,05	71,03	75,02	75,08
3	Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	41,5	47	45,92	62,78	63,94
4	Konservasi infrastruktur Alami Sumber Air	%	34,28	39,28	44,28	47,92	47,92
5	Persentase akses air minum layak dan aman (termasuk akses perpipaan)	%	83,46	88,58	90,03	92	93
7	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	78	87,35	88	92	92
8	Presentase drainase kondisi baik	%	40,39	60	62	74,21	75,13
9	Persentase jalan kondisi mantap	%	51,00	69,00	71,57	88	88,28
10	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	41,65	46,40	49,69	65,11	67,03
12	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	41,65	46,40	49,69	65,11	67,03
13	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah	%	NA	87,00	87,00	87,00	87,00
14	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	%	NA	87	87	87	87

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
15	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	NA	87,00	87,00	87,00	87,00
16	Persentase Kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	Persentase rekomendasi IPR yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Persentase Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada system informasi jasa konstruksi	%	65	65	80	90	90
19	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	NA	NA	NA	NA	19,14
20	Rasio bangun gedung ber-IMB per satuan bangunan	%	NA	NA	NA	NA	54,82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal 2021

Tabel 2.19
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	%	83,46	88,58	90,03	94	93,35
2.	Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78	87,35	88	92,20	92,24

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 11 sub urusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan 10 indikator yang telah

ditetapkan, yaitu: 1) Persentase pengembang perumahan berizin; 2) Persentase perumahan formal berizin; 3) Proporsi Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak; 4) Persentase Rumah Layak Huni; 5) Persentase kawasan permukiman kumuh; 6) Persentase Perumahan yang dilengkapi oleh PSU; 7) Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi Baik; 8) Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana; 9) Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana; 10) Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perumahan.

Capaian indikator persentase pengembang perumahan dan perumahan formal berizin selama kurun waktu tahun 2016-2020 sudah tercapai 100 % sejak tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, salah satunya dengan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator persentase rumah layak huni yang mengalami trend peningkatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020, dari 95,96 % di tahun 2016 menjadi 98,61. Tetapi capaian tersebut menurun di tahun 2020 menjadi 87,85 %, salah satu faktor turunnya capaian tersebut adalah dampak pandemi covid 19 dimana banyak anggaran pembangunan daerah terkena refofusing untuk penanganan pandemi covid 19.

Capaian indikator kawasan permukiman kumuh selama kurun waktu tahun 2016-2020 juga menunjukkan kinerja yang baik, hal ini dilihat dari penurunan luas kawasan kumuh yang cukup signifikan, dari 69,9 % di tahun 2016 menjadi 0 % di tahun 2020 berdasarkan SK Bupati No.648.2/520/2017. Dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan perumahan diperlukan peran serta dari masyarakat, dan tidak bisa tergantung dari pemerintah dikarenakan keterbatasan dilihat dari indikator. Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perumahan di Kabupaten Kendal cenderung mengalami peningkatan tahun 2016 tercatat sebesar 0,69 % menjadi 40,91% pada tahun 2020.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengembang perumahan berizin	%	100	100	100	100	100
2	Persentase perumahan formal berizin	%	100	100	100	100	100
3	Proporsi Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak	%	95,96	96,68	97,3	98,61	87,85
4	Persentase Rumah Layak Huni	%	95,96	96,68	97,3	98,61	87,85
5	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	0	3.937	4.180	7.192	4.77
6	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	95,96	96,63	97,3	98,61	87,85
7	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	69,9	85,34	40,46	0	0
8	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	%	0	19.85	28.46	23.17	3
9	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%	0	19.85	48.31	72.01	74.81
10	Persentase Perumahan yang dilengkapi oleh PSU	%	100	100	100	100	100
11	Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi Baik	%	0	25	30,37	100	100
12	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perumahan	%	0,69	19,93	19,93	33,92	40,91

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal 2021

Tabel 2.21
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	NA	50	NA	0	0
2	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, bencana dan kebakaran. Dalam rangka mendukung ketenteraman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dari indikator yang ada sampai tahun 2020 secara umum tercapai dengan baik dan rata-rata dilaksanakan. Pada ketenteraman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, indikator

persentase patroli siaga ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah mencapai 100% mulai tahun 2018-2020. Cakupan penegakan Perda sudah mencapai 100% pada tahun 2019 dan 2020. Pada pelaksanaan upaya peningkatan wawasan kebangsaan, indikator dengan capaian mengalami penurunan yaitu pada masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, tercatat pada tahun 2020 sebesar 1.150 jiwa dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 8.652 jiwa.

Capaian kinerja untuk sub urusan bencana di Kabupaten Kendal tahun 2016-2020 yang meliputi indikator persentase bencana yang tertangani dan persentase meningkatnya kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada korban sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk capaian kinerja kebakaran di Kabupaten kendal menunjukkan fluktuatif cenderung turun dimana indikator tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar 81% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 95%.

Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase patroli siaga ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	15	100	100	100
2.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	318	151	230	230	240
3.	Cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	rasio	1,4	1,3	1,4	1,4	1,65
4.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	98,4	84,9	98	10,4	10,8
5.	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	per desa/kelurahan	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
6.	Tertanganinya konflik sosial yang terjadi	%	100	100	100	100	100
7.	Cakupan penegakan Perda yang tertangani	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase Perda dan Perkada yang	%	90	90	90	90	90

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	ditegakkan						
9.	Persentase pelanggaran ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
10.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	0,53	0,55	0,6	0,67	0,58
11.	Presentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	%	NA	NA	NA	NA	NA
12.	Jumlah pelanggaran Perda	kasus	600	577	563	456	460
13.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
14.	Persentase bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100
15.	Persentase meningkatnya kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada korban.	%	100	100	100	100	100
16.	Persentase Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	0	10	10	10	10
17.	Persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%/tahun	NA	10	98	100	100
18.	Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Terbentuk (Desa Rawan 73)	%	2,73	5,47	8,22	9,59	10,96
19.	Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100	100
20.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	%	100	100	100	100	100
21.	Persentase LSM/Ormas yang dibina kebangsaan	%	7,19	8,82	10,46	12,09	13,73

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
22.	Presentase cakupan penegakan perda yang tertangani	%	100	92	100	100	100
23.	Presentase Kebakaran yang ditangani	%	100	100	100	100	100
24.	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (respon time)	%	75	88	81	92	95
25.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	70	80	100	100	100
26.	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	100	100	100
27.	Persentase Kelompok Balakar per Kecamatan	%	0	100	100	100	100
28.	Persentase relawan kebakaran yang dibina	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Pemadam kebakaran; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal 2021

Tabel 2.23
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
Sub Kebencanaan							
3	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi daerah rawan bencana	%	30	30	60	75	100
4	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten / Kota	%	30	30	60	75	100
5	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100

6. Sosial.

Urusan sosial memiliki kewenangan terkait dengan pemberdayaan sosial (Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kota; Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kota; Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di kota); Penanganan Warga Negara

Migran Korban Tindak Kekerasan (Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal); Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum); Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota; Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan); Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota;

Indikator yang kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial adalah besarnya cakupan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan terhadap PPKS baik itu melalui pemberdayaan, pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pada pemenuhan standar pelayanan. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya pada tahun 2020 mencapai 20%, memiliki kinerja yang sama jika dilihat dengan kondisi ditahun 2019. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, kondisi ditahun 2020 mengalami kenaikan signifikan sampai dengan 14%. Dilihat berdasarkan pembinaan terhadap PPKS, kinerja selama dua tahun terakhir (2019-2020) terbilang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator prosentase pembinaan anak terlantar yang tertangani sebesar 10% dan jumlah pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani hanya sebesar 10 anak.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan sosial juga menunjukkan masih rendah. Dalam lima tahun terakhir tidak ada peningkatan yang ditunjukkan dengan persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang tetap berada pada capaian 7%. Kinerja termasuk kategori tinggi hanya pada persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani dengan kinerja mencapai 100%.

Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kabupaten Kendal tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.24
Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya yang tertangani	%/tahun	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak terlantar yang dibina	%/tahun	15	10	10	10	10
3	Jumlah pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani	Anak	10	10	10	10	10
4	Persentase Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%/tahun	7	7	7	7	7
5	Persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%/tahun	100	100	100	100	100
6	Persentase PPKS di Luar Panti yang tertangani	%	100	20	20	20	20
7	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	%	92	100	100	73	100
8	Persentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga	%	7	7	7	7	9
9	Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	NA	NA	NA	0,03	NA
10	Persentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100
11	Persentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100
12	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100
13	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
14	Persentase Penduduk miskin yang mendapat santunan kematian	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021

Urusan sosial merupakan salah satu dari 6 urusan pembangunan yang termasuk dalam kategori urusan wajib dengan pelayanan dasar. Dimana ke enam urusan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah urusan yang harus memenuhi standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

Urusan sosial di tingkat Kabupaten/Kota dalam peraturan tersebut diamanatkan untuk menyediakan pelayanan berupa:

- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- 2) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Capaian kinerja SPM urusan Sosial di Kabupaten Kendal dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2016-2020

No	Indikator Sesuai Kewenangan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,95	10	10	10	10
2	Persentase Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,41	100	100	100	100
3	Persentase Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	1,62	10	10	10	10
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,16	10	10	10	10
5	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja juga

ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen di Kabupaten Kendal. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya.

Penempatan pencari kerja menunjukkan kinerja yang semakin baik, tahun 2016 sebesar 73,77% meningkat menjadi 75% pada tahun 2018. Namun ditahun 2019, pencari kerja yang ditempatkan tidak mengalami kenaikan tetap diangka 75%, dan bahkan ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 43%. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan. Kinerja peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ditunjukkan dengan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat ditahun 2019 keduanya mengalami kenaikan, namun ditahun 2020 yang mengalami kenaikan hanya pada persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Sementara itu, tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan trennya ditahun 2019-2020 menurun menjadi 74% dibandingkan tahun 2018 sebesar 76%.

Sementara itu, pembinaan terhadap lembaga pelatihan trennya membaik sampai dengan tahun 2019. Tercatat Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terbina pada tahun 2018 mencapai sebesar 62%, meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 63%, namun mengalami penurunan menjadi 45% ditahun 2020. Begitu pula pada jumlah lembaga pelatihan kerja yang berizin yang semula ditahun 2019 sebanyak 64 lembaga naik menjadi 70 lembaga ditahun 2020.

Tren membaik ditunjukkan oleh jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami peningkatan dari 30.017 orang pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 35.110 orang, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 35.625 orang pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan jika kesadaran pemilik perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya semakin baik.

Berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menarik beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Kewenangan urusan tenaga kerja yang ditarik ke pemerintah provinsi yaitu 1) Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja; 2) Persentase Pemeriksaan Perusahaan dan 3) Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan, oleh sebab itu capaian tahun 2017 dan 2018 tidak bisa dihitung (0).

Tabel 2.26
Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	73,77	74	75	75	43
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	90	90	93	91,42
3	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	91	83,33	92,34	93	94
4	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	70,31	80	76	74	74
5	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terbina	%	59,38	80	62	63	45
6	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Berizin	LPK	32	42	54	64	70
7	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB	%	96,36	82,14	95	83	53
8	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	orang	22.000	27.961	28.914	35.110	35.625
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	NA	66,49	66,10	67,71	70,50
10	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	73,77	74	75	75	43
11	Persentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	2	2	2	2	2,1
12	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	22	22	22	22	19
13	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	75373,1	77104,7	81012,9	81261,1	86760,7

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
14	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	51,10	64,32	74	54	51,07
15	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	60	65	70	75	50

Sumberdata : Dinas Tenaga Kerja Kab Kendal, 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Indikator Agregat pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Pada pembahasan diatas terlihat bahwa IPG dan IDG Kabupaten Kendal belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan belum responsif gender. Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) yang mengawal perencanaan yang responsif gender hanya 60,00% yang aktif.

Kekerasan perempuan dan anak masih ditemukan di Kabupaten Kendal. Sampai dengan 2020 KDRT perempuan dan anak sebesar 0,03%. Perwujudan Kabupaten Layak anak dapat dilaksanakan dengan Desa Layak Anak. Sampai dengan tahun 2020 Desa layak anak yang terbentuk baru mencapai 8%.

Tabel 2.27
Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	36,58	37,69	50,80	64,01	60,00
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50,97	47,54	52,9	49,91	22,22
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif	%	22,22	22,72	22,22	22,22	22,22
4.	Rasio KDRT perempuan dan anak	%	0,04	0,02	0,02	0,04	0,03
5.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	/ 100.000 perempuan	7,00	6,69	4,07	10,59	4,96
6.	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	3,85	6	7,34	9,19	8
7.	Cakupan Pengelola Industri Rumah (IR) yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%	22,38	26,66	34,42	35,96	33
8.	Jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
9.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	75	50	41	53	33
10.	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100

Sumber : DP2KBP2PA Kabupaten Kendal, 2021

3. Pangan.

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama peningkatan ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan bagi peningkatan sumberdaya manusia yang sehat dan tangguh. Peningkatan ketahanan pangan diselenggarakan berdasarkan Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) dan mengacu pula pada RAD PG Provinsi Jawa Tengah dan RAD PG Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal merupakan daerah surplus beras, daging ayam dan telur untuk wilayah Jawa Tengah bagian Utara.

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan adalah memenuhi kebutuhan pangan beragam, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai arahan kebijakan pangan dalam RPJMN 2020 - 2024.

Ketahanan pangan ditingkatkan dengan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin baik, yaitu pada tahun 2020 mencapai sebesar 87,2. Rata-rata tingkat konsumsi pangan pokok masih tinggi dalam konsumsi karbohidrat terutama konsumsi beras (dengan rata-rata 85 -95 Kg/ per kapita/ tahun) dan terigu. Sedangkan rata-rata konsumsi umbi-umbian, protein hewani, sayur-sayuran, buah-buahan masih rendah.

Penanganan daerah rawan pangan semakin baik dari tahun ke tahun, tahun 2016 sebesar 42,8 % meningkat menjadi sebesar 52,72 % pada tahun 2020, diharapkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat rentan/miskin menjadi lebih baik. Gambaran capaian kinerja pengembangan dan pemenuhan pangan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28
Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kapita (% AKE)	158	173,5	187,14	195,25	187,3
2	Ketersediaan protein perkapita	Kkal/kapita (% AKE)	117,11	114	131,79	127,29	131,9
3	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90	125	138	113	98
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	70	91,06	96,91	96,3	97,92
5	Penanganan daerah rawan pangan	%	42,8	42,8	51,6	52,52	52,72
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	82,1	84,2	84,8	86,8	87,2
7	Persentase pangan yang aman dikonsumsi asal tumbuhan	%	83,5	80	83,33	90	90
8	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	%	27,42	49,5	49,7	48	31,5
9	Prosentase lumbung pangan aktif	%	10	10	10	10	10
10	Ketersediaan bahan pokok utama (beras)	%	156,95	144,08	140,31	138,06	125,72

Sumberdata : Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kendal, 2021

4. Pertanahan.

Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 8 sub urusan yaitu: 1) Izin lokasi; 2) Sengketa Tanah Garapan; 3) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*; 5) Tanah Ulayat; 6) Tanah Kosong; 7) Izin Membuka Tanah dan 8) Penggunaan Tanah. Capaian indikator persentase bidang tanah bersertifikat milik Pemda tahun 2016 sebesar 39,41 % meningkat menjadi 42,01 % pada tahun 2020.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Pertanahan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase bidang tanah bersertifikat (milik Pemda)	%	39,41	39,41	39,41	40,89	42,01

Sumberdata : Dinas PUPR dan Badan Keuangan Daerah Kab Kendal, 2021

5. Lingkungan Hidup.

Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 6 sub urusan yaitu: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 17 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Persentase emisi gas rumah kaca; 3) Indeks kualitas air; 4) Lahan kritis yang tertangani; 5) Luas RTHK perkotaan publik; 6) Rasio ruang terbuka hijau; 7) Jumlah izin pengelolaan limbah B3; 8) Persentase ketaatan usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan; 9) Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti; 10) Persentase sampah yang tertangani; 11) Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA; 12) Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata; 13) Persentase penambahan luasan ruang publik yang dimanfaatkan; 14) Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang dapat diakses; 15) jumlah sumber mata air yang tertangani; 16) Luas Lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani; 17) Persentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau dan jumlah makam yang dipelihara/dikelola Pemda.

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan trend peningkatan, dari 49,62 di tahun 2016 menjadi 66,24, kemudian di tahun 2020 menjadi 65,37, hal ini menggambarkan status lingkungan yang baik. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, dimana semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan semakin baik kondisi lingkungannya. Pembobotan nilai IKLH adalah sebagai berikut : Sangat Baik (skornya 90-100), Baik (70-89,9), Sedang (50-69,9), Buruk (25-49,9), Sangat Buruk (0-24,9).

Dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup Kabupaten Kendal melakukan penanganan luas lahan kritis dan sumber mata air secara bertahap pada titik-titik kritis yang perlu segera mendapatkan penanganan, lahan kritis yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020

mengalami peningkatan, dari 6 % di tahun 2016 menjadi 18,20% di tahun 2020. Indikator luas Ruang Terbuka Hijau Kota (publik) capaian 2016 sebesar 14,94% meningkat menjadi 17,73% pada Tahun 2020.

Sementara itu untuk indikator persentase timbunan sampah yang tertangani menunjukkan trend peningkatan, dari 8,73% pada Tahun 2016 menjadi 20,5 % pada Tahun 2020. Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA juga meningkat dari 12 kecamatan di tahun 2016 menjadi 17 kecamatan di tahun 2020. Indikator jumlah lokasi taman dan RTH perkotaan yang tertata selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan dari 25 RTH di tahun 2016 menjadi 30 RTH di tahun 2020.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skor	49,62	63,49	66,29	66,24	65,37
2	Persentase emisi gas rumah kaca						
	a. Energi dan listrik	%	14,1	41,83	83,71	38,55	38,55
	b. <i>Industrial Processes and Production Use</i> (IPPU)	%	1,6	2,98	1,03	3,92	3,92
	c. <i>Agroforestry and Other Land Use</i> (AFOLU)	%	78,44	36,73	8,52	32,13	32,13
	d. Limbah	%	6,47	18,43	6,73	25,39	25,39
3	Indeks kualitas air;	skor	NA	58,57	66,70	50	46,7
4	Lahan kritis yang tertangani;	%	6	9,80	14,47	24	18,20
5	Luas RTHK perkotaan publik;	Ha	7,587	8,646	8,689	8,689	9,004
6	Rasio ruang terbuka hijau	%	14,94	17,02	17,11	17,11	17,73
7	Jumlah izin pengelolaan limbah B3	izin	12	13	15	29	30
8	Persentase ketaatan usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan	%	NA	NA	25	59	58
9	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti	%	NA	NA	100	100	100
10	Persentase timbunan sampah yang tertangani	%	8,73	9,55	10,71	21,26	20,5
11	Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA	Desa/ Kel	49	55	64	82	90
12	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	RTH	25	26	27	27	30
13	Persentase penambahan luasan ruang publik yang dimanfaatkan	%	2	6	6	6	6

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
14	Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	jenis	2	2	3	12	1
15	Jumlah sumber mata air yang tertangani	lokasi	NA	1	1	2	2
16	Luas Lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani	ha	10	8	14	24	18,2
17	Persentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau	%	20	20	20	20	20
18	Jumlah makam yang dipelihara/dikelola Pemda	jumlah	7	7	7	7	7
19	Cakupan pemantauan kualitas air	%	23,33	53,33	35	50	53,33
20	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	NA	NA	NA	25	50
23	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	25	59	58
24	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	orang	1	10	10	15	6
25	Persentase masyarakat yang dibina	%	25	30	40	62	28
28	Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik	%	14,94	17,02	17,11	17,11	17,73
29	Timbulan sampah yang ditangani	Ton	12.264	13.441	15.102	30.681	30.435
30	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R	%	3,04	3,33	3,62	3,91	4,20

Sumberdata : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal, 2021

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Capaian indikator kinerja untuk bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan untuk indikator kinerja Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun), Persentase Penerbitan akta kematian, Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan, Sistem Informasi Kependudukan yang ter up date, dan ketersediaan Profil Kependudukan

Kabupaten menunjukkan capaian 100%. Sedangkan untuk persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak pada tahun 2020 baru mencapai 33,10% dan Persentase Kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk di tahun 2020 baru mencapai 69,36%. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kendal tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun					
		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk (kepemilikan KK)	%	100	100	100	100	100
2	Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	98,91	90,45	96,58	99,69	99,79
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	NA	NA	15,36	15,36	33,09
4	Persentase Kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk	%	62,79	67,51	67,21	69,36	69,36
5	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun)	%	90,86	91,14	91,35	94,80	95,67
6	Persentase Penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	5,01	10,5	11,46	12	12,98
8	Sistem Informasi Kependudukan yang ter up date	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan	OPD	NA	NA	2 OPD	2 OPD	2 OPD
10	Profil Kependudukan Kabupaten		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Kepemilikan akta cerai	%	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal, 2020

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Urusan kewenangan pemberdayaan masyarakat dan desa yang diselenggarakan Kabupaten kendal adalah penataan desa, fasilitasi kerjasama antara desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan pembinaan

lembaga adat dan pembinaan adat istiadat. Berdasarkan data 266 desa maka diketahui pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selama tahun 2016–2020 menunjukkan kecenderungan peningkatan cukup baik, terutama tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Kendal sejak tahun 2018. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa dari alokasi dana desa (ADD), meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pembinaan PKK serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) secara swadaya.

Hal ini ditambahkan lagi dengan semakin membaiknya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Lembaga keuangan mikro dan berswadaya masyarakat mengalami peningkatan. Tingkat keberdayaan desa terus dikembangkan agar aparatur desa memiliki kapasitas dan kompetensi baik. Sampai dengan tahun 2020 aparatur desa yang telah menjalani Bimbingan Teknis sebanyak 822 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa sudah dilaksanakan. Pemberdayaan ekonomi desa dilaksanakan dengan meningkatkan pendirian BUMDes sesuai dengan potensi desa, namun masih fluktuatif, terutama pada tahun 2018 meningkat meningkat sebanyak 108 desa kemudian menurun menjadi 50 desa pada tahun 2020 maka peningkatan unit usaha perlu mendapatkan perhatian. Persentase Lembaga Keuangan Pedesaan (LKP) aktif menunjukkan peningkatan, tahun 2016 LKP aktif sebesar 28% meningkat menjadi 53,5% pada tahun 2020. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa tertinggal	Desa	0	85	0	0	0
2.	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Unit	30	97	130	140	180
3.	Desa yang mendapatkan program TMMD	Desa	2	3	48	3	3
4.	Jumlah aparatur desa yg sudah mengikuti Bintek / pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	266	266	1.049	400	822
5.	Jumlah data dan informasi	Dokumen	266	266	266	266	266
6.	Persentase Lembaga Keuangan Pedesaan aktif	%	28	29	53	53	53,5
7.	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	Desa	266	266	266	266	266
8	Tingkat Kemandirian Desa	Desa	0	8	11	11	12
9	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	0	3	4,13	4,13	4,51

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
10	Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%	NA	NA	2	2	2
11	Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa	%	NA	34	60	63	66
12	Persentase jumlah desa dengan BUMDes	%	12	31,2	40,6	52,6	67,6
13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	50	55	58	60	65
14	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (TP PKK Kecamatan)	Kelompok	20	20	20	20	20
15	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
16	Jumlah Posyandu aktif	%	1.197	1.273	1.320	1.320	1.320
17	Persentase desa yang memiliki sarpras dalam kondisi baik (jalan, kantor)	%	50	55	58	61	65
18	Persentase Desa yang memiliki Kerjasama	%	NA	NA	NA	NA	9,7
19	Persentase desa dengan RPJMDES, RKPDES, APBDES	%	100	100	100	100	100
20	% kelembagaan desa yang dibina {RT,RW,PKK,Posyandu,karangtaruna}	%	100	100	100	100	100
21	Persentase Desa Mandiri	%	0	3,01	3,01	4,13	4,51
22	% BUMDES Strata Maju	%	NA	NA	NA	NA	0,64
23	Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	kawasan	NA	NA	NA	1	2

Sumberdata : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kendal, 2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Urusan kewenangan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kendal adalah pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Upaya pengendalian penduduk, KB dan KS erat kaitannya dengan upaya mewujudkan keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk (migrasi in) dan penduduk yang keluar (migrasi out) berdasarkan amanat pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga.

Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran. Total Fertility Rate adalah indikator untuk melihat tingkat kemampuan perempuan melahirkan dalam kurun waktu di sebuah wilayah. TFR Kabupaten Kendal masih diatas 2 hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perempuan hamil lebih dari 2 kali.

Pengendalian penduduk dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana. Indikator keluarga berencana sampai dengan tahun 2020 sengan caoaian cukup baik. Rasio akseptor KB baru sampai dengan 2020 telah mencapai sebesar 84,57%, Cakupan peserta KB aktif baru mencapai

sebesar 70,26% sampai dengan tahun 2020 dan masih perlu mendapat perhatian adalah kesertaan KB bagi laki-laki belum optimal (tahun 2020 mencapai sebesar 1,38%, capaian ini masih dibawah target nasional sebesar 3%.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki istri di bawah usia 20 tahun angkanya cukup bagus sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,15%. Keberhasilan ini dikarenakan semakin efektifnya peran Bina Keluarga Remaja (BKR), PIK KRR dalam memberikan edukasi dalam upaya mencegah perkawinan usia dini dan kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan Generasi Z. Capaian kinerja urusan Dalduk dan KB, dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.33
Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio akseptor KB (baru)	%	100	78,42	70	77,91	84,57
2.	Cakupan peserta KB aktif (m-CPR)	%	80,9	81,1	69,45	69,35	70,26
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	79,23	79,25	79,12	79,28	79,1
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,45	1,45	0,42	0,98	1,15
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,89	9,87	11,83	18,34	15,77
6.	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,28	1,05	1,16	1,16	1,38
7.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	%	62,07	64,83	64,83	67,13	69,23
8.	Persentase PIKR aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	26	28,89	33,3	26,6	29,3
9.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	87,81	86,8	87,24	84,1	85,1
10.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
11.	Persentase penurunan usia pernikahan dini	%	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
12.	Cakupan PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	21	22	24	26,6	28,8
13.	Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB)	%	78,9	80	80	80	80

Sumberdata : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Kendal, 2021

9. Perhubungan.

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 4 sub urusan yaitu: 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan dan 4) perkeretaapian. Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 21 indikator yang telah ditetapkan yaitu: 1) Jumlah rute lintas penyeberangan; 2) Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir; 3) Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik; 4) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji; 5) Jumlah uji KIR angkutan umum; 6) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek; 7) Jumlah Trayek yang terlayani; 8) Persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek; 9) Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas; 10) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) Kabupaten/ Kota; 11) Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar; 12) Persentase Layanan PJU Berbasis Smart City; 13) Indek konektivitas wilayah; 14) Persentase layanan angkutan darat; 15) Rasio izin trayek; 16) Persentase terminal C sesuai standar; 17) Persentase pemasangan rambu-rambu; 18) Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik; 19) Jumlah orang melalui terminal per tahun 20) Jumlah pelabuhan laut dan 21) Persentase pelabuhan sesuai standard.

Capaian indikator jumlah rute lalu lintas penyebarangan mengalami peningkatan selama tahun 2016-2020, dari 2 buah di tahun 2016 menjadi 3 buah di tahun 2020. Jumlah pelabuhan, terminal dan taman juga meningkat selama kurun waktu 2016-2020, dari 5 unit di tahun 2016 menjadi 6 unit di tahun 2020. Jumlah sarana dan prasarana perhubungan

dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan dari 554 unit tahun 2016 menjadi 910 unit tahun 2020. Terminal angkutan penumpang umum dalam trayek selama kurun waktu 2016-2020 tetap 4 unit.

Untuk capaian indikator jumlah trayek yang terlayani meningkat dari 60 trayek di tahun 2016 menjadi 62 trayek di tahun 2018, meskipun ada peningkatan jumlah trayek namun masih banyak kecamatan maupun desa yang belum dilalui sarana transportasi umum. Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas juga menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan rambu-rambu lalu lintas selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 667 unit di tahun 2016 menjadi 1.217 unit di tahun 2020. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) juga meningkat dari 2.550 unit tahun 2016 menjadi 6.750 unit di tahun 2020.

Capaian indek konektivitas Kabupaten Kendal selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 0,74 pada tahun 2012 menjadi 0,76 pada tahun 2020. Indek konektivitas merupakan gambaran kondisi jaringan jalan yang saling terkoneksi di suatu kawasan, hal tersebut berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang dan jasa karena prasarana jalan sangat erat dalam memperlancar mobilitas antar wilayah. Capaian kinerja persentase layanan angkutan darat selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 70 % pada tahun 2016 menjadi 72 % pada tahun 2020, begitu juga dengan rasio izin trayek capaiannya mengalami peningkatan dari 70 % pada tahun 2016 menjadi 75 % pada tahun 2020.

Indikator persentase terminal C sesuai standart selama tahun 2016-2020 bersifat tetap sebesar 75 %. Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik, capaiannya juga bersifat tetap sebesar 60 % dari tahun 2016-2020.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rute lintas penyeberangan	Buah	2	2	2	3	3
2	Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir	Unit	5	5	6	6	6

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	Unit	554	608	670	780	910
4	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Unit	1	1	1	1	1
5	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	12.148	12.263	12.930	12.036	8.133
6	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	4	4	4	4	4
7	Jumlah Trayek yang terlayani	Trayek	60	60	62	62	62
8	Persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	53,33	63	66	78	80
10	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) Kabupaten/ Kota.	unit	3.217	5.266	5.620	6.759	7.967
11	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	Unit	11	11	11	11	11
12	Persentase Layanan PJU	%	19	42	52	87	101
13	Rasio konektivitas wilayah	angka	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76
14	Persentase layanan angkutan darat	%	70	70	70	72	72
15	Rasio izin trayek		70	70	70	73	75
16	Persentase terminal C sesuai standar	%	75	75	75	75	75
18	Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	60	60	60	60	60
19	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	5.403.675	2.807.546	1.935.204	1.441.478	920.744
20	Jumlah pelabuhan laut	unit	1	1	1	1	1
21	Persentase sarana prasarana pelabuhan sesuai standard	%	55	60	65	70	75

Sumberdata : Dinas Perhubungan Kab Kendal, 2021

10. Komunikasi dan Informatika.

Urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 2 sub urusan yaitu: 1) Informasi dan Komunikasi Publik dan 2) Aplikasi Informatika. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 13 indikator yang telah ditetapkan yaitu: 1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP); 2) Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah; 3) Indeks SPBE; 4) Indeks SPBE; 5) Indeks Domain Tata kelola SPBE; 6) Indeks Domain Layanan SPBE; 7) Jumlah Hotspot yang tersedia; 8) Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah, Sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online; 9) Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda; 10) Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi; 11) Persentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi; 12) Persentase kerja sama informasi dengan mass media; 13) Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi.

Capaian indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 sebesar 88,8. Capaian Indeks SPBE tahun 2020 sebesar 3,76, dan komposit indeks SPBE seperti Indeks domain kebijakan SPBE sebesar 3,41; Indeks domain tata kelola SPBE sebesar 3,43; Indeks domain layanan SPBE sebesar 4,03. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah hotspot yang tersedia bertambah setiap tahunnya dari 16 titik di tahun 2016 menjadi 85 titik di tahun 2020. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal, masih terdapat 8 Kecamatan yang beberapa desanya memiliki wilayah yang tidak dapat mengakses Mobile Broadband 4G, bahkan ada yang masih blankspot). Indikator jumlah Sistem Informasi Manajemen pemerintah daerah, sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 11 SIM di tahun 2016 menjadi 147 SIM di tahun 2020.

Capain indikator yang sudah mencapai 100 % selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah: 1) Indikator persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan pimpinan daerah/ tamu Pemda; 2) persentase kerja sama informasi dengan mass media dan 3) persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Skor	NA	NA	NA	15,38	88,8
2	Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	NA	NA	NA	NA	51,48
3	Indeks SPBE	Skor	NA	NA	2,94	3,76	3,76
4	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Skor	NA	NA	3,76	3,41	3,41
5	Indeks Domain Tata kelola SPBE	Skor	NA	NA	3	3,43	3,43
6	Indeks Domain Layanan SPBE	Skor	NA	NA	3,12	4,03	4,03
7	Jumlah Hotspot yang tersedia	titik	14	32	60	74	85
8	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah, Sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online	SIM	11	17	52	102	150
9	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	%	100	100	100	100	100
10	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	SKPD	12	38	54	60	66
11	Persentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	%	59	59	59	59	59
12	Persentase kerja sama informasi dengan mass media	%	100	100	100	100	100
13	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	%	100	100	100	100	100
14	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)	Skore	NA	NA	NA	NA	NA
15	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	35,21	35,21	39,90	39,90	41,31

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
16	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	NA	NA	NA	14,12	19,77

Sumberdata : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kendal, 2021

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam. Lingkup kewenangan pada perizinin meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Perkembangan wirausaha baru mikro di Kabupaten Kendal sampai pada tahun 2020 mencapai 32.207 unit. Jika dilihat capainnya menunjukkan peningkatan sebesar 125 unit dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 32.082 unit. Dukungan terhadap manajemen UKM setiap tahun dilaksanakan di 5 kecamatan sejak tahun 2016. Sementara itu jumlah UKM yang berkembang dari mikro ke kecil pada tahun 2020 mencapai 1.355 unit, trennya menurun dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Untuk kondisi koperasi kategori aktif, ditahun 2020 mencapai

sebesar 78%, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 71,9%. Sedangkan persentase koperasi yang dibina tahun 2019 sebesar 57,83% mengalami penurunan menjadi 50% pada tahun 2020.

Kinerja urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Kendal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wirausaha baru mikro	unit	33.216	33.400	31.872	32.082	32.207
2	Cakupan dukungan manajemen UMKM	Kec	5	5	5	20	20
3	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.285	1.353	1.528	1.335	1.355
4	Persentase Koperasi aktif	%	71,9	77,26	61,34	77,45	78,00
5	Persentase pertumbuhan UKM	%	6,5	1	5	7	5,2
6	Persentase UKM yang telah mengakses kredit usaha	%	9,9	0,6	0,6	1	1,2
7	Persentase usaha mikro yang berizin	%	10	4	3	5	7,3
8	Jumlah usaha mikro yang dibina	unit	230	220	370	680	1511
9	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	31	29	37	37,15	31,62
10	Persentase sumberdaya manusia koperasi yang terampil	%	37,47	38,46	41,28	41,58	42,41
11	Persentase koperasi yang dibina	%	46,84	52,04	53,89	57,83	50
12	Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina	%	60,41	62,13	63,08	57,83	50
13	persentasi koperasi/KSP yang diawasi	%	2	4	6	8,2	8,54
14	Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai	%	10	10	10	35,04	17,09
15	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	%	10	15	20	25	25,7
16	Persentase pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	%	10	15	20	25	25,7
17	% usaha mikro yang diberdayakan	%	2	2,5	3	8,5	4,42
18	% Usaha mikro yang dikembangkan	%	2	2,5	3	4,0	4,80
19	Persentase koperasi sehat	%	30	40	50	60,04	70,08
20	Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan	%	10	15	17	0	3
21	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	%	10	15	18	25	25,7

Sumberdata : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Kendal, 2021

12. Penanaman Modal.

Urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal.

Terkait jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Kendal, dilihat dari sisi tren memang fluktuatif, tahun 2017 mampu mencapai 354 investor, akan tetapi tahun 2018 turun menjadi 149 investor, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 903 investor. Peningkatan investor juga diikuti dengan nilai investasi yang masuk pada tahun 2020 sebesar 2,877 trilyun rupiah, maka menunjukkan bahwa nilai investasi setiap investor cukup signifikan.

Untuk mendukung kemudahan berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Kendal, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perijinan. Standar waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus perijinan usaha di Kabupaten Kendal adalah 7 hari kerja.

Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.37
Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor	5	5	5	13	8
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	173	354	149	561	903
3	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	dokumen	0	1	0	0	1
4	Kecepatan pelayanan perizinan	hari	7	7	7	7	7
5	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Triliyun)	Trilyun	1	4,1	1,331	8,341	3,146
6	Prosentase calon investor yang memiliki kepedminatan investasi	%	80	85	80	80	90
7	Prosentase permohonan perizinan dan Non perizinan yang memenuhi ketentuan	%	89	146	51	166	235
8	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,02	80,00	80,04	80,77	83,33
9	Prosentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola sisten informasi penanaman modal	%	80	90	90	95	98

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
10	Prosentase investor/pelaku usaha berijin efektif yang melaksanakan pelaporan penanaman modal	%	70	80	75	80	85

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kendal Tahun 2021

13. **Kepemudaan dan Olah Raga.**

Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan pemuda dan olah raga dapat dilihat dari indikator Indeks pembangunan pemuda daerah, Persentase OPD yang melakukan olahraga rutin setiap minggu, Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regioal/nasional/internasional dan persentase pembinaan organisasi kepramukaan daerah. Indikator kedepan terkait dengan kepemudaan dan olahraga Indeks Pembangunan Pemuda Daerah. Adapun capaian untuk indikator tersebut sebagai berikut.

Tabel 2.38
Capaian Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda yang dilatih pendidikan karakter	orang	NA	100	332	662	520
2	Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	57	145	211	268	21
3	Prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun	orang	60	61	124	86	17

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	nasional						
4	Organisasi Kepemudaan yang dibina	Buah	15	15	21	25	25
5	Jumlah wirausaha muda pemula	orang	200	25	122	135	100
6	Jumlah Klub Olah Raga	Klub	60	100	110	118	120
7	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	7	7	8	9	9
8	Organisasi Olahraga	Cabor	29	32	37	37	37
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	Na	Na	Na	15,11	15,11
10	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,11	0,19	0,31	0,43	0,44
11	Pembinaan gerakan pramuka kwartir cabang	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	%	35,48	76,76	76,47	62,86	37,21

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal, 2021

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, jumlah pemuda yang dilatih Pendidikan karakter mengalami angka fluktuatif yaitu pada tahun 2016 sebanyak 100 orang meningkat menjadi 662 orang pada tahun 2019 kemudian turun mejadi 460 orang pada tahun 2020. Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari 57 orang pada tahun 2016 turun menjadi 11 orang pada tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada jumlah wirausaha muda pemula menjadi 100 orang pada tahun 2020, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19.

14. Statistik.

Dalam UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang

lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus.

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kendal setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Kendal Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan Indeks Harga Konsumen serta Inflasi dan Penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten.

Selain itu juga masing-masing SKPD yang mengampu urusan-urusan strategis seperti Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan data profil masing-masing urusan yaitu profil pendidikan dan profil kesehatan.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan data statistik ekonomi kreatif	Ada/ Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan data statistik pariwisata	Ada/ Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
3	Ketersediaan data statistik e-commerce	Ada/ Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Buku Kendal Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku PDRB Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	% ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal	%	NA	NA	NA	95,25	95,42
7	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	%	NA	NA	NA	1,75	3,51

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, 2021

15. Persandian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi.

Saat ini Kabupaten Kendal memiliki 4 (empat) orang personil yang kompeten dalam bidang persandian. Idealnya pada setiap PD mempunyai 1 (satu) orang yang kompeten dalam persandian, sehingga pengelolaan persandian di Kabupaten Kendal bisa tertangani secara optimal.

Pelaksanaan persandian bertujuan untuk mengamankan informasi, namun sarana dan prasarana persandian yang diperlukan belum mencukupi. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	skor	Na	Na	Na	Na	Na
2	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	Na	89,63	104,1	100	100
3	% sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	%	Na	NA	Na	NA	22,84

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, 2021

16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangan bagi Kabupaten Kendal meliputi 5 sub urusan yaitu : kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah lokal, cagar budaya dan pengelolaan museum tingkat kabupaten. Cagar budaya merupakan warisan budaya perlu dijaga dan dilestarikan sebagai jatidiri bangsa. Upaya pelestarian cagar budaya merupakan usaha terus menerus yang bertujuan melstarikan dan mempertahankan nilai-nilai dan keberadaan cagar budaya melalui upaya pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan serta penyebarluasan kepada generasi muda dan masyarakat luas.

Kesenian dan warisan budaya dalam masyarakat baik yang bersifat benda maupun budaya tak benda harus dilestarikan menjadi jati diri masyarakat dan mempromosikan kepada masyarakat luas dalam wisata budaya. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kendal ditunjukkan dengan indikator persentase budaya lokal yang dilestarikan, jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan.

Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 1 cagar budaya pada tahun 2020. Budaya lokal yang dilestarikan antara lain dilakukan Promosi seni dan budaya melalui kegiatan festival yang dilakukan dengan persentase sebesar 75 % pada tahun 2020 dan banyaknya pembinaan pelaku seni budaya sebanyak 975 kelompok dan grup kesenian yang terdaftar sebanyak 676 kelompok. Perkembangan pembangunan kebudayaan dengan upaya memperkenalkan beragam seni dan budaya dari Kabupaten Kendal, diketahui sebagai berikut.

Tabel 2.41
Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	NA	NA	1	1	1
2	Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	50	NA	50	75	75
3	Persentase misi budaya yang dilestarikan	%	75	NA	84,62	85	85
4	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	kelompok	550	NA	575	975	975
5	Jumlah grup kesenian	kelompok	550	NA	644	676	676
6	Cakupan Kajian Seni	%	60	NA	73,33	75	75
7	Cakupan Fasilitasi Seni	%	50	NA	57,14	70	70
8	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	50	NA	77,43	85	85
9	Cakupan Organisasi seni	%	80	NA	60	80	80
10	Cakupan Gelar Seni dan budaya	%	80	NA	84	80	90
11	Persentase kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	%	0	0	0	0	0
12	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	0	0	0	0	0
13	Jumlah tim ahli cagar budaya	orang	NA	0	0	0	0
14	Persentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	%	NA	NA	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, 2021

17. Perpustakaan.

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan untuk indikator tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan peningkatan serta persentase perpustakaan dalam kondisi baik mencapai 65% di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 belum ada pustakawan yang terdpat di Kabupaten Kendal. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2014 – 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	28.952	31.114	35.154	38.071	38.071
2	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	18.195	16.440	18.340	20.315	3.891
3	Persentase perpustakaan dalam kondisi baik	%	na	57	60	65	65
4	Persentase perpustakaan aktif	%	52	54	56	58	60
5	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	NA	NA	NA	NA	40,37
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	NA	NA	NA	NA	7.7

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, 2021

18. Kearsipan.

Urusan kearsipan meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan. Capaian kinerja kearsipan selama lima tahun terakhir menunjukkan pengelolaan arsip dinamis dan statis menurun dari tahun 2016 sebanyak 7.600 berkas yang dikelola menjadi 2.990 berkas di tahun 2020. Sedangkan untuk prosentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara menunjukkan peningkatan dari 3,09% di tahun 2016 menjadi 4,54% di tahun 2018 dan tahun 2020 menurun menjadi 2,73%. Jumlah arsip yang dialihmediakan dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan fluktuasi dari 600 lembar menjadi 1.100 lembar pada tahun 2019 dan menurun tahun 2020 menjadi sebesar 500 lembar. Gambaran capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kendal Tahun 2016– 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengelolaan arsip dinamis dan statis	berkas	1.600	1.600	1.700	2.137	2.990
2	Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	%	NA	0,2	4,51	6,48	2,73
3	Jumlah arsip yang dialihmediakan	lembar	NA	600	700	1100	500
4	Jumlah Arsiparis/Tenaga teknis perpustakaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	NA	8	244	298	314
6	Cakupan sarana prasarana arsip yang terpelihara	%	NA	NA	26,19	26,19	26,19
7	Persentase arsip daerah yang di lestarikan dan diselamatkan	%	NA	NA	98,24	98,24	98,24

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
8	Persentase arsip yang dikelola secara baku	%	NA	NA	NA	NA	26
9	Persentase arsip statis yang dialihmediakan	%	NA	8,12	9,47	14,89	6,76
10	Persentase izin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan	%	NA	NA	NA	NA	50
11	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	48,22	75	54,42	100	75,75
12	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	NA	16,7	16,7	83.33	91.66

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, 2021

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten Kendal pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kinerja perikanan budidaya ditunjukkan dengan produksi perikanan budidaya yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020, dari sebanyak 23.116.793 kg pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 22.509.480 kg pada tahun 2020. Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem budidaya telah dilaksanakan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dengan cakupan per tahun antara 10-20 kelompok yang diberdayakan. Kinerja produksi perikanan tangkap menunjukkan peningkatan yang baik, dari tahun 2016 sebesar 3.086.445 Kg meningkat menjadi sebesar 3.801.077 kg pada tahun 2020. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap, pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan pembinaan dengan fasilitasi bagi kelompok nelayan dengan cakupan per tahun antara 10 – 20 kelompok nelayan.

Rata-rata tingkat konsumsi ikan masyarakat menunjukkan

peningkatan dari sebesar 19,37 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi sebanyak 30,92 kg/kapita/tahun pada tahun 2020. Hal ini masih lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah (2020) sebesar 33 Kg/ per kapota/ tahun. Upaya peningkatan konsumsi ikan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan nilai gizi ikan dan daya beli masyarakat serta “budaya makan ikan” belum menyebar ke selauruh lapisan masyarakat. Secara rinci Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan budidaya	kg	23.116.793	24.142.548	25.493.410	26.547.940	22.509.480
2	Produksi perikanan tangkap	Kg	3.086.445	3.326.763	3.152.489	3.543.970	3.801.077
3	Persentase Peningkatan Produksi Ikan	%	9,10	4,83	4,28	5,05	(12,57)
4	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok / tahun	10	5	10	20	12
5	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok / tahun	10	20	10	20	13
6	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam kondisi baik	%	20	40	70	80	100
7	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kap/ tahun	19,37	24,69	24,25	26,41	30,92

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2021

Beautiful Land, Good Business

2. Pariwisata.

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Obyek wisata di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun

2016-2020. Pada tahun 2016 sebanyak 9 obyek wisata unggulan, tahun 2020 meningkat menjadi 16 obyek wisata. Obyek wisata di Kabupaten Kendal yang paling banyak pengunjungnya adalah Pantai Sendang Sikucing dan Air Terjun Curug Sewu.

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Kendal, tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dari 98,7% pada tahun 2016 meningkat menjadi 100% pada tahun 2020. Sedangkan untuk pemandu wisata yang bersertifikasi di Kabupaten Kendal meningkat dari sebesar 38,5% pada tahun 2016 menjadi sebesar 90% pada tahun 2020.

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kendal juga mengalami fluktuatif yang cenderung meningkat dari tahun 2016-2020. Tahun 2016 sebanyak 239.899 orang, tahun 2019 meningkat menjadi 1.250.288 orang, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 459.342 orang, hal ini dikarenakan pandemic covid-19 yang mengharus obyek wisata ditutup sementara (PSBB). Menurunnya kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kendal. Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2016 sebesar 0,51%, menurun menjadi 0,036% pada tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Kendal juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi guna mengembangkan ide dan gambaran untuk perkembangan pariwisata Kabupaten Kendal.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Obyek wisata unggulan	OW	9	12	15	16	16
2	Jumlah Obyek destinasi yang dibangun/ dikembangkan	OW	3	3	3	3	3
3	Jumlah kunjungan wisata	Orang	239.899	1.126.000	1.182.302	1.250.288	459.342
4	Persentase usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi/ memenuhi standar usaha pariwisata	%	61,2	60,2	63,9	63,9	63,9
5	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	93,7	93,7	100	100	100
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,51	0,5	0,53	0,53	0,036

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	penyediaan prasarana (zona/ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Kab. Kendal	Unit	1	1	1	1	1
8	Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/ memenuhi standar kompetensi	%	34,8%	39,5%	61,8%	74,31%	81,21%
9	persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	5	5	5	5,75	-63,3
10	PAD sektor pariwisata	Rp	1.345.315.000	1.654.429.400	1.767.831.450	1.735.993.920	646.413.038
11	% Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	Na	6,25	25	18,75	18,75
12	% pelaku ekraf yang dikembangkan	%	Na	15,02	60,06	45,05	45,05
13	Persentase tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf yang tersertifikasi	%	0,47	1,12	3,63	4,75	3,73

Sumber data : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab Kendal, 2021

3. Pertanian.

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Masyarakat Kabupaten Kendal sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani (dalam arti luas) yang meliputi usaha tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan urusan kewenangan pertanian Kabupaten Kendal mencakup enam (6) sub urusan yaitu : Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Produksi tanaman pangan terutama diarahkan pada tanaman padi, jagung dan kedelai. Dari pertanian tanaman pangan produksi padi mengalami penurunan dari sebesar 260.888 ton pada tahun 2016 menjadi 220.532 ton pada tahun 2020, namun sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Kendal salah satu lumbung beras di Jawa Tengah (surplus).

Produktivitas padi di Kabupaten Kendal pada tahun 2016 sebesar 55,34% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 58,82% dan pada tahun 2020 produktivitas padi mencapai 54,25%.

Produksi jagung bersifat fluktuatif, pada tahun 2015 produksi jagung sebesar 209.0032 ton meningkat menjadi 222.922 ton pada tahun 2020 dan produksi kedelai sangat sedikit, dengan kecenderungan menurun dari sebanyak 3.032 ton tahun 2015 menjadi sebesar 108 ton tahun 2020, karena faktor iklim dan keterbatasan lahan yang cocok untuk dapat ditanami.

Produksi tanaman hortikultura terlihat dari Produksi Bawang merah, selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari sebanyak 320.936 kuintal menjadi 177.360 kuintal. Produksi cabe mengalami peningkatan dari sebanyak 41.585 kuintal pada tahun 2016 menjadi sebanyak 48.027 kwintal pada tahun 2020.

Sementara itu produksi perkebunan ditunjukkan dengan produksi tebu dengan kinerja yang cenderung menurun dari sebanyak 19.169,80 kuintal pada tahun 2016 menjadi 14.816,2 kuintal pada tahun 2020. Komoditas lainnya yang meningkat yaitu tembakau, kopi, cengkeh, karet. Sementara itu beberapa komoditas mengalami penurunan produksi, seperti kelapa dan kakao.

Pada bidang peternakan, populasi ternak sapi potong di Kabupaten Kendal mengalami kenaikan dari sebanyak 21.440 ekor pada tahun 2015 menjadi 22.258 ekor pada tahun 2020. Kenaikan juga terjadi pada populasi domba dari sebanyak 29.839 ekor pada tahun 2015 menjadi 30.002 ekor pada tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada populasi kambing, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Populasi kambing cenderung menunjukkan peningkatan dari sebanyak 36.718 ekor pada tahun 2015 menjadi 43.857 pada tahun 2020. Populasi ayam ras pedaging mengalami peningkatan dari sebanyak 8.587.800 ekor pada tahun 2016 menjadi 15.290.110 ekor pada tahun 2020. Populasi Ayam ras petelur meningkat dari sebanyak 3.538.300 ekor pada tahun 2015 menjadi 5.451.491 ekor pada tahun 2020. Berkaitan dengan kesehatan hewan, angka morbiditas (kesakitan) hewan menunjukkan penurunan dari sebanyak 8.915 ekor pada tahun 2015 menjadi 1.916 ekor pada tahun 2020.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, produksi daging sapi, kambing, domba dan ayam pedaging cenderung meningkat, begitu juga untuk produksi telur. Jumlah ternak sapi yang dipotong di RPH menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebanyak 1.960 ekor pada

tahun 2016 menjadi 2.207 ekor pada tahun 2020.

Secara rinci kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi padi	Ton	260.888	241.924	239.401	236.378	220.532
2.	Produktivitas Padi	Ku/Ha	55,34	52,88	54,56	58,82	54,25
3.	Produksi Jagung	Ton	225.505	239.122	199.199	215.866	222.922
4.	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	66,75	67,87	68,83	61,73	68,19
5.	Produksi Kedelai	Ton	1.340	1.945	2.280	1.451	108
6.	Produksi Bawang merah	Kwintal	320.936	318.863	184.334	139.341	177.360
7.	Produktivitas Bawang Merah	Ku/Ha	96,35	92,59	93,05	93,27	93,35
8.	Produksi Cabe	Kwintal	41.585	59.964	69.331	45.330	48.027
9.	Produktivitas Cabe	Ku/Ha	63,98	70,80	66,54	67,76	69,00
10.	Produksi Tebu	Kwintal	19.169,80	20.671,80	15.669,30	17.669,74	14.816,2
11.	Produksi Tembakau	Ton	806,13	1.038,26	1.331,30	2807,09	3.466,7
12.	Produksi Kopi	Ton	1.307,07	1.206,50	1.266,30	1540,27	1.541,24
13.	Produktivitas Kopi	Ku/Ha	5,09	5,21	5,48	6,86	7,34
14.	Produksi Cengkeh	Ton	158,09	252,87	242,30	276,27	279,16
15.	Produksi Karet	Ton	36,26	165,04	213,40	213,61	197,50
16.	Produksi Kelapa	Ton	598,76	478,34	560,79	602,74	549,77
17.	Produksi Kakao	Ton	198,54	153,92	156,60	156,76	140,50
18.	Indeks Pertanaman	%	186,53	188,81	189,83	175,51	173,43
19.	Persentase Lahan Sawah Untuk Pertanian	%	25,93	25,02	24,00	24	24,03
20.	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	NA	NA	103,48	103,21	101,84
21.	Populasi Sapi potong	ekor	20.523	20.598	20.804	21.364	22.258
22.	Populasi Kambing	ekor	37.776	37.645	37.920	45.594	43.857
23.	Populasi Domba	ekor	30.842	30.703	30.836	31.628	30.002
24.	Populasi Ayam ras pedaging	ekor	8.587.800	8.321.500	8.196.500	10.912.480	15.290.110
25.	Populasi Ayam ras petelur	ekor	3.799.915	4.088.100	4.198.300	5.383.371	5.451.491
26.	Produksi Daging sapi	kg	640.543	734.949	774.761	854.440,2	908.945,20
27.	Produksi Daging kambing	kg	108.801	115.412	112.767	214.026,8	147.421,83
28.	Produksi Daging domba	kg	16.393	15.633	15.306	19.402,82	27.040,71
29.	Produksi Daging ayam ras pedaging	kg	5.916.994	5.249.052	5.896.429	6.226.715	13.364.400
30.	Produksi telur	kg	36.204.920	34.474.321	38.556.141	44.952.224	46.739.813,12
31.	Jumlah ternak sapi yang dipotong di RPH	ekor	1.960	2.268	1.713	2.527	2.207
32.	Angka morbiditas hewan	ekor	7.900	3.996	2.334	2.916	1.916
33.	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	NA	NA	3,05	5,04	-1,97
34.	Produksi Durian	kwintal	19.369	33.672	49.740	56.855	37.414
35.	Persentase luasan tanaman pangan yang	%	86,96	89,53	91,11	92,56	94,46

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	menggunakan varietas benih unggul						
36.	Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	%	66,27	41,33	23,14	62,51	70,73
37.	Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	%	69	69,29	69,02	68,93	69,17
38.	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666
39.	Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Ha	2.000	1.170	2.085	1.314	985
40.	Angka morbiditas ternak ruminansia	ekor	7.900	1.470	1.334	2.916	1.916
41.	Persentase luas lahan yang memperoleh pengendalian hama penyakit	%	0,62	0,63	0,94	0,95	0,52
42.	Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif	%	76	78	79	80	82

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, 2021

4. Energi Sumber Daya Mineral

Kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya terkait dengan pengelolaan energi panas bumi. Sampai dengan tahun 2020 energi panas bumi yang termanfaatkan sebanyak 1 unit.

Tabel 2.47
Kinerja Urusan ESDM Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah energi panas bumi yang termanfaatkan	unit	1	1	1	1	1

Sumberdata : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kendal, 2021

5. Perdagangan.

Pada urusan perdagangan, pemerintah daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standarisasi dan perlindungan konsumen.

Pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yaitu pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan, saat ini ditahun 2019 Kabupaten Kendal hanya memiliki 24,99% pasar yang telah memenuhi persyaratan. Selebihnya, pasar rakyat masih belum memenuhi persyaratan. Untuk penataan PKL masih relatif kecil yaitu baru sebesar 20%. Pelaksanaan kewenangan dalam stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, di Kabupaten Kendal telah berjalan dengan baik, yaitu ditahun 2018 sudah mencapai 90%. Sementara itu dari sisi ekspor perdagangan, tercatat pada tahun 2019 sebesar 47,27%, meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyelenggaraan kewenangan pada standardisasi perlindungan konsumen, pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan penteraan terhadap alat timbang. Pada tahun 2020, UTP (Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya) yang ditera mencapai 20,47%.

Pada Urusan Perdagangan, capaian indikator kinerja dari tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase UTP yang ditera	%	0	3,12	90	96,50	20,47
2	Perkembangan nilai ekspor	%	72,49	15,8	13,24	47,27	12,81
3	Cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang	%	100	300	100	230,66	100
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	75	131,25	90	114,28	28,57
5	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	0	0	0	8,33	24,99	8,33
6	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	0	0	20	20	20
7	Persentase pasar yang layak fungsi	%	7,69	15,38	23,07	30,76	38,46
8	Persentase kebutuhan msyarakat terhadap barang pokok dan penting	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah jenis produk unggulan ekspor	jenis	21	22	23	24	25
10	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelaksanaan promosi produk dalam negeri	orang	Na	24.000	24.250	24.500	24.750

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, 2021

6. Perindustrian.

Urusan perindustrian pada lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Kondisi industri kecil dan menengah yang berkembang di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 tumbuh sebesar 4,01%. Pertumbuhannya cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada di bawah 1%. Pada kelompok industri kecil, sampai dengan tahun 2020 yang sudah memiliki sertifikasi halal sebesar 0,36% dan yang sudah memiliki izin PIRT sebesar 16,47%. Hasil penilaian kelayakan produksi, industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi di Kabupaten Kendal masih sangat kecil, hanya sebesar 2,64% pada tahun 2020. Dengan kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB sebesar 41,9% pda tahun 2020, maka perlu dukungan yang kuat dalam memperbaiki kualitas industri, baik dari sisi perizinan maupun kelayakan industri.

Capaian kinerja pada urusan perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	0,44	0,55	1,62	2,77	4,01
2	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	%	12,58	13,24	13,24	15,12	16,47
3	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	0,33	0,33	0,45	0,36	0,36
4	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	0,73	0,66	1,05	1,98	2,64
5	Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB	%	40,29	41,45	41,45	41,8	41,9
6	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	%	0,5	0,25	0,25	2,5	25
7	Persentase sentra indsutri yang dikembangkan	%	10	10	10	10	25
8	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	10	10	10	10	20
9	Persentase IKM yang diusulkan mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI)	%	0,5	10	10	10	10
10	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	1,2	1,4	1,5	2	2,5

Sumber : Dinas Perindustrian , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal, 2021

7. **Urusan Transmigrasi**

Urusan Transmigrasi pada lingkup pemerintah daerah hanya dibatasi pada lingkup penataan pesebaran yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2016, prosentase kawasan transmigrasi teridentifikasi 100% dihitung dari lokasi transmigrasi yang ditawarkan. Pada tahun 2020 prosentase kawasan transmigrasi tidak teridentifikasi dikarenakan tidak ada lokasi sasaran calon transmigran.

Capaian kinerja pada urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	% kawasan transmigrasi teridentifikasi	%	100	50	13	20	0
2	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	%	100	100	125	125	0
3	Jumlah kuota transmigran	KK	10	3	4	6	0

Sumber Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal tahun 2021

2.3.4 **Urusan Penunjang Pemerintah**

1. **Perencanaan.**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan penunjang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada tahun 2020, sebanyak 74,5% usulan berasal dari Musrenbang desa/kelurahan diakomodir dalam RPJMD. Capaian RPJMD sesuai sasaran yang ditetapkan sampai dengan 2020 sebesar 75%. Sedangkan aspirasi DPRD telah diakomodir dalam perencanaan sampai dengan 2020 mencapai sebesar 70,14%. Gambaran capaian kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.51
Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	40	57,45	34,17	57,71	74,5
2	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD	%	50	NA	71,3	75	75
3	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	Na	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100	100	100	100	100
5	Persentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD	%	40	42,66	58,9	62,35	70,14
6	Jumlah MOU kerjasama perencanaan pembangunan daerah	Dok	-	1	0	0	0
7	Nilai SAKIP	Nilai	48	55	61,39	64,55	66,31
8	Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan	Persen	50	NA	72	75	62,5

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Kendal, 2021

2. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) menjadi urusan penunjang yang erat kaitannya dengan peningkatan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang dapat mendorong daya saing daerah dilaksanakan melalui kegiatan riset, pengkajian, review dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya, penelitian perekonomian, penelitian infrastruktur dan pengembangan wilayah; kegiatan penelitian perekayasaan, penerapan, dan pelayanan inovasi dan teknologi. Dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah Kabupaten Kendal telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2016 tentang SIDa Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020 dan prestasi Kabupaten Kendal sebagai Kabupaten Inovatif Nomor 2 se Indonesia dari Kemenrisktek pada tahun 2020 sebagai apresiasi bagi pengembangan inovasi di Kabupaten Kendal. Capaian dalam urusan penelitian dan pengembangan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan RKPD.

Tabel 2.52
Capaian Pembangunan Urusan Penunjang
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks inovasi daerah	indeks	NA	NA	240	470	4.239
2	Indeks Daya Saing Daerah	%	NA	NA	2,666	7,7997	3,7486
3	Persentase produk inovasi/kelitbangan yang mendukung arah kebijakan pembangunan	%	NA	57,14	80,95	93,1	100

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Kendal, 2021

3. Keuangan.

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan pendapatan daerah, kinerja dapat dilihat dari

Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Kendal berkisar antara 27% - 39% dalam kurun waktu tahun 2016-2020, menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Persentase Pajak Daerah terhadap PAD berkisar antara 27-36%. Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja dapat terlihat dari indikator Persentase Realisasi Anggaran terjadi penurunan dari sebesar 84% pada tahun 2016 menjadi sebesar 79,4% tahun 2020 yang disebabkan Pandemi Covid-19.

Secara umum kinerja pengelolaan keuangan dan manajemen Barang Milik Daerah (BMD) diketahui dari Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan yang baik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Status tersebut didukung dengan capaian indikator persentase dokumen penganggaran tepat waktu yang meningkat dari 85% menjadi 90%, persentase laporan keuangan tepat waktu yang mengalami peningkatan dari 85% menjadi 90%, dan persentase aset daerah yang terintegrasi menunjukkan peningkatan yang baik sebesar 100% pada tahun 2020. Secara rinci kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53
Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase aset daerah yang ter-registrasi	%	21	30	35	100	100
3.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah	%	16	23	16	19,67	16,68
4.	Persentase Pajak terhadap PAD	%	32	27	36	36,5	39
5.	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	%	90	90	90	100	100
6.	Persentase Realisasi Anggaran	%	88	88	92	94,04	79,46
7.	Persentase Dokumen penganggaran tepat Waktu	%	90	90	90	95	95
8.	% konsistensi program/kegiatan APBD sesuai dengan RKPD	%	90	90	90	90	90
9.	% kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	%	95	95	95	95	95
10.	% Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)	%	100	100	100	100	100
11.	% OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	%	100	100	100	100	100
12.	% sistem keuangan yang terintegrasi	%	-	75	100	100	100
13.	% aset daerah yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100
14.	% Pertumbuhan WP Baru	%	1.08	0.31	-0.27	0.56	1.07
15.	% Pertumbuhan Pajak Pertahun	%	1	0	26	34	-3
16.	Nilai IKM	%	-	-	-	86.94	91.94

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
17.	% Realisasi Pajak Daerah	%	85.16	87.30	86.02	87.67	82.33
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	NA	NA	NA	NA	NA
19.	Kapasitas Fiskal Daerah	skor	NA	NA	NA	NA	0,733
20.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-10,98	-10,48	-8,41	-8,38	-9,53
21.	Deviasi realisasi PAD terhadap terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0,68	2,31	0,64	-15,03	6,92
22.	Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	18,86	24,40	25,40	27,15	22,69
23.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-10,98	-10,48	-8,41	-8,38	-9,53

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2021

4. **Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang yang mengelola ASN. Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepagawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pembinaan disiplin ASN, kesejahteraan ASN, pemberhentian ASN dan pensiun. Urusan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan aspek pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan manajerial.

Kinerja urusan penunjang kepegawaian adalah persentase pegawai mengikuti Diklat / BinteK yang difasilitasi BKPP Kabupaten Kendal pada tahun berjalan, persentase struktur jabatan yang terisi, persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik dan jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi. Kinerja urusan penunjang pendidikan dan pelatihan adalah persentase pegawai mengikuti Diklat / BinteK yang difasilitasi BKPP Kabupaten Kendal pada tahun berjalan.

Pada tahun 2016 jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang difasilitasi oleh BKPP sebesar 100% pada tahun 2018 meningkat menjadi 122,79%, artinya pada tahun 2018 pegawai yang mengikuti diklat ada yang dua kali dalam tahun berjalan. IPA tahun 2019 pengukuran dilakukan oleh BKN melalui SAPK.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Na	77,36	78,92	27,19	75,28

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.	Persentase ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKPP Kab. Kendal pada tahun berjalan	%	100	100	122,79	100	100
3.	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	83,07	87	86,28	92,45	88,7
4.	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	64,88	59,14	58,40	60,85	59,89
5.	Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	Jenis pelayanan	8	10	12	15	16
6.	Persentase ASN dengan penilaian prestasi kerja baik	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang ter update	%	90,15	89,59	94,25	96,43	96,43
8.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	129,36	150,59	228,28	253,50	207,23
9.	Tingkat Kedisiplinan ASN	%	99,8	99,832	99,810	99,689	97,375
10.	Persentase ASN menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu	%	90	90	92	94	95,78
11.	Persentase jabatan struktural yang dievaluasi	%	NA	NA	NA	96,68	NA
12.	Persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan	%	NA	NA	NA	NA	86,53
13.	Persentase struktur jabatan ASN yang terisi	%	83,07	87	86,28	92,45	88,7
14.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,76	5,04	7,76	6,69	8,08
15.	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi	%	100	100	100	100	100
16.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	NA	NA	NA	16,6	23,21
17.	Nilai Dimensi Disiplin	skor	NA	NA	NA	4,95	4,93
18.	Nilai Dimensi Kinerja	skor	NA	NA	NA	0,59	25,03
19.	Nilai Dimensi Kualifikasi	skor	NA	NA	NA	12,81	12,7
20.	Dimensi Kompetensi	skor	NA	NA	NA	8,83	32,62

Sumber : BKPP Kabupaten Kendal, 2021

5. Pengawasan.

Fungsi pengawasan internal pemerintahan Kabupaten Kendal memiliki peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara responsive dan akuntabel. Melalui pengawasan internal pemerintah daerah diharapkan tata kelola pelayanan publik dan pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi.

Kinerja fungsi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kendal yang kinerjanya diketahui berdasarkan indikator, sebagai berikut : tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Rasio

temuan pengawas dari rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Rata-rata nilai akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi berdasarkan LKjIP.

Pada tahun 2016 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih level 1 (satu). Pada tahun 2017 Tingkat Maturitas SPIP meningkat menjadi level 2, dan pada tahun 2020 menjadi level 3. Selain itu indikator persentase Aparatur Sipil Negara yang melaporkan harta kekayaannya meningkat dari kurun waktu 2016 – 2020. Pada tahun 2016 ASN yang melaporkan harta kekayaannya hanya sebesar 39%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 90% dan menjadi 100% pada tahun 2020.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	70	75	80	81,51	81,51
2	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	39	80	90	99,25	100
3	Persentase aduan masyarakat atas layanan public yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100	100	100	100	100
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Huruf	C	CC	CC	B	BB
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	2	3	3	3
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	2	2
7	Persentase Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	84,31	100	98,6	91,83	94,74
8	Jumlah temuan penyimpangan pembangunan jumlah temuan penyimpangan pembangunan	kasus	1	5	1	7	7
9	Persentase Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	100	100	100	100	100
10	Persentase Capaian IKU Inspektorat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kendal, 2021

6. Kewilayahan

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kecamatan sebagai salah Perangkat Daerah memerlukan adanya IKM ini karena adanya fungsi pelayanan publik secara langsung. Tujuan dari pelaksanaan survey IKM ini adalah sebagai tolak ukur/evaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 2.56
Kategori Penilaian Skor IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Adapun gambaran capaian IKM Kecamatan di Kabupaten Kendal periode 2016-2020 menunjukkan dari 20 kecamatan yang ada sebanyak 10 kecamatan (50%) baru melakukan survey IKM pada tahun 2018. Pada tahun 2020, Kecamatan yang memiliki skor IKM tertinggi adalah Kecamatan Limbangan (92,53), sedangkan kecamatan dengan skor IKM terendah adalah Kecamatan Plantungan (76,05). Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian IKM Kecamatan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Capaian IKM Kecamatan di Kabupaten Kendal tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	Skor	NA	NA	76,05	76,05	76,05
2	Sukorejo	Skor	73,57	NA	83,11	77,88	82,49
3	Pageruyung	Skor	NA	NA	82,34	82,34	82,34
4	Patean	Skor	80,23	84,86	83,71	83,71	83,71
5	Singorojo	Skor	75,22	75,5	75,68	75,68	91,19
6	Limbangan	Skor	75,22	75,5	75,68	75,68	92,83
7	Boja	Skor	NA	NA	84,04	84,04	84,04
8	Kaliwungu	Skor	NA	NA	89,56	89,56	80
9	Kaliwungu Selatan	Skor	83,98	84,02	84,1	84,1	84,1
10	Brangsong	Skor	NA	NA	76,09	76,09	76,09
11	Pegandon	Skor	NA	NA	82,41	82,41	82,9
12	Ngampel	Skor	80,73	80,92	81,16	82,60	88,83
13	Gemuh	Skor	NA	NA	86,75	86,75	86,75
14	Ringinarum	%	80	79	80	80	80
15	Weleri	Skor	NA	NA	86,92	86,92	86,92
16	Rowosari	Skor	NA	NA	81,68	81,68	81,68

No	Kecamatan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
17	Kangkung	Skor	NA	NA	84,25	84,25	84,25
18	Cepiring	%	NA	NA	79,34	79,34	83
19	Patebon	Skor	79	79	81	81	81
20	Kendal	%	82	82	84	84	84

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

b. Persentase Rata Rata Realisasi Dana Desa

Sejak disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa mendapatkan kucuran dana yang dianggarkan dari APBN sebesar sebesar Rp1 miliar. Tahun 2015, merupakan awal kali dikucurkan dana desa. Penggunaan dana desa sesuai dengan Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014 diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan prioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari 20 kecamatan yang ada menunjukkan rata-rata realisasi dana desa sebesar 100% sebanyak 8 kecamatan, capaian realisasi dana desa antara 90%-99% sebanyak 9 kecamatan dan sisanya sebanyak 3 kecamatan capaian rata-rata realisasinya rendah berkisar antara 7,08% - 50,65% yaitu kecamatan Pageruyung, Plantungan, dan Kecamatan Boja.

Tabel 2.58
Rata-Rata realisasi Dana Desa Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Capaian Kinerja Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	100	100	100	100	99,02
2	Sukorejo	92	100	100	100	100
3	Pageruyung	7,08	7,03	7,08	7,08	7,08
4	Patean	100	100	100	100	100
5	Singorojo	100	100	97,86	97,86	97,86
6	Limbangan	100	100	97,86	97,86	97,86
7	Boja	51,51	54,25	50,65	96,04	99,99
8	Kaliwungu	90	90	90	90	90
9	Kaliwungu Selatan	100	100	100	100	100
10	Brangsong	90	90	90	90	90
11	Pegandon	94	95	96	97	96
12	Ngampel	100	100	100	100	100
13	Gemuh	90	90	90	90	90
14	Ringinarum	100	100	99	99	99
15	Weleri	99,92	98,76	97,08	97,08	100
16	Rowosari	100	100	100	100	100
17	Kangkung	100	100	100	100	100

No	Kecamatan	Capaian Kinerja Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
18	Cepiring	98,52	98,23	99,21	99,21	99,21
19	Patebon	100	99	98	98	98

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

c. Persentase Anggaran Fisik Seluruh Desa

Penggunaan dana di tingkat desa untuk pembangunan fisik dan fisik di wilayah Kabupaten Kendal menunjukkan adanya trend menurun dalam kurun waktu antara tahun 2014-2018. Penggunaan dana untuk pembangunan dari 20 kecamatan sebanyak 9 kecamatan masih menunjukkan adanya proporsi yang lebih besar untuk pembangunan fisik, bahkan di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kota Kendal 100% digunakan untuk pembangunan fisik. Untuk kecamatan lainnya sudah menunjukkan adanya alokasi dana untuk pembangunan non fisik semakin bertambah setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya pemanfaatan anggaran untuk pembangunan fisik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Alokasi Anggaran Fisik di Tingkat Desa Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Capaian Kinerja Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	100	97,84	97,87	94,52	33,12
2	Sukorejo	62,5	62,92	53,25	53,25	53,25
3	Pageruyung	65,4	67,1	66,22	66,22	66,22
4	Patean	74,89	78,31	77,42	77,42	77,42
5	Singorojo	32,00	32,50	33,50	33,50	33,50
6	Limbangan	32,00	32,50	33,50	33,50	33,50
7	Boja	70	70	70	91,52	45
8	Kaliwungu	100	100	100	100	100
9	Kaliwungu Selatan	66	68	64	67	38
10	Brangsong	70	70	70	70	70
11	Pegandon	87	86	85	81	56
12	Ngampel	62,59	60,34	54,76	69,62	72,49
13	Gemuh	60	60	60	60	60
14	Ringinarum	70	75	75	75	75
15	Weleri	62,28	63,87	62,87	62,87	98,18
16	Rowosari	67,19	61,53	60,01	60,01	60,01
17	Kangkung	40	30	100	100	100
18	Cepiring	99,13	97,39	95,77	95,77	95,77
19	Patebon	78	80	75	75	75
20	Kendal	100	100	100	100	100

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

d. Persentase Kegiatan Mengakomodir Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan/desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan/desa di kecamatan yang bersangkutan. Adapun tujuan daripada musrenbang kecamatan adalah memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat kelurahan (dan atau lintas kelurahan) yang menjadi skala pelayanan atau kewenangan kecamatan dan lintas kecamatan untuk satu tahun mendatang; Merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum-forum SKPD dan Musrenbang kabupaten. Serta meenetapkan delegasi kecamatan untuk mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatanyang merupakan kegiatan kecamatan.

Dari pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang dilakukan di Kabupaten Kendal menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan rata-rata sudah banyak yang mengakomodir dari musrenbang tersebut. Data tahun 2016-2020menunjukkan adanya peningkatan hasil musrenbang yang diakomodir di tingkat kecamatan. Secara lengkap gambaran capaian hasil musrenbang yang diakomodir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Hasil Musrenbang yang diakomodir di tingkat Kecamatan
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Capaian Kinerja Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	65	65	65	65	75
2	Sukorejo	28	10	7,5	12,5	12,2
3	Pageruyung	1,7	1,3	1,4	1,4	1,4
4	Patean	77,21	79,44	76,59	76,59	76,59
5	Singorojo	60	60	60	60	60
6	Limbangan	60	60	60	60	60
7	Boja	77,21	79,44	76,59	37,84	66,67
8	Kaliwungu	80	85	80	80	80
9	Kaliwungu Selatan	42,18	45,77	52,89	52,89	52,89
10	Brangsong	75	75	75	75	75
11	Pegandon	80	82	81	83	70
12	Ngampel	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
13	Gemuh	80	80	80	80	80
14	Ringinarum	75	75	75	75	75
15	Weleri	50,25	62,30	60,15	47,40	50,65
16	Rowosari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kecamatan	Capaian Kinerja Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
17	Kangkung	70	77	80	80	80
18	Cepiring	NA	NA	9,66	9,66	9,66
19	Patebon	78	80	75	75	75
20	Kendal	80	85	85	87	88

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

e. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kecamatan yaitu Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Secara lengkap gambaran capaian pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagai berikut:

Tabel 2.61
Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang

No	Kecamatan	Capaian Kinerja Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	100	100	100	100	100
2	Sukorejo	100	100	100	100	100
3	Pageruyung	100	100	100	100	100
4	Patean	100	100	100	100	100
5	Singorojo	100	100	100	100	100
6	Limbangan	100	100	100	100	100
7	Boja	100	100	100	100	100
8	Kaliwungu	100	100	100	100	100
9	Kaliwungu Selatan	100	100	100	100	100
10	Brangsong	100	100	100	100	100
11	Pegandon	100	100	100	100	100
12	Ngampel	100	100	100	100	100
13	Gemuh	100	100	100	100	100
14	Ringinarum	100	100	100	100	100
15	Weleri	100	100	100	100	100
16	Rowosari	100	100	100	100	100
17	Kangkung	100	100	100	100	100
18	Cepiring	100	100	100	100	100
19	Patebon	100	100	100	100	100
20	Kendal	100	100	100	100	100

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

f. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP berguna untuk mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 - 85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30. Adapun gambaran nilai SAKIP kecamatan di Kabupaten Kendal pada tahun 2016-2020 ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Nilai Sakip Kecamatan Kabupaten Kendal tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Capaian Kinerja Tahun (skor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	NA	NA	60,86	60,86	60,86
2	Sukorejo	NA	NA	61,67	61,67	61,67
3	Pageruyung	C	CC	61,59	61,59	61,59
4	Patean	0	0	62,4	62,4	62,4
5	Singorojo	NA	NA	63,97	63,97	63,97
6	Limbangan	NA	NA	63,97	63,97	63,97
7	Boja	NA	NA	61,73	61,73	61,73
8	Kaliwungu	NA	NA	61,54	61,54	61
9	Kaliwungu Selatan	62,5	62,51	62,69	62,69	62,69
10	Brangsong	NA	NA	63,77	63,77	63,77
11	Pegandon	NA	NA	64,05	64,05	64,09
12	Ngampel	61,46	61,53	61,62	61,73	61,73
13	Gemuh	NA	NA	61,04	61,04	61,04
14	Ringinarum	63	62	63,15	63,15	63,15
15	Weleri	NA	NA	61,91	61,91	61,91
16	Rowosari	NA	NA	60,20	60,20	60,20
17	Kangkung	NA	NA	60,33	60,33	60,33
18	Cepiring	NA	NA	63,69	63,69	61,39
19	Patebon	62	60	60,89	60,89	60,89
20	Kendal	95	80	61,46	61,46	61,46

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2019.

7. Sekretariat Daerah

Sekeretariat daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Sekretaris Daerah sebagaimana mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kinerja Sekretariat Daerah ditunjukkan berdasarkan masing-masing bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut capaian kinerja Sekretariat daerah selengkapnya.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemenuhan kebutuhan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga	%	100	100	100	100	100
4	Persentas OPD yang difasilitasi dlam implementasi RB	%	100	100	100	100	100
5	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan pimpinan daerah atau tamu daerah	%	100	100	100	100	100
6	Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase kebijakan kesra yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
8	Persentase Kelurahan dan kecamatan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100
9	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
10	persentase Kerjasama antar Daerah yang di implementasikan	%	100	100	100	100	100
11	Persentase BUMD yang difaslitasi	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang tepat waktu, mandiri, profesional.	%	100	100	100	100	100
13	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan laporanevaluasi yang tersusun	%	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretarian Daerah Kabupaten Kendal, Tahun 2021

8. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsi Sekretariat DPRD adalah : (1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, (2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, (3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan (4) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Kendal terdiri dari 10 indikator, adapun indikator yang harus mendapatkan perhatian yaitu Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar, Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan OPD yang Memenuhi Standar. Berikut capaian kinerja Sekretariat daerah selengkapnya.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Dewan
Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase penurunan pelanggaran disiplin apartur dalam berpakaian dinas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
5	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan OPD yang Memenuhi Standar	laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6	Rata-rata nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	87,75	87,00	87,25	87,25
7	Persentase arsip dinamis dan statis yang diselamatkan	prosen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8	Jumlah Pembahasan Raperda,Hearing,Rapat-Rapat DPRD, Reses dan Kunjungan Kerja	perda	16,00	17,00	17,00	18,00	18,00
9	Jumlah propemperda yang disetujui	kajian	1,00	2,00	6,00	6,00	6,00
10	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan daerah/tamu Pemda	prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, Thun 2021

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Kendal diselenggarakan melalui fasilitasi bagi partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya kemasyarakatan yang lain dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah dan persatuan-keatuan bangsa di daerah agar beragam kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dapat terselenggara dengan baik. Masyarakat di Kabupaten Kendal selama ini menjunjung tinggi rasa solidaritas, persaudaraan antar agama serta toleran dalam masyarakat. Demikian pula dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg dan Pemilukada baik Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (2018) maupun Pemilihan Bupati yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 pada masa Pandemi – Covid 19 dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel, tidak menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat.

Dalam pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, terutama lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Sosial Kemasyarakatan belum optimal, hal ini antara lain disebabkan lembaga tidak selalu melengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan domisili secara lengkap. Upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan cukup baik, melalui pemahaman, pembinaan serta penyuluhan terhadap para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan / pelajar, ormas, LSM dan masyarakat sebanyak 3.379 orang. Untuk perkembangan capaian kinerja indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	2.635	3.105	3.200	8.652	3.379
2.	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	kelompok	5	10	15	20	25
3.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	%	0	0	68,3	82	75,6
4.	Persentase LSM/Ormas yang dibina kebangsaan	%	7,19	8,82	10,46	12,09	13,73
5	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	%	100	100	100	100	100
6	Persentase penguatan terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Jumlah kegiatan penguatan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di daerah / Jumlah kebijakan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di pemerintah pusat)*100						
7	Persentase mitigasi dampak kerawanan bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya / jumlah ancaman terhadap ketahanan ekonomi sosial budaya)*100	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, Tahun 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah.
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB.

Tabel 2.66
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020
(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.439.635,39	5.622.475,38	5.784.865,38	6.052.715,38	5.986.492,88
B	Pertambangan dan Penggalian	221.683,34	279.651,58	290.601,58	307.101,58	313.608,32
C	Industri Pengolahan	10.505.620,53	11.076.050,47	11.763.810,92	12.445.172,22	12.338.134,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	56.202,05	58.778,90	61.548,43	64.819,93	64.617,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.512,95	22.520,15	23.620,15	24.370,15	24.881,20
F	Konstruksi	1.739.413,20	1.868.908,35	1.991.958,35	2.073.768,35	1.997.248,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.200.580,71	3.378.702,01	3.566.378,06	3.752.648,06	3.608.772,06
H	Transportasi dan Pergudangan	563.781,17	604.398,93	642.616,58	694.461,27	470.829,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	886.876,39	948.148,64	1.022.048,64	1.107.313,64	1.059.587,63
J	Informasi dan Komunikasi	1.060.960,28	1.199.100,15	1.337.651,10	1.476.151,10	1.679.231,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	486.262,35	511.388,41	527.539,48	541.355,94	550.129,03
L	Real Estate	252.709,43	272.415,49	287.415,49	303.365,49	302.932,49
M,N	Jasa Perusahaan	72.210,02	78.499,07	85.399,07	94.039,07	88.338,82

Kategori	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	511.043,35	523.938,00	541.638,00	561.763,00	559.200,80
P	Jasa Pendidikan	609.025,27	660.174,07	710.224,07	763.124,07	760.627,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.392,66	181.985,25	196.840,25	209.700,25	226.845,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	345.505,86	378.508,47	411.508,97	444.516,97	412.211,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ADHK		26.139.414,95	27.665.643,32	29.245.664,52	30.916.386,47	30.443.688,53

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur.

1. Panjang Jalan.

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah 1.002,23 km² dan terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 770,993 km (jalan kewenangan Kabupaten Kendal). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 sebesar 88,28 % (delapan puluh delapan koma dua delapan persen) dalam kondisi mantap, yaitu kondisi sedang dan baik.

2. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum.

Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa bagian utara. Tersedia 4 (empat) terminal di wilayah Kabupaten Kendal yang melayani transportasi baik dalam kota maupun keluar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 penumpang angkutan umum sebanyak 3.433.256 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam) orang, meningkat menjadi 4.126.754 (empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat) orang pada tahun 2017.

3. Luas Wilayah Industri.

Sesuai RTRW Kab kendal tahun 2011-2031 di alokasikan pengembangan kawasan peruntukan industri seluas 5 .109 Ha yang terdiri atas Kawasan Industri dan sentra industri kecil menengah yang berada di Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal dan Patebon. Berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Nasional KEK, kawasan industri Kendal (KIK) ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kendal seluas 1.000 Ha yang terletak di kecamatan Kaliwungu dan

Brangsong. Zona KEK Kendal yaitu Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, dan Zona Industri.

4. Luas Wilayah Kebanjiran.

Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia, namun jika dilihat dari kawasan yang rawan terkena bencana banjir dapat diketahui ternyata terdapat 9 (sembilan) wilayah kecamatan yang rawan terkena bencana banjir. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kendal, Patebon, Ngampel, Kaliwungu, Brangsong, Cepiring, Kangkung, Rowosari, dan Weleri. Luas wilayah yang berpotensi terkena banjir di Kabupaten Kendal mencapai 55.600,21 ha (lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu hektar).

5. Luas Wilayah Kekeringan.

Selain banjir, Kabupaten Kendal juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah Kecamatan Patebon, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Ngampel, Pegandon, Brangsong, Gemuh, Cepiring. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Luas daerah yang berpotensi terkena bencana kekeringan adalah 99.972,78 ha (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh delapan hektar).

6. Luas Wilayah Perkotaan.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 menetapkan bahwa wilayah perkotaan terbagi atas 3 (tiga) pusat kegiatan. Pertama adalah Pusat kegiatan nasional yang selanjutnya di sebut sebagi PKN adalah kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala nasional. Kedua Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Dan yang ketiga adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Kabupaten Kendal sebagai Pusat Kegiatan Nasional bersama dengan Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR).

Wilayah yang termasuk dalam pusat kegiatan lokal adalah Kendal, Weleri, Boja, Kaliwungu, dan Sukorejo. Sedangkan pusat pelayanan kawasan adalah Kecamatan Pegandon.

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran/Rumah Makan.

Jumlah restoran/Rumah Makan yang ada di Kabupaten Kendal dari tahun 2017 sampai tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Tahun 2017 restoran di Kabupaten Kendal berjumlah 67 (enam puluh tujuh) unit, dan di tahun 2020 meningkat menjadi 151 (seratus lima puluh satu) unit.

8. Pelayanan Air Bersih.

Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut karena indikator ini menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. Tahun 2010 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Kendal sebesar 60 % (enam puluh persen), kemudian pada tahun 2015 pencapaiannya sudah sampai pada angka 75 % (tujuh puluh lima persen).

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.

1. Angka Kriminalitas.

Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun pada tahun 2018, namun dari 2019 sampai 2020 justru mengalami kenaikan. Tahun 2017 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga), dan tahun 2020 sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kasus.

Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi di wilayah Kabupaten Kendal pada tahun 2018 adalah pencurian, yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) kasus, sedangkan penyalahgunaan narkoba sebanyak 20 (dua puluh kasus, pengamiayaan sebanyak 2 (dua) kasus dan pembunuhan sebanyak 1 (satu) kasus.

2. Kemudahan Perizinan.

Pelayanan perizinan di Kabupaten Kendal saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui Online Single Submission (OSS) diantaranya dilakukan melalui pembangunan Mall Perizinan.

Berikut ditampilkan secara rinci jenis perizinan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin.

Tabel 2.67
Jenis Izin dan Lama Proses Pengurusannya

NO.	JENIS PERIZINAN	JANGKA WAKTU PELAYANAN
1.	Izin/ Persetujuan Prinsip	7 hari
2.	Izin Lokasi	7 hari
3.	Izin IPPT	7 hari
4.	Izin penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Puskesmas	7 hari
5.	Izin Kawasan Industri	7 hari
6.	Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB) selain rumah tinggal dengn luas sampai 100 m ²	7 hari
7.	Izin usaha angkutan orang dengan kendaraan umum	2 hari
8.	Izin usaha angkutan barang dengan kendaraan umum	2 hari
9.	Izin trayek angkutan dengan kendaraan umum	2 hari
10.	Kartu pengawasan angkutan dengan kendaraan umum	2 hari
11.	Izin prinsip angkutan	2 hari
12.	Izin reklame, selain izin pemasangan reklame dengan luas maksimal	7 hari
13.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari
14.	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	3 hari
15.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk usaha skala menengah dan besar; sekarang diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS)	Badan Usaha 2-2,5 Jam Perorangan 30 menit
16.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 hari
17.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	7 hari
18.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	7 hari
19.	Validasi Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) setelah bukti setor diupload oleh pemohon dan diinformasikan ke DPMPSTP	10 menit
20.	Izin Usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan	7 hari
21.	Izin warung internet/komputer	7 hari
22.	Izin prinsip dan izin usaha	7 hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, 2021

Keterangan : Perhitungan waktu/ lamanya proses perizinan dihitung dari berkas lengkap dan benar

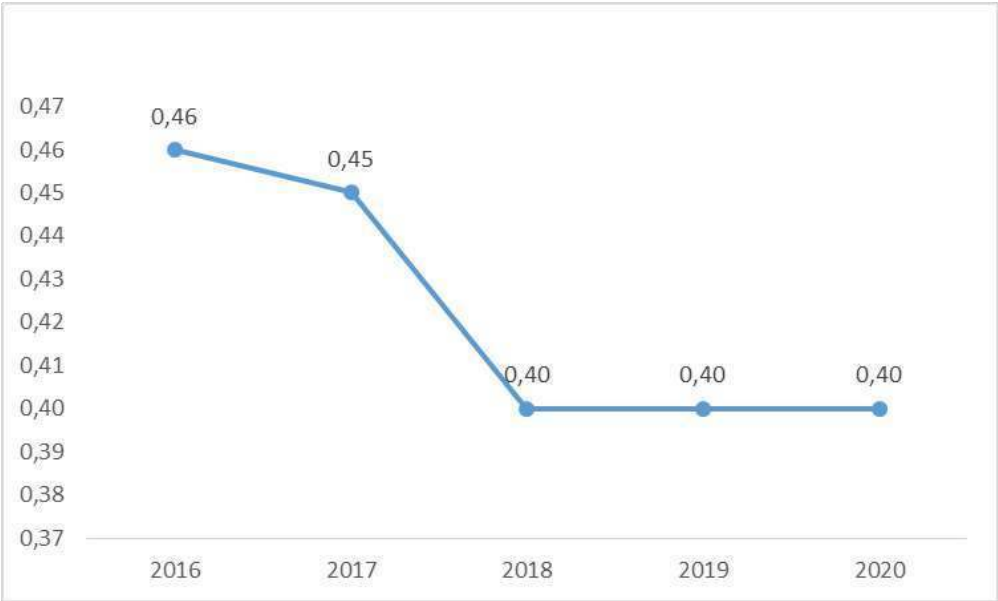
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kendal dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan. Dari 0,46 (nol koma empat puluh enam) pada tahun 2016 menjadi 0,40 (nol koma empat puluh) pada tahun 2020. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 (seratus) orang usia produktif di Kabupaten Kendal menanggung 40 (empat puluh) orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan sedang. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30 (tiga puluh), angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Gambar 2.31

Angka Ketergantungan di Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal Tahun 2021

2.5 Hasil Evaluasi RPJMD

2.5.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (*Impact*) Kabupaten Kendal Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (*impact*) Tahun 2020 berdasarkan tingkat capaiannya. Dari 357 Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat *impact* Tahun 2020, yang memiliki capaian kinerja **Sangat Tinggi** sebanyak 245 indikator atau 68,63 persen, **Tinggi** sebanyak 49 indikator atau 13,73 persen, **Sedang** sebesar 12 indikator atau 3,36 persen, **Rendah** sebanyak 10 Indikator atau 2,80 persen, dan **Sangat Rendah** sebanyak 41 Indikator atau 11,48 persen.

Capaian IKK tingkat *impact* Kabupaten Kendal Tahun 2020 menunjukkan masih perlu upaya dan komitmen dari seluruh Perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya target Indikator makro, IKU Pemerintah Daerah, dan IKU Perangkat Daerah dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara rinci realisasi dan tingkat capaian masing-masing IKK tingkat *impact* disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (*Impact*) Kabupaten Kendal Tahun 2020

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan ekonomi	%	6,2-6,6	-1,53	-23,18	Sangat Rendah	Lintas PD
2	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rp	32,35	30,91	95,54	Sangat Tinggi	Lintas PD
3	Inflasi	%	4,76	1,68	283,33	Sangat Tinggi	Lintas PD
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,8	9,99	98,10	Sangat Tinggi	Lintas PD
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,5	72,29	95,75	Sangat Tinggi	Lintas PD
6	Pengeluaran per Kapita	Rupiah / kapita/ tahun	11.014.000	11.425.000	103,73	Sangat Tinggi	Lintas PD
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,5	92,85	98,25	Sangat Tinggi	Lintas PD
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,5	77,50	100,00	Sangat Tinggi	Lintas PD
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	8	9,60	83,33	Tinggi	Lintas PD
10	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	9,5	0,60	1583,33	Sangat Tinggi	Lintas PD
11	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,03	0,05	61,22	Rendah	Lintas PD
12	Angka Kematian Ibu	per 100000 KH	1100	103,94	1058,30	Sangat Tinggi	Lintas PD
13	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	Lintas PD
14	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
15	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80	66,31	82,89	Tinggi	Bag. Organisasi
16	Prosentase perangkat daerah pelayanan yang indeks IKMnya Baik	%	100	96,36	96,36	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi
17	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan	Prosen	100	75,00	75,00	Sedang	Bag. Umum

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda						
18	Jumlah jamaah yang terlayani transportasi, komunikasi dan silaturahmi	Nilai angka	90	84,00	93,33	Sangat Tinggi	Bag. Kesra
19	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,73	7,45	96,38	Sangat Tinggi	Disdikbud
20	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,5	12,95	89,31	Tinggi	Disdikbud
21	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,45	74,43	99,97	Sangat Tinggi	Dinas kesehatan
22	Total Fertillity Rate (TFR)	Indeks	2,2	2,30	104,55	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
23	Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya yang tertangani	%	20	20,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
24	Prosentase fakir miskin dan PMKS yang mendapat pembinaan	%	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial
25	Persentas PSKS yang dibina	%	10	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial
26	Prosentase PMKS yang didampingi	%	100	20,00	20,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial
27	Prosentase Anak terlantar yang dibina	%	10	10,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
28	Jumlah meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma	anak	366	356	97,27	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
29	Prosentase Meningkat-nya kemam-puan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	60	10,00	16,67	Sangat Rendah	Dinas Sosial
30	Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
31	Jumlah pemuda yang yang dilatih pendidikan karakter	Orang	300	1554	518,00	Sangat Tinggi	Disporapar
32	Athlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	125	692	553,60	Sangat Tinggi	Disporapar
33	Prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional	orang	60	331	551,67	Sangat Tinggi	Disporapar
34	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.380	5318	385,36	Sangat Tinggi	Disperinko p & UKM
35	Prosentase koperasi sehat	%	90	100,00	111,11	Sangat Tinggi	Disperinko p & UKM
36	Ketersediaan pangan Utama /beras	%	177	184,80	104,41	Sangat Tinggi	DPP
37	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan Budidaya	%	3,5	0,00	0,00	Sangat Rendah	DKP
38	Prosentase pertumbuhan kunjungan wisata	% / Pertah un	5	-46,00	- 920,00	Sangat Rendah	Disporapar

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	3	1,00	33,33	Sangat Rendah	Disdikbud
40	Jumlah kasus konflik antar umat beragama	Kasus	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Kesbangpol
41	Jumlah Dokumen inspeksi kondisi jalan	Dok	2	9	450,00	Sangat Tinggi	PUPR
42	Tersedianya dokumen data base jalan yang up to date	Dok	16	10	62,50	Rendah	PUPR
43	Prosentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	100	88,28	88,28	Tinggi	PUPR
44	Jumlah jalan/ jembatan yang terbangun	Jalan/ Jembatan	8	4	50,00	Sangat Rendah	PUPR
45	Prosentase Daerah irigasi berfungsi baik	%	70	63,01	90,01	Sangat Tinggi	PUPR
46	Jumlah kegiatan konservasi	%	54,5	47,92	87,93	Tinggi	PUPR
47	prosentase Turap/Talud/Bronjong yang terbangun	%	99	84,00	84,85	Tinggi	PUPR
48	Prosentase Kawasan Kumuh	%	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perkim
49	Prosentase rumah tangga yang menggunakan air minum	%	100	94,00	94,00	Sangat Tinggi	PUPR
50	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	PUPR
51	Nilai Investasi	Trilyun	7715	8.344,217	108,16	Sangat Tinggi	DPMPSTP
52	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,7	7,56	75,40	Tinggi	Disnaker
53	Prosentase angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kesbangpol
ASPEK PELAYANAN UMUM		-	-		-	-	-
Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	53	56,79	107,15	Sangat Tinggi	Disdikbud
2	Prosentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	%	50	47,09	94,18	Sangat Tinggi	Disdikbud
3	Angka kelulusan pendidikan non formal	%	84	86,25	102,68	Sangat Tinggi	Disdikbud
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	100	106,67	106,67	Sangat Tinggi	Disdikbud
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	100	89,86	89,86	Tinggi	Disdikbud
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	%	90	94,56	105,07	Sangat Tinggi	Disdikbud
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	66	73,88	111,94	Sangat Tinggi	Disdikbud

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0,02	0,03	66,67	Sedang	Disdikbud
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0,1	0,09	111,11	Sangat Tinggi	Disdikbud
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Disdikbud
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA	%	90	99,13	110,14	Sangat Tinggi	Disdikbud
12	Prosentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	%	66,85	71,33	106,70	Sangat Tinggi	Disdikbud
13	Prosentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	%	89,79	79,89	88,97	Tinggi	Disdikbud
14	Prosentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	68,36	70,01	102,41	Sangat Tinggi	Disdikbud
15	Prosentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	91,18	75,25	82,53	Tinggi	Disdikbud
16	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD		1	1,01	99,01	Sangat Tinggi	Disdikbud
17	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP		1	0,95	105,15	Sangat Tinggi	Disdikbud
18	Rasio Guru/Siswa SD		0,05	0,06	89,29	Tinggi	Disdikbud
19	Rasio Guru/Siswa SMP		0,05	0,06	81,97	Tinggi	Disdikbud
20	Prosentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	%	97,5	93,93	96,34	Sangat Tinggi	Disdikbud
21	Prosentase PKBM Memiliki Akreditasi	%	75	75,00	100,00	Sangat Tinggi	Disdikbud
22	Presentase pendidik yang memiliki sertifikasi	%	54	56,66	104,93	Sangat Tinggi	Disdikbud
23	Prosentase Pendidik TK Memiliki Sertifikasi	%	44	44,92	102,09	Sangat Tinggi	Disdikbud
24	Prosentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	%	60	60,52	100,87	Sangat Tinggi	Disdikbud
25	Prosentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	%	62	61,07	98,50	Sangat Tinggi	Disdikbud
26	prosentase ketersediaan data kependidikan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Disdikbud
Kesehatan		-	-				-
1	Prosentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	90	70,00	77,78	Tinggi	Dinas Kesehatan
2	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	62,20	62,20	Rendah	Dinas Kesehatan
3	Cakupan sarana prasarana puskesmas	Puskesmas	78	50,00	64,10	Rendah	Dinas Kesehatan
4	Jumlah RS pemerintah yang dibangun	Buah	1	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
5	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	30	30,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM / P-IRT)	%	85	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
7	Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih	%	90	84,73	94,14	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan sehat (PHBS).						
8	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif (status Minimal Madya)	%	50	99,65	199,30	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,6	6,50	86,15	Tinggi	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
11	Prosentase BBLR (Berat badan <2.500 gr)	%	4	4,60	86,96	Tinggi	Dinas Kesehatan
12	Cakupan penggunaan air bersih	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
13	Strata Kabupaten Sehat	Kategori	Padapa	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
14	Cakupan penggunaan jamban keluarga yang memenuhi syarat	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
15	Cakupan Rumah sehat	%	85	75,56	88,89	Tinggi	Dinas Kesehatan
16	Puskesmas memiliki IPAL	unit	30	14,00	46,67	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
17	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
18	Jml seluruh pasien Tb yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk disuatu wilayah tertentu (CNR)	/100.000 pddk	165	136,77	82,89	Tinggi	Dinas Kesehatan
19	Prosentase angka kasus HIV yang diobati (SUFA)	%	85	90,65	106,65	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
20	Persentase desa melaksanakan STBM	%	100	80,00	80,00	Tinggi	Dinas Kesehatan
21	Prosentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan tata laksana pnemonia melalui program MTBS	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
22	Prosentase puskesmas yang melakukan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
23	prosentase penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	87,40	87,40	Tinggi	Dinas Kesehatan
24	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	/100.000 pddk	<55	13,93	394,83	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
25	Prosentase KLB dapat ditangani < 24 jam	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
26	Acute Flaccid Paralysis (AFP) anak usia dibawah 15 tahun	Per 100.000 pddk	≥ 2	0,88	44,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
27	Prosentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu	%	100	10,00	10,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
28	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan yang	%	100	90,00	90,00	Tinggi	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	menerapkan integrasi sistem informasi kesehatan						
29	Rasio dokter per satuan penduduk	/100.0 00 pddk	21,1	31,40	148,82	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
30	Rasio para medis per satuan penduduk	/100.0 00pddk	45	212,80	472,89	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
31	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin ((jumlah yang dilayani/jumlah kunjungan)x100%))	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
32	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di faskes	%	84,5	99,90	118,22	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
33	Cakupan kunjungan bayi	%	97	100,00	103,09	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	95	100,00	105,26	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
35	Cakupan penduduk memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	%	90	0,00	0,00	Sangat Rendah	
36	Prosentase Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	Prosen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Dr.H. Soewondo
37	BOR (Bed Occupancy Rate)	%	75	60,57	80,76	Tinggi	RSUD Dr.H. Soewondo
38	AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	3,5	3,44	101,74	Sangat Tinggi	RSUD Dr.H. Soewondo
39	NDR (Net Date Rate)	%	2,5	3,34	74,85	Sedang	RSUD Dr.H. Soewondo
40	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	Nilai	85	83,17	97,85	Sangat Tinggi	RSUD Dr.H. Soewondo
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Prosentase saluran drainase/ gorong-gorong berkondisi baik	%	93	87,00	93,55	Sangat Tinggi	PUPR
2	Prosentase cakupan drainase lingkungan kondisi baik	%	100	97,80	97,80	Sangat Tinggi	PUPR
3	Prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	85	75,08	88,33	Tinggi	PUPR
4	prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	100	92,10	92,10	Sangat Tinggi	PUPR
5	Prosentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.	%	12	17,11	142,58	Sangat Tinggi	DLH
6	Prosentase tersedianya informasi mengenai	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	PUPR

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.						
7	Prosentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	Prosen	4	6,00	150,00	Sangat Tinggi	PUPR
Perkim							
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH)	%	98,01	87,85	89,63	Tinggi	Dinas Perkim
2	Prosentase PSU perumahan dalam kondisi baik	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perkim
3	prosentase kawasan permukiman kumuh	%	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perkim
4	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan	%	47,9	40,91	85,41	Tinggi	Dinas Perkim
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
6	Cakupan penanganan kebakaran sesuai dengan Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate)	%	100	97,50	97,50	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
7	Prosentase capaian kegiatan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
8	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	unit	12	11,00	91,67	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
Ketentraman, ketertiban umum dan							
1	prosentase patroli siaga ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	52,00	52,00	Rendah	Satpol PP dan Damkar
2	cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	1.328	1027	77,33	Tinggi	Satpol PP dan Damkar
3	cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	rasio	1,4	1,40	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
4	jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	98	98,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
5	rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	Per Desa/kelurahan	5	5,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
6	Tertanganinya konflik sosial yang terjadi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kesbangpol

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Cakupan penegakan Perda	%	100	60,00	60,00	Rendah	Satpol PP dan Damkar
8	rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Per 10.000 pendud uk	0,6	0,58	96,67	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
9	meningkatnya penanganan penyidikan terhadap kasus pelanggar Perda	berkas	520	237	45,58	Sangat Rendah	Satpol PP dan Damkar
10	Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Kesbangpol
11	Jumlah Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	3125	22357	715,42	Sangat Tinggi	Kesbangpol
12	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	ormas	5	4,00	80,00	Tinggi	Kesbangpol
13	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	%	80	82,00	102,50	Sangat Tinggi	Kesbangpol
14	Jumlah data dan informasi	Dokum en	23	18,00	78,26	Tinggi	BPBD
15	Prosetase bencana yang tertangani	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	BPBD
16	meningkatnya kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada kordan sertaDinas Kesehatan	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	BPBD
17	Prosentase Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	10	10,00	100,00	Sangat Tinggi	BPBD
Sosial							
1	Prosentase pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%/tahu n	20	20,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
2	Prosentase pembinaan Anak terlantar yang terta ngani	%/tahu n	10	10,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
3	Jumlah pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani	Anak	366	356,00	97,27	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
4	Prosentase Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%/tahu n	7	7,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
5	Prosentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%/tahu n	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
<u>Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</u>							-
Ketenagakerjaan							

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	78	43,00	55,13	Rendah	Disnaker
2	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	93	91,42	98,30	Sangat Tinggi	Disnaker
3	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	95	94,00	98,95	Sangat Tinggi	Disnaker
4	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	75	74,00	98,67	Sangat Tinggi	Disnaker
5	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terbina	%	65	45,00	69,23	Sedang	Disnaker
6	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Berijin	LPK	24	43,00	179,17	Sangat Tinggi	Disnaker
7	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	91,86	0,00	0,00	Sangat Rendah	Disnaker
8	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB	%	90	53,00	58,89	Rendah	Disnaker
9	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	orang	23.000	143849,00	625,43	Sangat Tinggi	Disnaker
10	Prosentase Pemeriksaan Perusahaan	%	81,4	0,00	0,00	Sangat Rendah	Disnaker
11	Prosentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	40,78	0,00	0,00	Sangat Rendah	Disnaker
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
12	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	77,7	68,75	88,48	Tinggi	Dinas P2KBP3A
13	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,91	49,91	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
14	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif	%	22,22	22,22	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
15	Rasio KDRT dan anak	%	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
16	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	13	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas P2KBP3A
17	Cakupan Pengelola Industri rumahan (IR) yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%	45,52	39,50	86,78	Tinggi	Dinas P2KBP3A
Pangan							
1	Ketersediaan energi perkapita	%	185	187,30	101,24	Sangat Tinggi	DPP
2	Ketersediaan protein perkapita	%	117	131,90	112,74	Sangat Tinggi	DPP
3	Penguatan Cadangan Pangan	%	45	31,50	70,00	Sedang	DPP
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90	98,00	108,89	Sangat Tinggi	DPP

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	80	97,92	122,40	Sangat Tinggi	DPP
6	Penanganan daerah rawan pangan	%	50,1	52,72	105,23	Sangat Tinggi	DPP
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87,5	87,20	99,66	Sangat Tinggi	DPP
8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	86	90,00	104,65	Sangat Tinggi	DPP
Pertanahan							
1	Lahan Pemda Bersertifikat	Bidang	225	134,00	59,56	Rendah	PUPR
2	Jumlah konflik pertanahan milik Pemda	kasus	0	2,00	100,00	Sangat Tinggi	PUPR
Kependudukan dan Pencatatan sipil							
1	Rasio Penduduk ber KTP	%	98	99,69	101,72	Sangat Tinggi	Dispendukc apil
2	Rasio Anak berakte kelahiran	%	99	94,80	95,76	Sangat Tinggi	Dispendukc apil
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	95	69,36	73,01	Sedang	Dispendukc apil
4	Rasio Pasangan berakte nikah	%	13	12,00	92,31	Sangat Tinggi	Dispendukc apil
5	Cakupan Akte Kematian	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dispendukc apil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinpermas des
2	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Unit	266	218,00	81,95	Tinggi	Dinpermas des
3	Desa yang mendapatkan program TMMD	Desa	16	61,00	381,25	Sangat Tinggi	Dinpermas des
4	Jumlah aparatur desa yg sudah mengikuti bintek / pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	1862	2863,00	153,76	Sangat Tinggi	Dinpermas des
5	Jumlah data dan informasi	Dokumen	266	1596,00	600,00	Sangat Tinggi	Dinpermas des
6	Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	30,5	53,50	175,41	Sangat Tinggi	Dinpermas des
7	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	desa	266	266,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinpermas des
Pengendalian penduduk dan KB							
1	Rasio akseptor KB (baru)	%	95,5	84,57	88,55	Tinggi	Dinas P2KBP3A
2	Cakupan peserta KB aktif	%	82	70,26	85,68	Tinggi	Dinas P2KBP3A
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	79,32	79,10	99,72	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,2	1,15	104,35	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
5	Cakupan Pasangan Usia	%	10	15,77	157,70	Sangat	Dinas

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Subur yang ingin ber-KB tidakterpenuhi (Unmet Need)					Tinggi	P2KBP3A
6	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,4	1,38	98,57	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	%	69,23	69,23	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
8	Prosentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	31,1	29,30	94,21	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
9	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	80	85,10	106,38	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
Perhubungan							
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	unit	6	6,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
2	Jumlah Rute lintas penyeberangan	buah	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
3	Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir	unit	6	6,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
4	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	unit	940	910,00	96,81	Sangat Tinggi	Dishub
5	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	unit	1	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
6	Jumlah uji KIR angkutan umum		12.930	38056,0 0	294,32	Sangat Tinggi	Dishub
7	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	unit	5	5,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
8	Jumlah Trayek yang terlayani	Trayek	62	62,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
9	prosentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	86	80,00	93,02	Sangat Tinggi	Dishub
10	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	unit	1.500	1217,00	81,13	Tinggi	Dishub
11	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten/ Kota.	unit	7.877	6750,00	85,69	Tinggi	Dishub
12	Jumlah alat pengujian	unit	11	11,00	100,00	Sangat	Dishub

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	kendaraan bermotor yang memenuhi standar					Tinggi	
13	Prosentase Layanan PJU Berbasis Smart City	Prosen	75	56,00	74,67	Sedang	Dishub
Komunikasi dan Informatika							
1	Jumlah Hotspot yang tersedia	titik	29	85,00	293,10	Sangat Tinggi	Diskominfo
2	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah, Sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online	SIM	20	147,00	735,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
3	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	Prosen	100	75,00	75,00	Sedang	Diskominfo / Protokol
4	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	SKPD	22	63,00	286,36	Sangat Tinggi	Diskominfo
5	Prosentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Prosen	59	59,00	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
6	Prosentase kerja sama informasi dengan mas media	Prosen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
7	Prosentase optimaliasai pemanfaatan teknologi Informasi	Prosen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
8	Jumlah Perda /perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	Dokumen	1	2,00	200,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
Koperasi dan UMKM							
1	Jumlah wirausaha baru mikro	unit	32.337	159845,00	494,31	Sangat Tinggi	Disperinko p & UKM
2	Cakupan dukungan manajemen UMKM	Kec	20	35,00	100,00	Sangat Tinggi	Disperinko p & UKM
3	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.380	1355,00	98,19	Sangat Tinggi	Disperinko p & UKM
4	Prosentase Koperasi aktif	%	78,65%	78,00%	99,17	Sangat Tinggi	Disperinko p & UKM
Lingkungan Hidup							
1	Terpenuhinya IKLH	Skor	68,00	65,37	96,13	Sangat Tinggi	DLH
2	Jumlah daerah layanan pengangkutanke TPA	Kecamatan	17	17,00	100,00	Sangat Tinggi	DLH
3	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	lokasi	34	35,00	102,94	Sangat Tinggi	DLH
4	Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	jumlah	5	33,00	660,00	Sangat Tinggi	DLH
5	Jumlah sumber mata air yang tertangani	titik	2	2,00	100,00	Sangat Tinggi	DLH
6	Luas lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani	Ha	20	18,20	91,00	Sangat Tinggi	DLH

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Prosentase volume timbulan sampah yang tertangani	%	13,06	20,50	156,97	Sangat Tinggi	DLH
8	Prosentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DLH
9	Jumlah makam yang dipelihara/ dikelola Pemda	lokasi	7	7,00	100,00	Sangat Tinggi	DLH
Penanaman modal							
1	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor	30	8,00	26,67	Sangat Rendah	DPMPTSP
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah	432	676,00	156,48	Sangat Tinggi	DPMPTSP
3	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	dokum en	6	1,00	16,67	Sangat Rendah	DPMPTSP
4	Kecepatan pelayanan perizinan	hari	7	7,00	100,00	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Kepemudaan dan Olahraga							
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiata n	70	80,00	114,29	Sangat Tinggi	Disporapar
2	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiata n	70	80,00	114,29	Sangat Tinggi	Disporapar
3	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	kelomp ok	24	25,00	104,17	Sangat Tinggi	Disporapar
4	Jumlah wirausaha muda pemula	orang	400	582,00	145,50	Sangat Tinggi	Disporapar
5	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	cabor	33	37,00	112,12	Sangat Tinggi	Disporapar
6	Jumlah klub olahraga	klub	70	120,00	171,43	Sangat Tinggi	Disporapar
7	Jumlah gedung olahraga	unit	10	9,00	90,00	Tinggi	Disporapar
8	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	130	892,00	686,15	Sangat Tinggi	Disporapar
Statistik							
1	Buku Kendal dalam Angka	Ada/tid ak	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
2	Buku PDRB dalam Angka	Ada/tid ak	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
Persandian							
1	Prosentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	2,5	na	0,00	Sangat Rendah	Bag. Umum/ Protokol
Kebudayaan							
1	Prosentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	90	75,00	83,33	Tinggi	Disdikbud
2	Prosentase misi budaya yang dilestarikan	%	100	85,00	85,00	Tinggi	Disdikbud
3	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	Kelomp ok	585	975,00	166,67	Sangat Tinggi	Disdikbud
4	Jumlah grup kesenian	Kelomp	600	676,00	112,67	Sangat	Disdikbud

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ok				Tinggi	
5	Cakupan Kajian Seni	%	90	75,00	83,33	Tinggi	Disdikbud
6	Cakupan Fasilitas Seni	%	90	70,00	77,78	Tinggi	Disdikbud
7	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	90	85,00	94,44	Sangat Tinggi	Disdikbud
8	Cakupan Organisasi Seni	%	95	80,00	84,21	Tinggi	Disdikbud
9	Cakupan Gelar Seni dan Budaya	%	95	90,00	94,74	Sangat Tinggi	Disdikbud
Kearsipan							
1	Pengelolaan arsip dinamis dan statis	berkas	910.600	22.144	2,43	Sangat Rendah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Prosentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	%	3,52	2,73	77,56	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah arsip yang dialihmediakan	lembar	4.000	2.900	72,50	Sedang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Jumlah Arsiparis / Tenaga teknis perpustakaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	349	314,00	89,97	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	prosentase perpustakaan dalam kondisi baik	Prosen	75	65,00	86,67	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perpustakaan							
1	tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksem plar	41.770	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	116.443	87.824	75,42	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan		-	-				-
Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan budidaya	Kg	155.652 .231	130.754. 299	84,00	Tinggi	DKP
2	Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	5	2,70	54,00	Rendah	DKP
3	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	Kelomp ok/ tahun	10	4,00	40,00	Sangat Rendah	DKP
4	Produksi perikanan tangkap	Kg	13.223. 630	13.818.6 19	104,50	Sangat Tinggi	DKP
5	Prosentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam kondisi baik	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DKP
6	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelomp ok/ tahun	10	4,00	40,00	Sangat Rendah	DKP
7	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap	18,75	26,41	140,85	Sangat	DKP

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	penduduk (kg/kap/th)	/th				Tinggi	
Pariwisata							
1	Kunjungan wisata	orang	1.850.961	4.497.730	242,99	Sangat Tinggi	Disporapar
2	Prosentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Disporapar
3	Jumlah obyek wisata unggulan	DTW	10	16	160,00	Sangat Tinggi	Disporapar
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,71	0,036	5,07	Sangat Rendah	Disporapar
			2.166.641	1735993,92	80,12		
Pertanian							
1	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	429	433	100,93	Sangat Tinggi	DPP
	Produksi pertanian tanaman pangan utama						DPP
2	- Padi	Ton	1.432.243	1.506.027	105,15	Sangat Tinggi	DPP
3	- Jagung	Ton	1.279.057	1.281.515	100,19	Sangat Tinggi	DPP
4	- Kedelai	Ton	8.077	10.156	125,74	Sangat Tinggi	DPP
	Produksi tanaman hortikultura						DPP
5	- Bawang merah	Kwintal	1.634.655	1.487.386	90,99	Sangat Tinggi	DPP
6	- Cabe	Kwintal	267.682	303.258	113,29	Sangat Tinggi	DPP
	Produksi tanaman perkebunan						DPP
7	- Tebu	Ton	106.344,10	109.121	102,61	Sangat Tinggi	DPP
8	- Tembakau	Ton	6.998,43	14.178	202,59	Sangat Tinggi	DPP
9	- Kopi	Ton	7.043,70	7.943	112,77	Sangat Tinggi	DPP
10	- Cengkeh	Ton	1.081,50	1.631	150,82	Sangat Tinggi	DPP
11	- Karet	Ton	307,43	878	285,57	Sangat Tinggi	DPP
12	- Kelapa	Ton	3.339,19	3.562	106,67	Sangat Tinggi	DPP
13	- Kakao	Ton	855,93	930	108,67	Sangat Tinggi	DPP
14	Keikutsertaan dalam pameran promosi produk pertanian	Even	28	17	60,71	Rendah	DPP
15	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	429	433	100,93	Sangat Tinggi	DPP
	Populasi komoditas peternakan utama						DPP
16	- Sapi potong	ekor	21.106	124.323	589,04	Sangat Tinggi	DPP
17	- Kambing	ekor	38.696	228.759	591,17	Sangat Tinggi	DPP
18	- Domba	ekor	31.354	177.279	565,41	Sangat Tinggi	DPP

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	- Ayam ras pedaging	ekor	50.031.800	55.784.472	111,50	Sangat Tinggi	DPP
20	- Ayam ras petelur	ekor	4.100.000	25.879.054	631,20	Sangat Tinggi	DPP
	Meningkatnya produksi daging dan telur						DPP
21	- daging sapi	kg	4.390.543	4.240.884	96,59	Sangat Tinggi	DPP
22	- daging kambing	kg	686.371	708.420	103,21	Sangat Tinggi	DPP
23	- Daging domba	kg	93.468	101.656	108,76	Sangat Tinggi	DPP
24	- Daging ayam ras pedaging	kg	35.265.239	38.567.397	109,36	Sangat Tinggi	DPP
25	- Telur ayam ras	kg	226.300.420	231.648.970	102,36	Sangat Tinggi	DPP
	Angka kematian / mortalitas ternak						DPP
26	- Sapi potong	%	2,4	0,00	940512,58	Sangat Tinggi	DPP
27	- Domba	%	2,15	0,00	1423558,23	Sangat Tinggi	DPP
28	- Kambing	%	2,15	0,00	1007530,71	Sangat Tinggi	DPP
29	- Ayam ras	%	5	0,00	1275000000,00	Sangat Tinggi	DPP
30	Luas Lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal/dalam, embung, dam parit,long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Ha	8.080	9.884	122,33	Sangat Tinggi	DPP
31	Luas Lahan Pertanian Panga Berkelanjutan (LP2B)	Ha	22.666	22.666	100,00	Sangat Tinggi	DPP
32	Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	Ha	13.100	10.136	77,37	Tinggi	DPP
33	Luas lahan yang mendapat pemupukan menggunakan pupuk bersubsidi	Ha	35.000	204.142	583,26	Sangat Tinggi	DPP
34	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	122	632	518,03	Sangat Tinggi	DPP
Perdagangan							
1	Prosentase UTTP yang ditera	%	90	15,72	17,47	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
2	Perkembangan nilai ekspor	%	5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
3	Cakupan bina kelompok pedagang/ jumlah pedagang	%	100	30,82	30,82	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok	%	95	28,57	30,07	Sangat Rendah	Dinas perdagangan

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan barang penting di daerah						
5	Prosentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	16,66	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
6	Prosentase lokasi PKL yang tertata	%	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
Perindustrian							
1	Prosentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	4,62	4,01	86,80	Tinggi	Disperinko p & UKM
2	Prosentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	%	17,89	16,47	92,06	Sangat Tinggi	Disperinko p & UKM
3	Prosentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	0,03	0,36	1200,00	Sangat Tinggi	Disperinko p & UKM
4	Prosentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	3,3	2,64	80,00	Tinggi	Disperinko p & UKM
5	Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB	%	42,14	0	0,00	Sangat Rendah	Disperinko p & UKM
Transmigrasi							
1	Jumlah calon transmigran yang dilatih tentang kemampuan dasar sesuai dengan lokasi dan kebutuhan kompetensi.	KK	28	26,7	95,36	Sangat Tinggi	Disnaker
2	Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	%	20	0	0,00	Sangat Rendah	Disnaker
Urusan Penunjang							
Kepegawaian							
1	Prosentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat/ BinteK yang difasilitasi BKPP Kabupaten Kendal pada tahun berjalan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2	Prosentase struktur jabatan yang terisi	%	95	88,70	93,37	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3	Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang menggunakan E-Gov	19	16,00	84,21	Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	Prosentase pegawai dengan	%	100	0,00	0,00	Sangat	Badan

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	penilaian prestasi kerja baik					Rendah	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan							
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	85	81,51	95,89	Sangat Tinggi	Inspektorat
2	prosentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3	Prosentase aduan masyarakat atas layanan public yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Huruf	B	BB	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,00	66,67	Sedang	Inspektorat
7	Prosentase Aparatur Sipil Negara yang melaporkan hasil kekayaan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
Pengelolaan Keuangan dan Aset							
1	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	23	23,11	100,48	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah
Pemerintahan Umum							
1	Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan.	buah	84	98	116,67	Sangat Tinggi	Setwan
2	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	Prosen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Setwan
3	% PD yang bernilai IKM baik	%	100	96,36	96,36	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi
4	% Pelaksanaan Urusan Sesuai SPM yang telah diterbitkan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi
5	Jumlah Produk Kerjasama Daerah	Dokumen	45	33,00	73,33	Sedang	Bag. Tapem
Perencanaan Pembangunan							
1	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	65	74,50	114,62	Sangat Tinggi	BAPERLITB ANG
2	Prosentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD	%	90	62,50	69,44	Sedang	BAPERLITB ANG
3	Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BAPERLITB ANG

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016- 2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016- 2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BAPERLITB ANG
5	Prosentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD	%	65	70,14	107,91	Sangat Tinggi	BAPERLITB ANG
6	Jumlah MOU kerjasama perencanaan pembangunan daerah	dok	1	0,00	0,00	Sangat Rendah	BAPERLITB ANG
ASPEK DAYA SAING							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	unit	92	92	100,00	Sangat Tinggi	
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	unit	26	26	100,00	Sangat Tinggi	
Lingkungan Hidup							
1)	Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	100	92,2	92,20	Sangat Tinggi	
Fokus Iklim Berinvestasi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1)	Angka kriminalitas	Kasus	110	151	72,85	Sedang	
2)	Lama proses perijinan	hari	7	7	100,00	Sangat Tinggi	
Fokus Sumber Daya Manusia							
1)	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	5,8	2,78	47,93	Sangat Rendah	
2)	Rasio ketergantungan	Rasio	0,44	0	0,00	Sangat Rendah	

2.5.2 Capaian Kinerja Program dalam RPJMD 20216-2021 sampai dengan Tahun 2020

Dari hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2020 diperoleh bahwa jumlah program RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sejumlah 501 program dan jumlah program RKPD Tahun 2020 sejumlah 440 program. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, terdapat 501 (Lima ratus satu) program yang dijabarkan dalam 551 indikator

program RPJMD 2016-2021. Adapun capaian indikator program dalam RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun anggaran 2020 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi, sejumlah 456 Indikator atau 82,76%;
- b. Tinggi, sejumlah 52 indikator atau 9,44%;
- c. Sedang, sejumlah 8 indikator atau 1,45%;
- d. Rendah, sejumlah 11 indikator atau 2,00%;
- e. Sangat Rendah, sejumlah 24 indikator atau 4,36%;

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 terdapat indikator belum tercapai diantaranya karena adanya pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional dan regional. Selain itu upaya pencapaian target juga dipengaruhi realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan wabah Covid 19. Secara lengkap hasil evaluasi terhadap capaian indikator program RPJMD 2016-2021 sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :



Tabel 2.69
Capaian indikator kinerja program rpjmd kabupaten kendal
Periode 2016-2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Urusan Wajib																		
1.01	Urusan Pendidikan																		
1.01.1.0 1.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00	Sangat Tinggi	84,00	84,00	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	36,00	6	6,00	23,00	6,00	23,00	6,00	23,00	6,00	23,00	383,33	Sangat Tinggi	92,00	255,56	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	87,75	88,00	87,50	88,00	87,75	88,00	88,00	88,00	100,00	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.15	Program pendidikan anak usia dini	APK PAUD	Prosen	53,00	43,84	64,00	43,84	63,00	48,07	64,00	56,79	65,00		0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.16	Program wajib belajar pendidikan dasar															0,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
	sembilan tahun																		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	Prosen	0,02	0,09	0,08	0,10	0,07	0,06	0,06	0,19	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	0,04	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Prosen	0,10	0,63	0,59	1,23	0	0,58	0,35	0,98	0,23	0,23	100,00	Sangat Tinggi	0,23	43,48	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.18	Program pendidikan non formal	Angka kelulusan pendidikan non formal	Prosen	84,00	81,45	88,51	84,81	90,53	84,83	91,24	86,25	91,60	86,25	94,16	Sangat Tinggi	86,25	102,68	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.20	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Presentase pendidik yang memiliki sertifikasi	Prosen	54,00	51,50	52,75	58,60	54,30	61,07	55,52	58,89	56,66	58,89	103,94	Sangat Tinggi	58,89	109,06	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.0 1.01.22	Program manajemen pelayanan pendidikan	persentase ketersediaan data kependidikan	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	Urusan Kesehatan																		
1.02.1.0 2.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00		100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	12,00	Sangat Rendah	48,00	48,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
1.02.1.0 2.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,25	87,00	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	100,00	Sangat Tinggi	87,25	99,15	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.15	Program obat dan perbekalan kesehatan	persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	Puskesm as	100,00		96,00	98,00	97,00	90,00	98,00	90,00	99,00	70,00	70,71	Sedang	70,00	70,00	Sedang	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.16	Program upaya kesehatan masyarakat	persentase puskesmas terakreditasi	Prosen	30,00		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	333,33	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.17	Program pengawasan obat dan makanan	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM / P-IRT)	Prosen	90,00		65,00	91,00	70,00	90,00	75,00	95,00	100,00		0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	persentase desa siaga aktif minimal madya	Prosen	70,00		58,00	50,00	60,00	50,00	62,00	96,80	100,00	11,18	11,18	Sangat Rendah	11,18	15,97	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.20	Program perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Prosen	0.02		0,03	4,20	0,03	4,20	0,03	4,02	85,00	3,76	4,42	Sangat Rendah	3,76	#VALUE E!	#VALUE !	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.21	Program pengembangan lingkungan sehat	persentase desa melaksanakan STBM		100,00		20,00	100,00	40,00	100,00	60,00	100,00	75,00	80,00	106,67	Sangat Tinggi	80,00	80,00	Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persentase orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	persentase fasyankes yang menerapkan integrasi sistem informasi kesehatan		100,00		25,00	43,30	40,00	90,00	80,00	100,00	116,00	80,00	68,97	Sedang	80,00	80,00	Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	orang	90,00		70,00	80,00	75,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	94,12	Sangat Tinggi	80,00	88,89	Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Cakupan sarana prasarana puskesmas	Puskesm as	78,00		68,00	68,00	70,00	70,00	72,00	72,00	75,00	50,00	66,67	Sedang	50,00	64,10	Rendah	Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya																		
1.02.1.0 2.01.26	Program Pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah RS pemerintah yang dibangun	buah	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	persentase warganegara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan	Prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	110,00		122,90	148,70	120,00	80,24	118,00	103,94	116,00		0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	/1000 KH	8,00		8,89	9,05	8,75	6,42	8,50	9,60	8,20		0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	
1.02.1.0 2.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	Prosen	100		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr Soewondo
1.02.1.0 2.02.33	Program peningkatan kualitas pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan Blud	%	100			100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr Soewondo
1.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.1.0 3.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.02	Program peninekatan	persentase sarana dan	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	sarana dan prasarana aparatur	prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja																	Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	60,00		12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	166,67	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00		100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	12,00	Sangat Rendah	60,00	60,00	Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100,00	86,50	100,00	87,25	87,00	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	100,00	Sangat Tinggi	87,25	87,25	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Jalan dan Jembatan yang terbangun	Paket	8,00		0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	4,00	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	persentase saluran drainase/gorong-gorong ber kondisi baik	prosen	98,00		84,00	60,00	88,00	39,00	91,00	87,40	94,00	87,00	92,55	Sangat Tinggi	87,00	88,78	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.17	Program pembangunan turap/talud/bro njong	persentase Turap/Talud/Br onjong yang terbangun	prosen	99,00		30,00	30,00	48,00	10,00	68,00	73,60	88,00	84,00	95,45	Sangat Tinggi	84,00	84,85	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.18	Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	prosen	100,00		70,00	70,00	80,00	71,57	88,00	88,00	94,00	86,38	91,89	Sangat Tinggi	86,38	86,38	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.20	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen inspeksi kondisi jalan	Dok	10,00		2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	9,00	90,00	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
1.03.1.0 3.01.21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Kegiatan	5,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	4,00	80,00	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Dokumen data base jalan yang up to date	Dok	16,00		2,00	2,00	0,00	1,00	4,00	5,00	4,00	2,00	50,00	Sangat Rendah	14,00	87,50	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	prosen	95,00		75,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	85,00	80,00	94,12	Sangat Tinggi	80,00	84,21	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan jasa konstruksi	persentase pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	prosen	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.24	Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Daerah irigasi berfungsi baik	prosen	100,00		50,00	42,00	55,00	45,92	60,00	62,78	65,00	70,00	107,69	Sangat Tinggi	70,00	70,00	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.25	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	prosen	85,00		65,00	70,05	70,00	71,03	75,00	75,02	80,00	75,08	93,85	Sangat Tinggi	75,08	88,33	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.26	Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Persentase kegiatan konservasi	Prosen	54,5		43,66	43,66	45,00	44,28	47,5	47,92	49,08	49,08	100,00	Sangat Tinggi	49,08	90,06	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air	- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air	prosen	100,00		83,00	94,00	89,00	94,00	100,00	94,00	100,00	94,00	94,00	Sangat Tinggi	94,00	94,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	limbah	minum layak - Proporsi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Prosen	50,00		76,83	87,35	70,91	88,00	64,99	92,00	55,00	92,10	167,45	Sangat Tinggi	92,10	184,20	Sangat Tinggi	
1.03.1.0 3.01.28	Program pengendalian banjir	Persentase menurunnya luasan genangan di daerah rawan banjir	prosen	25,00		0,05	55,00	0,10	55,00	15,00	55,00	20,00	55,00	275,00	Sangat Tinggi	55,00	220,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.29	Program peningkatan infrastruktur perdesaan/perkotaan	persentase permukiman yang dilengkapi prasarana permukiman berkualitas	prosen	30,00		10,00	25,00	15,00	25,00	20,00	25,00	25,00	25,00	100,00	Sangat Tinggi	25,00	83,33	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.31	Program peningkatan sarana dan prasarana umum	persentase ketersediaan sarana prasarana umum	prosen	30		10	20,00	15	20,00	20	20,00	25	20,00	80,00	Tinggi	20,00	66,67	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.34	Program pemanfaatan ruang	persentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	Prosen	4,00		13,00	13,00	10,00	10,00	8,00	8,00	6,00	6,00	100,00	Sangat Tinggi	6,00	150,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.0 3.01.35	Program pengendalian pemanfaatan ruang	persentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	prosen	4,00		13,00	13,00	10,00	10,00	8,00	8,00	6,00	6,00	100,00	Sangat Tinggi	6,00	150,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																0,00			
1.03.3.0 1.01.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Perencanaan Tata ruang	-	95,00	-	1,00	56,00	37,86	56,00	56,72	56,00	69,42	56,00	80,67	Tinggi	56,00	58,95	Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															0,00			
1.04.1.0 4.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman
1.04.1.0 4.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana	pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	bln	12,00	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
	aparatur	aparatur																	Pemukiman
1.04.1.0 4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	12,00	100	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.0 4.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	peningkatan kapasitas SDM dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman	bln	12,00	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.0 4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	bln	12,00	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.0 4.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	12,00	86,50	12,00	87,25	87,00	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	100,00	Sangat Tinggi	87,25	727,08	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.0 4.01.15	Program pembagian perumahan	cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	98,01	95,96	97,19	96,68	97,61	97,30	97,19	98,61	97,61	87,85	90,00	Sangat Tinggi	87,85	89,63	Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100,00	0	25,00	25,00	50,00	30,27	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.0 4.01.16	Program lingkungan sehat perumahan	persentase kawasan permukiman kumuh	%	0,00	69,9	56,75	56,75	20,95	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.0 4.01.17	Program pemberdayaan komunitas perumahan	persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan	%	47,90	0,69	19,93	19,93	26,92	19,93	33,92	33,92	40,91	40,91	100,00	Sangat Tinggi	40,91	85,41	Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
1.04.1.0 4.01.18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	cakupan perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial	unit	0,00	0	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																		
1.05.1.0 5.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.0 5.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.0 5.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.0 5.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.0 5.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100,00	87,25	87,00	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	100,00	Sangat Tinggi	87,25	99,15	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00		0,00	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	6,00	Sangat Rendah	24,00	24,00	Sangat Rendah	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.0 5.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pelaksanaan kegiatan pengamanan	keg	100,00	60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.0	Program	Persentase kasus	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat	Satpol PP dan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
5.01.16	pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal	kejahatan yang tertangani													Tinggi			Tinggi	Damkar
1.05.1.0 5.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	100,00		31,25	3.105,00	3.105,00	3.200,00	3.200,00	8.652,00	8.652,00	1.150,00	13,29	Sangat Rendah	16.138,25	#####	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.0 5.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase capaian kegiatan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.0 5.01.25	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase capaian kegiatan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																		
1.05.1.0 5.02.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.0 5.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	75,00		75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	133,33	Sangat Tinggi	100,00	133,33	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.0 5.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaan dinas	prosen	100,00	100	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	200,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.0 5.02.06	Program peningkatan pengembangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	rata-rata Nilai SKP	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	Sangat Tinggi	6,00	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PD yang memenuhi standar																	
1.05.1.0 5.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kasus kriminalitas yang tertangani	Kasus	110,00		150,00	0,00	130,00	0,00	125,00	151,00	115,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.0 5.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	3.125,00		3.125,00	3.105,00	3.125,00	3.200,00	3.125,00	8.652,00	3.125,00	1.150,00	36,80	Sangat Rendah	19.232,00	615,42	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.0 5.02.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	ormas	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	80,00	Tinggi	19,00	380,00	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.0 5.02.21	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	prosen	80,00		76,70	82,00	78,00	82,00	79,00	82,00	80,00	82,00	102,50	Sangat Tinggi	82,00	102,50	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																		
1.05.1.0 5.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.0 5.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.0 5.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.0 5.03.05	Program Peningkatan Kapasitas	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan	prosen	30,00	3,00	2,00	30,00	2,00	30,00	2,00	30,00	2,00	30,00	1.500,00	Sangat Tinggi	30,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Sesuai Standar																	
1.05.1.0 5.03.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	87	86,00	87	86,00	87	86,00	88	86,00	97,73	Sangat Tinggi	86,00	97,73	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.0 5.03.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Persentase peningkatan kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada kordan serta Dinas Kesehatan	Prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.01.1.0 5.03.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	Dokume n	20,00	4,00	7,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	50,00	Sangat Rendah	1,00	5,00	Sangat Rendah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Sosial																		
1.06.1.0 6.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
1.06.1.0 6.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
1.06.1.0 6.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
1.06.1.0 6.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	5,00	0	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	5,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
1.06.1.0 6.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi	Laporan	12,00		12,00	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	50,00	Sangat Rendah	24,00	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
	dan keuangan	standar																		
1.06.1.0 6.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87,00	87,50	87,25	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Sosial	
1.06.1.0 6.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial	
1.06.1.0 6.01.17	Program pembinaan anak terlantar	persentase Anak terlantar yang dibina	%	10,00	15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi	10,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial	
1.06.1.0 6.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma	%	336,00	316	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi	10,00	2,98	Sangat Rendah	Dinas Sosial	
1.06.1.0 6.01.21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	prosentas PSKS yang dibina	%	42,00	100	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	Sangat Tinggi	7,00	16,67	Sangat Rendah	Dinas Sosial	
1.06.1.0 6.01.16	Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	persentase PMKS yang didampingi	%	100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	20,00	20,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial	
1.06.1.0 6.01.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	60,00	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi	10,00	16,67	Sangat Rendah	Dinas Sosial	
1.07	Tenaga Kerja																			
1.07.1.0 7.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja	
1.07.1.0 7.01.02	Program peningkatan	persentase sarana dan	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	sarana dan prasarana aparatur	prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja																	
1.07.1.0 7.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.0 7.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.0 7.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	30,00	360	10,00	6,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	Sangat Tinggi	24,00	80,00	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.0 7.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100,00	88,00	100,00	88,00	100,00	88,00	100,00	88,00	88,00	Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.0 7.01.15	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Prosentasi Peserta Pelatihan terhadap seluruh pendaftar	%	93,00	100	866,00	86,00	480,00	86,00	600,00	89,00	720,00	50,00	6,94	Sangat Rendah	50,00	53,76	Rendah	Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.0 7.01.16	Program peningkatan kesempatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	78,00	73,77	1.864,00	63,02	5.958,00	75,00	6.000,00	75,00	6.000,00	43,00	0,72	Sangat Rendah	43,00	55,13	Rendah	Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.0 7.01.17	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Prosentasi kasus perselesaian hubungan industrial	%	90,00	96,36	715,00	50,00	353,00	50,00	750,00	50,00	750,00	50,00	6,67	Sangat Rendah	50,00	55,56	Rendah	Dinas Tenaga Kerja
1.08	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak																		
1.08.1.1 4.01.15	Program keserasian Kebijakan	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	prosen	12,59	3,85	5,59	6,00	7,34	7,34	9,1	10,84	10,84	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pengendalian Penduduk,

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
	Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan																		Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.08.1.1 4.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	prosen	77,78	30,43	33,33	37,68	49,33	50,80	64,1	68,75	68,75	68,75	100,00	Sangat Tinggi	68,75	88,39	Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.08.1.1 4.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT dan anak	Prosen	0,40	0,4	0,04	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	0,04	10,00	Sangat Rendah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	prosen	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	100,00	Sangat Tinggi	22,22	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.09	Pangan																		
1.10	Pertanahan																		
1.10.3.0 5.01.38	Program peningkatan, penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase penerbitan sertifikat aset Pemerintah Daerah	prosen	81,00		40,50	50,00	47,00	50,00	57,00	50,00	68,50	50,00	72,99	Sedang	50,00	61,73	Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.11	Lingkungan Hidup																		
1.11.1.1 1.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
1.11.1.1 1.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1 1.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	20	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	500,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1 1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	400,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1 1.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87,00	87,50	87,25	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1 1.01.15	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase volume timbunan sampah yang tertangani	prosen	13,06	8,73	9,43	9,55	10,46	10,71	11,39	21,26	12,39	20,50	165,46	Sangat Tinggi	20,50	156,97	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.03.1.0 3.01.37	Program pemgembangan kinerja pengelolaan kebersihan/pertamanan	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA	Kec	17,00	12	13,00	14,00	14,00	14,00	15,00	16,00	16,00	17,00	106,25	Sangat Tinggi	17,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1 1.01.16	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indek Kulaitas Lingkungan Hidup	Score	68,00	49,82	63,49	63,49	65,00	66,29	66,00	66,24	67,00	65,37	97,57	Sangat Tinggi	65,37	96,13	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1 1.01.17	Program perlindungan dan konservasi	Jumlah sumber mata air yang tertangani	Jumlah	8,00		1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	8,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
	sumber daya alam																			
1.11.1.1 1.01.18	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Luas lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani (Ha)	Ha	20,00	6	8,00	9,80	10,00	14,47	12,00	24,00	15,00	18,20	121,33	Sangat Tinggi	18,20	91,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.1 1.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis Data informasi lingkungan yang dapat diakses	Jumlah	5,00	3	4,00	7,00	4,00	7,00	4,00	12,00	5,00	1,00	20,00	Sangat Rendah	30,00	600,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.1 1.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah lokasi taman dan RTH perkotaan yang tertata	Lokasi	34,00	26	26,00	27,00	28,00	27,00	30,00	35,00	32,00	35,00	109,38	Sangat Tinggi	35,00	102,94	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.1 1.01.25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau	prosen	100,00	40	20,00	92,00	20,00	98,12	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup	
1.04.1.1 1.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah makam yang dipelihara/dikelola Pemda	Lokasi	7,00	7	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	Sangat Tinggi	7,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
1.12.1.1 2.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	
1.12.1.1 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	60,00	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	166,67	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	
1.12.1.1 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		berkapakaian dinas																	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	0,00	NA	-	100,00	100	100,00	100	100,00	0	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.1 2.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	60,00	12	12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	80,00	Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.1 2.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.1 2.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP	Prosen	98,00		84	99,69	88	99,69	92	99,69	96	99,69	103,84	Sangat Tinggi	99,69	101,72	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
1.13.1.1 3.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.1 3.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.1 3.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.1 3.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.1 3.01.06	Program peningkatan	Jumlah laporan capaian kinerja	Laporan	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	dan keuangan PD yang memenuhi standar																	Masyarakat dan Desa
1.13.1.1 3.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	88,00	87	88,00	87,25	88,00	87,5	88,00	100,57	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.1 3.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	jumlah desa tertinggal di Kabupaten Kendal	Desa	0,00		85	85,00	65	0,00	45	0,00	23	0,00	0,00	Sangat Rendah	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.1 3.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	unit	266,00	40	62	67,00	60	33,00	60	38,00	34	50,00	147,06	Sangat Tinggi	211,00	79,32	Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif	Prosen	30,5	28	28,5	28,50	29	53,00	29,5	53,00	30	53,50	178,33	Sangat Tinggi	53,50	175,41	Sangat Tinggi	
1.13.1.1 3.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Desa yg mendapatkan program TMMD	Desa	16,00	2	2	3,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi	14,00	87,50	Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.1 3.01.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur desa yg sudah mengikuti bintek / pelatihan peningkatan kapasitas	orang	1.862,00	266	328	266,00	266	843,00	271	400,00	465	822,00	176,77	Sangat Tinggi	2.597,00	139,47	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.14.1.1 4.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1	Program	persentase	prosen	100,00	12	99	99,00	99	99,00	99	99,00	99	99,00	100,00	Sangat	99,00	99,00	Sangat	Dinas

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
4.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja													Tinggi			Tinggi	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	4	4	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	28,00	100	28	28,00	28	28,00	28	28,00	28	28,00	100,00	Sangat Tinggi	28,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	88,00	100	88,00	100	88,00	100	88,00	88,00	Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	Prosen	82,00	80,9	81,0	80,37	81,3	69,00	81,6	69,35	81,8	70,26	85,89	Tinggi	70,26	85,68	Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
																			Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	Rasio Akseptor KB (baru)	prosen	27,74	27,74	27,74	66,91	27,74	70,00	27,74	77,91	27,74	84,57	304,87	Sangat Tinggi	84,57	304,87	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling		31,10	21	22	28,89	24	33,30	26,6	26,60	28,8	29,30	101,74	Sangat Tinggi	29,30	94,21	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Cakupan Tribina pada Desa / Kelurahan untuk meningkatkan ketahanan Keluarga (BKB,BKR dan BKL)	Prosen	31,46	22,7	24,47	24,47	26,22	26,22	27,97	27,97	29,72	29,10	97,91	Sangat Tinggi	29,10	92,50	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.1 4.01.24	Program pengembangan model oprasional BKB-psyandu-PADU	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Prosen	79,32	79,23	79,23	79,25	79,27	79,12	79,28	79,28	79,30	79,10	99,75	Sangat Tinggi	79,10	99,72	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.15	Perhubungan																		
1.15.1.1 5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.1 5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		Kerja																	
1.15.1.1 5.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.1 5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.1 5.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.1 5.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	88,00	100	88,00	100	88,00	100	88,00	88,00	Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.1 5.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Rute lintas penyeberangan	buah	3,00	2	2	2,00	2	2,00	3	3,00	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.1 5.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana prasarana perhubungan dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.1 5.01.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Trayek yang terlayani	Trayek	62,00	60	60	60,00	61	62,00	62	62,00	62	62,00	100,00	Sangat Tinggi	62,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.1 5.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir	unit	6,00	5	5	5,00	6	6,00	6	6,00	6	6,00	100,00	Sangat Tinggi	6,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.1 5.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Layanan PJU Berbasis Smart City	%	75,00	0	15	15,00	30	30,00	45	52,00	60	56,00	93,33	Sangat Tinggi	56,00	74,67	Sedang	Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
1.15.1.1 5.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	unit	12,00	11	11	11,00	11	11,00	12	11,00	12	11,00	91,67	Sangat Tinggi	11,00	91,67	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.16	Komunikasi dan Informatika																		
1.16.1.1 6.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.1 6.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.1 6.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.1 6.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.1 6.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.1 6.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	88,00	100	88,00	100	88,00	100	88,00	88,00	Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.1 6.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah SistemInformasi ManajemenPemeintahDaerah, Saranakomunika si(Media Massa,MediaInte rpersonal,Media	SIM	20,00	11	15	17	16	52	17	102,00	18	150,00	833,33	Sangat Tinggi	150,00	833,33	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
		Luar ruang,Media Tradisionaldan MediaOnline)																		
1.16.1.1 6.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Perda / Perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	dokume n	100,00	1	100	1,00	100	1,00	100	3,00	100	2,00	200,00	Sangat Tinggi	2,00	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.16.1.1 6.01.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Prosen	59,00		59	59,00	59	100,00	59	59,00	59	59,00	100,00	Sangat Tinggi	59,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.16.1.1 6.01.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase kerja sama informasi dengan mas media		100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.16.1.1 6.01.19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi		100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.16.1.1 6.01.21	Program Kehumasan	Persentase pemanfaatan fasilitas protokol dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda		100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																			
1.17.1.1 7.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.17.1.1 7.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.17.1.1 7.01.03	Program peningkatan	Persentase penurunan	prosen	100,00	100	45 stel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian.	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	disiplin aparatur	pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas																	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.1 7.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	55,00		40,00	55,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	Sangat Tinggi	55,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.1 7.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	130,00		125,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.1 7.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,75	87,00	87,75	87,25	87,75	87,50	87,75	100,29	Sangat Tinggi	87,75	99,72	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.1 7.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	unit	32.337	1.285	31.847	15,00	31.962	1.328,00	32.082	1.355,00	32.207	1.355,00	4,21	Sangat Rendah	1.355,00	4,19	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.1 7.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha Baru mikro	unit	32.337	31.719	31.847	100,00	31.962	32.062,00	32.082	32.082,00	32.207	32.207,00	100,00	Sangat Tinggi	32.207,00	99,60	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.1 7.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil		1.380	1.278	1.300	15,00	1.315	1.328,00	1.355	1.355,00	1.355	1.355,00	100,00	Sangat Tinggi	1.355,00	98,19	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.1 7.01.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam proses produksi	Orang	9.388,00	9.088	9.138,00	13,24	9.188,00	12,43	9.238,00	15,12	9.288,00	156,00	1,68	Sangat Rendah	156,00	1,66	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.1 7.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase koperasi sehat	%	95,00	70	72	77,26	75	83,00	80	91,22	85	100,00	117,65	Sangat Tinggi	100,00	105,26	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Koperasi																		Menengah
1.17.1.1 7.01.20	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Cakupan dukungan manajemen UMKM	kec	20,00	5	6	5,00	0	0,00	0	20,00	0	0,00	0	Sangat Tinggi	30,00	150,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.18	Penanaman Modal																		
1.18.1.1 8.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.1 8.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00		12	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.1 8.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.1 8.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	40,00	20	40	40,00	40	40,00	40	40,00	40	40,00	100,00	Sangat Tinggi	40,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.1 8.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	11,00	9	11	5,00	11	5,00	11	5,00	11	5,00	45,45	Sangat Rendah	20,00	181,82	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.1 8.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.1 8.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	432,00	194	241	173,00	289	149,00	336	561,00	384	676,00	176,04	Sangat Tinggi	1.753,00	405,79	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.1	Program	Kecepatan	Hari	7.00		7	7.00	7	7.00	7	7.00	7	7.00	100.00	Sangat	7.00	100.00	Sangat	Dinas Penanaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
8.01.16	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pelayanan Perizinan													Tinggi			Tinggi	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.1 8.01.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	kegiatan	5,00	1	1	1,00	1	0,00	1	0,00	1	1,00	100,00	Sangat Tinggi	2,00	40,00	Sangat Rendah	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.19	Kepemudaan dan Olah Raga																		
1.19.1.1 9.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.1 9.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00		12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.1 9.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaan dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.1 9.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.1 9.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	400,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.1 9.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87,00	87,50	87,25	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.1 9.01.15	Program Pengembangan dan Kesperasian	Jumlah pemuda yang yang dilatih pendidikan	orang	300,00	NA	100,00	100,00	150,00	332,00	200,00	662,00	250,00	460,00	184,00	Sangat Tinggi	1.554,00	518,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Kebijakan Pemuda	karakter																	Pariwisata
1.19.1.1 9.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Prestasi kepemudaan	Keg	15,00		8,00	2,00	8,00	2,00	12,00	2,00	15,00	2,00	13,33	Sangat Rendah	8,00	53,33	Rendah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.1 9.01.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah wirausahawan muda	orang	100,00	200	20,00	25,00	20,00	122,00	20,00	135,00	20,00	100,00	500,00	Sangat Tinggi	582,00	582,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.1 9.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Cabor	33,00	29	29,00	32,00	32,00	37,00	33,00	37,00	33,00	37,00	112,12	Sangat Tinggi	143,29	434,21	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.1 9.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	persentase sarpras yang kondisi baik		80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	Sangat Tinggi	80,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.20	Statistik																		
1.20.1.1 6.01.15	Program pengembangan data/informasi/s tatistik daerah	Jumlah data/informasi/s tatistik daerah	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	Sangat Tinggi	3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.21	Persandian																		
1.22	Kebudayaan																		
1.22.1.0 1.01.15	Program pengembangan nilai budaya	Persentase misi budaya yang dilestarikan	Prosen	100,00	75	75	0,00	80	0,00	80	0,00	90	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22.1.0 1.01.16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	3,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	2	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22.1.0 1.01.17	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	kelompok	585,00	550	565	0,00	575	0,00	580	0,00	585	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22.1.1 9.01.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan budaya	Cakupan gelar seni dan budaya	Prosen	95,00		80	0,00	85	0,00	90	0,00	95	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.23	Perpustakaan																		
1.23.1.2 3.01.01	Program Pelayanan Administrasi	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Perkantoran																		
1.23.1.2 3.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.2 3.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.2 3.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	15,75		2,055	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	100,00	Sangat Tinggi	3,42	21,71	Sangat Rendah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.2 3.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.2 3.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.2 3.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	persentase perpustakaan dalam kondisi baik	Prosen	75,00		55	0,00	60	100,00	65	65,00	70	65,00	92,86	Sangat Tinggi	65,00	86,67	Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.02.1.0 2.01.34	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	persentase penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Prosen	100,00		100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai	Prosen	100,00		100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		standar																	
		persentase penderita ODGJ berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Prosen	100,00		100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.24.1.0 2.01.16	Program penyelamatan dan pelestariaan dokumeNarsip daerah	persentase arsip dinamis dan stastis yang diselamatkan	Prosen	12,00		4	0,20	12	4,54	12	6,48	12	2,73	22,75	Sangat Rendah	2,73	22,75	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.24.1.2 3.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan sesuai standar		95,00		77,500	77,50	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi	90,00	94,74	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.1.2 3.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumeNarsip daerah	persentase arsip dinamis dan stastis yang diselamatkan	Prosen	10,00		12,000	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	120,00	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.1.2 3.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	persentase perpustakaan dalam kondisi baik	Prosen	12,00		12,000	0,00	12,00	100,00	12,00	65,00	12,00	65,00	541,67	Sangat Tinggi	65,00	541,67	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.1.2 3.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	persentase Sarana Prasarana Arsip dalam kondisi baik		12,00		12,000	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 2.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan																		
2.01.2.0 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.0 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.0 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran	prosen	100,00	100		100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
		disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas																	
2.01.2.0 1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.0 1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	8,00	7	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.0 1.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,70	87	87,70	87,25	87,70	87,5	87,70	100,23	Sangat Tinggi	87,70	99,66	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.0 1.01.18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	kegiatan peningkatan kapasitas nelayan dalam bidang keselamatan pelayaran	kegiatan	24,00	4	4	4,00	4	4,00	4	4,00	4	4,00	100,00	Sangat Tinggi	16,00	66,67	Sedang	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.0 1.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	155.652.231,00	22.883.000	24.027.885	24.027.885,00	25.229.279	25.379.950,00	26.490.743	26.547.940,00	27.815.280	9.948.428,00	35,77	Sangat Rendah	108.787.203,00	69,89	Sedang	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.0 1.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan Tangkap (kg)	kg	13.223.629,74	2.096.288	2.138.213	2.138.213,00	2.180.977	3.152.489,00	2.224.596	3.543.970,00	2.269.087	1.028.755,00	45,34	Sangat Rendah	11.959.715,00	90,44	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.0 1.01.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	Orang	13.223.629,74			10,00		10,00		20,00	2.269.087	4,00	0,00	Sangat Rendah	54,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	132.769.231,00	22.883.000	24.027.885	24.027.885,00	25.229.279	25.379.950,00	26.490.743	26.547.940,00	27.815.280	9.948.428,00	35,77	Sangat Rendah	85.904.203,00	64,70	Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.0 1.01.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kap/th	18,75		15,43	15,43	16,2	24,25	17,01	26,41	17,86	26,41	147,87	Sangat Tinggi	26,41	140,85	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
	pemasaran produksi perikanan	(kg/kap/th)																	
2.02	Pariwisata																		
2.02.1.0 1.01.17	Program pengembangan kemitraan	1. Cakupan Organisasi Seni	Prosen	95,00	80	85	0,00	90	60,00	90	80,00	95	80,00	84,21	Tinggi	80,00	84,21	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Prosen	0,36		0,50	0,50	0,55	0,55	0,53	0,53	0,36	0,36	100,00	Sangat Tinggi	0,36	100,00	Sangat Tinggi	
2.02.1.1 9.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase OW yang dipromosikan	Prosen	100,00		80	90,00	85	100,00	90	100,00	95	100,00	105,26	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.02.1.1 9.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah OW unggulan	DTW	10,00		9	12,00	9	15,00	9	16,00	10	16,00	160,00	Sangat Tinggi	68,00	680,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.02.1.1 9.01.17	Program pengembangan Kemitraan	1. Cakupan Organisasi Seni	Prosen	0,50		0,5	0,00	0,5	0,45	0,5	0,40	0,5	0,40	80,00	Tinggi	0,40	80,00	Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Prosen	0,01	0,0051	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	39,22	Sangat Rendah	0,00	39,22	Sangat Rendah	
2.03	Pertanian																		
2.03.2.0 3.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.0 3.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.0 3.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	212	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.0 3.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	40,00		43	40,00	40	40,00	40	40,00	40	40,00	100,00	Sangat Tinggi	40,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.0 3.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang	Laporan	60,00		12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	80,00	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
	capaian kinerja dan keuangan	memenuhi standar																		
2.03.2.0 3.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.03.2.0 3.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Prosen	100,10	NA	NA	103,17	100,04	103,17	100,06	103,17	100,08	103,17	103,09	Sangat Tinggi	103,17	103,07	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.03.2.0 3.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan																			
		Ketersediaan bahan pokok utama/beras (%)	prosen	177,00	171,68	157,57	173,00	174,12	175,00	176,71	177,00	184,80	104,41	Sangat Tinggi	184,80	104,41	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan		
		Ketersediaan Energi per kapita	Kkal/ka pita	185,00	158	175,00	175,00	179,00	187,14	183,00	195,25	185,00	187,30	101,24	Sangat Tinggi	187,30	101,24	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Ketersediaan Protein per kapita	Kkal/ka pita	117,00	117	115,00	115,00	115,00	131,79	116,00	127,29	116,00	131,90	113,71	Sangat Tinggi	131,90	112,74	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Penguatan cadangan pangan	%	45,00	27,42	30,00	30,00	35,00	49,70	40,00	48,00	45,00	31,50	70,00	Sedang	31,50	70,00	Sedang	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90,00	90	90,00	90,00	90,00	138,00	90,00	113,00	90,00	98,00	108,89	Sangat Tinggi	98,00	108,89	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	%	80,00	70	72,00	72,00	75,00	96,91	78,00	96,30	80,00	97,92	122,40	Sangat Tinggi	97,92	122,40	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Penanganan daerah rawan pangan	%	50,10	42,8	50,00	42,80	50,00	51,60	50,10	52,52	50,10	52,72	105,23	Sangat Tinggi	52,72	105,23	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87,50	82,1	84,10	84,10	86,80	84,80	86,80	86,80	87,00	87,20	100,23	Sangat Tinggi	87,20	99,66	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	86,00	83,5	80,00	80,00	80,00	83,33	83,30	90,00	83,30	90,00	108,04	Sangat Tinggi	90,00	104,65	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.03.2.0	Program	Keikutsertaan	event	28.00	3	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	Sangat	18.00	64.29	Rendah	Dinas Pertanian	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
3.01.17	peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	dalam pameran promosi produk pertanian													Tinggi				dan Pangan
2.03.2.0 3.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok tani	kelompok	429,00	71	70,00	72,00	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	100,00	Sangat Tinggi	359,00	83,68	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.0 3.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi pertanian pangan utama																	
		- Padi	ton	1.432.243	260.888	231.975	224.117	233.135	244.331	234.301	241.649	235.472	245.172	104,12	Sangat Tinggi	1.216.157,00	84,91	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Jagung	ton	1.279.057	225.505	209.869	206.894	210.289	195.097	210.710	218.865	211.131	226.122	107,10	Sangat Tinggi	1.072.483,00	83,85	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kedelai	ton	8.077	1.340	1.341	1945	1.344	2280	1.347	1451	1.351	108	7,99	Sangat Rendah	7.124,00	88,20	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produksi Tanaman Hortikultura		-															
		- Bawang Merah	kwintal	1.634.655	320.936	258.832	296.894	260.773	184.334	262.729	263.179	264.700	167.050	63,11	Rendah	1.232.393,00	75,39	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Cabe	kwintal	267.682	40.984	45.114	55.759	45.226	69.331	45.339	45.430	45.453	46.753	102,86	Sangat Tinggi	258.257,00	96,48	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produksi tanaman perkebunan		-															
		- Tebu	Ton	106.344	19.170	18.167	20.671,80	14.998	15.669,30	17.650	17.669,74	17.650	14.816,20	83,94	Tinggi	87.996,84	82,75	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Tembakau	Ton	6.998	806	1.020	1.038,26	1.195	1.331,30	1.280	2.807,09	1.332	3.466,70	260,36	Sangat Tinggi	9.449,48	135,02	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kopi	Ton	7.044	1.300	1.115	1.206,50	1.132	1.266,35	1.148	1.540,27	1.166	1.541,24	132,22	Sangat Tinggi	6.861,43	97,41	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Cengkeh	Ton	1.082	158	100	252,87	179	242,30	198	276,27	218	279,16	128,23	Sangat Tinggi	1.208,69	111,76	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Karet	Ton	307	36	53	165,04	54	213,40	54	213,61	55	194,49	355,10	Sangat Tinggi	822,80	267,64	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kelapa	Ton	3.339	599	547	478,34	549	560,79	548	602,74	549	549,77	100,20	Sangat Tinggi	2.790,40	83,57	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kakao	Ton	856	199	128	153,92	130	156,60	131	156,76	133	140,50	105,31	Sangat Tinggi	806,32	94,20	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi air tanah dangkal/dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan)	Ha	8.080	2.000	1.280	0,00	1.050	2.085,00	1.150	1.314,00	1.250	985,00	78,80	Tinggi	6.384,00	79,01	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Ha	135.996	22.666	22.666	0,00	22.666	22.666,00	22.666	22.666,00	22.666	22.666,00	100,00	Sangat Tinggi	22.666,00	16,67	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Pangan
		Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	meter	13.100		1.600	0,00	2.500	5.136,00	2.750	5.000,00	3.000	0,00	0,00	Sangat Rendah	10.136,00	77,37	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		Luas lahan yang mendapat pemupukan menggunakan pupuk bersubsidi	Ha	198.700	31.000	32.000	0,00	33.200	35.801,00	33.500	37.981,00	34.000	99.360,00	292,24	Sangat Tinggi	204.142,00	102,74	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.0 3.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	122,00	122	122,00	112,00	116,00	116,00	150,00	150,00	122,00	122,00	100,00	Sangat Tinggi	122,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.0 3.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka kematian / mortalitas ternak																	
		- Sapi potong	Prosen	2,40	2,74	2,80	1,92	2,70	2,03	2,60	0,01	2,50	0,00025518	9.405,13	Sangat Tinggi	0,00	0,01	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kambing	Prosen	2,15	2,52	2,51	2,30	2,46	2,31	2,41	0,01	2,39	0,00015103	14.235,58	Sangat Tinggi	0,00	0,01	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Domba	Prosen	2,15	2,3	2,51	2,21	2,46	2,38	2,41	0,01	2,39	0,00021339	10.075,31	Sangat Tinggi	0,00	0,01	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras	Prosen	5,00	4,78	5,40	3,28	5,30	4,93	5,20	2,10	5,10	0,00000040	12.500.000,0	Sangat Tinggi	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
														0					
2.03.2.0 3.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi Komoditas Peternakan Utama														0,00			
		- Sapi potong	ekor	21.106	20.523	20.606	20.598,0 0	20.738	20.804,0 0	20.856	21.364 ,00	20.986	19.594 ,00	93,37	Sangat Tinggi	102.88 3,00	487,46	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kambing	ekor	38.696	37.776	37.558	37.645,0 0	37.934	37.920,0 0	38.140	45.594 ,00	38.313	33.106 ,00	86,41	Tinggi	192.04 1,00	496,28	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Domba	ekor	31.354	30.842	30.438	30.703,0 0	30.742	30.836,0 0	30.884	31.628 ,00	31.044	23.431 ,00	75,48	Tinggi	147.44 0,00	470,24	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras pedaging	ekor	50.031.8 00	8.587. 800	8.254. 000	8.321.50 0,00	8.263. 000	8.196.50 0,00	8.295. 000	10.912 .480,0 0	8.312. 000	11.178 .392,0 0	134,48	Sangat Tinggi	47.196. 672,00	94,33	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras petelur	ekor	4.100.00 0	3.799. 915	4.000. 000	4.088.10 0,00	4.000. 000	4.198.30 0,00	4.050. 000	5.383. 371,00	4.826. 068,00	117,71	Sangat Tinggi	22.295. 754,00	543,80	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.03.2.0 3.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produksi daging dan telur ayam ras																	
		- Daging sapi	kg	4.390.54 3	640.54 3	742.50 0	734.949, 00	745.00 0	774.761, 00	750.00 0	854.44 0,20	750.00 0	818.05 0,68	109,07	Sangat Tinggi	3.822.7 43,88	87,07	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging kambing	kg	686.371	108.80 1	112.75 0	115.412, 00	115.35 0	112.767, 00	115.50 0	214.02 6,78	116.72 0	142.90 0,43	122,43	Sangat Tinggi	693.90 7,21	101,10	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging domba	kg	93.468	16.393	14.950	15.633,0 0	15.225	15.306,0 0	15.430	19.402 ,82	15.645	29.547 ,23	188,86	Sangat Tinggi	96.282, 05	103,01	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging ayam ras pedaging	kg	35.265.2 39	5.916. 994	5.821. 500	5.249.05 2,00	5.833. 200	5.896.42 9,00	5.885. 600	6.226. 714,83	5.895. 710	11.628 .391,8 6	197,23	Sangat Tinggi	34.917. 581,69	99,01	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Telur ayam ras	kg	226.300. 420	36.204 .920	37.720 .250	34.474.3 21,00	37.720 .250	38.556.1 41,00	37.965 .000	44.952 .224,1 2	38.345 .000	48.633 .463,6 9	126,83	Sangat Tinggi	202.82 1.069,8 1	89,62	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.0 3.01.25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Populasi Komoditas Peternakan hasil penerapan teknologi peternakan																	
		- Sapi potong	ekor	21.106	20.523	20.606	20.598,0 0	20.738	20.804,0 0	20.856	21.364 ,00	20.986	19.594 ,00	93,37	Sangat Tinggi	102.88 3,00	487,46	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kambing	ekor	38.696	37.776	37.558	37.645,0 0	37.934	37.920,0 0	38.140	45.594 ,00	38.313	33.106 ,00	86,41	Tinggi	192.04 1,00	496,28	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Domba	ekor	31.354	30.842	30.438	30.703,0 0	30.742	30.836,0 0	30.884	31.628 ,00	31.044	23.431 ,00	75,48	Tinggi	147.44 0,00	470,24	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras	ekor				8.321.50		8.196.50		10.912		11.178	134,48	Sangat	47.196.	94,33	Sangat	Dinas Pertanian

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		pedaging		50.031.800	8.587.800	8.254.000	0,00	8.263.000	0,00	8.295.000	.480,00	8.312.000	.392,00		Tinggi	672,00		Tinggi	dan Pangan
		- Ayam ras petelur	ekor	4.100.000	3.799.915	4.000.000	4.088.100,00	4.000.000	4.198.300,00	4.050.000	5.383.371,00	4.100.000	4.826.068,00	117,71	Sangat Tinggi	22.295.754,00	543,80	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.05	Energi dan Sumber Daya Mineral																		
2.05.1.1 7.01.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Cakupan pembinaan dan pengendalian usaha pertambangan dan air bawah tanah	Prosen	100,00	100	154	0,00	154	0,00	154	0,00	154	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.015.1. 17.01.1 7	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Prosen	100,00	100	77	0,00	77	0,00	77	0,00	77	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi		1,31	0	0,44	0,67	0,66	1,78	0,88	1,98	1,10	2,64	240,00	Sangat Tinggi	2,64	201,53	Sangat Tinggi	
2.015.1. 17.01.1 8	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang Energi	cakupan pembinaan dan sosialisasi gugus tugas hemat energi dan air	Orang	478,00	100	103	0,00	103	0,00	103	0,00	103	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi		1,31	0,22	0,44	0,00	0,66	0,00	0,88	0,00	1,10	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	
2.06	Perdagangan																		
2.06.2.0 6.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan
2.06.2.0 6.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00		12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan
2.06.2.0	Program	Persentase	prosen	100.00	100	158	100.00		100.00	100	100.00	100	100.00	100.00	Sangat	100.00	100.00	Sangat	Dinas

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
6.01.03	peningkatan disiplin aparatur	penurunan disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas						100							Tinggi			Tinggi	Perdagangan
2.06.2.0 6.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	106,00		5	100,00	3	100,00	5	100,00	5	100,00	2.000,00	Sangat Tinggi	100,00	94,34	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan
2.06.2.0 6.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12,00		12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	400,00	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan
2.06.2.0 6.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	12,00	88,00	12	88,00	12	88,00	12	88,00	733,33	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan
2.06.2.0 6.01.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	persentase UTTP yang ditera		100,00		100	3,12	100	90,00	100	271,92	100	15,72	15,72	Sangat Rendah	15,72	15,72	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan
2.06.2.0 6.01.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perkembangan nilai ekspor	Prosen	5,00		5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan
2.06.2.0 6.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah		100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan
2.06.2.0 6.01.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase lokasi PKL yang tertata		10,00		10	0,00	10	20,00	10	20,00	10	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan
2.07	Perindustrian																		
2.07.1.1 7.01.16	Program pengembangan	Persentase industri kecil	Prosen	4,62	0,25	75,76	0,55	76,55	2,35	77,30	2,77	78	4,01	5,14	Sangat Rendah	4,01	86,80	Tinggi	Dinas Perindustrian.

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	industri kecil dan menengah	dan menengah yang berkembang																	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.07.1.1 7.01.18	Program penataan struktur industri	jumlah data industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten Kendal	Dokumen	11,00	1	75,76	0,00	76,55	0,00	77,30	0,00	78	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.07.1.1 7.01.20	Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri	Terciptanya kegiatan industri dengan proses produksi terstandar dan berwawasan lingkungan	perusahaan	473,00	60	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.08	Transmigrasi																		
2.08.1.0 7.01.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase Jumlah Transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	%	20,00	100	4	0,00	4	50,00	4	50,00	4	10,00	250,00	Sangat Tinggi	10,00	50,00	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja
2.08.1.0 7.01.16	Program transmigrasi lokal	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	KK	28,00	10	20	6,70	10	4,00	10	6,00	10	0,00	0,00	Sangat Rendah	26,70	95,36	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
3	Urusan Penunjang																		
3.01	Perencanaan																		
3.01.3.0 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	10.000,00	Sangat Tinggi	95,00	95,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.0 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	60,00	12	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	10.000,00	Sangat Tinggi	95,00	158,33	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.0 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	250,00	100	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	10.000,00	Sangat Tinggi	95,00	38,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
3.01.3.0 1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	183,00	12	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	10.000 ,00	Sangat Tinggi	95,00	51,91	Rendah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.0 1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	500,00	-	95%	100,00	95%	100,00	95%	100,00	95%	100,00	10.526 ,32	Sangat Tinggi	500,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.0 1.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	95%	87,25	95%	87,25	95%	87,25	95%	87,25	9.184, 21	Sangat Tinggi	87,25	99,15	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.1.1 3.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	Dokume n	266,00	0	93%	12,00	93%	12,00	93%	12,00	93%	12,00	1.290, 32	Sangat Tinggi	12,00	4,51	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.01.3.0 1.01.15	Program pengembangan data/informasi	Jumlah data dan informasi	dokume n	60,00		12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	80,00	Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.0 1.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah MOU kerjasama perencanaan pembangunan daerah	dokume n	1,00		70	1,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.0 5.01.17	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklnajuti menjadi MoU setiap tahun		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Renda h	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.01.3.0 1.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah konsep Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	dokume n	13,00		70%	0,00	70%	0,00	70%	0,00	70%	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.0 1.01.19	Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar	Jumlah konsep Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	dokume n	5,00		70%	0,00	70%	0,00	70%	0,00	70%	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.0	Program	Persentase	prosen	70.00		93%	100.00	93%	100.00	93%	100.00	93%	100.00	10.752	Sangat	100.00	142.86	Sangat	Badan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1.01.21	perencanaan pembangunan daerah	konsistensi program RKPD dengan RPJMD													,69	Tinggi			Tinggi	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD	Prosen	65,00	40	46	42,66	50	58,90	55	62,35	60	70,14	116,90	Sangat Tinggi	70,14	107,91	Sangat Tinggi		
3.01.3.0 5.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD dengan RPJMD		0,00		4,9%	100,00	4,8%	100,00	4,7%	100,00	4,6%	100,00	217.39 1,30	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi!	Sekretariat Daerah	
3.01.3.0 1.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-rata pencapaian sasaran bidang ekonomi	prosen	100,00	-	70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	10.000 ,00	Sangat Tinggi	70,00	70,00	Sedang	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
3.01.3.0 1.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD bidang sosial dan budaya	Prosen	55,00		70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	10.000 ,00	Sangat Tinggi	70,00	127,27	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
3.01.3.0 1.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD bidang fisik dan prasarana	prosen	100,00		70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	10.000 ,00	Sangat Tinggi	70,00	70,00	Sedang	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
3.02	Keuangan																			
3.02.3.0 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah	
3.02.3.0 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	85,00	65%	70%	80,00	73%	80,00	75%	80,00	80%	80,00	10.000 ,00	Sangat Tinggi	80,00	94,12	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah	
3.02.3.0 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	210	100,00	210	100,00	47,62	Sangat Rendah	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah	
3.02.3.0 2.01.05	Program Peningkatan	persentase ASN yang mengikuti	prosen	80,00	60	60	20,00	65	20,00	75	20,00	75	20,00	26,67	Sangat Rendah	80,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Keuangan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar																	Daerah
3.02.3.0 2.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah
3.02.3.0 2.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah
3.02.3.0 2.01.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase PAD teerhadap total pendapatan	Prosen	10,00	10	10,00	16,45	10,00	14,97	10,00	19,67	10,00	23,11	231,10	Sangat Tinggi	23,11	231,10	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah
3.02.3.0 5.01.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap total pendapatan	Prosen	23,11		19,45	16,45	14,97	14,97	19,67	19,67	23,11	23,11	100,00	Sangat Tinggi	23,11	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.02.1.1 3.01.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	266,00	0	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	37,59	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.02.3.0 5.01.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.03	Kepegawaian																		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Serta Pendidikan dan Pelatihan																		
3.03.3.0 3.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.0 3.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.0 3.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.0 3.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.0 3.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	persentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat/Bintek yang difasilitasi BKPP Kab. Kendal pada tahun berjalan	Prosen	100,00	100	100	150,00	100	122,90	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.0 3.01.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase struktur jabatan yang terisi	Prosen	95,00	83,07	87	89,30	87	85,28	90	92,45	90	88,70	98,56	Sangat Tinggi	88,70	93,37	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.0 3.01.17	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	Prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.0 3.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang menggunakan E-Gov	jenis	19,00	8	10	12,00	12	13,00	14	15,00	16	16,00	100,00	Sangat Tinggi	16,00	84,21	Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.04	Penelitian dan																		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Pengembangan Fugsi Lain																		
3.05																			
3.05.3.0 5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	80	100,00	85	100,00	90	100,00	95	100,00	105,26	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	87,25	100	87,25	100	87,25	100	87,25	87,25	Tinggi	87,25	99,15	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.01.17	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase bangunan yang berizin dan laik fungsi		20,00			0,00	5	0,00	10	0,00	15	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.05.3.0 5.01.18	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Rata-rata waktu pelayanan produk hukum daerah		30,00		30	30,00	30	30,00	30	30,00	30	30,00	100,00	Sangat Tinggi	30,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.01.20	Program Penataan Kelembagaan	Nilai Akuntabilitas Kineria Instansi	Prosen	80,00		55	55,00	60	61,39	65	64,55	75	66,31	88,41	Tinggi	66,31	82,89	Tinggi	Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	dan Ketatalaksanaan	Pemerintah																	
3.05.3.0 5.01.21	Program Kehumasan	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.01.22	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Inflasi	%	4,76	6,29	5,95	6	5,63	2,16	5,32	2,58	5,03	1,68	33,40	Sangat Rendah	1,68	35,29	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.01.23	Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, serta Kesejahteraan Rakyat	Jumlah jamaah yang terlayani transportasi, komunikasi dan silaturahmi	nilai angka	90,00		70	70	75	0	80	84	85	84	98,82	Sangat Tinggi	84,00	93,33	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.0 5.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	90,00	Tinggi	90,00	90,00	Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.0 5.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	90,00	Tinggi	90,00	90,00	Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.0 5.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	12,00		12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.0 5.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12,00	12	12,00	5,00	12,00	5,00	12,00	5,00	12,00	5,00	41,67	Sangat Rendah	5,00	41,67	Sangat Rendah	Sekretariat DPRD
3.05.3.0 5.02.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87,00	87,50	87,25	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Pemerintah																		
	Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah	persentase arsip dinamis dan statis yang diselamatkan	Prosen	100,00	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.0 5.02.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Pembahasan Raperda, hearing, rapat-rapat DPRD, Reses dan Kunjungan Kerja	Dokumen	60,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	Sangat Tinggi	60,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.0 5.02.18	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Propemperda yang disetujui	kajian	7,00	1	6,00	8,00	6,00	8,00	6,00	8,00	6,00	8,00	133,33	Sangat Tinggi	8,00	114,29	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.0 5.02.21	Program Kehumasan	Persentase pemanfaatan fasilitas protokol dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.0 5.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	99,45	100	99,45	100	99,45	100	99,45	99,45	Sangat Tinggi	99,45	99,45	Sangat Tinggi	Kecamatan Kendal
3.05.3.0 5.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100%	100	99,21	100	99,21	100	99,21	100	99,21	99,21	Sangat Tinggi	99,21	99,21	Sangat Tinggi	Kecamatan Kendal
3.05.3.0 5.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kendal
3.05.3.0 5.03.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	113,64	Sangat Tinggi	Kecamatan Kendal

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
3.05.3.0 5.03.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN		100,00	100%	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kendal
3.05.3.0 5.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	420,00	100	84,00	100,00	84,00	100,00	84,00	100,00	84,00	100,00	119,05	Sangat Tinggi	100,00	23,81	Sangat Rendah	Kecamatan Patebon
3.05.3.0 5.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	176,00	100	41,00	100,00	41,00	100,00	32,00	100,00	31,00	100,00	322,58	Sangat Tinggi	100,00	56,82	Rendah	Kecamatan Patebon
3.05.3.0 5.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	175,00	100	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00	285,71	Sangat Tinggi	100,00	57,14	Rendah	Kecamatan Patebon
3.05.3.0 5.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	5,00	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	4,00	80,00	Tinggi	Kecamatan Patebon
3.05.3.0 5.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	25,00	100	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	25,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Patebon
3.05.3.0 5.04.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	25,00	88,00	25,00	88,00	43,00	88,00	25,00	88,00	352,00	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Patebon
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan	Prosen	156,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	64,10	Rendah	Kecamatan Patebon

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
	Keuangan Desa	kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa																		
3.05.3.0 5.04.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	212,00	100	43,00	43,00	43,00	43,00	42,00	42,00	42,00	42,00	100,00	Sangat Tinggi	42,00	19,81	Sangat Rendah	Kecamatan Patebon	
3.05.3.0 5.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	0,80	95,00	0,85	95,00	0,90	95,00	0,95	95,00	10.000 ,00	Sangat Tinggi	95,00	95,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pegandon	
3.05.3.0 5.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	1,00	98.97 %	0,80	0,75	0,85	0,76	0,90	0,67	0,95	0,63	66,48	Sedang	0,63	63,16	Rendah	Kecamatan Pegandon	
3.05.3.0 5.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	31,00	100,00	31,00	100,00	27,00	100,00	27,00	100,00	370,37	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pegandon	
3.05.3.0 5.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	1,00	100%	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90	0,90	0,95	0,95	100,00	Sangat Tinggi	0,95	95,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pegandon	
3.05.3.0 5.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	0,00	0%	0,80	0,00	0,85	0,00	0,90	0,00	0,95	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Kecamatan Pegandon	
3.05.3.0	Program	rata-rata nilai	rata-rata	88.00	86.50	0.80	87.00	0.85	87.00	0.90	87.00	0.95	87.00	9.157.	Sangat	87.00	98.86	Sangat	Kecamatan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
5.05.07	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai SKP											89	Tinggi			Tinggi	Pegandon	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	1,00	100%	100	95,00	100	95,00	100	95,00	95	95,00	100,00	Sangat Tinggi	95,00	95,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pegandon	
3.05.3.0 5.05.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	1,00	100%	0,80	0,79	0,85	0,85	0,90	0,90	0,95	0,95	100,00	Sangat Tinggi	0,95	95,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pegandon	
3.05.3.0 5.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	100,00	100 %	100,00	100 %	100,00	100 %	100,00	10.000 ,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan weleri	
3.05.3.0 5.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100%	100 %	99,93	1,00	99,93	100	99,93	100	99,93	99,93	Sangat Tinggi	99,93	99,93	Sangat Tinggi	Kecamatan weleri	
3.05.3.0 5.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan weleri	
3.05.3.0 5.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dava	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai	prosen	100	100%	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan weleri	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
	Aparatur	Standar																		
3.05.3.0 5.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	11,00	68,75	Sedang	Kecamatan weleri	
3.05.3.0 5.06.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100	86,50	1,00	88,00	1,00	88,00	100	88,00	100	88,00	88,00	Tinggi	88,00	88,00	Tinggi	Kecamatan weleri	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan weleri	
3.05.3.0 5.06.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Weleri	
3.05.3.0 5.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh	
3.05.3.0 5.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh	
3.05.3.0 5.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
		disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas																		
3.05.3.0 5.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh	
3.05.3.0 5.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh	
3.05.3.0 5.07.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	86,75	87,00	87,00	87,25	87,25	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh	
3.05.3.0 5.07.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh	
3.05.3.0 5.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	2.108,00	100,00	2.617,00	100,00	3.108,00	100,00	3.612,00	100,00	2,77	Sangat Rendah	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Cepiring	
3.05.3.0	Program	persentase	prosen	32,00		32,00	100,00	31,00	100,00	31,00	100,00	32,00	100,00	312,50	Sangat	100,00	312,50	Sangat	Kecamatan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
5.08.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja													Tinggi			Tinggi	Cepiring
3.05.3.0 5.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	20,00	100	18,00	100,00	18,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	500,00	Sangat Tinggi	100,00	500,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Cepiring
3.05.3.0 5.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	28,00		28,00	100,00	28,00	100,00	28,00	100,00	28,00	100,00	357,14	Sangat Tinggi	100,00	357,14	Sangat Tinggi	Kecamatan Cepiring
3.05.3.0 5.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	37,00		25,00	4,00	25,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	41,00	110,81	Sangat Tinggi	Kecamatan Cepiring
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100,00		144,00	100,00	162,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Cepiring
3.05.3.0 5.08.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	prosen	100,00			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Cepiring
3.05.3.0 5.09.01	Program Pelayanan	persentase unit kerja internal	prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Administrasi Perkantoran	yang terlayani																	
3.05.3.0 5.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.0 5.09.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.0 5.09.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88%	86,50	100%	0,88	100%	0,88	100%	0,88	100%	0,88	88,00	Tinggi	0,88	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.0 5.09.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.0 5.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Brangsong
3.05.3.0	Program	persentase	prosen	100%	100%	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat	1,00	100,00	Sangat	Kecamatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
5.10.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja													Tinggi			Tinggi	Brangsong
3.05.3.0 5.10.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Brangsong
3.05.3.0 5.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Brangsong
3.05.3.0 5.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Brangsong
3.05.3.0 5.10.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88%	86,50	100%	0,88	100%	0,88	100%	0,88	100%	0,88	88,00	Tinggi	0,88	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Brangsong
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Brangsong
3.05.3.0 5.10.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan,	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Brangsong

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		keagamaan, ekonomi, dan PATEN																	
3.05.3.0 5.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Boja
3.05.3.0 5.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Boja
3.05.3.0 5.11.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Boja
3.05.3.0 5.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Boja
3.05.3.0 5.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Boja
3.05.3.0 5.11.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,00	87,00	87,00	87,25	87,00	87,50	87,00	99,43	Sangat Tinggi	87,00	98,86	Sangat Tinggi	Kecamatan Boja
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Boja
3.05.3.0	Program	persentase	%	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat	Kecamatan Boja

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD		
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian	
5.11.15	peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN													Tinggi				Tinggi	
3.05.3.0 5.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Limbangan	
3.05.3.0 5.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	321,00	100%	61,00	100,00	106,00	100,00	56,00	100,00	55,00	100,00	181,82	Sangat Tinggi	100,00	31,15	Sangat Rendah	Kecamatan Limbangan	
3.05.3.0 5.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Limbangan	
3.05.3.0 5.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16,00	-	0,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	150,00	Sangat Tinggi	24,00	150,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Limbangan	
3.05.3.0 5.12.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	86,75	87,00	87,00	87,25	87,25	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Kecamatan Limbangan	
3.05.3.0 5.12.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan,	%	2.131,00	100%	303,00	303,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	100,00	Sangat Tinggi	1.674,00	78,55	Tinggi	Kecamatan Limbangan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		ekonomi, dan PATEN																	
3.05.3.0 5.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	1,00	Sangat Rendah	Kecamatan Singorojo
3.05.3.0 5.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	1,00	Sangat Rendah	Kecamatan Singorojo
3.05.3.0 5.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	1,00	Sangat Rendah	Kecamatan Singorojo
3.05.3.0 5.13.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	87,50	86,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Singorojo
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100,00	100%	1,00	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Kecamatan Singorojo
3.05.3.0 5.13.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	1,00	Sangat Rendah	Kecamatan Singorojo
3.05.3.0	Program	persentase unit	prosen	100	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat	Kecamatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
5.14.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	kerja internal yang terlayani													Tinggi			Tinggi	Sukorejo	
3.05.3.0 5.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100%	1,00	96,00	1,00	96,00	100	96,00	100	96,00	96,00	Sangat Tinggi	96,00	96,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Sukorejo	
3.05.3.0 5.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Sukorejo	
3.05.3.0 5.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100	100%	1,00	0,00	1,00	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Kecamatan Sukorejo	
3.05.3.0 5.14.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100	86,50	1,00	87,25	1,00	87,25	1,00	87,25	1,00	87,25	8.725,00	Sangat Tinggi	87,25	87,25	Tinggi	Kecamatan Sukorejo	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100%	1,00	0,00	100%	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Kecamatan Sukorejo	
3.05.3.0 5.14.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan	Prosen	100	100%	1,00	90,00	1,00	90,00	100	90,00	100	90,00	90,00	Tinggi	90,00	90,00	Tinggi	Kecamatan Sukorejo	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		PATEN																	
3.05.3.0 5.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Patean
3.05.3.0 5.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Patean
3.05.3.0 5.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Patean
3.05.3.0 5.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Patean
3.05.3.0 5.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16	NA		0,00		0,00	4	4,00	4	4,00	100,00	Sangat Tinggi	4,00	25,00	Sangat Rendah	Kecamatan Patean
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Patean
3.05.3.0 5.15.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan.	prosen	100	100		94,00		94,00	100	94,00	100	94,00	94,00	Sangat Tinggi	94,00	94,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Patean

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
		kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN																		
3.05.3.0 5.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pageruyung	
3.05.3.0 5.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pageruyung	
3.05.3.0 5.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pageruyung	
3.05.3.0 5.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16,00	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	4,00	25,00	Sangat Rendah	Kecamatan Pageruyung	
3.05.3.0 5.16.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100	86,50	100,00	87,50	1,00	87,50	100	87,50	100	87,50	87,50	Tinggi	87,50	87,50	Tinggi	Kecamatan Pageruyung	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100	100%	100,00	100%	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pageruyung	
3.05.3.0 5.16.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan administrasi.	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi.	%	100	100	1,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Pageruyung	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
	pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN																		
3.05.3.0 5.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan	
3.05.3.0 5.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100		1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan	
3.05.3.0 5.17.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan	
3.05.3.0 5.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100		-	100,00	-	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan	
3.05.3.0 5.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16,00		-	4,00	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	16,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan	
3.05.3.0 5.17.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100	86,50	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan	Prosen	100		100%	100,00	-	100,00	100%	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020			Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		penyelenggaraan pemerintahan desa																	
3.05.3.0 5.17.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100		1,00	95,00	1,00	95,00	100	95,00	100	95,00	95,00	Sangat Tinggi	95,00	95,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan
3.05.3.0 5.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100%	100,00	100%	100,00	10.000 ,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
3.05.3.0 5.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	1,00	100%	100	100,00	100	100,00	100%	100,00	100%	100,00	10.000 ,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
3.05.3.0 5.18.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
3.05.3.0 5.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	1,00	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
3.05.3.0 5.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	88,00	100%	86,75	86,75	87,00	87,00	87,25	87,25	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
3.05.3.0 5.18.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100,00	86,50	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
	Program	Persentase desa	Prosen	100,00	100%	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat	Kecamatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa													Tinggi			Tinggi	Rowosari
3.05.3.0 5.18.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100,00	100%	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
3.05.3.0 5.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.0 5.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	%	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.0 5.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100	1,00	100,00	0,32	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.0 5.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100		0,00	100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.0 5.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang	Laporan	100	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	capaian kinerja dan keuangan	memenuhi standar																	
3.05.3.0 5.19.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100	1,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100%	100%	100,00	100%	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.0 5.19.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.0 5.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.0 5.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.0 5.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ringinarum

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
3.05.3.0 5.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.0 5.20.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88	86,50	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ringinarum
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.0 5.20.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.0 5.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100%	100	94,33	100	94,33	100	94,33	100	94,33	94,33	Sangat Tinggi	94,33	94,33	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngampel
3.05.3.0 5.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	75%	80	99,24	85	99,24	90	99,24	95	99,24	104,46	Sangat Tinggi	99,24	99,24	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngampel
3.05.3.0 5.21.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur	prosen	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngampel

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		dalam berkapakaan dinas																	
3.05.3.0 5.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngampel
3.05.3.0 5.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngampel
3.05.3.0 5.21.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	87,5	86,50	87,5	87,50	87,5	87,50	87,5	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngampel
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100%	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngampel
3.05.3.0 5.21.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100	100%	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngampel
3.05.3.0 5.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.0 5.22.02	Program Peningkatan	persentase sarana dan	prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
	Sarana dan Prasarana Aparatur	prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja																	Selatan
3.05.3.0 5.22.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.0 5.22.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.0 5.22.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	1,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.0 5.22.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu Selatan
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.0 5.22.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan,	%	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaliwungu Selatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		ekonomi, dan PATEN																	
3.05.3.0 5.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3.05.3.0 5.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3.05.3.0 5.23.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3.05.3.0 5.23.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3.05.3.0 5.23.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	1,00	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3.05.3.0 5.23.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	87,75	86,50	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	100,00	Sangat Tinggi	87,75	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3.05.3.0 5.23.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level SPIP	3	1	100%	3,00	100%	3,00	100%	3,00	100%	3,00	300,00	Sangat Tinggi	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
		2. Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas	%	0,85	70%	0,75	0,80	0,80	0,80	0,82	0,80	0,83	0,80	96,08	Sangat Tinggi	0,80	93,82	Sangat Tinggi	
		3. persentase aduan masvarakat atas	%	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%		Status Capaian
		layanan pubik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima																	
		4. Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Skor	B	C	CC	BB	CC	BB	CC	BB	B	BB	100,00	Sangat Tinggi	BB	100,00	Sangat Tinggi	
3.05.3.0 5.23.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100,00	39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3.05.3.0 5.23.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	3,00	2	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	300,00	Sangat Tinggi	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi Perekonomian
Global dan Nasional

Kondisi Perekonomian
Daerah

Kinerja Keuangan
Daerah

Analisis Keuangan
Daerah

Kerangka
Pendanaan



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mendapatkan otonomi dan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dalam usaha penggalan dan penggunaan anggaran, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Pertumbuhan positif di beberapa Negara menunjukkan pemulihan perekonomian global. Pemulihan tersebut didorong oleh program vaksinasi yang terus berjalan di berbagai negara. Di tengah akselerasi vaksinasi Covid-19, dunia masih berhati-hati dengan risiko terjadinya gelombang ketiga dan mutasi virus Covid-19. Mutasi virus yang baru-baru ini muncul diindikasikan dapat menyebar lebih cepat sehingga beberapa negara kembali menutup perbatasan dan kembali memberlakukan restriksi perjalanan. Kondisi ini kemudian menahan laju pemulihan ekonomi global pada akhir triwulan I tahun 2021.

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh 0,4 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2021. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut didorong oleh pertumbuhan pada sebagian besar komponen pengeluaran sejalan dengan mulai dicabutnya pembatasan aktivitas masyarakat. Konsumsi individu tumbuh 1,6 persen (YoY) terutama untuk konsumsi barang seperti kendaraan bermotor dan bagiannya. Sementara itu, konsumsi jasa masih berkontraksi 3,2 persen (YoY), lebih kecil dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 6,8 persen (YoY). Pemulihan konsumsi masyarakat tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Beberapa Negara lainnya juga mengalami pertumbuhan ekonomi kearah positif. Korea Selatan tumbuh 1,8 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2020 (1,4 persen, YoY). Selain itu, Singapura telah kembali tumbuh positif pada triwulan I tahun 2021 sebesar 0,2 persen (YoY). Pemulihan ekonomi Singapura didorong oleh pulihnya kinerja industri barang dan mengecilnya kontraksi pada industri jasa. Jepang masih mengalami kontraksi 1,9 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2021, lebih

dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Turunnya kinerja perekonomian Jepang bersumber dari hampir seluruh kelompok pengeluaran kecuali pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan ekspor.

Perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2021 berkontraksi 0,74 persen (YoY), membaik dibandingkan kontraksi yang terjadi pada triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja sektor eksternal sejalan dengan pemulihan ekonomi di negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok dan Amerika Serikat. Ditinjau dari lapangan usaha, pemulihan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif yang terjadi pada enam sektor yakni industri, pengadaan air, jasa keuangan, pertanian, perdagangan listrik dan gas, serta real estat. Sementara itu, sektor lainnya menunjukkan kontraksi yang menipis.

Sektor pertanian tumbuh 2,95 persen (YoY), lebih tinggi baik dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan I tahun 2020. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan produksi tanaman pangan seiring dengan pergeseran panen raya dan cuaca yang mendukung. Laju pertumbuhan sektor pertanian tertahan oleh kontraksi yang terjadi pada subsektor perikanan dan kehutanan. Kontraksi sebesar 1,3 persen (YoY) pada subsektor perikanan disebabkan oleh curah hujan tinggi dan angin kencang yang menurunkan kualitas air dan menyebabkan gagal panen ikan budidaya. Kontraksi 8,9 persen (YoY) pada subsektor kehutanan disebabkan oleh turunnya permintaan bahan kayu bulat untuk industri kayu. Dari sisi pengeluaran, perekonomian juga menunjukkan perbaikan pada setiap komponennya. Konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor tumbuh positif sementara komponen lainnya mengalami kontraksi yang mengecil. Meskipun separuh komponen pengeluaran telah tumbuh positif, namun konsumsi rumah tangga yang memiliki share terbesar masih berkontraksi cukup dalam.

Pada triwulan I tahun 2021, hampir semua provinsi di Wilayah Jawa masih mengalami kontraksi, kecuali Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi Jawa Tengah berkontraksi sebesar 0,9 persen (YoY), akan tetapi kondisinya lebih baik dibandingkan Triwulan II-IV tahun 2020 yang berkontraksi lebih dalam pada kisaran -3 hingga -5 persen (y-on-y). Secara keseluruhan semua provinsi di Wilayah Jawa mengalami perbaikan ditandai dengan kontraksi yang tidak sedalam triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -31,04 persen. Sementara dari sisi

pengeluaran, yang mengalami kontraksi terdalam sehingga tumbuh negatif adalah komponen Impor Barang dan Jasa sebesar -2,28 persen.

Dibandingkan dengan kinerja pada Triwulan IV-2020, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2021 kembali mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 1,69 persen setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -1,89 persen (q-to-q). Dilihat dari sisi produksi, kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 18,33 persen. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,93 persen. Struktur ekonomi Jawa Tengah Triwulan I-2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,05 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 61,08 persen.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah, yaitu sebesar 61,08 persen. Komponen lainnya, yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Tengah secara berturut-turut meliputi komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 40,56 persen, komponen PMTB sebesar 30,42 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,94 persen, dan komponen PKLNPRRT sebesar 1,17 persen. Sementara komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB Jawa Tengah memiliki peran sebesar 38,81 persen. Untuk besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2021 mencapai Rp345.614,94 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp244.406,10 miliar.

Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, dan dukungan dari pembiayaan diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga

dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, kita berharap masyarakat terus melakukan disiplin di dalam protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Pemerintah tetap akan menjalankan 3T yaitu *testing*, *tracing*, dan *treatment* di dalam mendukung pengendalian penyebaran Covid-19.

Perbaikan pertumbuhan terjadi hampir di sebagian besar lapangan usaha Jawa Tengah antara lain Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi. Anggaran pada penanganan Covid-19 yang berfokus pada kesehatan (pengadaan APD, pemenuhan kebutuhan ruang isolasi, revitalisasi rumah sakit rujukan, insentif tenaga kesehatan); pemulihan ekonomi (pembuatan masker, paket sembako, pasar murah, penguatan BUMDes, pelatihan dan bantuan alat kelompok pemuda, pendidikan perkoperasian dan UKM, subsidi bunga pinjaman bagi koperasi); dan penyediaan jaring pengaman sosial (bantuan pangan non tunai, pemberian vitamin kelompok rentan, tambahan alokasi fakir miskin non produktif, logistik permakanan) dapat memberikan dampak pada turunnya laju konsumsi rumah tangga. Untuk mengembalikan perekonomian secara optimal pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perbaikan-perbaikan yang terkena dampak seperti perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kebijakan percepatan pemulihan perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat Inovasi dunia industri dari skala kecil hingga besar yang pemasarannya melalui Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi opsi terbaik.

3.2 Kondisi Perekonomian Daerah

Adanya pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mengalami kontraksi dimana tahun 2019 diangka 5,71% melambat menjadi -1,53% di tahun 2020. Angka kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 9,44% meningkat menjadi 9,99% di tahun 2020. Tingkat pengangguran juga meningkat dari 6,26% pada tahun 2019 meningkat menjadi 7,56% pada tahun 2020. Dengan kondisi makro yang demikian, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal harus melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian Kabupaten Kendal untuk tahun-tahun yang akan datang. Selain perekonomian, potensi daerah dan sumber daya manusia yang unggul juga menjadi salah satu

prioritas, karena di era globalisasi dan era revolusi industri 4.0, daerah juga dituntut agar mampu bersaing di kancah nasional dan internasional.

3.3 Kinerja Keuangan Daerah

Mendasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Kendal diwujudkan dalam APBD yang dapat ditinjau dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi:

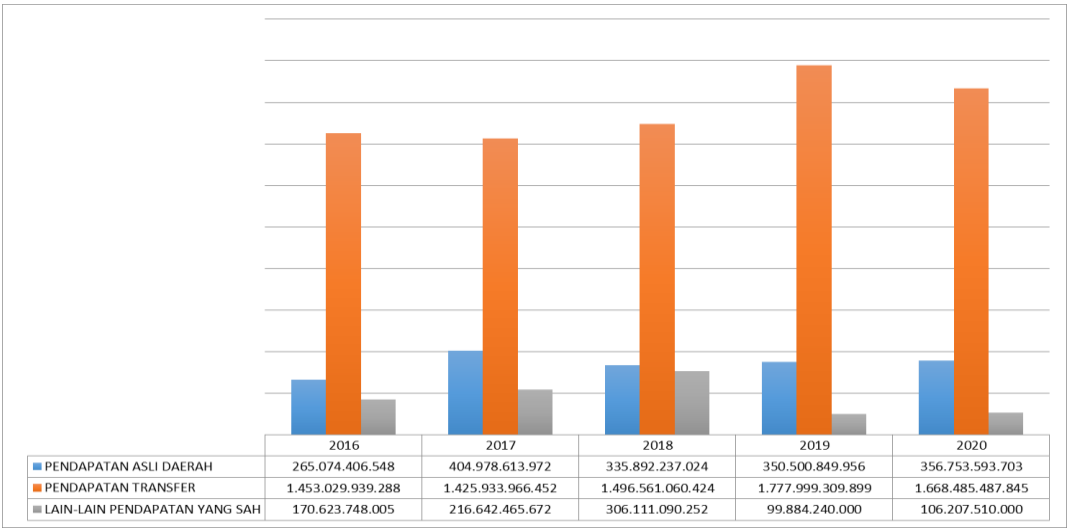
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pendapatan Transfer terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Desa.

Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.1
Tren dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal



Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Total realisasi pendapatan daerah mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,18%. Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal sebagian besar berasal dari PAD. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, realisasi PAD mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,46%, Pendapatan Transfer meningkat sebesar 3,93% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah rata-rata meningkat sebesar 1,81%.

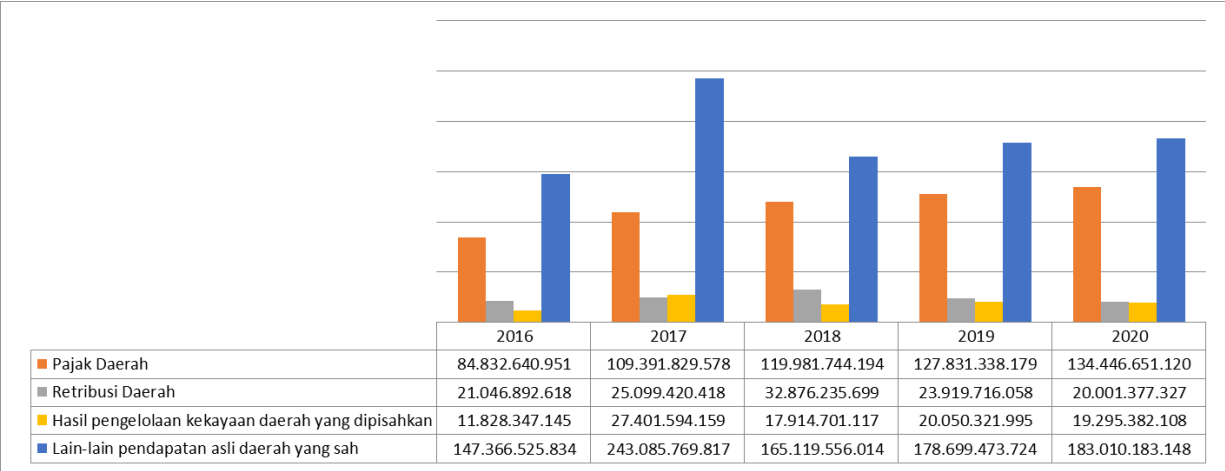
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, PAD Kabupaten Kendal sebagian besar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.2
Tren dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaaa Kekayaan Daerah yang dipisahkan)



Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

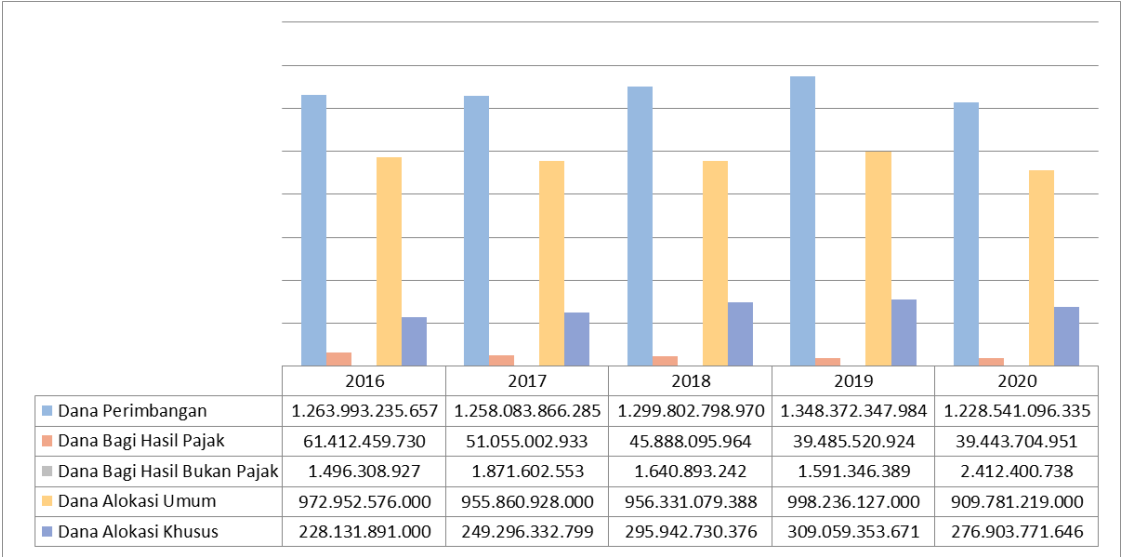
2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
- b. Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Dalam kurun waktu 2016-2020, sumber utama Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 74,92%, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 21,22% dan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 3,86%. Untuk mengetahui trend dan proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.3
Tren dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal

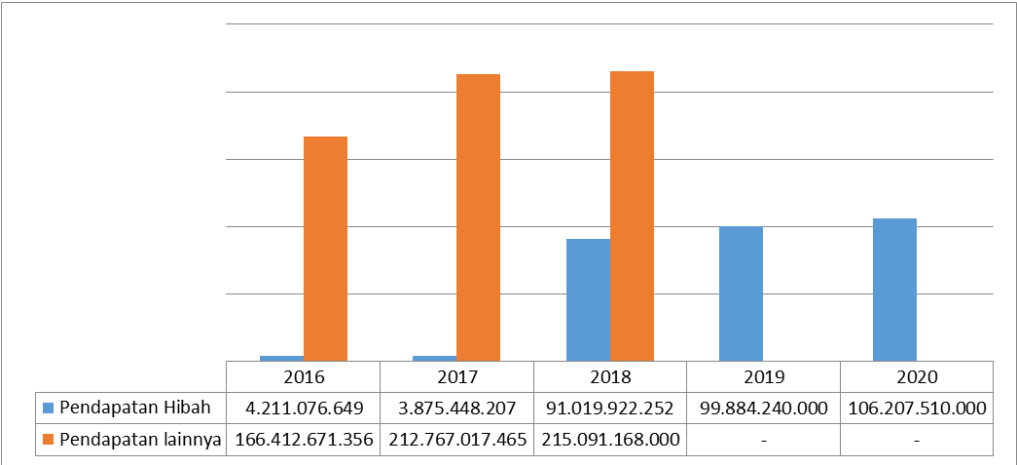


Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Untuk mengetahui trend dan proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.4
Tren dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal (Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya)



Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

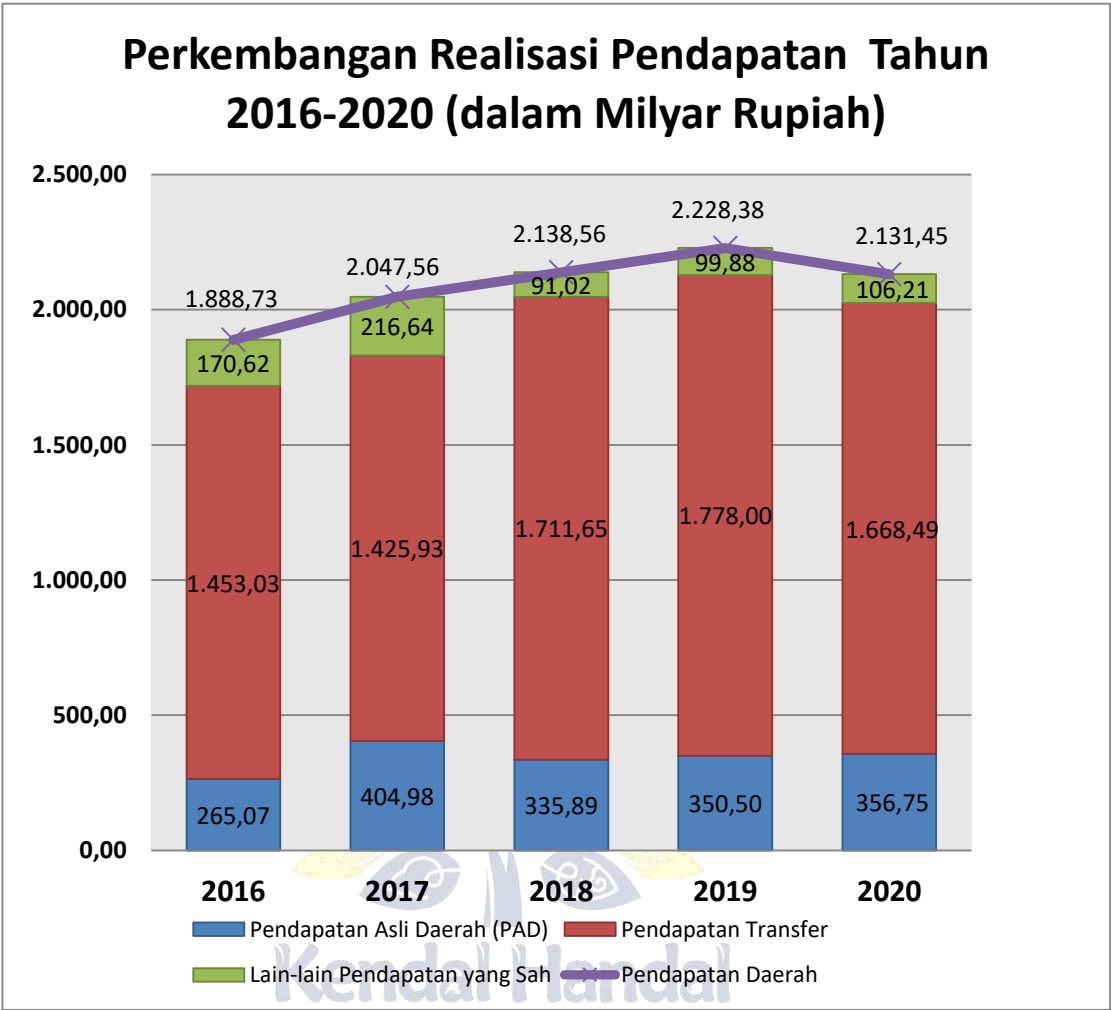
Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH	1.888.728.093.841	2.047.555.046.096	2.138.564.387.700	2.228.384.399.855	2.131.446.591.548
PENDAPATAN ASLI DAERAH	265.074.406.548	404.978.613.972	335.892.237.024	350.500.849.956	356.753.593.703
Pendapatan Pajak Daerah	84.832.640.951	109.391.829.578	119.981.744.194	127.831.338.179	134.446.651.120
Pendapatan Retribusi Daerah	21.046.892.618	25.099.420.418	32.876.235.699	23.919.716.058	20.001.377.327
Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.828.347.145	27.401.594.159	17.914.701.117	20.050.321.995	19.295.382.108
Pendapatan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	147.366.525.834	243.085.769.817	165.119.556.014	178.699.473.724	183.010.183.148
PENDAPATAN TRANSFER	1.453.029.939.288	1.425.933.966.452	1.496.561.060.424	1.777.999.309.899	1.668.485.487.845
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.263.993.235.657	1.258.083.866.285	1.299.802.798.970	1.348.372.347.984	1.228.541.096.335
Dana Bagi Hasil Pajak	61.412.459.730	51.055.002.933	45.888.095.964	39.485.520.924	39.443.704.951
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.496.308.927	1.871.602.553	1.640.893.242	1.591.346.389	2.412.400.738
Dana Alokasi Umum	972.952.576.000	955.860.928.000	956.331.079.388	998.236.127.000	909.781.219.000
Dana Alokasi Khusus	228.131.891.000	249.296.332.799	295.942.730.376	309.059.353.671	276.903.771.646
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	35.237.692.000	-	27.000.000.000	276.891.111.000	293.058.283.000
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	35.237.692.000	-	27.000.000.000	36.454.064.000	44.612.446.000
Pendapatan Dana Desa	-	-	-	240.437.047.000	248.445.837.000
Transfer Pemerintah Provinsi*)	153.799.011.631	167.850.100.167	169.758.261.454	152.735.850.915	146.886.108.510
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	139.793.646.915	128.496.428.284
Pendapatan Bagi Hasil lainnya	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	153.799.011.631	167.850.100.167	169.758.261.454	12.942.204.000	18.389.680.226
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	170.623.748.005	216.642.465.672	306.111.090.252	99.884.240.000	106.207.510.000
Pendapatan Hibah	4.211.076.649	3.875.448.207	91.019.922.252	99.884.240.000	106.207.510.000
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan lainnya	166.412.671.356	212.767.017.465	215.091.168.000	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021

Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.5
Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Dari grafik tersebut diketahui total Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, namun pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan. Hal ini karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda tidak hanya di Indonesia akan tetapi seluruh dunia.

1. Permasalahan dan Solusi

Realisasi target Pendapatan Daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Permasalahan eksternal

antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi dan adanya pandemi *Covid-19* yang berpengaruh pada keadaan ekonomi maupun sosial masyarakat. Adapun permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain belum optimalnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah pengelola pajak daerah, Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya dalam hal keterpaduan data dan pengkoneksian sistem pengelolaan Pendapatan Daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan Daerah dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan pendapatan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain :

- a. meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah melalui penyederhanaan prosedur pelayanan perpajakan dan terus memperbaiki serta menyempurnakan sistem informasi perpajakan untuk lebih memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi daerah melalui perbaikan sarana prasarana maupun penerapan E-Retribusi secara bertahap.
- c. menyelenggarakan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
- d. melakukan sosialisasi/ penyuluhan kepada wajib pajak/ retribusi agar membayar pajak sesuai ketentuan dan penegakan disiplin pembayaran pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
- e. mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisa serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- f. meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah maupun antara Organisasi Perangkat Daerah

pengelola pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah terhadap optimalisasi pendapatan daerah.

- g. melakukan pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran (kanal pembayaran) serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan Bank Jateng, Kantor Pos, Indomaret, Tokopedia, Gopay dan agen Laku Pandai Bank Jateng.
- h. meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Perangkat Daerah pengampu Dana Transfer, Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pencairan Dana Transfer.

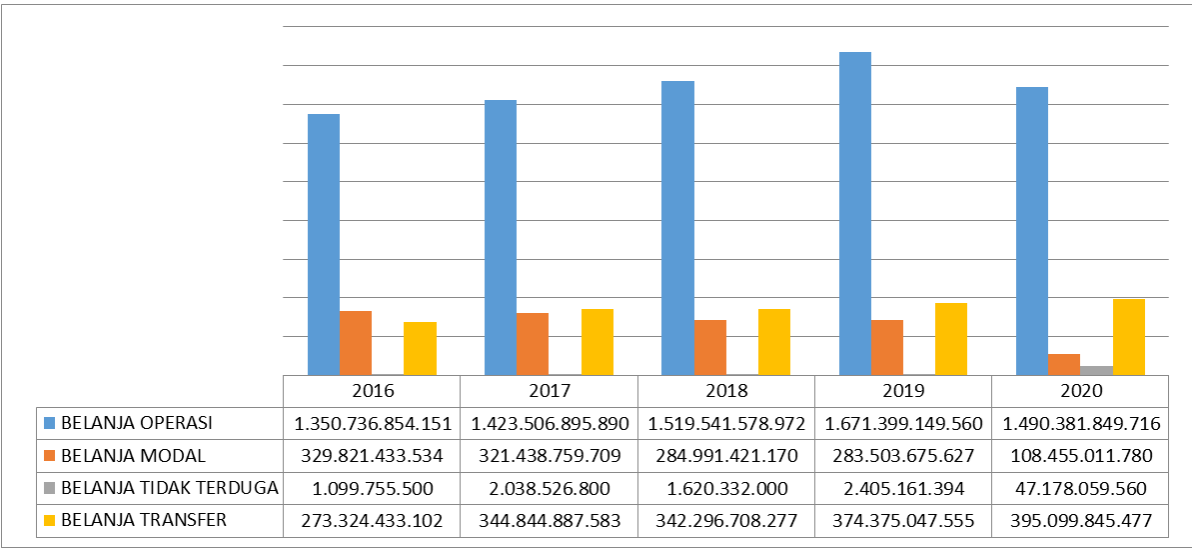
3.3.2 Belanja Daerah

Mendasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Struktur Belanja Daerah juga mengalami perubahan, yakni terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal;
- 3) Belanja Tidak Terduga; dan
- 4) Belanja Transfer.

Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,44%. Gambaran realisasi belanja daerah Kabupaten Kendal sebagaimana gambar sebagai berikut.

Gambar 3.6
Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

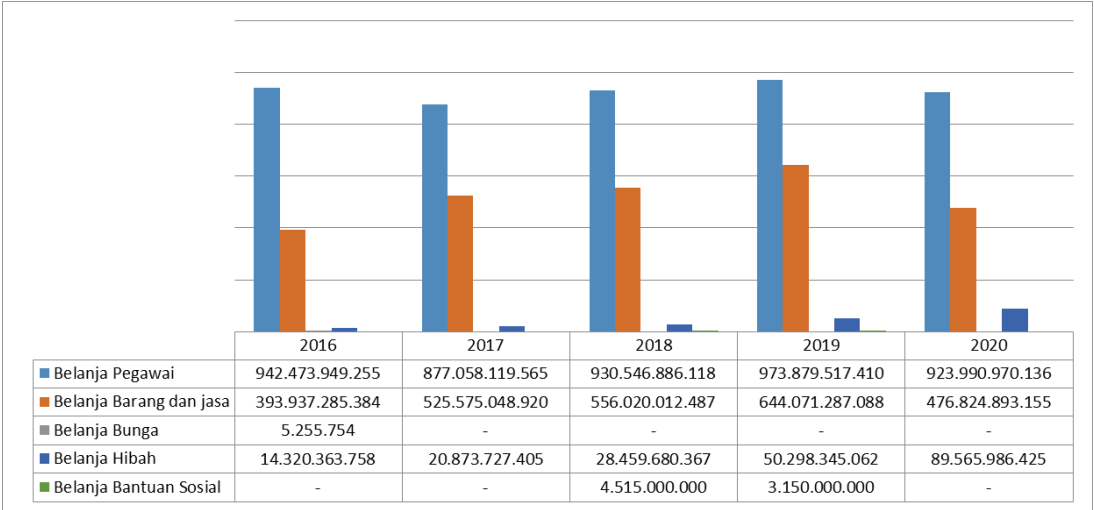
1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas:

- a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan /anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yang diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Gambaran realisasi belanja operasi Kabupaten Kendal sebagaimana gambar sebagai berikut.

Gambar 3.7
Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

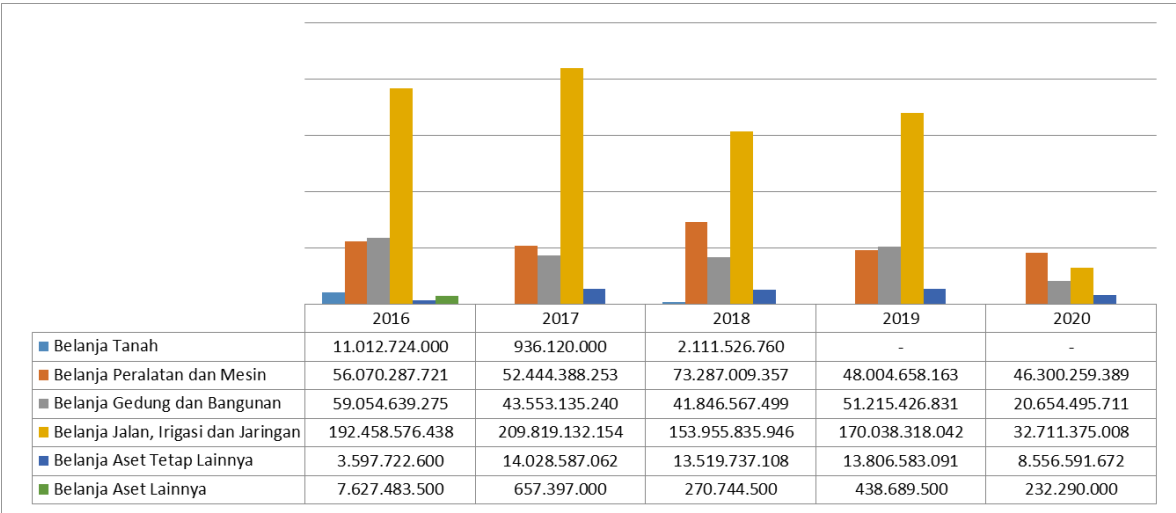
2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas:

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Aset Lainnya.

Gambaran realisasi belanja modal Kabupaten Kendal sebagaimana gambar sebagai berikut.

Gambar 3.8
Realisasi Modal Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya

Perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

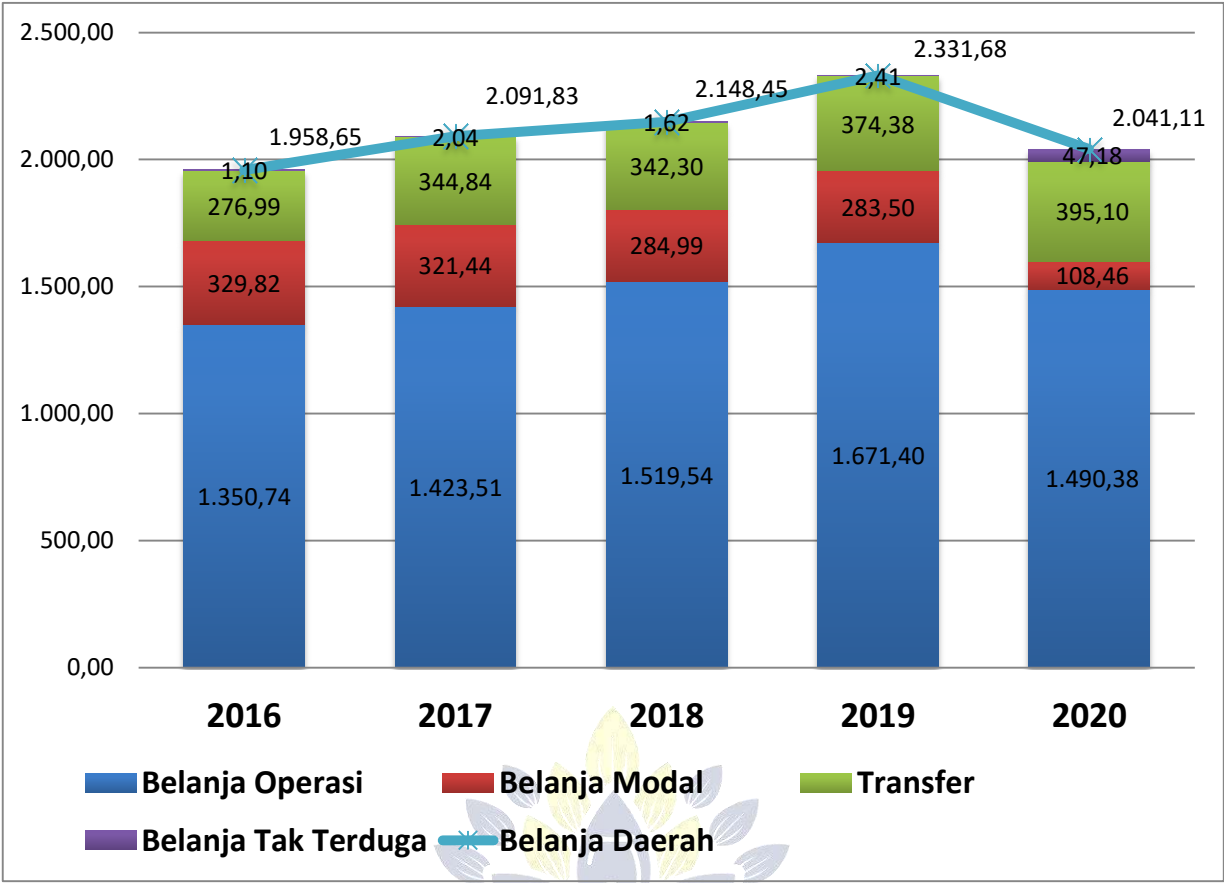
URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA	1.954.982.476.287	2.091.829.069.982	2.148.450.040.419	2.331.683.034.136	2.041.114.766.533
BELANJA OPERASI	1.350.736.854.151	1.423.506.895.890	1.519.541.578.972	1.671.399.149.560	1.490.381.849.716
Belanja Pegawai	942.473.949.255	877.058.119.565	930.546.886.118	973.879.517.410	923.990.970.136
Belanja Barang dan jasa	393.937.285.384	525.575.048.920	556.020.012.487	644.071.287.088	476.824.893.155
Belanja Bunga	5.255.754	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	14.320.363.758	20.873.727.405	28.459.680.367	50.298.345.062	89.565.986.425
Belanja Bantuan Sosial	-	-	4.515.000.000	3.150.000.000	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	329.821.433.534	321.438.759.709	284.991.421.170	283.503.675.627	108.455.011.780
Belanja Tanah	11.012.724.000	936.120.000	2.111.526.760	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	56.070.287.721	52.444.388.253	73.287.009.357	48.004.658.163	46.300.259.389
Belanja Gedung dan Bangunan	59.054.639.275	43.553.135.240	41.846.567.499	51.215.426.831	20.654.495.711
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.458.576.438	209.819.132.154	153.955.835.946	170.038.318.042	32.711.375.008
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.597.722.600	14.028.587.062	13.519.737.108	13.806.583.091	8.556.591.672
Belanja Aset Lainnya	7.627.483.500	657.397.000	270.744.500	438.689.500	232.290.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.099.755.500	2.038.526.800	1.620.332.000	2.405.161.394	47.178.059.560
Belanja Tidak Terduga	1.099.755.500	2.038.526.800	1.620.332.000	2.405.161.394	47.178.059.560
BELANJA TRANSFER	273.324.433.102	344.844.887.583	342.296.708.277	374.375.047.555	395.099.845.477
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**)	11.648.013.393	11.251.676.120	16.596.348.783	21.038.517.880	14.976.918.783
Bagi Hasil Pajak	9.041.322.169	8.785.730.200	12.786.657.600	18.523.317.758	13.740.139.419
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.606.691.224	2.465.945.920	3.809.691.183	2.515.200.122	1.236.779.364
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	261.676.419.709	333.593.211.463	325.700.359.494	353.336.529.675	380.122.926.694
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	972.828.057	332.386.381.369	324.664.937.400	352.332.216.900	379.162.169.500
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	260.703.591.652	1.206.830.094	1.035.422.094	1.004.312.775	960.757.194

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
SURPLUS / (DEFISIT)	(66.254.382.446)	(44.274.023.886)	(9.885.652.719)	(103.298.634.281)	90.331.825.015
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	378.467.152.223	297.142.223.911	234.877.915.025	212.488.849.034	97.695.464.753
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	378.230.336.423	297.125.254.911	234.868.200.025	212.484.349.034	97.690.214.753
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Piutang	236.815.800	16.969.000	9.715.000	4.500.000	5.250.000
PENGELUARAN DAERAH	15.087.514.866	18.000.000.000	12.500.000.000	11.500.000.000	6.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	18.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	87.514.866	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	363.379.637.357	279.142.223.911	222.377.915.025	200.988.849.034	91.695.464.753
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	297.125.254.911	234.868.200.025	212.492.262.306	97.690.214.753	182.027.289.768

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021



Gambar 3.9
Realisasi Belanja Tahun 2016-2020 (dalam Milyar)



Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Proporsi Belanja langsung terhadap total Belanja Daerah dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 terus meningkat, namun pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya kebijakan anggaran belanja *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran guna penanganan wabah tersebut .

1. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja antara lain :

- a. Adanya aturan penganggaran Belanja Tidak Terduga yang bersifat penyediaan,
- b. Belanja Pegawai penyediaan CPNS, Acres dan PPPK, sisa tunjangan pegawai pensiun dan sisa insentif pemungutan,
- c. Belanja Hibah untuk BOP PAUD ada sisa karena mendasarkan pada Dapodik tahun sebelumnya.
- d. *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19.

Adapun permasalahan internal antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, di samping itu juga ada efisiensi/ penghematan belanja, antara lain dengan pelaksanaan lelang dengan nilai kontrak di bawah anggaran dan atau pembelian barang dan jasa di bawah harga standar harga/ kegiatan. Solusi yang dilakukan terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun 2020 antara lain:

- a. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik serta proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih awal.
- b. Perlunya pemantauan progres kegiatan, bila terlambat/tidak sesuai jadwal perlu penyelesaian masalahnya dan percepatan kegiatan tersebut, juga pencermatan bila ada kegiatan yang tidak sesuai atau diperkirakan tidak bisa dilaksanakan segera diambil solusi penyelesaiannya.
- c. Penyelesaian program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif dan selektif karena pendapatan APBD Kabupaten Kendal masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dana hibah pemerintah, dana bagi hasil pajak serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- d. Perlunya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kementerian terkait agar terwujud harmonisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun perencanaannya di tahun selanjutnya
- e. Perlunya efektivitas kerja dan pencermatan untuk efisiensi anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang berupa belanja tidak langsung termasuk belanja pegawai.
- f. Perlunya konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan penerapan Analisis standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku.
- g. Penyelarasan program Perangkat Daerah dengan prioritas program nasional, regional dan daerah.

3.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada

hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	378.467.152.223	297.142.223.911	234.877.915.025	212.488.849.034	97.695.464.753
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	378.230.336.423	297.125.254.911	234.868.200.025	212.484.349.034	97.690.214.753
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Piutang	236.815.800	16.969.000	9.715.000	4.500.000	5.250.000
PENGELUARAN DAERAH	15.087.514.866	18.000.000.000	12.500.000.000	11.500.000.000	6.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	18.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	87.514.866	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	363.379.637.357	279.142.223.911	222.377.915.025	200.988.849.034	91.695.464.753
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	297.125.254.911	234.868.200.025	212.492.262.306	97.690.214.753	182.027.289.768

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebagaimana hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penerimaan Kembali Piutang merupakan pengembalian pokok pinjaman bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang disalurkan sejak tahun 2001 dan saat ini sudah tergolong dalam piutang macet.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan di Tahun Anggaran 2016-2020 yang meliputi penganggaran untuk penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah.

3. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari Tahun Anggaran 2016 sampai pada Tahun 2019 selalu mengalami penurunan kemudian Tahun 2020 mengalami kenaikan SiLPA untuk senilai Rp.84.337.075.015,00. Kenaikan nilai SiLPA ini disebabkan karena kondisi wabah *Covid-19* yang mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksana sesuai rencana.

3.4 Analisis Keuangan Daerah

3.4.1 Derajat Desentralisasi Fiskal

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah Pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah lainnya.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal. Jika nilainya tinggi, menunjukkan derajat desentralisasinya besar (mandiri).

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah derajat yang menggambarkan perbandingan antara kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan atau penerimaan daerah di APBD. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kendal periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kapabilitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

TAHUN	PAD	PENDAPATAN	%
2016	263.274.261.742	1.833.356.474.931	14,36
2017	395.818.878.534	2.057.834.605.083	19,23
2018	338.052.929.990	2.127.823.036.990	15,89
2019	412.512.717.638	2.344.033.949.116	17,60
2020	333.650.044.139	2.149.414.537.843	15,52
2021	415.542.060.688	2.278.236.519.171	18,24
Rata-Rata	359.808.482.122	2.131.783.187.189	16.81

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kendal periode 2016-2021 adalah sebesar 16,81%. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran PAD dalam pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan masih kecil. Upaya untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan tata kelola potensi pajak dan retribusi daerah, serta sumber-sumber PAD lainnya masih harus terus dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan peran dan proporsi PAD sebagai sumber dana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

3.4.2 Indeks Kinerja Keuangan

Indeks Kinerja Keuangan (IKK) diukur dengan 4 (empat) indikator sebagai berikut :

1. Ketergantungan Fiskal (KF)

Ketergantungan Fiskal merupakan persentase dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah dikurang belanja pegawai dalam total pendapatan anggaran daerah di APBD. Belanja pegawai dalam hal ini adalah belanja pegawai yang diperuntukan bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta hak-hak yang diterima oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Ketergantungan Fiskal Kabupaten Kendal selama 2016-2021 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Ketergantungan Fiskal Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

TAHUN	DAU	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai Terhadap DAU	Sisa	Pendapatan	%
2016	972.952.576.000	942.473.949.255	96,87	297.125.254.911	1.833.356.474.931	16,21
2017	955.860.928.000	877.058.119.565	91,76	234.868.200.025	2.057.834.605.083	11,41
2018	956.331.079.388	930.546.886.118	97,30	212.492.262.306	2.127.823.036.990	9,99
2019	998.236.127.000	973.879.517.410	97,56	97.690.214.753	2.344.033.949.116	4,17
2020	909.781.219.000	923.990.970.136	101,56	182.027.289.768	2.149.414.537.843	8,47
2021	931.382.224.000	1.129.394.130.453	121,26	0	2.278.236.519.171	0,00
Rata-Rata	954.090.692.231	962.890.595.490	101,05	170.700.536.961	2.131.783.187.189	8,37

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Dari data tersebut dapat di lihat bahwa rata-rata DAU yang digunakan untuk belanja pegawai adalah sebesar 101,05%. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Kabupaten Kendal tidak semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Hal tersebut tampak pada angka indeks yang rata-rata adalah sebesar 8.37%. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa masih ada DAU yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP)

Kapasitas Penciptaan Pendapatan merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD berdasarkan Kapasitas Penciptaan Pendapatan di daerah. Proporsi PAD disini tidak dinyatakan terhadap total nilai APBD namun dinyatakan sebagai persentase dari PDRB kabupaten. Kapasitas Penciptaan Pendapatan selama 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

TAHUN	PAD	PDRB	%
2016	263.274.261.742	26.970.000.000.000	0,98
2017	395.818.878.534	35.570.000.000.000	1,11
2018	338.052.929.990	28.830.000.000.000	1,17
2019	412.512.717.638	30.900.000.000.000	1,33
2020	333.650.044.139	30.910.000.000.000	1,08
Rata-Rata	348.661.766.409	30.636.000.000.000	1,14

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan kenaikan pendapatan masih cukup rendah yaitu berada di angka 1,33%. Hal ini berarti harus diupayakan kegiatan-kegiatan yang menjadi pemacu untuk dapat terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Proporsi Belanja Modal (PBM)

Proporsi Belanja Modal merupakan indikator yang menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah yang memberikan manfaat jangka panjang sehingga memberikan efek multiplier yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. PBM dirumuskan sebagai persentase belanja modal dengan total belanja pada APBD.

Tabel 3.7
Proporsi Belanja Modal Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

TAHUN	BELAJA MODAL	BELANJA	%
2016	329.821.433.534	1.954.982.476.287	16,87
2017	321.438.759.709	2.091.829.069.982	15,37
2018	284.991.421.170	2.148.450.040.419	13,26
2019	283.503.675.627	2.331.683.034.136	12,16
2020	108.455.011.780	2.041.114.766.533	5,31
2021	174.670.048.442	2.312.194.067.943	7,55
Rata-rata	250.480.058.377	2.146.708.909.217	11,75

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Proporsi Belanja modal menggambarkan besarnya persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Selama periode 2013-2017 alokasi belanja modal mengalami fluktuasi sangat tergantung pada penetapan skala prioritas pada perencanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya. Selain itu, hal ini juga sering dipengaruhi oleh

kebijakan posting anggaran terkait dengan pengakuan/pencatatan aset pada akhir tahun kegiatan.

4. Kontribusi Sektor Pemerintah

Kontribusi Sektor Pemerintah merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian, dimana dinyatakan sebagai persentase total belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten.

Tabel 3.8
Kontribusi Sektor Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja	PDRB	%
2016	1.954.982.476.287	26.970.000.000.000	7,25
2017	2.091.829.069.982	35.570.000.000.000	5,88
2018	2.148.450.040.419	28.830.000.000.000	7,45
2019	2.331.683.034.136	30.900.000.000.000	7,55
2020	2.041.114.766.533	30.910.000.000.000	6,60
Rata-rata	2.113.611.877.471	30.636.000.000.000	6,95

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Kontribusi sektor pemerintah dalam mengerakkan pembangunan daerah berada di kisaran angka rata-rata 1,45%. Hal ini menunjukan bahwa belanja sektor pemerintah relatif stabil setiap tahunnya. Berdasarkan 4 (empat) indikator di atas maka dapat diketahui Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

TAHUN	KF	KPP	PBM	KSP	Jumlah	IKK
2016	96,87	0,98	16,87	7,25	121,97	30,49
2017	91,76	1,11	15,37	5,88	114,12	28,53
2018	97,30	1,17	13,26	7,45	119,18	29,80
2019	97,56	1,33	12,16	7,55	118,60	29,65
2020	101,56	1,08	5,31	6,60	114,55	28,64
2021	121,26		7,55		128,81	64,41
Rata-rata	101,05	1,13	11,75	6,95	119,54	35,25

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dimana angka IKK berada di angka yang relatif stabil menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Kabupaten Kendal cenderung tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Hal ini dapat diartikan sebagai kestabilan kinerja keuangan daerah namun dapat juga

diartikan sebagai belum optimalnya upaya daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga belanja pembangunan cenderung juga mengalami stagnasi ketersediaan alokasi anggaran.

3.5 Kerangka Pendanaan

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2013-2018, maka pendapatan daerah tahun 2019–2023 diupayakan dapat meningkat. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sebagaimana Tabel 3.4. Untuk memenuhi kebutuhan belanja, salah satunya dapat digunakan melalui pinjaman daerah.

1. Pendapatan Daerah

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, upaya yang ditempuh diantaranya adalah meningkatkan PAD. Untuk pencapaian PAD dengan menggunakan kebijakan/strategi yaitu :

1. Intensifikasi Pajak Asli Daerah (PAD), meliputi penagihan secara intensif terhadap sumber-sumber pajak asli daerah, penilaian kepada individu wajib pajak, untuk meng upgrade data wajib pajak, sehingga target dapat dinaikkan, sedangkan dari segi teknologi langkah yang diambil untuk menaikkan potensi PAD adalah melakukan modernisasi alat untuk memantau potensi pajak, sehingga tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan realita di lapangan. Intensifikasi dilakukan juga terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, dengan menaikkan tarif PBB dan BPHTB.
2. Ekstensifikasi Pajak Asli Daerah (PAD), meliputi Pendataan wajib pajak baru, sebagai upaya menggali potensi pajak asli daerah, baik dari pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, PBB, BPHTB dan seterusnya. Hal tersebut akan meningkatkan target pajak asli daerah.

2. Belanja Daerah

Kenaikan anggaran belanja pegawai yang di tahun direncanakan dalam RPJMD 2021–2026, digunakan untuk penyediaan adanya tambahan ASN di tahun 2022, dan penyediaan tambahan ASN di tahun-tahun berikutnya. Pada belanja barang terdapat kenaikan pagu anggaran yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pagu anggaran hibah pada RPJMD 2021–2026 diberikan pada lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang menunjang program prioritas daerah.

Kenaikan dan penurunan belanja modal pada RPJMD 2021-2026 dipergunakan untuk prasyarat penggunaan Dana Transfer Umum (DTU)

yang mewajibkan sebesar 25% belanja modal dari DTU, dalam rangka infrastruktur pelayanan publik dan meningkatkan aset daerah.

Kenaikan pagu anggaran dipergunakan untuk penyediaan apabila terjadi keadaan darurat atau kepentingan mendesak, dan dalam rangka memenuhi aturan kenaikan belanja tidak terduga harus mengalami kenaikan 15 % sampai dengan 10 % dari tahun sebelumnya.

Pada belanja bagi hasil pagu anggaran pada RPJMD 2021-2021 digunakan untuk menyesuaikan target pendapatan yang mengalami kenaikan targetnya, sebesar 10 %. Belanja bantuan keuangan pada obyek belanja Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami kenaikan, untuk memenuhi syarat penganggaran sebesar 10 % dari DTU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, sedangkan pada obyek belanja Dana Desa (DD) merupakan penerusan dari pemerintah pusat. Sedangkan pada obyek Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada dusun, dipenuhi dalam rangka untuk melaksanakan visi misi dan program unggulan Bupati Kendal tahun 2021-2026.

3. Pembiayaan Daerah

SILPA digunakan untuk penyeimbang di tahun 2022-2023 antara pendapatan, belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan capaian pendapatan, sedangkan di tahun 2024 terdapat pencairan dana cadangan Pilkada dan Pilkades. Pembentukan Dana Cadangan tahun Anggaran pada tahun 2022 dan 2023 senilai Rp.25.000.000.000,00 diperuntukkan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024. Selain itu dipergunakan untuk pengembangan dan/atau penyertaan modal BUMD sesuai dengan peraturan daerah tentang BUMD yang telah ditetapkan dalam peraturan penyertaan modal. Kenaikan SILPA juga digunakan untuk penyeimbang antara pendapatan, belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan capaian pendapatan.

Tabel 3.10
Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH	2.278.236.519.171,00	2.398.503.775.879,00	2.440.917.666.527,00	2.489.524.785.430,00	2.535.875.206.109,00	2.581.943.213.844,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	415.542.060.688,00	565.639.024.396,00	608.052.915.044,00	656.660.033.947,00	703.010.454.626,00	749.078.462.361,00
Hasil Pajak Daerah	174.220.000.000,00	301.061.000.000,00	329.367.099.980,00	358.959.809.978,00	387.159.150.976,00	413.516.627.674,00
Hasil Retribusi Daerah	19.312.746.900,00	30.082.300.000,00	33.332.724.900,00	37.199.027.615,00	41.195.954.933,00	45.247.666.060,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.345.000.000,00	19.000.000.000,00	19.228.000.000,00	19.458.736.000,00	19.692.240.000,00	19.928.500.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	206.664.006.288,00	215.495.724.396,00	226.125.090.164,00	241.042.460.354,00	254.963.108.717,00	270.385.668.627,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.768.204.458.483,00	1.738.374.751.483,00	1.738.374.751.483,00	1.738.374.751.483,00	1.738.374.751.483,00	1.738.374.751.483,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.602.490.919.483,00	1.572.661.212.483,00	1.572.661.212.483,00	1.572.661.212.483,00	1.572.661.212.483,00	1.572.661.212.483,00
Dana perimbangan	1.314.796.489.483,00	1.284.966.782.483,00	1.284.966.782.483,00	1.284.966.782.483,00	1.284.966.782.483,00	1.284.966.782.483,00
Dana Transfer Umum	969.343.594.362,00	939.513.887.362,00	939.513.887.362,00	939.513.887.362,00	939.513.887.362,00	939.513.887.362,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00
Dana Alokasi Umum	931.382.224.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00
Dana Transfer Khusus.	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00
Dana Insentif Daerah	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00
Dana Insentif Daerah	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00
dana otonomi khusus						
dana keistimewaan						
Dana Desa	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00
Dana Desa	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Transfer Antar-Daerah	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00
Hibah dari Pemerintah	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.312.194.067.943,00	2.437.603.775.879,00	2.446.417.666.527,00	2.561.624.785.430,00	2.557.375.206.109,00	2.603.443.213.844,00
BELANJA OPERASI	1.758.177.938.243,00	1.774.798.796.488,00	1.721.928.171.039,00	1.841.759.388.670,00	1.820.665.378.118,00	1.843.963.323.471,00
Belanja Pegawai	1.129.394.130.453,00	1.165.367.172.766,00	1.150.137.740.439,00	1.164.336.128.670,00	1.180.140.532.118,00	1.193.802.823.871,00
Belanja Barang dan Jasa	548.064.846.490,00	543.382.056.472,00	514.961.530.600,00	525.194.360.000,00	570.294.846.000,00	580.782.499.600,00
Belanja Bunga	-	25.000.000,00	-	-	-	-
Belanja Hibah	68.898.961.300,00	60.178.567.250,00	45.008.900.000,00	140.408.900.000,00	58.410.000.000,00	57.558.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	11.820.00.000,00	5.846.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00
BELANJA MODAL	174.670.048.442,00	170.927.913.846,00	203.240.000.000,00	195.270.000.000,00	207.894.804.400,00	225.623.948.000,00
Belanja Modal	174.670.048.442,00	170.927.913.846,00	203.240.000.000,00	195.270.000.000,00	207.894.804.400,00	225.623.948.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.860.000.000,00	11.860.000.000,00	12.860.000.000,00	12.860.000.000,00	13.860.000.000,00	15.860.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	7.860.000.000,00	11.860.000.000,00	12.860.000.000,00	12.860.000.000,00	13.860.000.000,00	15.860.000.000,00
BELANJA TRANSFER	371.486.081.258,00	480.017.065.545,00	508.389.495.488,00	511.735.396.760,00	514.955.023.591,00	517.995.942.373,00
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**)	15.766.568.258,00	33.114.330.000,00	36.269.982.488,00	39.615.883.760,00	42.835.510.591,00	45.876.429.373,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	13.835.268.818,00	30.106.100.000,00	32.936.709.998,00	35.895.980.998,00	38.715.915.098,00	41.351.662.767,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.931.299.440,00	3.008.230.000,00	3.333.272.490,00	3.719.902.762,00	4.119.595.493,00	4.524.766.606,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	355.719.513.000,00	446.902.735.545,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	355.719.513.000,00	446.902.735.545,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pemerintahan Desa						
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)	(33.957.548.772,00)	(39.100.000.000,00)	(5.500.000.000,00)	(72.100.000.000,00)	(21.500.000.000,00)	(21.500.000.000,00)
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan	51.957.548.772,00	75.000.000.000,00	55.000.000.000,00	95.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	51.957.548.772,00	75.000.000.000,00	55.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Pencairan dana cadangan	-	-	-	50.000.000.000,00	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000,00	35.900.000.000,00	49.500.000.000,00	22.900.000.000,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan Daerah	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	18.000.000.000,00	10.900.000.000,00	24.500.000.000,00	22.900.000.000,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	33.957.548.772,00	39.100.000.000,00	5.500.000.000,00	72.100.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021)

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan Pembangunan

Telaahan K.L.H.S
Kabupaten Kendal

Isu Strategis



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Gambaran permasalahan di Kabupaten Kendal dapat terlihat dari bab-bab sebelumnya yang menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama lima tahun kedepan. Permasalahan tersebut tidak lepas dari permasalahan global, nasional maupun daerah yang menjadi tantangan dalam pembangunan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan di kabupaten mendasarkan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kendal, adapun permasalahan-permasalahan pembangunan di kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan.

- a. Masih rendahnya APK PAUD dan APK SMP, tahun 2020 APK PAUD sebesar 56,79% dan APK SMP sebesar 86,25%.
- b. Masih kurangnya ruang kelas dalam kondisi baik SD maupun SMP. Tahun 2020 untuk SD sebesar 71,33% dan SMP sebesar 79,89%.
- c. Masih kurangnya ruang perpustakaan SD dan SMP dalam kondisi baik, tahun 2020 SD sebesar 71,33% dan SMP sebesar 79,89%.
- d. Masih rendahnya persentase pendidik memiliki sertifikasi, tahun 2020 untuk TK sebesar 44,92% SD sebesar 60,52% dan SMP sebesar 61,07%.
- e. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Tengah dan target nasional.
- f. Belum optimalnya harapan lama sekolah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Kendal.
- g. Masih kurangnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas serta belum memenuhi Standar Kompetensi.

- h. Masih tingginya angka putus sekolah (APts) sehingga akan mempengaruhi indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten Kendal dalam hal bidang Pendidikan.
- i. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran belum terpenuhi sesuai standar sarana prasarana pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.

2. Kesehatan.

- a. Masih ditemukan kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, tahun 2020 AKB sebesar 10/ 1.000 KH, AKABA sebesar 12,4/ 1.000 KH dan AKI sebesar 115,79/100.000 KH. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, tenaga kesehatan yang belum optimal, dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat belum optimal.
- b. Masih ditemukannya gizi buruk dan stunting, tahun 2020 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,05% dan balita stunting sebesar 17,54% berdasarkan data EPPBGM 2020.
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan (puskesmas sesuai permenkes 75/2016 masih 30% pada tahun 2020.
- d. Belum semua penduduk mendapat pelayanan minimal sebagaimana PMK No 4 tahun 2019.
- e. Belum optimalnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat, tahun 2020 rumah ber PHBS sebesar 84,73%.
- f. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker, Jantung).

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.

- a. Belum optimalnya kinerja sistem irigasi, capaian tahun 2020 indeks kinerja sistem irigasi tercatat sebesar 1,02 %.
- b. Masih terdapat drainase jalan dalam kondisi tidak baik, pada tahun 2020 drainase jalan kondisi baik sebesar 87 %.
- c. Masih terdapat jalan dalam kondisi tidak baik (rusak berat, sedang dan ringan) sebesar 32,97 % pada tahun 2020.
- d. Belum optimalnya pencapaian SPM tahun 2020, akses air minum layak dan aman sebesar 93 %, Akses sanitasi layak sebesar 92 %.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - a. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni, tahun 2020 sebesar 13,09 % rumah tidak layak huni belum tertangani.
 - b. Masih terdapat Kawasan kumuh sebesar 134,76 ha pada tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Nomor : 648.2/121/2021.
 - c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan, baru sebesar 40,91 %.
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - a. Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah, tahun 2020 sebesar 90%.
 - b. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - c. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) baru sebesar 95% pada tahun 2020.
 - d. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2020 baru sebesar 10,96% desa risiko tinggi.
6. Sosial.
 - a. Masih minimnya peningkatan kapasitas ataupun pemberdayaan pada lembaga kesejahteraan sosial, tahun 2020 sebesar 9%.
 - b. Rendahnya cakupan pemenuhan standar pelayanan minimal pada kelompok PPKS.
 - c. Belum optimalnya penanganan PPKS diluar korban HIV dan NAPZA.
 - d. Belum validnya data kemiskinan.
 - e. Belum optimalnya pemenuhan standar taman makam pahlawan, tahun 2020 sebesar 0,7%.

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja.
 - a. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah. Tahun 2020 sebesar 7,56%.
 - b. Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, tahun 2020 Pencari kerja yang ditempatkan sebesar 43%.
 - c. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- d. Menurunnya Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB tahun 2020 menjadi sebesar 53%.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak, tahun 2020 sebesar 0,03%.
 - b. Masih belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak, hal ini karena pada tahun 2020 baru sebesar 8% cakupan pembentukan desa layak anak.
 - c. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga, hal ini dapat dilihat dari Cakupan IR yang mendapat pelatihan baru mencapai 20% pada tahun 2020 ini masih banyak perlu pembinaan dan pelatihan mengingat munculnya pelaku IR Baru.
 - d. Belum optimalnya pelaksanaan PUG, tahun 2020 kelembagaan PUG yang aktif sebesar 60%.
3. Pangan.
 - a. Belum terpenuhinya ketersediaan cadangan pangan daerah yang tersedia (capaian tahun 2020 mencapai sebesar 31,5% dari 100 ton).
 - b. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin/rentan, sampai dengan 2020 sebesar 52,72%.
 - c. Belum optimalnya tingkat konsumsi pola pangan bergizi seimbang dan aman (B2SA) secara luas dalam masyarakat, tahun 2020 skor PPH sebesar 87,2.
4. Pertanian.

Masih terdapat bidang tanah milik Pemda yang belum bersertifikat Tahun 2020 tanah milik Pemda bersertifikat 42,01 %.
5. Lingkungan hidup.
 - a. Capaian indek kualitas lingkungan hidup sebesar 66,37 (kurang baik).
 - b. Belum terpenuhinya penyediaan ruang terbuka hijau (17,73 % pada tahun 2020).
 - c. Menurunnya persentase sampah tertangani, capaian tahun 2020 sebesar 20,5 %.
 - d. Belum optimalnya daerah layanan pengangkutan ke TPA, baru 17 kecamatan dari total 20 kecamatan yang ada.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - a. Masih rendahnya persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak dimana pada tahun 2020 baru mencapai 33,09%.
 - b. Masih adanya penduduk belum memiliki KTP elektronik. Kepemilikan KTP elektronik pada tahun 2020 sebesar 99,31%.
 - c. Masih rendahnya persentase kepemilikan akta kelahiran (tahun 2020 sebesar 69,36%).
 - d. Belum optimalnya kepemilikan akta kelahiran anak (kelompok usia 0-18 tahun) sebesar 95,07% pada tahun 2020.
 - e. Rendahnya kepemilikan dokumen perkawinan, tahun 2020 sebesar 12,98%.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - a. Belum semua desa memiliki BUMDes, sampai dengan tahun 2020 hanya sebanyak 180 BUMDes dari sebanyak 266 desa (67,6%), dan sebanyak 0,64% dari 180 BUMDes memiliki kategori strata maju.
 - b. Belum semua desa mencapai strata desa mandiri (tahun 2020 sebesar 4,51%).
 - c. Belum semua desa memiliki perangkat desa dengan kompetensi tata kelola pemerintahan desa (lebih kurang 23 – 27%).
 - d. Belum optimalnya pembentukan kawasan perdesaan (tahun 2020 sebesar 20%).
 - e. Belum semua dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes sesuai dengan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - a. Masih Tingginya Total Fertility Rate dalam rangka pengendalian kelahiran di Kabupaten Kendal (2,2).
 - b. Masih kurangnya optimalnya kesadaan masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB (1,38%).
 - c. Masih cukup tingginya unmet need KB berdasarkan data 2020 adalah 15,77%.
 - d. Belum optimalnya cakupan bina keluarga balita (BKB), tahun 2020 sebesar 70,26%.
9. Perhubungan.
 - a. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum yang ditandai dengan persentase terminal tipe C sesuai standar sebesar 75%,

pemenuhan halte baru sebesar 80%, layanan angkutan darat sebesar 72%.

- b. Belum optimalnya cakupan rasio ijin trayek, pada tahun 2020 sebesar 75 %.
- c. Belum semua sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik, pada tahun 2020 sebesar 60%.

10. Komunikasi dan informatika.

- a. Belum optimalnya capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebesar 88,8 di tahun 2020.
- b. Belum optimalnya capaian indeks SPBE dimana di tahun 2018 baru mencapai 3,76 pada tahun 2020.
- c. Belum optimalnya pemasangan hotspot di ruang publik, jumlah hotspot baru 85 titik pada Tahun 2020.
- d. Pengembangan sistem SPBE belum terkelola dengan baik, dikarenakan adanya penambahan indeks domain manajemen SPBE.
- e. Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
- f. Masih terdapat area ruang publik yang blankspot Mobile Broadband 4G dan bahkan ada yang blankspot internet di beberapa wilayah desa di 8 Kecamatan.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

- a. Menurunnya pertumbuhan UKM tahun 2020 menjadi 5,2%.
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, tahun 2020 koperasi aktif sebesar 78,00%.
- c. Rendahnya cakupan usaha mikro yang berijin, tahun 2020 sebesar 7,3%.
- d. Belum optimalnya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil. Tahun 2020 Usaha mikro yang berkembang sebesar 4,80%.

12. Penanaman modal.

- a. Menurunnya jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di tahun 2020 (3,146 Trilyun) walaupun jumlah investor di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- b. Belum semua investor/pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sesuai ketentuan, tahun 2020 baru sebesar 85%.

13. Kepemudaan dan olah raga.

- a. Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kabupaten Kendal. Sampai Tahun 2020 baru 25 organisasi kepemudaan yang mendapatkan pembinaan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga untuk pembinaan atlet. Tahun 2020 hanya terdapat 9 gedung olah raga.
- c. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga, hal ini karena tidak adanya event pertandingan pada tahun 2020 terkait dengan adanya pandemi Covid-19.

14. Statistik;

- a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
- b. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
- c. Belum terciptanya satu data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

15. Persandian.

- a. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan pusat dan provinsi.
- c. Peningkatan risiko dan celah keamanan informasi dalam penerapan digitalisasi pemerintahan (penyelenggaraan SPBE) Pemerintah Daerah sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era siber. sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian tahun 2020 baru sebesar 22,84%.

16. Kebudayaan.

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Kendal, tahun 2020 baru 1 cagar budaya yang dilestarikan.
- b. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival tahun 2020 sebesar 75%.

- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk aktualisasi seni dan budaya, belum adanya gedung seni.

17. Perpustakaan.

- a. Belum optimalnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung di tahun 2016 sebesar 18.195 menjadi 3.891 ditahun 2020.
- b. Masih ditemukannya perpustakaan dengan kondisi kurang baik, tahun 2020 perpustakaan kondisi baik sebesar 65%.

18. Kearsipan.

- a. Belum optimalnya pemeliharaan arsip inaktif dan statis dimana pada tahun 2020 baru mencapai 2,73%.
- b. Cakupan sarana prasarana pemeliharaan arsip masih belum memadai, tahun 2020 sarana prasarana yang terpelihara sebesar 26,19%.
- c. Masih ditemukannya arsip daerah yang belum di lestarikan dan diselamatkan tahun 2020 sebesar 1,76%.

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. kelautan dan perikanan.

- a. Menurunnya produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 budidaya menjadi 22.509.480 kg, dikarenakan belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana BBI (Balai Benih Ikan) yang belum optimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan kelompok pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan dengan teknologi tepat guna dan jumlah kelompok yang dibina terbatas setiap tahun, tahun 2020 hanya sebanyak 12 kelompok.
- c. Tingkat konsumsi ikan rata-rata masih rendah tahun 2020 sebesar 30,93 Kg/ per kapita per tahun lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah (2020) sebesar 33 kg/ per kapita/ tahun. Hal ini disebabkan pemahaman tentang nilai gizi ikan, pangan beragam dan daya beli masyarakat.

2. Pariwisata.

- a. Menurunnya jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 sebesar 459,342 orang, hal ini karena adanya pandemi Covid-19.
- b. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru, tahun 2020 hanya 3 objek wisata yang dikembangkan.
- c. Belum semua SDM pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikat

atau memenuhi standar kompetensi, tahun 2020 sebesar 81,21%.

- d. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif.
- e. Kurangnya daya tarik wisata Kendal, sehingga belum memberikan dampak wisata lain yang ada di sekitarnya.
- f. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPK).

3. Pertanian.

- a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas pertanian terutama tanaman pangan utama (padi dan jagung), tahun 2020 produksi padi sebesar 245.172 ton, jagung 226.122 ton.
- b. Belum optimalnya penanganan angka kesakitan dan kematian hewan, tahun 2020 angka morbiditas hewan sebesar 1.916 ekor.
- c. Belum optimalnya penggunaan varietas bibit unggul, tanaman pangan sebesar 94,46 %, tanaman hortikultura sebesar 75,06 % dan tanaman perkebunan sebesar 69,17 %.

4. Perdagangan.

- a. Rendahnya peningkatan sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan, kondisi ini dapat dilihat dari pasar yang memenuhi persyaratan hanya sebesar 8,33% di tahun 2020.
- b. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah baru mencapai 28,57% di tahun 2020.
- c. Rendahnya nilai produk ekspor di Kabupaten Kendal, tercatat pada tahun 2020 menunjukkan penurunan.
- d. Masih belum optimalnya penataan PKL di Kabupaten Kendal, hal ini dapat terlihat dari lokasi PKL yang dilakukan penataan ditahun 2020 baru mencapai 20%.
- e. Belum optimalnya standardisasi dan perlindungan konsumen, yang ditunjukkan dengan UTP yang ditera masih belum semuanya, tercatat pada tahun 2020 UTP yang ditera sebesar 15,72%.
- f. Pemenuhan dan pengelolaan pupuk untuk kebutuhan pertanian dan pangan yang belum optimal.

5. Energi

Belum optimalnya energi panas bumi yang termanfaatkan, dari tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 1 unit.

6. Perindustrian.

- a. Rendahnya status IKM yang berijin, antara lain IKM memiliki Izin usaha industri kecil melalui P-IRT baru mencapai 16,47%.
- b. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil dimana pada tahun 2020 baru sebesar 4,01%.
- c. Rendahnya kondisi industri yang memiliki standar produksi layak, hal ini ditunjukkan dengan industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi hanya sebesar 2,64% di tahun 2020.
- d. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA).
- e. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Industri Daerah dan Nasional.

7. Transmigrasi

- a. Terbatas jumlah kuota pengiriman calon transmigran.

4.1.4 Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya pencapaian target target dalam perencanaan pembangunan dalam RPJMD (tahun 2020 sebesar 75%).
- b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran (usulan masyarakat yang diakomodir sampai dengan 2020 sebesar 74,5%).

2. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum semua dokumen perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian ilmiah.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk peningkatan inovasi dan pembangunan daerah.
- c. Belum adanya tenaga fungsional peneliti pada perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kendal.
- d. Belum terwujudnya inovasi daerah yang memadai.

3. Keuangan.

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal (tahun 2020 sebesar 16,68%) menunjang kemandirian fiskal daerah, disebabkan kurang akuratnya data objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan obyek pajaknya, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal, kurangnya pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

- b. Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah/BMD untuk pelayanan publik dan kerjasama dengan pihak swasta yang mendatangkan pendapatan daerah.
4. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
 - a. Pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal, belum semua ASN mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran setiap tahunnya.
 - b. Profesionalisme ASN cukup baik dengan nilai 75,28. Ditahun mendatang Indeks Profesionalitas ASN dapat ditingkatkan.
 - c. Pengembangan pola karir dengann sistem merit bagi ASN sedang disiapkan tahapan tahapan utk pemenuhannya.
5. Pengawasan
 - a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas APIP sampai dengan tahun 2020 pada level 2.
 - b. Pengawasan kinerja Perangkat Daerah belum optimal.
 - c. Belum semua temuan BPK ditindaklanjuti sampai tuntas, data tahun 2020 temuan BPK yang ditindaklanjuti baru mencapai 81,51%.
6. Kewilayahan.
 - a. Belum optimalnya realisasi dana desa.
 - b. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
7. Sekretariat Daerah
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat.
 - b. Belum optimalnya penataan organisasi.
8. Sekretariat Dewan
 - a. Belum optimalnya pelayanan pada DPRD.
9. Kesbangpolinmas
 - a. Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat
 - b. Masih terdapat lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan LSM terdaftar di Kesbangpol.
 - c. Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan lembaga swdaya masyarakat dalam masyarakat, data tahun 2018 sebanyak 3.200 orang peserta.
 - d. Belum optimalnya Pendidikan politik bagi pemilih perempuan dan pemilih pemula di perdesaan.

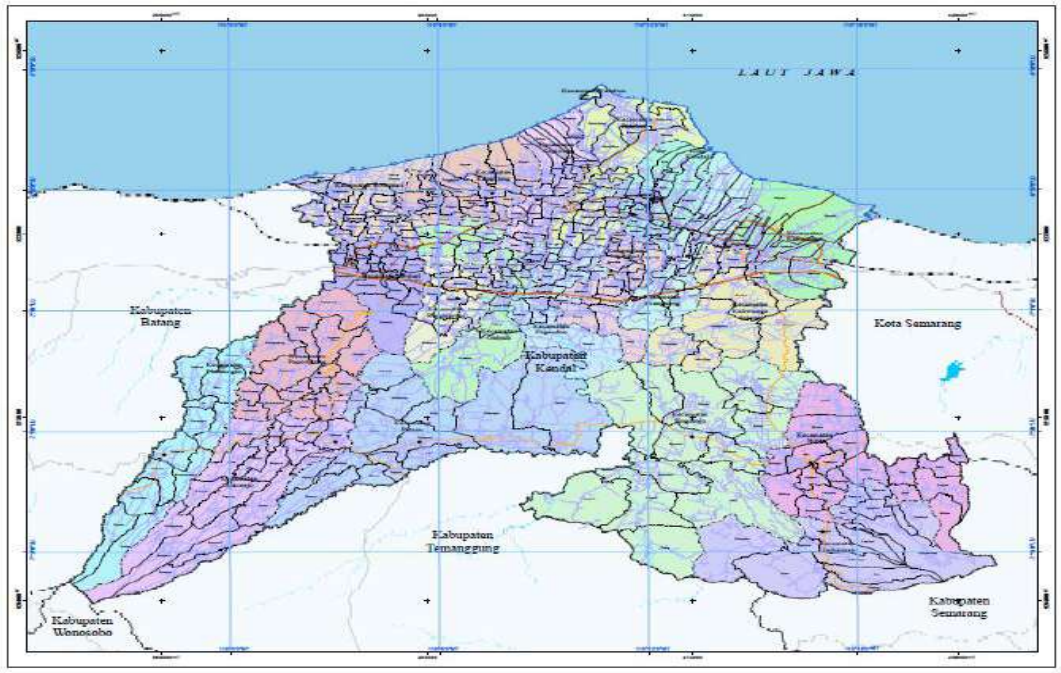
4.2. Telaahan KLHS Kabupaten Kendal

Kerentanan merupakan konsep yang dikembangkan untuk menganalisis respons sosial-ekologis terhadap perubahan lingkungan, yang didefinisikan sebagai kecenderungan untuk terpengaruh secara merugikan. Kerentanan adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak negative (Peraturan Menteri LHK Nomor 33/2016). Tingkat kerentanan dipengaruhi oleh keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptif. Keterpaparan (E/Exposure) menunjukkan derajat, lama dan atau besar peluang suatu sistem untuk kontak atau dengan goncangan atau gangguan. Sensitivitas (S) merupakan kondisi internal dari sistem yang menunjukkan derajat kerawannya terhadap gangguan. Kemampuan Adaptif (KA/AC) menunjukkan kemampuan dari suatu sistem untuk melakukan penyesuaian (adjust) terhadap perubahan iklim sehingga potensi dampak negatif dapat dikurangi dan dampak positif dapat dimaksimalkan atau dengan kata lain kemampuan untuk mengatasi konsekuensi dari perubahan iklim (*to cope with the consequences*).

Kementerian LHK mengembangkan perangkat analisis kerentanan dan risiko perubahan iklim yang dinamakan SIDIK (Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan). SIDIK dapat diakses secara online di www.sidik.menlhk.go.id. SIDIK menggunakan 13 indikator kapasitas adaptasi dan 8 indikator keterpaparan dan sensitivitas. Data yang digunakan SIDIK adalah dari data Potensi Desa (PODES) yang dirilis oleh BPS 3 kali dalam 10 tahun. Data PODES terakhir yang digunakan SIDIK adalah data PODES 2018. Hasil analisis tersebut menghasilkan dua indeks, yaitu indeks kapasitas adaptasi (IKA) dan indeks keterpaparan dan sensitivitas (IKS). Berdasarkan kedua indeks tersebut, diklasifikasikan tingkat kerentanan menggunakan sistem kuadran. Pada dasarnya wilayah dengan IKS tinggi dan IKA rendah digolongkan menjadi wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, dan sebaliknya wilayah dengan IKS rendah dan IKA tinggi tergolong dalam wilayah dengan tingkat kerentanan rendah (tidak rentan). Indikator yang digunakan melibatkan 97 variabel data statistik yang terdiri dari data sosial-ekonomi, infrastruktur, dan kependudukan.

Tingkat kerentanan desa (indikatif) Kabupaten Kendal mengacu pada hasil analisis dari SIDIK dengan menggunakan data PODES 2018 menunjukkan dominasi tingkat kerentanan sedang. Sebaran tingkat kerentanan desa secara spasial dapat dilihat dalam peta di bawah ini. Perlu dicatat bahwa peta tingkat kerentanan tersebut menggunakan indikator kerentanan nasional, dan untuk analisis lebih lanjut perlu diidentifikasi indikator lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Kendal



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020

4.3. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu Strategis Kabupaten Kendal disusun berdasarkan pada gambaran umum, permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Kendal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023 serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031.

4.3.1. Isu Strategis Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas

1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatan kualitas UMKM belum optimal.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.

b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.

2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jaminan perlindungan sosial.

3. Pemenuhan Layanan Dasar

Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yang belum optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan.

4. Peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah

penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

5. Pengentasan kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat

6. Peningkatan Produktifitas dan daya saing

Produktifitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

d. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa

1. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa.
2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.
5. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama.
6. Rendahnya budaya literasi.
7. Belum optimalnya peran keluarga.

e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar

1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak.
2. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas.
3. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
4. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
5. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
6. Konektivitas Transportasi Jalan.
7. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim

1. Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup.
2. Ketahanan bencana dan perubahan iklim.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

1. Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir.

2. Pemberantasan korupsi belum optimal.
3. Indek profesionalisme ASN.
4. Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintah.
5. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas.
6. Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan social ekonomi berkelanjutan.

4.3.2. Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Isu Strategi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan wilayah.
2. Penanggulangan Kemiskinan.
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.
4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung.
5. Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam.
6. Kedaulatan pangan dan energi.
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

4.3.3. Isu Pembangunan Kabupaten Kendal 2021 – 2026

1. Tantangan Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kendal

a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- 1) Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Kendal menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 905.451 jiwa dengan laju pertumbuhan 0.18 % diperkirakan meningkat mencapai sekitar 940.296 jiwa pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk

meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, penyebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kendal yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian Kabupaten Kendal. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah :

- a. mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, tingkat sosial ekonomi, dan gender;
- b. meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai;
- c. meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan
- d. mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular.

Namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, dan antarjenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah perkotaan dan perdesaan, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga

pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kendal secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan kondisi demografi.

3) Kualitas hidup dan peran perempuan serta anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh :

- a. tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan
- b. kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak.

Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti :

- a) menipisnya nilai budaya dan agama;
 - b) menurunkan eksistensi dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam; dan
 - c) meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.
- 4) Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan Kabupaten Kendal untuk dapat mempertahankan jati diri masyarakat ketimuran yang berpegang pada norma dan kesopanan, dan sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan

agama serta peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.

- 5) Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.
- 6) Proses pelayanan sosial harus disertai upaya menggali potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat. Masih ada permasalahan sosial yang belum terjangkau karena keterbatasan kemampuan pemerintah.

b. Ekonomi

- 1) Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 4 % per tahun dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang lebih maju.
- 2) Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Banyak usaha mikro yang terdampak dengan adanya penerapan PSBB dan PPKM.
- 3) Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi persaingan ekonomi antardaerah yang makin tinggi akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan. Untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing nasional sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian

digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

- 4) Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertambahan penduduk Kabupaten Kendal. Dalam angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen lebih berpendidikan setingkat SD, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak.
- 5) Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan. Selain akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 6) Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi

yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

- 7) Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi perkembangan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan kemajuan IPTEK, tantangan yang dihadapi adalah :

- 1) meningkatkan kontribusi IPTEK untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat;
- 2) menciptakan rasa aman;
- 3) memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan;
- 4) memperkuat sinergi kebijakan IPTEK dengan kebijakan sektor lain;
- 5) mengembangkan budaya IPTEK di kalangan masyarakat;
- 6) meningkatkan komitmen daerah terhadap pengembangan IPTEK;
- 7) mengatasi degradasi fungsi lingkungan;

- 8) mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; dan
- 9) meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya IPTEK, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan IPTEK.

d. Sarana dan Prasarana

- 1) Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.
- 2) Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi daerah adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim

kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

- 3) Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana teknologi informasi komunikasi tersebut dapat diterima masyarakat sesuai dengan pendidikan dan etika moral. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses penyalurannya untuk keperluan masyarakat karena belum ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana dan prasarananya.
- 4) Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah :
 - a. melakukan reformasi, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
 - b. mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan
 - c. melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan

masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah.

Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

- 5) Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan.

e. Politik

- 1) Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.
- 2) Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desentralisasi dan keadilan sosial. Terkait dengan telah dirumuskannya format

hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah.

- 3) Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil. Konsolidasi demokrasi memerlukan pelaksana kebijakan yang reformis di dalam pemerintahan dan memerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, salah satu tantangan demokrasi terbesar adalah masih belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah secara profesional.
- 4) Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatif perkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan bukan

mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi.

f. Hukum dan Aparatur

- 1) Tantangan ke depan di dalam mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran merupakan syarat mutlak dalam upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kendal.
- 2) Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya seiring dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi.
- 3) Proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi Industri 4.0, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi (TI), meningkatkan perubahan manajemen pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk satu data daerah, *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pandemi Covid-19 telah memacu penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk Pendidikan dan pelayanan publik) memanfaatkan TI dan tatanan baru dalam kesehatan dan mobilitas penduduk internal Kabupaten Kendal dan antar daerah.

g. Wilayah dan Tata Ruang

1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan dan pemanfaatan lahan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi :
 - a. arahan lokasi kegiatan;
 - b. batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam; dan
 - c. efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan.

Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antarsektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.

2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perdesaan dan perkotaan perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisiknya, tetapi untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing desa / kelurahan maupun kota. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang ada selama ini dan belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Kendal.

h. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis kesehatan. Ketiga krisis itu menjadi tantangan Kabupaten Kendal jangka panjang yang perlu

diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Kendal, yaitu terancamnya moral masyarakat, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.

- 2) Meningkatnya luasan lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Hal ini akan menjadikan krisis lahan yang berarti bahwa kebutuhan akan lahan baik untuk aktivitas budidaya maupun untuk aktivitas lindung tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Pada sisi yang lain, terjadinya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut yang berupa deforestasi hutan mangrove dan degradasi terumbu karang juga menyebabkan hilangnya potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir. Kasus pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga

menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam pembangunan Kabupaten Kendal yang berdaya saing.

4.3.4. ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 – 2026

Tabel 4.1.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

No	Isu Penting Per Urusan berdasarkan analisis permasalahan	Isu Stratategi
A	Pelayanan Dasar	Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing dan pelayanan dasar
1.	Pendidikan Belum semua penduduk mendapatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan baik PAUD, SD maupun SMP.	
2.	Kesehatan Derajat kesehatan belum optimal hal ini dapat dilihat dari masih tingginya kematian ibu, bayi, angka kesakitan.	
3.	Pekerjaan Umum Belum terpenuhi air minum yang layak dan sanitasi layak	
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Belum terpenuhinya keesedian rumah bagi penduduk	
5.	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Belum optimalnya penegakkan perda dan penanganan bencana	

No	Isu Penting Per Urusan berdasarkan analisis permasalahan	Isu Strategi
6.	Sosial Belum semua anak terlantar, disabilitas terlantar, Lansia terlantar, PGOT dan korban bencana terlantar diluar panti mendapatkan pelayanan dasar.	
B	Non Pelayanan Dasar	Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0
1.	Tenaga Kerja Penyerapan tenaga kerja belum sesuai dengan tenaga yang tersedia hal ini dikarena kompetensi belum sesuai dengan permintaan pasar	
2.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Masih belum optimalnya kualitas dan perlindungan pada perempuan dan anak	
3.	Pemuda dan Olahraga Belum optimalnya prestasi olahraga dan pemuda	
4.	Perpustakaan Belum optimalnya minat baca pada masyarakat	
5.	Kebudayaan Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan karakter budaya	
		Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah
6.	Koperasi dan UKM menurunnya % koperasi aktif dan belum optimalnya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil.	
7.	Penanaman Modal Belum optimalnya daya tarik investasi	
8.	Ketahanan Pangan Ketersediaan dan distribusi pangan belum optimal	
9.	Perikanan dan Kelautan Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	

No	Isu Penting Per Urusan berdasarkan analisis permasalahan	Isu Stratategi
10.	Perindustrian belum optimalnya pengembangan industri kecil	
11.	Perdagangan Belum optimalnya peningkatan ekspor perdagangan dan implementasi perdagangan secara daring (e- commerce)	
12.	Pariwisata Belum optimalnya kunjungan wisata karena belum optimalnya pengembangan obyek wisata, pengembangan industri kreatif belum optimal	
		Konektifitas antar wilayah yang belum optimal, ketahanan bencana dan kualitas lingkungan yang belum optimal
13.	Urusan Pekerjaan Umum Kualitas jalan, jembatan, irigasi dan drainase belum baik	
14.	Urusan Perhubungan a. Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan b. Belum optimalnya pelayanan perhubungan laut	
15.	Urusan Lingkungan Masih kurangnya kualitas lingkungan, pengelolaan sampah belum optimal, pengawan industri atas pengelolaan limbah belum optimal.	
		Belum Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan inovasi daerah
16.	Komunikasi dan Informasi Belum optimalnya pencapaian Indeks SPBE	
17.	Keuangan Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	
18.	Perencanaan Belum optimalnya akuntabilitas perencanaan daerah	

No	Isu Penting Per Urusan berdasarkan analisis permasalahan	Isu Stratategi
19.	Kepegawaian Belum optimalnya Indeks Profesionalisme ASN dan indeks Merit System	
20.	Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian	
21.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Belum semua penduduk memiliki administrasi kependudukan catatan sipil	
22.	Kelitbangan Belum optimalnya pencapaian indek daya saing dan inivasi daerah	
23.	Statistik Belum terciptanya Satu data dalam perencanaan pembangunan	
24.	Kearsipan Belum optimalnya pencapaian indeks kearsipan	
25.	Pengawasan Masih terjadi temuan dalam pelaksanaan pembangunan	
26.	Persandian Belum optimalnya pengelolaan sandi dalam pemerintahan	
27.	Kewilayahan Belum optimalnya pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan	

Analisis SWOT yaitu sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan uraian tentang gambaran daerah. Analisis ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan dan dikelompokkan sesuai kontribusi masing-masing. Analisis SWOT meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

A. Faktor-Faktor Internal

Tabel 4.2.
Analisis Faktor-Faktor Internal

NO	FAKTOR INTERNAL	URAIAN
1	Kekuatan	Kabupaten Kendal terletak di kawasan strategis pengembangan perekonomian Jawa Tengah yaitu Kawasan Kedungsapur

NO	FAKTOR INTERNAL	URAIAN
		dengan pusat pertumbuhan di Kota Semarang. Kabupaten Kendal merupakan kawasan pengembangan bagi industri dan perumahan-pemukiman. • Memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan secara terpadu dekat dengan pelabuhan, rel kereta api dan jalan bebas hambatan (toll). Sehingga memudahkan pengiriman bahan baku dan hasil industri ke kota-kota industri lainnya di Pulau Jawa. • Kabupaten Kendal merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang unggul. Telah menjadi pemasok kebutuhan bahan pangan bagi Kota Semarang dan sekitarnya, antara lain : beras, sayur mayur, telur, daging ayam dan ikan (hasil perikanan laut dan ikan air tawar). • Kabupaten Kendal tersedia lahan pertanian/ perkebunan dan lahan pertambakan yang dapat dioptimalkan bagi agro industri dan pengembangan perikanan budidaya secara intensif. • Potensi hasil kerajinan dan UMKM di Kabupaten Kendal sangat beragam, terutama pengolahan makanan, kuliner dan kerajinan lainnya. Industri kecil kerajinan dan UMKM memanfaatkan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat. • Potensi ekonomi lokal dan perdagangan informal (usaha mikro dan perdagangan eceran, pedagang kaki lima) menjadi “jaring pengaman” bagi masyarakat desa dan kelompok berpendapatan rendah.

NO	FAKTOR INTERNAL	URAIAN
		Sektor informal dan pasar tradisional menjadi penampung bagi tenaga kerja kurang terampil tetap bekerja dan tenaga kerja lanjut usia. • Sistem sosial budaya masyarakat Kendal yang kondusif dan toleran mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil yang sedang tumbuh dan dapat menerima pada pendatang yang beragam budaya dan suku bangsa.
2	Kelemahan	• Jumlah kelompok usia produktif (15 – 54 tahun) yang menganggur (tahun 2018) sebesar 6,06% lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Tengah (sebesar 4,51%). Demikian pula jumlah perempuan yang menganggur lebih banyak daripada tenaga kerja laki-laki. • Rata-rata pendidikan para pencari kerja masih rendah (lulus SD/SMP) dan keterampilan yang bersertifikasi para pencari kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di bidang industri dan jasa-jasa lainnya. • Banyaknya penduduk miskin masih relatif tinggi 9,84%. Kelompok masyarakat miskin antara lain buruh tani, buruh nelayan dan penganggur. Kelompok tersebut berpendidikan rendah, keterampilan terbatas dan kurang memiliki akses permodalan usaha, peralatan usaha dan lahan pertanian. • Potensi tenaga kerja perempuan kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) yang belum mendapatkan pelatihan keterampilan dan usaha masih cukup

NO	FAKTOR INTERNAL	URAIAN
		besar. Hal ini diketahui dari sumbangan ekonomi rumah tangga masih rendah (tahun 2018 sebesar 34,86%) saja. • Perkembangan wilayah Kendal bagian Utara (kawasan Pantai Utara) lebih cepat daripada perkembangan wilayah Kendal Bagian Selatan, hal ini berdampak pada tumbunya kesempatan kerja dan peluang berusaha. • Dalam pembangunan perkoperasian dan lembaga keuangan mikro belum optimal. Hal ini dikayahui dari besarnya kopresi aktif baru 64,3% pada tahun 2018 dan LKM belum merata di semua wilayah.

B. Faktor-Faktor Eksternal

Tabel 4.3.
Analisis Faktor – Faktor Eksternal

NO	FAKTOR EKSTERNAL	URAIAN
1	Peluang	• Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan investasi tertinggi nasional (tahun 2018) berdampak pada peningkatan penanaman modal di Kabupaten Kendal dan sekitarnya. • Kondisi stabilitas politik nasional, turunnya suku bunga kredit dan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing telah dapat menarik meningkatnya nilai investasi di Jawa Tengah dan sekitarnya. • Fasilitasi pemerintah pusat dalam pelayanan perizinan usaha dengan sistem OSS dan pelayanan perizinan satu pintu telah dapat meningkatkan penanaman modal di Jawa Tengah,

NO	FAKTOR EKSTERNAL	URAIAN
		termasuk Kabupaten Kendal. • Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan pinjaman daerah dari pihak ke tiga untuk mendapatkan dana pembangunan daerah selain dari bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Provinsi. • Pemerintah daerah dapat membuka peluang bagi pengembangan perekonomian daerah, melalui kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota, kerjasama dengan dunia usaha dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam berbagai bidang pembangunan, antara lain inovasi daerah dan penelitian dan pengembangan Iptek guna mendorong pemanfaatan potensi daerah bagi kesejahteraan rakyat. • Perkembangan inovasi dan kreativitas daerah di era otonomi daerah memberikan peluang bagi perkembangan unggulan daerah, antara lain pariwisata dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah. • Pembangunan bidang pemuda dan olahraga belum optimal, terutama terkait dengan pelatihan kewirausahaan pemuda, prestasi olah raga dan pembinaan organisasi massa kepemudaan.
2	Tantangan	• Sejak April 2020 kita mengalami Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya perekonomian nasional dan daerah memerlukan perhatian dalam pengembangan ekonomi. Pemulihan

NO	FAKTOR EKSTERNAL	URAIAN
		kesehatan dengan vaksinasi untuk mencapai “<i>herd immunity</i>” dan pemulihan perekonomian daerah. Kabupaten Kendal dapat mengembangkan unggulan daerah (pertanian, peternakan, perikanan dan UKM dan menyerap tenaga kerja daerah. Tatanan sosial baru menjadikan pelaksanaan PPKM, pengaturan mobilitas sosial masyarakat dan pemulihan perekonomian berdasarkan potensi/ unggulan daerah. • Perkembangan otonomi daerah di era globalisasi telah menjadikan masing-masing pemerintah daerah harus bersaing dalam membangun perekonomian daerah, menarik investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. • Tuntutan masyarakat dan kalangan dunia usaha tentang pelayanan publik yang mudah dan cepat semakin meningkat. Hal ini menjadikan masing-masing perangkat daerah harus melakukan inovasi baru. • Terjadi ketertinggalan perkembangan pembangunan perdesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan sehingga perkembangan perkotaan lebih cepat dibandingkan perdesaan. Hal ini diketahui dari penduduk miskin di perdesaan lebih banyak daripada perkotaan. • Keterwakilan perempuan di parlemen masih relatif rendah (2018 sebesar

NO	FAKTOR EKSTERNAL	URAIAN
		22,8%) belum mencapai kuota keterwakilan sebesar 30%. • Dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, diketahui rata-rata lama sekolah belum mencapai 12 tahun. Rata-rata pendidikan perempuan (rata-rata 7,4 tahun (lebih rendah daripada laki-laki (rata-rata 8 tahun). • Sumbangan sektor usaha pariwisata dalam pendapatan daerah masih rendah, dibandingkan dengan jumlah potensi wisata bahari, wisata alam dan wisata buatan yang tersedia di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan analisis permasalahan dan tantangan dan SWOT maka isu strategis Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut ini :

1. **Pemulihan kondisi sosial dan perekonomian Kabupaten Kendal**
- Sejak bulan April 2020 terjadinya pandemi Covid 19 telah berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat dengan membentuk *herd immunity* dan pemulihan sistem sosial. Pada tahun-tahun mendatang perlu pemulihan perekonomian daerah dengan bertumpu pada unggulan daerah, terutama bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta kerajinan skala usaha kecil dan mikro yang memiliki daya tahan dalam gejolak perekonomian dan menyerap tenaga kerja setempat.
2. **Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing dan pelayanan dasar**
- Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum optimal pada tahun 2020 baru mencapai 72,29 kondisi optimal pencapaian sejahtera apabila IPM mencapai 80, dan gambaran pembentuk IPM dapat dilihat dilihat sebagai berikut:
- 1) Pendidikan yang belum optimal.
- Beberapa permasalahan di Kabupaten Kendal di bidang pendidikan adalah masih rendahnya rata rata lama sekolah (7,45 tahun) dibawah provinsi dan nasional, angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, angka melanjutkan yang masih kurang. Pendidikan

vokasi yang belum terlaksana dalam rangka meningkatkan ketrampilan bagi anak sekolah. Pendidikan dasar sudah merata disemua wilayah di Kabupaten Kendal, namun demikian kualitas pendidikan masih belum merata, kesenjangan masih terasa antara daerah atas dan daerah bawah, demikian kualitas guru menjadi permasalahan.

2) Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal

Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi dan balita serta tingginya stunting. Angka kesakitan di Kabupaten Kendal masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, Kusta, Filariasi) maupun penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetis Mellitus, Kanker, Jantung). Kondisi ini dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang sehat, lingkungan yang tidak sehat dan pelayanan masih belum optimal. Pendekatan Keluarga Sehat merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Perwujudan keluarga sehat masih menjadi prioritas dalam tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2020 indeks Keluarga Sehat baru mencapai angka 0,20. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dilihat kepuasan masyarakat baru mencapai 83,17.

3) Tenaga Kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar

Kabupaten Kendal telah mengalami bonus demografi, dimana penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar 2 kali lipat dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi potensi dan ancaman. Kualitas penduduk usia produktif yang baik akan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Kendal, Namun apabila usia produktif tidak berkualitas banyak pengangguran maka ini akan menambah beban bagi Pemerintah Kabupaten Kendal. Pengangguran di Kabupaten Kendal masih tinggi, urusan tenaga kerja memiliki tugas untuk meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan pasar. Kabupaten Kendal memiliki potensi kedepan untuk menjadikan calon tenaga kerja terserap dalam industri yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Kendal.

4) Kualitas Pelayanan Dasar belum optimal

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi

korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada ketentraman, kertiban dan perlindungan masyarakat serta sosial.

- 5) Masih tingginya PMKS/PPKS yang belum ditangani, belum optimalnya pelayanan SPM Sosial (anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, gelandangan)
- 6) Kualitas Perempuan, anak dan pemuda yang masih belum optimal
Kesetaraan dan keadilan gender adalah isu dalam pembangunan kualitas perempuan. Indeks Pemberdayaan perempuan (IPG) masih belum optimal, masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kekerasan pada perempuan dan anak. Peran pemuda dalam pembangunan belum optimal. Pemuda harus memiliki prestasi termasuk prestasi olahraga.
- 7) Pemajuan Budaya dan peningkatan Minat Baca
Masih belum optimalnya pemajuan kebudayaan dikerena kurang kualitas sarana dan prasarana. Menjadi SDM yang maju dan unggul harus memiliki karakter budaya dan pengetahuan yang baik. Minat baca menjadi alat ukur terkait dengan peningkatan kualitas SDM.

3. Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0

Pertumbuhan ekonomi secara makro terdampak oleh Pandemi Covid-19 sehingga mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal -1,53% masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (-2,07%). Tahun 2021 – 2026 memerlukan dukungan dan fasilitasi bagi pemulihan sosial kemasyarakatan dan ekonomi daerah, terutama memanfaatkan produk unggulan daerah (perdagangan, pertanian, peternakan dan UKM).

Rendahnya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi dan membatasi kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kontribusi sektor lapangan usaha. Kontribusi sektor lapangan usaha dalam pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku didominasi oleh sektor industri pengolahan 42,29%, sector pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,24%. Terjadi ketidakseimbangan kontribusi antar sub sector pertumbuhan ekonomi dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Kendal.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemulihan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, terutama sebagai berikut :

a. Perindustrian dan UMKM

1. Masih belum optimalnya pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan peningkatan transaksi perdagangan secara daring (*e-commerce*);
2. Aksesibilitas yang menghubungkan antar potensi ekonomi (industri dan pariwisata) belum optimal.
3. Belum optimalnya dampak kawasan industri pada pengembangan kluster pengembangan industri di daerah sekitarnya;
4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi sebagai dampak perkembangan jalan toll;
5. Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi kecil hanya 6,69% tahun 2020. Karena masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan dan pemasaran serta branding teknologi berbasis teknologi. Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirausaha mikro. Belum optimalnya kemitraan *e-commerce* dengan UMKM.

b. Penanaman Modal

Belum optimalnya pertumbuhan nilai investasi dikarenakan belum terpetakan potensi investasi dan kebijakan terkait dengan insentif bagi investor

c. Pertanian Perkebunan dan Perikanan

Berkurangnya lahan pertanian berdampak pada penurunan produktivitas hasil pertanian, beban produksi pertanian tidak sebanding hasil hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani (NTP 103,21). Produksi perikanan budidaya dan tangkap mengalami penurunan.

d. Perdagangan

Potensi ekspor di Kabupaten Kendal belum optimal dalam pengembangannya, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor. Potensi lain yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah jasa perhotelan dan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata merupakan pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

e. Pariwisata

Belum optimalnya kontribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah karena kualitas obyek wisata kurang menarik, belum terkoneksi paket wisata antar kabupaten Kota (*Travel Pattern*), pengembangan desa wisata.

4. Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan antar wilayah, dan kualitas lingkungan yang belum optimal

- a. Kualitas infrastruktur yang tidak baik menyebabkan konektifitas antar wilayah terganggu. Masih ditemukannya jalan rusak sepanjang jalan Kabupaten Kendal, jalan yang tidak memiliki drainase baik.
- b. Masih kurangnya kualitas sarana prasarana perhubungan (perlengkapan jalan seperti rambu, marka, guardrill, halte dan perlengkapan angkutan) dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Belum optimalnya pemanfaatan terminal dan masih ada terminal yang belum memenuhi standar.
- c. Indeks kualitas lingkungan hidup masih kurang baik (65,37) hal ini dilihat dari rendahnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri kendal harus mampu menekan pencemaran udara akibat industri, pencemaran limbah industri. Belum optimalnya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, perubahan iklim berdampak pada penurunan kualitas lingkungan
- d. Masih belum terpenuhinya rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh. Pencapaian standar pelayanan pekerjaan umum (air bersih dan sanitasi) dan perumahan (rumah layak huni untuk korban bencana dan rumah yang terkena dampak program) belum tercapai.
- e. Belum optimalnya penanganan bencana hal ini dilihat dari masih kurangnya infrastruktur penanganan kebencanaan.
- f. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian Kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Rasio TPA dengan jumlah penduduk masih kurang, sampah yang tertangani menurun (20,5%)

5. Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, *Smartcity*, dan Inovasi Daerah

Reformasi birokrasi masih menjadi isu nasional. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, Indeks Kematangan informasi masih belum dilaksanakan. Pengelolaan keuangan sudah mencapai WTP namun secara kualitas masih perlu mendapat perhatian, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan asset daerah yang belum sesuai standar. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi ASN. Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah, Maturitas SPIP dan akuntabilitas APIL telah mencapai level 3 untuk itu juga perlu dilakukan peningkatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan korupsi di Kabupaten. Selain itu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga belum maksimal. Pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan Perangkat Daerah di Kecamatan bagian dari meningkat pelayanan publik yang lebih cepat. Belum semua Perangkat Daerah memberikan pelimpahan kewenangan di Kecamatan.

6. Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum menuju Pencapaian Indeks Desa Membangun

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal dilihat dari minimnya sarana dan prasarana pemerintah desa, partisipasi masyarakat yang masih kurang, peran kelembagaan masyarakat yang belum optimal, Implementasi teknologi tepat guna masih belum optimal, pengelolaan asset desa belum optimal, kemandirian desa belum optimal, peran KPMD belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

7. Munculnya Pandemi COVID 19

Munculnya pandemic COVID 19 tahun 2020 menyebabkan perubahan perilaku pada beberapa sector yaitu:

- a. Pendidikan, belum semua anak sekolah mampu mengakses pendidikan secara daring dikarenakan akses internet yang belum terjangkau di beberapa wilayah;
- b. Kesehatan, belum semua faskes memiliki ruang isolasi secara standar;
- c. Belum semua masyarakat mendapatkan akses untuk vaksinasi;

- d. PKM mikro belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh;
- e. Banyak tenaga kerja yang di rumahkan menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun dan kemiskinan menjadi meningkat;
- f. Banyaknya pasar dan industry yang belum menerapkan protokol kesehatan.

8. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Kendal. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar Kabupaten Kendal memiliki angka kemiskinan yang cukup baik, namun dibandingkan Kota Semarang masih cukup jauh. Penanggulangan kemiskinan ini harus diselesaikan oleh banyak OPD, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi Perangkat Daerah dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR juga belum optimal dalam membantu penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.4.

Isu Strategis Pembangunan
Global, Nasional, Provinsi Jawa Tengah Dan Kabupaten Kendal

NO	ISU STRATEGIS			
	GLOBAL	NASIONAL	JAWA TENGAH	KAB. KENDAL
1.	Kemiskinan	a. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk b. Pemenuhan Layanan Dasar c. Pengentasan kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	a. Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum menuju Pencapaian Indeks Desa Membangun b. Penanggulangan Kemiskinan
2.	Pangan dan Gizi		Kedaulatan pangan dan energi	
3.	Kesehatan	Pemenuhan Layanan Dasar		Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing dan pelayanan dasar

NO	ISU STRATEGIS			
	GLOBAL	NASIONAL	JAWA TENGAH	KAB. KENDAL
4.	Pendidikan	a. Pemenuhan Layanan Dasar b. Peningkatan Produktifitas dan daya saing c. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing dan pelayanan dasar
5.	Gender	Peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda		
6.	Air Bersih dan Sanitasi	Keberlanjutan Sumber Daya Alam	Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	
7.	Energi		Kedaulatan pangan dan energi	
8.	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	a. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi b. Transformasi Struktural Berjalan Lambat c. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital d. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	

NO	ISU STRATEGIS			
	GLOBAL	NASIONAL	JAWA TENGAH	KAB. KENDAL
		Dan Transformasi Pelayanan Publik e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar		
9.	Infrastruktur	a. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan b. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar c. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim	a. Kesenjangan wilayah b. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung c. Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	a. Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan antar wilayah, dan kualitas lingkungan yang belum optimal b. Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business



**KENDAL
HANDAL, UNGGUL,
MAKMUR DAN BERKEADILAN**

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun masa RPJMD. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kendal dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”**.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

2. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

3. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

4. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

5.2. Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Misi pertama: **Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

- a. Industri, yaitu dengan
 - 1) Penyebaran dan pemerataan industri;
 - 2) Optimalisasi potensi sumber daya lokal;
 - 3) Mempertahankan dominasi kontribusi sektor industri;
 - 4) Peningkatan daya saing dan produktivitas industri berbasis potensi dan keunggulan daerah.
- b. Pariwisata, yaitu dengan
 - 1) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata;
 - 2) Pengembangan destinasi pariwisata;
 - 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif;
 - 4) Terintegrasi, bernilai tambah dan berdaya saing.
- c. UMKM, yaitu dengan
 - 1) Peningkatan kapasitas dan produk UMKM;
 - 2) Inkubasi usaha;
 - 3) Peningkatan daya saing UMKM.

2. Misi kedua: **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.**

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Kendal, sehingga bisa bersaing secara regional, nasional ataupun internasional. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

- a. SDM Unggul
 - 1) Membangun peran lebih pendidikan untuk mendorong wajib belajar 12 tahun;
 - 2) Perluasan akses terhadap perguruan tinggi;
 - 3) Membangun ruang belajar informal dimasyarakat; dan

- 4) mendorong kembalinya nilai-nilai kemasyarakatan yang beragama dan berbudi pekerti luhur.
 - b. Daya Saing
 - 1) Membuat iklim pendidikan yang nyaman dan berbudaya dalam mendorong SDM Berkualitas dan berdaya saing;
 - 2) Mendongkrak daya saing melalui inovasi dan teknologi Informasi.
 - c. Revolusi Industri 4.0
 - 1) Peningkatan penguasaan teknologi;
 - 2) Perluasan pasar industri dan UMKM melalui optimalisasi pemasaran online.
3. Misi ketiga: **Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.**
- Misi ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan kerukunan antar umat beagama. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :
- a. Inklusif
 - 1) Memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang beragama yang harmonis;
 - 2) Mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal di berbagai event daerah, nasional, maupun global.
 - b. Makmur/Kesejahteraan
 - 1) Menjamin rasa aman bagi masyarakat dengan penguatan peran Polri dan TNI sampai unit terkecil lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal;
 - 2) Penataan kawasan dan pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal.
 - c. Kelembagaan
 - 1) Penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat dan kehidupan beragama;
 - 2) Mendorong peran aktif seluruh stakeholder dalam pembangunan Kabupaten Kendal.
4. Misi keempat: **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kendal secara berkelanjutan. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. Infrastruktur Berkeadilan

- 1) Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
- 2) Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/ distribusi *channel*;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan Infrastruktur.

b. Berkelanjutan

- 1) Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal.
- 2) Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

5. Misi kelima: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.**

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kemasyarakat secara optimal. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. *e-Government*

- 1) Mendorong keterbukaan informasi dan data terpusat serta *Command Center*;
- 2) Mendorong optimalisasi *e-Planning*, *e-Monitoring*, *e-Musrenbang*, *e-Services*, *e-Budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi.

b. Partisipatif

Mendorong pendekatan pembangunan konsep *bottom-up* dengan memberikan ruang bagi desa/dusun dan unit pemerintahan daerah terkecil (RT dan RW) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui bantuan anggaran Pemerintah Kabupaten.

c. *Good Governance*

Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam menjaga kesinergian dan penerapan prinsip prinsip *good governance* (partisipatif, keadilan hukum, transparansi, *public services*, berorientasi konsesus, efektif dan efisien, bervisi strategis, berkeadilan).

5.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari 5 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kabupaten Kendal.

Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

Tabel 5.1.

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

Visi: “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	URUSAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi 1 : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)													
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal	Pertumbuhan ekonomi			%	-1,53	2,5-3,2	4,28-5,5	5,33-5,64	5,38-5,70	5,43-5,76	5,49-5,82	5,49-5,82	
		Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	%	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Perindustrian, ESDM
			Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,036	0,26	0,43	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45	Pariwisata
			Prosentase pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	6	6	12	18	24	30	36	36	Pariwisata
			Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,1	3,1	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,6	Pertanian, Kelautan dan Perikanan
			Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	%	-3.8	-2	-1	0,5	1	1,5	2	2	Perdagangan, Penanaman Modal

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	URUSAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,2	87,2	87,3	87,3	87,4	87,4	87,5	87,5	Pangan
	Tingkat pengangguran terbuka			%	7,56	7,14	6,73	5,63	5,43	5,23	5,15	5,15	
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,5	73,4	75,99	78,58	81,17	83,76	86,35	86,35	Tenaga Kerja
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	Prosentase UMK yang berkembang	%	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7	Koperasi UMKM
		Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	Trilliun	3,146	1,61	2,5	2,75	3	3,3	3,6	16,76	Penanaman Modal
	Angka Kemiskinan			%	9,99	9,89-9,79	9,79-9,59	9,59-9,39	9,39-9,19	9,19-8,89	8,89-8,69	8,89-8,69	
		meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Tingkat Kesejahteraan I	%	20,25	20,19	19,95	19,87	19,77	19,68	19,57	19,57	Sosial
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0													
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudi pekerti luhur	Indek Pembangunan Manusia (IPM)			indek	72,29	72,61	73,61	74,61	75,61	76,61	77,61	77,61	
		Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	Tahun	12,95	13,1	13,25	13,4	13,55	13,7	13,85	13,85	Pendidikan, Kebudayaan , Perpustakaan
			rata -rata lama sekolah	Tahun	7,45	7,65	7,85	8,05	8,25	8,45	8,65	8,65	Pendidikan, Kebudayaa, Perpustakaan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	URUSAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,53	74,63	74,73	74,83	74,93	75	75	Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemuda Olahraga
		meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	92,85	92,95	93,05	93,1	93,2	93,3	93,4	93,4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 3: Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan.													
Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	Angka kriminalitas			Per 100.000 penduduk	151	150	149	148	147	146	145	145	
		Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	Pemerintah an Umum (Kesbangpol)
			Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	%	1	1	1	1	1	1	1	5	Trantibumlin mas (Satpol PP)
Meningkatkan kualitas kebudayaan daerah	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan
		Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan
			Persentase cagar budaya yang diselestarikan	%	3	100	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	URUSAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)			Nilai	0,7095	0,7190	0,7205	0,7220	0,7235	0,7250	0,7265	0,7265	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kualitas desa	Jumlah Desa Mandiri	desa	12	1	2	3	3	3	3	27	
Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan													
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan tata ruang	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas			%	80,212	80,158	80,908	82,050	83,198	84,344	85,490	85,490	
		Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78	PUPR
			Persentase drainase kondisi baik	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	81,39	PUPR
			Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73,00	75,45	75,45	PUPR
			Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	PUPR, Pertanahan
		Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase Capaian Universal Acces	%	94,67	95,17	95,67	96,17	96,67	97,17	97,67	97,67	PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas	angka	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	Perhubungan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82	Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas	Indeks kualitas air	Indeks	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,74	Lingkungan Hidup

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	URUSAN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
dan ketahanan terhadap bencana		lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	Indeks	75,16	72,7	72,79	72,88	72,96	73,06	73,15	73,15	Lingkungan Hidup	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93	43,93	Lingkungan Hidup	
	Indeks Resiko Bencana (IRB)			Indeks	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57		
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	60	61	62	63	64	65	66	66	Trantibumlin mas (BPBD)	
Misi 5: . Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.														
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	61,39	64,41	66,35	67,75	68,32	69,2	69,5	69,5		
		Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	nilai	66,31	68,55	70,55	72,55	75,55	77,55	80,10	80,10	Sekretariat Daerah, Perencanaan, Litbang	
			Kasus Korupsi	kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan
			Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
		Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indek Profesionalisme ASN	indeks	75,28	75,66	76,29	76,7	76,72	77,72	78,72	78,72	Kepegawaian	
			Indeks SPBE	indeks	3,76	2,76	3,13	3,43	3,75	3,91	3,91	3,91	3,91	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Kearsipan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	URUSAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Indek kematangan kelembagaan	indeks	32,88	32,88	32,88	32,9	32,92	32,96	33,04	33,04	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata rata IKM	nilai	83,17	87,17	87,37	87,77	88,17	88,47	88,77	88,77	Dukcapil, Sekretariat DPRD, Kecamatan



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Kendal Recovery

Competitive Kendal

Kendal smart City

Kendal Inclusive

sustainable Kendal



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

- 1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

- a. Industri, yaitu dengan
 - 1) Penyebaran dan pemerataan industri
 - 2) Optimalisasi potensi sumber daya lokal
 - 3) Mempertahankan dominasi kontribusi sektor industri
 - 4) Peningkatan daya saing dan produktivitas industri berbasis potensi dan keunggulan daerah
- b. Pariwisata, yaitu dengan
 - 1) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata
 - 2) Pengembangan destinasi pariwisata
 - 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif
 - 4) Terintegrasi, bernilai tambah dan berdaya saing
- c. UMKM, yaitu dengan
 - 1) Peningkatan kapasitas dan produk UMKM.
 - 2) Inkubasi usaha
 - 3) Peningkatan daya saing UMKM

4) Digitalisasi Pemasaran

Dengan indikator tujuan pada misi ini yaitu 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan 3) Angka Kemiskinan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu:

- a. peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal;
- b. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan;
- c. meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani;
- d. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolah ikan;
- e. Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataan ijin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar sesuai dengan protokol kesehatan mencegah penyebaran pandemi Covid 19, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen;
- f. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan promosi penanaman modal;
- g. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;
- h. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja;

- i. peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha mikro, pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam membantu permodalan usaha mikro serta digitalisasi marketing;
- j. peningkatan upaya penurunan kesmiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial.

Pada misi ini juga dikaitkan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomer 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Percepatan pembangunan ekonomi berdasarkan perpres tersebut adalah pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Kendal, pembangunan Industri berbasis baja, Pengembangan Kawasan Industri Kendal dan Pengembangan pelabuhan perikanan pantai Tawang.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusi Kendal, sehingga bisa bersaing secara regional, nasional ataupun internasional. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

- a. SDM Unggul
 - 1) Mendorong wajib belajar 12 tahun;
 - 2) Perluasan akses terhadap perguruan tinggi;
 - 3) Membangun ruang belajar informal di masyarakat; dan
 - 4) mendorong kembalinya nilai-nilai kemasyarakatan yang beragama dan berbudi pekerti luhur.
- b. Daya Saing
 - 1) Membuat iklim pendidikan yang nyaman dan berbudaya dalam mendorong SDM berkualitas dan berdaya saing;
 - 2) Mendongkrak daya saing melalui inovasi dan teknologi Informasi.
- c. Revolusi Industri 4.0
 - 1) Peningkatan penguasaan teknologi;
 - 2) Perluasan pasar industri dan UMKM melalui optimalisasi pemasaran online.

Misi kedua ini memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda;
- c. Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam penanganan pandemi COVID-19;
- e. Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB;
- f. Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di masa pandemi Covid-19;
- g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG disemua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.

3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong

Misi ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu:

- a. Inklusif
 - 1) Memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang beragama yang harmonis;
 - 2) Mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal di berbagai event daerah, nasional, maupun global.

b. Makmur/Kesejahteraan

- 1) Menjamin rasa aman bagi masyarakat dengan penguatan peran Polri dan TNI sampai unit terkecil lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal;
- 2) Penataan kawasan dan pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal.

c. Kelembagaan

- 1) Penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat dan kehidupan beragama;
- 2) Mendorong peran aktif seluruh *stakeholder* dalam pembangunan Kabupaten Kendal.

Misi ketiga ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) Angka Kriminalitas), 2) Indeks Desa Membangun. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- a. Pencegahan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan pemahaman cinta tanah air, pelaksanaan bela negara, peningkatan kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pemilu yang kondusif;
- b. meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM;
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui penataan desa, peningkatan administrasi desa, peningkatan dan pembentukan BUMDES.

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kendal secara berkelanjutan. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. Infrastruktur Berkeadilan

- 1) Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
- 2) Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/ distribusi *channel*;

- 3) Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan Infrastruktur;
 - 4) Mendorong infrastruktur yang layak anak, lansia dan difabel.
- b. Berkelanjutan
- 1) Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;
 - 2) Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Misi keempat ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas 2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup dan 3) Indeks Resiko Bencana (IRBI). Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu :

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase melalui pembangunan dan rehabilitas;
- b. Peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitas irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah;
- c. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penanganan limbah sesuai SPM;
- d. Peningkatan penanganan Kumuh melalui peningkatan kualitas PSU di kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM;
- e. peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalaui peningkatan pemahaman, peningkatan informasi RTRW dan peneggakan perda RTRW;
- f. Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi;
- g. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keaneragaman hayati;
- h. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, peningkatan

early warning system, dan peningkatan prasarana penanganan bencana.

Pada misi ini juga dikaitkan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomer 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Percepatan pembangunan infrastruktur berdasarkan perpres tersebut adalah pembangunan Bendung Karet Sungai Blorong, pembangunan bendungan Bodri, pembangunan bendung karet sungai Bodri, revitalisasi kawasan bekas sungai Bodri, Pembangunan Prasarana Konversi SDA Sungai Blorong, Pembangunan Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon (Industri Baja) dan Akses jalan pantura Kendal ke KPI Kendal, Pembangunan Interchange di Arteri Kaliwungu ke KI Kendal, Pembangunan Outer Ringroad Kendal - Semarang (Harbor Toll), pembangunan Kendal Sea Port, Pembangunan gardu induk KI Kendal, Pembangunan Pipa Gas Distribusi Semarang Kendal dan pembangunan Rusunawa KI Kendal.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kemasyarakat secara optimal. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. E-Government

- 1) Mendorong keterbukaan informasi dan data terpusat serta *Command Center*;
- 2) Mendorong optimalisasi *e-planning*, *e-monitoring*, *e-musrenbang*, *e-services*, *e-budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi.

b. Partisipatif

- 1) Mendorong pendekatan pembangunan konsep *bottom-up* dengan memberikan ruang bagi desa/dusun dan unit pemerintahan daerah terkecil (RT dan RW) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui bantuan anggaran Pemerintah Kabupaten.

c. *Good Governance*

- 1) Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam menjaga kesinergian dan penerapan prinsip prinsip *good governance* (partisipatif, keadilan hukum, transparansi, *public services*, berorientasi konsesus, efektif dan efisien, bervisi strategis, berkeadilan).

Misi kelima ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) Indeks Reformasi Birokasi. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu :

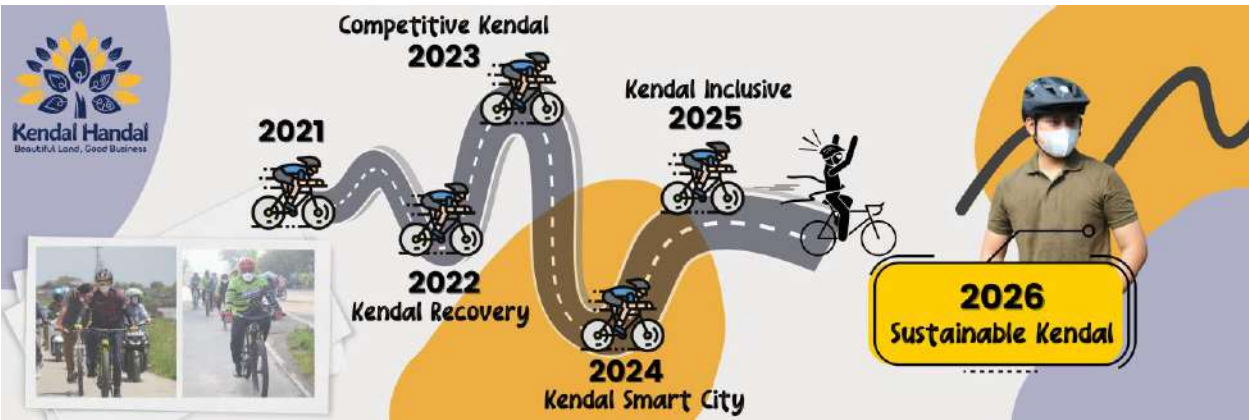
- a. Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan peran RT/RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas APBD;
- b. Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN;
- c. Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, mendorong optimalisasi *e- planning, e-monitoring, e-musrenbang, e-services, e-budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas 1 data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian;
- d. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.



6.2. **Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disetiap misi. Berikut ini arah kebijakan setiap tahun:

Gambar 6.1
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026



➤ Tahun 2021

Memiliki arah kebijakan dengan fokus pada aspek pemulihan ekonomi, kesehatan, sosial dan infrastruktur.

➤ **Tahun 2022 “Kendal Recovery”**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2022 di prioritaskan pada **“Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal”**. Fokus dari pembangunan tahun 2022 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penguatan kepada UMKM, penguatan industri, pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan kemudahan investasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan peningkatan sektor usaha ekonomi kreatif. Kondisi ini akan didukung dengan kualitas infrastruktur, baik akses maupun sarana prasarana pendukung pemulihan ekonomi juga meningkatkan kualitas kesehatan yang berbasis Promotif dan Preventif, peningkatan pelayanan rujukan dan faskes tingkat pertama, serta mencapai standar pelayanan minimum. Kualitas infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi difokuskan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten dan jalan poros desa, peningkatan kualitas jembatan dan peningkatan kualitas irigasi.

➤ **Tahun 2023 “Competitive Kendal”**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada **“Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”**. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era *industry 4.0*.

➤ **Tahun 2024 “Kendal Smart City”**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 di prioritaskan pada **“Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”**. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan

kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean dan Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

➤ Tahun 2025 “Kendal Inclusive”

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 di prioritaskan pada **“Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”**. Fokus pada kebijakan ini adalah penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Penguatan kualitas jalan difokuskan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan pemeliharaan jalan serta peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten. Untuk layanan angkutan jalan yang terintegrasi difokuskan pada peningkatan kualitas terminal terpadu Bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa.

Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

➤ Tahun 2026 “Sustainable Kendal”

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 merupakan akhir periode RPJMD tahun 2021-2026, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 di prioritaskan pada **“Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”**. Adapun Fokus kebijakan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Kabupaten Kendal tahun 2021-2026, berikut disajikan tabel program prioritas tahun 2021 - 2026:

Tabel 6.1.

Roadmap Pelaksana Program Prioritas Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	“Kendal Recovery” Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal	meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penguatan kepada UMKM, penguatan industri, pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan kemudahan investasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan peningkatan sektor UMKM	Ekonomi						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	PERINDUSTRIAN
									Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PARIWISATA
									Program Pemasaran Pariwisata	
									Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PERTANIAN
									Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
									Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
									Program Penyuluhan Pertanian	
									Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PERIKANAN DAN KELAUTAN
									Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
									Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
									Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	KOPERASI UMKM
									Program Pengembangan UMKM	
									Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL
									Program Pelayanan Penanaman Modal	
									Peningkatan Sarana Distribusi	PERDAGANGAN

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
									Perdagangan	
									Program Pengembangan Ekspor	
									Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
									Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat"	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
									Program Penataan Desa	
									Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Infrastruktur						Program Penyelenggaraan Jalan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
									Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
									Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
									Program Pengembang Perumahan	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Kawasan Permukiman	
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyelenggaraan LLAJ	PERHUBUNGAN
									Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota	LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pengelolaan Persampahan	

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
2.	“Competitive Kendal” Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal		Kesehatan						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	KESEHATAN
									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
									Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan	Pendidikan						Program pengelolaan pendidikan	PENDIDIKAN
			Kebudayaan dan karakter						Program Pengembangan Kebudayaan	KEBUDAYAAN
									Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
									Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
									Program Pembinaan Perpustakaan	PERPUSTAKAAN

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
		prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era <i>industry 4.0</i>	Kesehatan						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	KESEHATAN
									Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Keluarga Berencana	Keluarga Berencana						Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB)	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
									Program Pengendalian Penduduk	
		Olahraga	Olahraga						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Program	

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
									Perlindungan Perempuan	
									Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
									Program Perlindungan Khusus Anak	
			Kualitas ASN						Program Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN
									Program Pengembangan Sumberdaya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Tenaga Kerja						Program Perencanaan Tenaga Kerja	TENAGA KERJA
									Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	PERINDUSTRIAN
3	"Kendal Smart City" Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien,	peningkatan kemandapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas	Komunikasi dan Informatika						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN DAN KEARSIPAN
									Program Pengelolaan	

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
	bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City	perencanaan dan penganggaran, peningkatan <i>clean dan Good Governances</i> , penguatan <i>Smart City</i> yang difokuskan pada <i>Smart government, Smart Education, Smart Health, Smart economy</i> dan <i>Smart Transportation</i> .							Informasi Dan Komunikasi Publik	
									Program Pengelolaan Arsip	
									Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
									Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
									Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	
		Kelembagaan dan perencanaan							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SETDA, PERENCANAAN
									Program Perekonomian Dan Pembangunan	
									Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
									Program Penelitian Dan Pengembangan	

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
									Daerah	
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pengawasan						Program Penyelenggaraan Pengawasan	PENGAWASAN
									Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
			Penganggaran						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	KEUANGAN
									Program Pengelolaan Barang Milik	
									Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Pendidikan						Program Pengelolaan Pendidikan	PENDIDIKAN
									Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
			Kesehatan						Program	KESEHATAN

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
									Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Perhubungan						Program Penyelenggaraan LLAJ	PERHUBUNGAN
4.	“Kendal Inclusive” Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan	Penguatan ekonomi dalam ketersediaan pangan dan pengendalian kemiskinan	Ketahanan pangan						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	PANGAN
									Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
									Program Penanganan Kerawanan Pangan	
									Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Penanganan kemiskinan berkelanjutan						Program Pemberdayaan Sosial	SOSIAL
									Program Rehabilitasi Sosial	

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
									Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana						Program Penyelenggaraan Jalan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Penyelenggaraan LLAJ	PERHUBUNGAN
									Program Penanggulangan Bencana	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Lingkungan Hidup						Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota	LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pengelolaan Persampahan	
5.	“Sustainable Kendal” Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan	peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas,	Peningkatan pendapatan masyarakat						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	KOPERASI dan UKM
									Program Pengembangan UMKM	

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
		serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.	Tenaga Kerja						Program Perencanaan Tenaga Kerja	TENAGA KERJA
									Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
									Program Hubungan Industrial	
									Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Peningkatan mitigasi bencana						Program Penanggulangan Bencana	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			Keamanan dan kenyamanan						Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
			Toleransi						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	PEMERINTAHAN UMUM
									Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Pemberdayaan perempuan dan						Program Pengarus Utamaan Gender	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Unsur	RENCANA TAHUN KE -					Program	Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026		
			perlindungan anak						Dan Pemberdayaan Perempuan	PERLINDUNGAN ANAK
									Program Perlindungan Perempuan	
									Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
									Program Perlindungan Khusus Anak	
			Lingkungan Hidup						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/Kota	

6.3. Arah Kebijakan Pembangunan *mainstreaming*

Pembangunan di Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak merubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari dana desa.

Isu kemiskinan juga diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

6.4. Program Prioritas

Program Unggulan merupakan program DICO M. GANINDUTO, B.Sc & H. WINDU SUKO BASUKI, SH untuk warga Kabupaten Kendal, program unggulan tersebut diantaranya :

1. "*Program Infrastruktur*": Alokasi tambahan anggaran 100-300 juta per Dusun per Tahun yang difokuskan pada pembangunan fisik, pengembangan SDM dan perekonomian mikro. Revitalisasi dan penataan Alun-alun Kabupaten, Alun-Alun Kaliwungu dan Ruang Terbuka Hijau Plus berbasis kecamatan (sarana rekreasi, olahraga dan pelayanan publik). Pembangunan dasar di area-area wisata.
2. "*Program Perekonomian dan Pariwisata*": mengawal proses pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan memprioritaskan kepentingan daerah, mulai dari tenaga kerja hingga pengusaha untuk menggerakkan perekonomian daerah, mengembangkan konsep *One Village One Product (OVOP)*.
3. "*Program Pertanian*": pembangunan BUMD pertanian untuk optimaliasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (budidaya dan tangkap/nelayan); pembangunan kawasan agro industri berbasis potensi daerah (durian, rambutan, jagung dsb); pengembangan pertanian organik untuk meningkatkan kualitas produk dan penghasilan petani,

Pemberdayaan masyarakat pinggiran hutan; revitalisasi Petugas Penyuluh Lapangan.

4. "*Program Agama dan Budaya*", Bantuan operasional ponpes, tempat ibadah dan aktifitas keagamaan, insentif Takmir Masjid, Modin, Guru Ngaji, Pegiat Budaya dan Penjaga Makam, umroh untuk pegiat keagamaan di kampung, Sholat Subuh Berjamaah, Beasiswa guru diniyah hingga 52, Program pengembangan Santriprenuer (Santri Berwirausaha), Beasiswa santri berprestasi (akademik, olahraga, seni dan budaya), Pengembangan bisnis online, market place dan *start up* (1 ponpes 1 *start up*), Beasiswa Hafidz dan Hafidzoh.
5. "*Program Pendidikan*": Pelayanan pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD hingga SLTP, Program 10.000 beasiswa SMA/MA/SMK/Sederajat dan Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi dan keluarga tidak mampu, bantuan seragam dan peralatan sekolah, Peningkatan tunjangan guru honorer, bantuan studi lanjut untuk guru berprestasi, percepatan sertifikasi guru, standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama
6. "*Program Kesehatan*": Jaminan pelayanan kesehatan gratis dan perluasan keanggotaan BPJS masyarakat, Dokter On Call, Puskesmas yang terakreditasi A, Optimalisasi Posyandu ibu, anak dan lansia dengan memberikan tambahan nutrisi dan makanan.
7. "*Program Sosial*": Social Security Number (Satu Kartu Untuk Semua Layanan Sosial), Program Keluarga Harapan Plus APBD Kabupaten Kendal, Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus), Pengembangan koperasi berbasis segmen (koperasi Wanita, petani, nelayan, LMDH, PKL dsb), Peningkatan tunjangan/insentif RT, Peningkatan tunjangan kematian.
8. "*Program Ketenagakerjaan*": MoU penyerapan tenaga lokal bagi setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Kendal, 10.000 Wira Usaha Baru melalui bantuan permodalan bergulir (1 Dusun 1 WUB), Balai Latihan Kerja yang terkoneksi dengan kebutuhan swasta, Mendorong tumbuhnya industri kreatif, start up dan bisnis online, Program Job Market Fair (Festival Tenaga Kerja), Program "Jemput Kerja" bagi keluarga tidak mampu usia produktif untuk disalurkan ke lapangan pekerjaan.
9. "*Program Tata Kelola Pemerintahan*": Penerapan Zona Bebas KKN dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan *merit system*, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik services), (SPBE) (Korupsi, Kolusi untuk mempercepat pelayanan (e-pengawasan/command

center (*e-monitoring*), perencanaan pembangunan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting/real time budgeting*), dan Pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) dan sebagainya.



Tabel 6.2.

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
Misi ke-1 :Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif(start up)								
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal	Penguatan Struktur Ekonomi Kendal: Mempertahankan Dominasi Industri, Mendorong Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata, UMKM, Ekonomi Kreatif Pertanian dan Perikanan.	Program Perekonomian dan Pariwisata	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	PERINDUSTRIAN
			Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta			- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata	PARIWISATA
			Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
				pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan			Intelektual	
			Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani		Program Pertanian	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian	PERTANIAN
				Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolahan ikan			- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	PERIKANAN DAN KELAUTAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
							Perikanan	
			Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas ekspor, penataan ijin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar sesuai dengan protokol kesehatan mencegah penyebaran pandemi covid-19, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen			- Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Pengembangan Ekspor - Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PERDAGANGAN
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang			- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	PANGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
							Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan	
Mengurangi Kemiskinan dan pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Penurunan pengangguran melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan perselisihan tenaga kerja.		Program Ketenagakeriaan	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Penempatan Tenaga Kerja	TENAGA KERJA
							- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL
		meningkatkan pendapatan	Prosentase UMK yang	peningkatan kualitas dan kuantitas usaha		Program Perekonomian	- Program Pemberdayaa	KOPERASI UMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
		masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	berkembang	mikro melalui fasilitasi izin usaha dan PIRT, peningkatan akses permodalan dengan koperasi, pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi		dan Pariwisata	n Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM	
	Angka Kemiskinan	meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Tingkat kesejahteraan I	peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kab.Kendal.	Program Agama dan Budaya Program Sosial	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	SOSIAL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
Misi ke-2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0								
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudi pekerti luhur	IPM	Meningkatkan SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin dan berprestasi, pemberian perlengkapan sekolah sesuai dengan SPM, peningkatan pendidikan 12 tahun, peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mendukung pembelajaran daring dengan mengaplikasikan <i>Learning Management System</i> pada jenjang pendidikan kewenangan kabupaten serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan	Memberikan memenuhi dan menjamin pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta mampu meningkatkan dan kesejahteraan	Program Pendidikan	- Program pengelolaan pendidikan	PENDIDIKAN
			Rata -rata lama sekolah					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
				Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda		Program Agama dan Budaya	- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Kesenian Tradisional	KEBUDAYAAN
				Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca			Program Pembinaan Perpustakaan	PERPUSTAKAAN
		meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan keselamatan ibu dan anak, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan kepemilikan jaminan		Program Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	KESEHATAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
				pemeliharaan kesehatan (JKN) menuju UHC (<i>Universal Health Coverage</i>) perilaku hidup bersih dan sehat.			Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB		Program Kesehatan	- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Program Pengendalian Penduduk	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PEMUDA OLAHRAGA
		meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep			- Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Pemenuhan Hak Anak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
				Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus			(Pha) - Program Perlindungan Khusus Anak	
Misi ke-3 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan								
Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	Angka kriminalitas							
		Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	Pencegahan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan pemahaman cinta tanah air, pelaksanaan belanegara, peningkatan kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pemilu yang kondusif	Pencegahan konflik difokuskan pada peningkatan bela negara cinta tanah air	Program agama dan budaya	- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	PEMERINTAHAN UMUM
			Persentase penurunan gangguan keamanan dan	meningkatkan kententraman dan ketertiban umum melalui penegakan	SDM yang berkualitas didukung dengan memperteguh	Program agama dan budaya	Program Peningkatan Ketenteraman Dan	TRANTIBUM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
			ketertiban	perda, peningkatan disiplin aparaturnya, dan peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM	keragaman, budaya dan kehidupan beragama di era disrupsi		Ketertiban Umum	
Meningkatkan kualitas kebudayaan daerah	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya dan cagar budaya, meningkatkan promosi budaya dan warisan budaya, mengadakan event kebudayaan sebagai salah satu sarana promosi kebudayaan, memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat melalui berbagai event yang dilaksanakan, menjaga keberadaan cagar budaya yang ada dan mempromosikan cagar budaya sebagai salah satu destinasi pariwisata maupun destinasi pembelajaran siswa.	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga budaya dan cagar budaya serta peningkatan promosi kebudayaan local daerah dalam berbagai event yang diadakan di daerah.	Program Agama dan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	KEBUDAYAAN
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
Meningkatnya kemandirian desa	Indek Desa Membangun	Meningkatnya kualitas desa	Persentase Desa Mandiri	Peningkatan kualitas desa melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan,	Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa Sebagai Etalase dan Subjek	Program Infrastruktur	- Program Penataan Desa - Program Peningkatan Kerjasama Desa	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
				penataan desa, peningkatan administrasi desa, mendorong inovasi masyarakat melalui fasilitas dan kerjasama, peningkatan dan pembentukan BUMDES	Pembangunan Kabupaten Kendal (Desa Membangun Kendal)		- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
Misi ke-4 :Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.								
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan tata ruang	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	Peningkatan konektivitas wilayah melalui kualitas infrastruktur jalan, drainase pembangunan dan rehabilitasi, manajemen rekayasa lalu lintas, peningkatan sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan pengembangan penerangan jalan kewenangan kabupaten, melalui peningkatan kelas jalan, peningkatan kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan drainase	Membangun Keterpaduan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan.	Program Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Persentase drainase kondisi baik				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
				rusak berat dan ringan serta pembangunan drainase baru.				
			Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	Peningkatan kualitas pengendali banjir, longsor melalui peningkatan kapasitas dan kualitas irigasi dan drainase		Program Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalui peningkatan pemahaman RTRW dan penegakan perda RTRW			Program Penyelenggara n Penataan Ruang	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase capaian universal akses	Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penangan limbah sesuai SPM	Penataan Kawasan dan Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dengan Mendudukan Tata Ruang Sebagai Kompas Investasi di Kabupaten Kendal.		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Peningkatan penangaanan perumahan dan			- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
							- Program Pengembangan Perumahan	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
				kawasankumuh melalui peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni dan tertata rapi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas perumahan dengan PSU kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM			- Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	indek konektivitas	meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan transportasi	pemantapan transportasi yang <i>smart</i> , kualitas manajemen perhubungan		Penyelenggara n LLAJ	PERHUBUNGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
				sperti Bus Rapid transit dan layanan angkutan feeder pedesaan berbasis IT.				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	Indeks kualitas air	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keaneragaman hayati dengan RTH yang cukup dan berkualitas	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas uji air udara, tanah, pengelolaan 3R	Program Infrastruktur	- Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota - Program Pengelolaan Persampahan	LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks kualitas udara					
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan					
	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui menerapkan strategi pengurangan resiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana, penguatan desa tangguh bencana, peningkatan <i>early warningsistem</i> , dan prasarana penanganan bencana	Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim.		Program Penanggulangan Bencana	TRANTIBUM
Misi ke-5 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.								
Meningkatkan reformasi	Indeks Reformasi							
		Meningkatnya	Nilai SAKIP	Peningkatan birokrasi	Pemerintah Daerah	Program Tata	- Program	SETDA,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Birokrasi	birokrasi yang akuntabel		yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan pengukuran pencapaian kinerja memperkuat kelembagaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan peran RT RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi, perencanaan, litbang dan peningkatan kualitas APBD	Kabupaten Kendal, Garda Terdepan Membangun TataKelola Yang Bersih dan Transparan Dengan Prinsip Good Governance	Kelola Pemerintahan' Program Tata Kelola Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN ,
			Kasus Korupsi				- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	PENGAWASAN
			Opini BPK				- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program	KEUANGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
							Pengelolaan Barang Milik - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indek Profesionalisme ASN	Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN	Peningkatan birokrasi yang Kapebel difokuskan pada pengembangan smart city disegala aspek		Program Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIA N
			Indeks SPBE	Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, Mendorong optimalisasi E-Planning, E-Monitoring, E-Musrenbang, E-Services, E-Budgeting sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas satu data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian. Peningkatan kualitas			- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik - Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip - Program Penyelenggaraan Statistik	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , STATISTIK, PERSANDIAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
				infrastruktur teknologi informasi			Sektoral - Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	
			Indeks kematangan kelembagaan	Peningkatan kematangan organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas, penjaminan mutu layanan daerah, ketaatan terhadap SOP, terukurnya kinerja daerah, manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, adanya pengembangan inovasi layanan dan peningkatan kualitas budaya organisasi.			- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Program Perekonomian dan Pembangunan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengembangan Sumberdaya - Program Perumusan Kebijakan,	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	URUSAN
							Pendampingan Dan Asistensi - Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata-rata IKM	Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli, peningkatan penyelesaian pengaduan yang terintegrasi dan peningkatan sarana prasarana pelayanan		Program Tata Kelola Pemerintahan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIAT DPRD, KEWILAYAHAN

6.5. Program RPJMD Kabupaten Kendal berbasis pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Kendal yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Untuk itu, dilakukan penyelarasan

Program RPJMD dengan Program Pembangunan dalam RPJMD. Hasil penyelerasan Program pada RTRW dan RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 6.3.

Tabel Penyelerasan Program RTRW dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG		
I	<u>Perwujudan Sistem Perkotaan</u>		
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	20 kecamatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
b.	Penetapan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang	20 kecamatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
c.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang PKL	Kendal, Kaliwungu, Weleri, Boja dan Sukorejo	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
d.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (Bagian Selatan Kabupaten Kendal)	Plantungan, Patean, Singorojo, Limbangan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
e.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (Bagian Tengah Kabupaten Kendal)	Pageruyung, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Ngampel, Kaliwungu Selatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
f.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (Bagian Utara/ Pesisir Kabupaten Kendal)	Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Brangsong	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
g.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis	Kabupaten Kendal	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
h.	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa/KTP2D (Bagian Utara/ Pesisir	Kangkung, Patebon, Cepiring, Kota Kendal, Brangsong	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
	Kabupaten Kendal)		
i.	Penyusunan Rencana Pengembangan KTP2D (Bagian Tengah Kabupaten Kendal)	Gemuh, Ngampel, Ringinarum, dan Pegandon	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
j.	Penyusunan Rencana Pengembangan KTP2D (Bagian Selatan Kabupaten Kendal)	Boja, Pagerruyung, Limbangan, Singorojo, Plantungan, Sukorejo	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	<u>Perwujudan Sistem Prasarana</u>		
2.1.	Transportasi Darat		
a.	Pembangunan terminal penumpang tipe B	Kec. Sukorejo	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
b.	Pengembangan terminal tipe C	Kec. Weleri, Kendal, Kaliwungu, Boja	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
c.	Peningkatan jalan arteri	a. jalan Lingkar Weleri; b. jalan Weleri-batas Kota Kendal; c. jalan lingkar Bodri; d. jalan raya Barat; e. jalan raya Kendal; f. jalan raya Timur; g. jalan batas Kota Kendal- batas Kota Semarang; h. jalan Ketapang - Kebonharjo; i. jalan Lingkar Kaliwungu;	
d.	Pembangunan jalan Weleri-Rowosari-Kangkung-Cepiring-Patebon- Kendal-Brangsong-Kaliwungu (Jalan Pesisir)	Kab. Kendal	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
e.	Pembangunan jalan arteri	a. Jalan penghubung SORR (Semarang Outer Ring Road) b. Jalan akses pelabuhan penyeberangan Kendal	
f.	Pengembangan jalan tol	jalan tol Trans Jawa ruas Batang-Semarang	
g.	Peningkatan jaringan jalan provinsi	a. jalan Weleri – Patean/ batas Kabupaten Temanggung; b. jalan Sukorejo – Plantungan/ Blimbing; c. jalan Cangkiran-Boja- Sukorejo; d. jalan Kaliwungu/Sekopek- Boja- Limbangan-batas Kabupaten Semarang; e. jalan Patebon-Pegandon/ jalan keluar tol Kendal; dan f. jalan akses menuju KPI.	
h.	Pengembangan jalan kolektor	a. jalan Weleri - Ringinarum - Gemuh - Pegandon - Ngampel - Brangsong - Kaliwungu Selatan; dan b. jalan lingkaran Kaliwungu - Pelabuhan Kendal.	Program Penyelenggaraan Jalan
i.	Pengembangan jalan lokal	seluruh kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan
j.	Pengembangan jalur kereta api antar kota	a. Jalur lintas utara Jawa (Jakarta-Cirebon- Semarang-Bojonegoro-Surabaya);	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
		b. jalur Kedungsepur.	
k.	Pembangunan rencana kereta api cepat Jakarta-Surabaya	Kab. Kendal	
j.	Pembangunan rel kereta api jalur ganda Semarang – Pekalongan – Tegal – Purwokerto	Kab. Kendal	
l.	Rencana pengaktifan kembali jalur Kalibodri-Kendal-Kaliwungu	Kalibodri-Kendal- Kaliwungu	
m.	Pembangunan jalur kereta api khusus dari Stasiun Mangkang – Kawasan Industri Kendal – Pelabuhan Kendal	Stasiun Mangkang – Kawasan Industri Kendal – Pelabuhan Kendal	
n.	Pengembangan stasiun penumpang KA	Kec Kaliwungu, Pegandon, Weleri, Kendal	
o.	Rencana pengembangan alur pelayaran kelas I	a. jalur Kendal – Kumai (Kalimantan Tengah); b. rencana pengembangan jalur Kendal-Banjarmasin (Kalimantan Selatan); c. rencana pengembangan jalur Kendal-Bahaur (Kalimantan Tengah); d. rencana pengembangan jalur Kendal-Tanah Laut (Kalimantan Tengah); dan e. rencana pengembangan jalur Kendal-Pulang pisau (Kalimantan Tengah).	Program Pengelolaan Pelayaran

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
p.	Studi pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas I	Kec Kaliwungu	Program Pengelolaan Pelayaran
q.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas I	Kec Kaliwungu	Program Pengelolaan Pelayaran
2.2.	Transportasi Laut		
a.	Pembangunan Terminal Kendal (Kendal sea port)	Kec Kaliwungu	
b.	Penyusunan Master Plan Pelabuhan Kabupaten Kendal	Kec Kaliwungu	Program Pengelolaan Pelayaran
c.	Peningkatan pelabuhan menjadi pelabuhan penyeberangan (ASDP) / pelabuhan pengumpan regional	Kec Kaliwungu	
d.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelayaran Rakyat)	Kec Rowosari	
e.	Renovasi, pemeliharaan bangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP)	Tawang Kec. Rowosari.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
f.	Renovasi, pemeliharaan bangunan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	Bandengan Kec. Kendal dan Kec. Rowosari	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2.3.	Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan		
a.	Pembangunan pipa gas alam Cirebon - Semarang - Bangkalan	Kec. Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon, Cepiring, Kangkung, dan Rowosari	
b.	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 KVA : Mandiracan -	Kab Kendal	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
	Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Ungaran – Purwodadi – Cepu – Krian (Circuit II); Ungaran – Demak – Purwodadi – Kudus – Pati – Tanjung Jati B (Jepara); jalur selatan terhubung Tasikmalaya – Cilacap – Kebumen – Purworejo – Klaten – Pedan – Wonogiri – Kediri; Gardu Induk 500/150 kV – Pedan – Ungaran.		
c.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang membentang antar Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Kab Kendal	
d.	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah	Kab Kendal	
e.	Pembangunan gardu induk	Kawasan Industri Kendal	
f.	Pembangunan PLTA	Kec Singorojo, Plantungan	
g.	Pembangunan PLTU	Kec Patebon	
h.	Pembangunan PLTS	Kec Kangkung	
i.	Pembangunan PLTPB (Panas Bumi) Gunung Ungaran	Kab Kendal	
j.	Pembangunan PLTB	Kec Limbangan	
k.	Pembangunan PLTMH	Kec Plantungan, Pageruyung, Limbangan	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
1.	Pembangunan PLTSa (Sampah)	Kec Kaliwungu Selatan, Pageruyung	Pengelolaan Persampahan
2.4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi		
a.	peningkatan kapasitas jaringan kabel telekomunikasi pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum, dan sosial, terminal, permukiman, dan kawasan yang baru dikembangkan	Kab Kendal	
b.	penggelaran serat optik dari Kota Tegal - Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang - Kota Pekalongan - Kabupaten Pekalongan - Kabupaten Batang - Kabupaten Kendal - Kota Semarang - Kabupaten Demak - Kabupaten Kudus - Kabupaten Pati - Kabupaten Rembang	Kab Kendal	
c.	Pengembangan menara telekomunikasi bersama	Kab Kendal	
d.	Peningkatan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Daerah	Kab Kendal	
2.5.	Sistem Jaringan Sumberdaya Air		
a.	Penyusunan studi penanganan gelombang pasang	Kab Kendal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
b.	Pemeliharaan jaringan irigasi	Kab Kendal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
c.	pembangunan jaringan irigasi	Kab Kendal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
			(Sda)
d.	Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah	Kab Kendal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
e.	Pengembangan polder	Kec Kendal, Kaliwungu	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
f.	Pembangunan pemecah ombak, penahan abrasi pantai / Tanggul Laut	Kec Kaliwungu, Kendal, Patebon, Rowosari	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
g.	pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri	a. Pembangunan Bendung Karet Sungai blorong b. Pembangunan Waduk Bodri c. Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri d. Revitalisasi Kawasan Bekas sungai Bodri e. Pembangunan Prasarana Konservasi SDA Sungai Blorong	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
2.6.	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya	Beautiful Land, Good Business	
	2.6.1. Sistem penyediaan air minum (SPAM)		
a.	Revisi Master Plan Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal	Kab Kendal	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
b.	Peningkatan cakupan pelayanan jaringan perpipaan	Kab Kendal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
c.	Peningkatan sarana pendukung jaringan	Kab Kendal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
	perpipaan		Sistem Penyediaan Air Minum
d.	Optimalisasi bukan jaringan perpipaan	Kab Kendal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	2.6.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Kab Kendal	
a.	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Air limbah Kabupaten Kendal	Kab Kendal	
b.	Pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah terpusat	Kab Kendal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
c.	Pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga secara setempat atau terpusat di lingkungan padat penduduk	Kab Kendal	
d.	Peningkatan akses sistem pengelolaan air limbah di perkotaan dan pedesaan	Kab Kendal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	2.6.3. Sistem Pengelolaan Limbah B3		
a.	Pembangunan pengolahan limbah B3	Kab Kendal	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
b.	Penambahan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun	Kab Kendal	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	2.6.4. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah		
a.	Penyusunan Master Plan Sistem Persampahan Kabupaten Kendal	Kab Kendal	Pengelolaan Persampahan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
b.	Pembangunan TPA	Kec Kaliwungu Selatan, Pageruyung	Pengelolaan Persampahan
c.	Pembangunan TPS Terpadu	Kec Boja, Weleri, Cepiring. Kaliwungu. Sukorejo, Kendal	Pengelolaan Persampahan
d.	Pengembangan TPS 3R	Kab Kendal	Pengelolaan Persampahan
e.	Penyediaan sarana pewadahan, pengangkutan dan pengumpulan sampah	Kab Kendal	Pengelolaan Persampahan
	2.6.5. Sistem Jaringan Drainase		
a.	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sistem Drainase Kabupaten Kendal	Kab Kendal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
b.	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase	Kab Kendal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
c.	Pembangunan jaringan drainase	Kab Kendal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	2.6.6. Sistem jaringan evakuasi bencana		
a.	Pembangunan jalur evakuasi bencana	Kab Kendal	
b.	Penyediaan ruang evakuasi bencana	Kab Kendal	
B	PERWUJUDAN POLA RUANG		
I	Perwujudan Kawasan Lindung		
1.1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
a.	Reboisasi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang berfungsi lindung	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo, Singorojo, Patean, Pageruyung	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
b.	Pengembalian fungsi hutan lindung dan perlindungan satwa	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo,, Singorojo, Patean, Pageruyung	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
c.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo,, Singorojo, Patean, Pageruyung	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
d.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo,, Singorojo, Patean, Pageruyung	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
e.	Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo,, Singorojo, Patean, Pageruyung	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
1.2.	Kawasan perlindungan setempat		
a.	Peningkatan fungsi konservasi (reboisasi) di sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, sekitar danau/waduk	Kec Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Weleri, Boja, Singorojo, Gemuh, Patean, Plantungan, Sukorejo	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
b.	Pengamanan kawasan sempadan rel kereta api	Kec Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Ngampel, Brangsong, Kaliwungu	
c.	Pengendalian penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi	Kab Kendal	
d.	Penyusunan Rencana Rencana Ruang Terbuka Hijau	Kab Kendal	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
e.	DED Ruang Terbuka Hijau	Kab Kendal	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
f.	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	Kab Kendal	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
1.3.	Kawasan konservasi		
a.	Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	Kec Kaliwungu Selatan	
b.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kab Kendal	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
c.	Pelestarian ekosistem alam yang berada di dalam kawasan cagar alam	Kec Kaliwungu Selatan	
d.	Pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah	Kec Kaliwungu Selatan	
e.	Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan produktif yang tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem	Kec Kaliwungu Selatan	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
1.4.	Kawasan cagar budaya		
a.	Pengendalian kegiatan yang dapat merusak cagar budaya	Kec Limbangan, Kaliwungu, Kendal	
b.	Pembatasan bangunan pada kawasan cagar budaya	Kec Limbangan, Kaliwungu, Kendal	
c.	Pelestarian bangunan cagar budaya	Kec Limbangan, Kaliwungu, Kendal	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
1.5.	Kawasan lindung geologi		
a.	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan lindung geologi	Kec Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Kaliwungu Selatan, Singorojo	
b.	Perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar cekungan air tanah	Kec Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Kaliwungu Selatan, Singorojo	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
c.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kab Kendal	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
d.	Perlindungan sekitar mata air terhadap alih fungsi lindung	Kab Kendal	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
e.	Pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana geologi	Kab Kendal	
f.	Pengembangan dan penerapan teknologi bencana geologi	Kab Kendal	
1.6.	Kawasan rawan bencana		
a.	Studi penanganan banjir	Kab Kendal	
b.	Program Pengendalian Banjir	Sungai Aji/Slembang, Waridin, Blorong, Kendal, Buntu, Bodri, Blukar, Glodog, Bulanan/Pening, dan Kuto	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
c.	Studi penanganan longsor	Kab Kendal	
d.	Pembuatan talud penahan longsor	Kab Kendal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
			(Sda)
e.	Studi penanganan abrasi	Kawasan pesisir Kab. Kendal	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
f.	Penanganan teknis abrasi, pembuatan tanggul tepi pantai	Kawasan pesisir Kab. Kendal	
g.	Studi konservasi kawasan sabuk pantai	Kawasan pesisir Kab. Kendal	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
h.	Reboisasi dan konservasi kawasan sabuk pantai yang rawan abrasi	Kawasan pesisir Kab. Kendal	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
i.	Penanganan Teknis kawasan sabuk pantai	Kawasan pesisir Kab. Kendal	
j.	Penanaman tanaman lindung	Kab Kendal	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
k.	Pembuatan sarana resapan air	Kab Kendal	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
l.	Penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi	Kab Kendal	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota
m.	Pengaturan bangunan dan daerah hijau	Kab Kendal	
II	Perwujudan Kawasan Budi Daya		
2.1.	Kawasan hutan produksi		
a.	Intensifikasi lahan hutan produksi	Kec Limbangan, Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Boja, Brangsong, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Ngampel, Pagerruyung, Patean, Pegandon, Ringinarum, Weleri	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
2.2.	Kawasan pertanian		
a.	Pengawasan alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kab Kendal	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
b.	Peningkatan sarana prasarana penunjang pertanian	Kab Kendal	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
c.	Pengembangan lumbung pangan	Kec Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Weleri, dan Ringinarum	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
d.	Intensifikasi lahan pertanian sawah	Kab Kendal	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
e.	Pengembangan pertanian organik	Kab Kendal	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
f.	Pemantapan GAPOKTAN	Kab Kendal	Program Penyuluhan Pertanian
g.	Pengembangan sentra/produksi komoditas hortikultura dan pasca panen	Kec Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Ngampel, Ringinarum, Kaliwungu Selatan, Gemuh, Pegandon, Sukorejo, dan Singorojo.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
h.	Intensifikasi dan Diversifikasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	Kab Kendal	
i.	Pengembangan teknologi dan informasi pertanian	Kab Kendal	Program Penyuluhan Pertanian
j.	Pengembangan pasca panen <i>agroforestry</i>	Kab Kendal	Program Penyediaan Dan Pengembangan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
	dan hortikultura		Sarana Pertanian
k.	Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan	Kab Kendal	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
l.	Penyusunan RPJM Kawasan Agropolitan	Kab Kendal	
m.	Penyusunan DED Kawasan Agropolitan	Kab Kendal	
n.	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan	Kec Limbangan, Boja, Singorojo, Patean, Pagerruyung, Plantungan, Sukorejo, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, dan Ngampel	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
o.	Pengolahan hasil perkebunan	Kab Kendal	Program Penyuluhan Pertanian
p.	Pengembangan dan peningkatan mutu ternak	Kec Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Gemuh, Pegandon, Patebon, Cepiring	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
q.	Peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran hasil ternak	Kab Kendal	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2.3.	Perikanan		
a.	Pengembangan kawasan minapolitan	Kab Kendal	
b.	Pengembangan dan peningkatan mutu budidaya perikanan	Kab Kendal	
c.	Pengolahan hasil produksi perikanan	Kab Kendal	
d.	Peningkatan pemasaran perikanan	Kab Kendal	
e.	Renovasi dan pemeliharaan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan	a. Pengembangan PPP Tawang b. Pengembangan PPI Sendang	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
	Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Sikucing dan Bandengan c. Pengembangan TPI Tawang, Bandengan, Tanggulmalang, Sendang Sikucing dan Karangsari.	
2.4.	Kawasan pertambangan dan energi		
a.	Program pengembangan pertambangan rakyat	Kec Pegandon, Weleri, Pageruyung, Patean, Sukorejo, Singorojo, Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Brangsong, Ngampel, Weleri, sepanjang Sungai Bodri	
b.	Peningkatan kerjasama pengelolaan bersama kawasan pertambangan	Kec Pegandon, Weleri, Pageruyung, Patean, Sukorejo, Singorojo, Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Brangsong, Ngampel, Weleri, sepanjang Sungai Bodri	
c.	Perbaikan lahan (reklamasi) lahan bekas tambang	Kec Pegandon, Weleri, Pageruyung, Patean, Sukorejo, Singorojo, Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Brangsong, Ngampel, Weleri, sepanjang Sungai Bodri	
2.5.	Kawasan peruntukan industri		
a.	Penyusunan rencana penataan kawasan peruntukan industri	Kab Kendal	
b.	Penyusunan studi pembangunan kawasan industri	Kec Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon	
c.	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri	a. Pembangunan Pusat Logistik berikat KI Kendal	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
		b. Pembangunan Rusunawa KI Kendal c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri Lainnya di Kab. Kendal.	
d.	Pembinaan industri kecil menengah	Kab Kendal	
e.	Peningkatan daya tarik investasi	Kab Kendal	
2.6.	Kawasan Pariwisata		
a.	Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kendal	Kab Kendal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
b.	Penyediaan sarana & prasarana pendukung	Kab Kendal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
c.	Peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan	Kab Kendal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
d.	Pembentukan paket Daerah Tujuan Wisata (DTW) serta promosi wisata	Kab Kendal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
e.	Peningkatan peran serta masyarakat kawasan wisata	Kab Kendal	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
f.	Pengembangan SDM pariwisata	Kab Kendal	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
g.	Penetapan Desa Wisata	Kab Kendal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
h.	Pengembangan Desa Wisata	Kab Kendal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
2.7.	Kawasan permukiman		
a.	Program intensifikasi lahan permukiman sesuai rencana tata ruang	Kab Kendal	
b.	Peningkatan pelayanan sarana prasarana lingkungan	Kab Kendal	
c.	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah	a. Pembangunan Rusunawa Umum b. Pembangunan Rusunami c. Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	
2.8.	Kawasan pertahanan dan keamanan		
a.	Pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun	Kab Kendal	
b.	Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan	Kab Kendal	
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten		
a.	Studi Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Kendal	Kec. Kaliwungu	
b.	Review Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu	Kabupaten Kendal	
c.	Review Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kendal	Kabupaten Kendal	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PROGRAM RPJMD KABUPATEN KENDAL 2021-2026
d.	Studi Penyiapan Sarana Perumahan Pendukung Kawasan Industri Kabupaten Kendal	Pembangunan Rusunawa KI Kendal, Pusat Logistik berikat KI serta Sarana dan Prasarana Industri Lainnya	
e.	Pembangunan Kawasan Industri	a. Pembangunan Industri Berbasis Baja b. Pengembangan KI Kendal (KEK) c. Pembangunan KI Lainnya di Kab. Kendal	
g.	Penetapan Kawasan Industri	Kabupaten Kendal	
h.	Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri	Kabupaten Kendal	
i.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Lindung dan Rawan Bencana Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	
j.	Pengelolaan kawasan CAT Ungaran – Kendal	Kecamatan Limbangan dan Boja	Perencanaan Lingkungan Hidup
k.	Penyusunan rencana rinci kawasan panas bumi Gunung Ungaran	Kecamatan Limbangan dan Boja	
l.	Pemanfaatan panas bumi Gunung Ungaran	Kecamatan Limbangan dan Boja	

6.6. Agenda Prioritas

1. Aspek 1: UMKM, Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a Peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja
- b Peningkatan kualitas dan kuantitas investasi
- c Peningkatan jumlah wirausaha muda pemula
- d Penguatan dan penambahan lapangan kerja
- e Pembangunan infrastruktur penunjang destinasi wisata
- f Peningkatan peran Pariwisata dalam pembangunan daerah
- g Pembentukan kelompok sadar wisata penerapan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) pelaku wisata, penerapan *E-Tourism*, dan *E-Marketing*, serta pengembangan produk UMKM yang sesuai dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- h Pembinaan dan Peningkatan kapasitas BUMD dan BUMDes.
- i Pemetaan dan Pemanfaatan Aset Pariwisata Daerah.

2. Aspek 2: Keterpaduan Infrastruktur, Berdaya Saing, dan Optimalisasi Peran Teknologi Informatika dan Komunikasi

- a. Pembangunan Jalan strategis peningkatan ekonomi daerah.
- b. Pembangunan jalan distribusi barang dari Desa-Kota.
- c. Pemantauan lalu lintas melalui CCTV sebagai bagian dari *Smart City* Kendal.
- d. Pembangunan Trayek Angkutan dan Moda Transportasi Publik yang terintegrasi.
- e. Peningkatan Fungsi Terminal dan stasiun yang terintegrasi pusat-pusat kegiatan kota, dengan fokus pengembangan pada stasiun yang memungkinkan untuk dilakukan integrasi.
- f. Memfasilitasi percepatan ekonomi di Kabupaten Kendal sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019.
- g. Pembangunan dan peningkatan jaringan TIK.
- h. Penyediaan dan pemerataan akses internet gratis.
- i. Penyediaan dan peningkatan jaringan internet dan TIK yang mendukung pelayanan pendidikan.

3. Aspek 3: SDM dan Tataan Kelembagaan Masyarakat yang Beragama dan Berbudaya

- a. Wajib Belajar 12 Tahun.
- b. Program bantuan beasiswa daerah.
- c. Peningkatan kualitas pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas di seluruh kecamatan dengan ketersediaan fasilitas rawat inap.
- e. Optimalisasi posyandu ibu, anak dan lansia.
- f. Peningkatan penanganan kemiskinan dengan memperkuat data dan pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pemberian jaminan perlindungan sosial.
- g. Peningkatkan kesejahteraan pengelola takmir.

4. Aspek 4: Ketahanan dan Pembangunan yang Berkelanjutan

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rencana penanggulangan bencana daerah.
- b. Optimalisasi forum penanggulangan bencana untuk mendorong peran aktif masyarakat.
- c. Program pengelolaan risiko bencana untuk mitigasi bencana.
- d. Program rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim.
- e. Program desa tangguh bencana.
- f. Program kampung iklim berbasis komunitas.
- g. Pembangunan infrastruktur pencegah bencana banjir dan longsor.
- h. Menerapkan kurikulum sekolah siaga bencana pada tingkat SD, SMP, SMA sederajat.
- i. Program bantuan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- j. Pembangunan infrastruktur pembentuk struktur ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Kendal.
- k. Elektrifikasi perdesaan berbasis EBT dan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi (*energy mix*).
- l. Program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di 5 pusat kegiatan Kabupaten Kendal.
- m. Program penghijauan dan pemeliharaan RTH.
- n. Melakukan Revitalisasi Penataan Alun-alun Kota Kendal.
- o. Melakukan Revitalisasi Penataan Alun-alun Kaliwungu.

- p. Penggunaan alat deteksi dini Covid-19 (GeNose) di fasilitas kesehatan dan bangunan pemerintahan.
- q. Penggunaan teknologi pencegahan dini dengan sinar UV untuk sterilisasi lantai masjid dan gedung pemerintahan.

5. Aspek 5: Good Governance

- a. Pembangunan Mall Pelayanan Publik.
- b. Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- c. Melakukan Reformasi birokrasi berbasis *merit system*.
- d. Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
- e. Membuat *Command Center (E-monitoring)*.
- f. Melaksanakan perencanaan pembangunan berbasis elektronik (*e-planning*).
- g. Peningkatan Kerja sama luar negeri.
- h. Peningkatan Kerja sama Swasta dan Pemerintah Pusat.
- i. Penyediaan dan pengelolaan data tanah dan aset daerah yang transparan.
- j. Peningkatan kerja sama lembaga penelitian pemerintah, swasta dan akademisi.
- k. Pengembangan skema pembiayaan pembangunan yang kreatif dan inovatif.
- l. Pembinaan dan penanaman prinsip-prinsip *Good Governance* pada setiap ASN.
- m. Pembuatan dan peningkatan fungsi Web *Open Data Kendal Smart City*.
- n. Inventarisasi dan *asset management* berbasis digital.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan pada bab sebelumnya. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan kembali pulih dengan cepat.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 meliputi :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan perkembangan capaian pendapatan daerah 5 tahun kebelakang (2016-2021), selama belum terjadi pandemi covid 19 pendapatan mengalami kenaikan akan tetapi selama terjadinya

pandemic Covid-19 ini pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan. Sehingga pendapatan daerah harus mempertimbangkan dari sisi Pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari provinsi. Khusus Pendapatan Asli Daerah diperlukan strategi dan kebijakan umum pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai berikut :

- a. Pendataan, pemutakhiran serta pemetaan potensi pendapatan;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- c. Review peraturan-peraturan yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
- d. Pemanfaatan aset-aset pemerintah daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan;
- e. Pengembangan BUMD serta peningkatan profesionalisme dan tata kelola BUMD.

Disamping itu dalam hal pembiayaan diperlukan inovasi-inovasi diantaranya melalui CSR (*Corporated Social Responsibility*) ataupun KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kendal, mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun kerangka pendanaan belanja daerah diantaranya diarahkan untuk :

- a. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan pemenuhan belanja daerah yang sifatnya wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum);
- c. Melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah;

Dalam rangka pendanaan belanja daerah dan guna percepatan pencapaian target pembangunan daerah upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui pinjaman daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang perlu di bayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan diperlukan dalam rangka penyiapan dana cadangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ataupun untuk penyertaan (investasi) daerah. Untuk penyertaan modal tersebut diantaranya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2013-2018, maka pendapatan daerah tahun 2019-2023 diupayakan dapat meningkat. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Untuk memenuhi kebutuhan belanja, salah satunya dapat digunakan melalui pinjaman daerah.



Tabel 7.1

Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH	2.278.236.519.171,00	2.398.503.775.879,00	2.440.917.666.527,00	2.489.524.785.430,00	2.535.875.206.109,00	2.581.943.213.844,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	415.542.060.688,00	565.639.024.396,00	608.052.915.044,00	656.660.033.947,00	703.010.454.626,00	749.078.462.361,00
Hasil Pajak Daerah	174.220.000.000,00	301.061.000.000,00	329.367.099.980,00	358.959.809.978,00	387.159.150.976,00	413.516.627.674,00
Hasil Retribusi Daerah	19.312.746.900,00	30.082.300.000,00	33.332.724.900,00	37.199.027.615,00	41.195.954.933,00	45.247.666.060,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.345.000.000,00	19.000.000.000,00	19.228.000.000,00	19.458.736.000,00	19.692.240.000,00	19.928.500.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	206.664.006.288,00	215.495.724.396,00	226.125.090.164,00	241.042.460.354,00	254.963.108.717,00	270.385.668.627,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.768.204.458.483,00	1.738.374.751.483,00	1.738.374.751.483,00	1.738.374.751.483,00	1.738.374.751.483,00	1.738.374.751.483,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.602.490.919.483,00	1.572.661.212.483,00	1.572.661.212.483,00	1.572.661.212.483,00	1.572.661.212.483,00	1.572.661.212.483,00
Dana perimbangan	1.314.796.489.483,00	1.284.966.782.483,00	1.284.966.782.483,00	1.284.966.782.483,00	1.284.966.782.483,00	1.284.966.782.483,00
Dana Transfer Umum	969.343.594.362,00	939.513.887.362,00	939.513.887.362,00	939.513.887.362,00	939.513.887.362,00	939.513.887.362,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00
Dana Alokasi Umum	931.382.224.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00
Dana Transfer Khusus.	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00	345.452.895.121,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00
Dana Insentif Daerah	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00
Dana Insentif Daerah	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00
dana otonomi khusus						
dana keistimewaan						

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dana Desa	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00
Dana Desa	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00
Transfer Antar-Daerah	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00	165.713.539.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00
Hibah dari Pemerintah	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.312.194.067.943,00	2.437.603.775.879,00	2.446.417.666.527,00	2.561.624.785.430,00	2.557.375.206.109,00	2.603.443.213.844,00
BELANJA OPERASI	1.758.177.938.243,00	1.774.798.796.488,00	1.721.928.171.039,00	1.841.759.388.670,00	1.820.665.378.118,00	1.843.963.323.471,00
Belanja Pegawai	1.129.394.130.453,00	1.165.367.172.766,00	1.150.137.740.439,00	1.164.336.128.670,00	1.180.140.532.118,00	1.193.802.823.871,00
Belanja Barang dan Jasa	548.064.846.490,00	543.382.056.472,00	514.961.530.600,00	525.194.360.000,00	570.294.846.000,00	580.782.499.600,00
Belanja Bunga	-	25.000.000,00	-	-	-	-
Belanja Hibah	68.898.961.300,00	60.178.567.250,00	45.008.900.000,00	140.408.900.000,00	58.410.000.000,00	57.558.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	11.820.00.000,00	5.846.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00
BELANJA MODAL	174.670.048.442,00	170.927.913.846,00	203.240.000.000,00	195.270.000.000,00	207.894.804.400,00	225.623.948.000,00
Belanja Modal	174.670.048.442,00	170.927.913.846,00	203.240.000.000,00	195.270.000.000,00	207.894.804.400,00	225.623.948.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.860.000.000,00	11.860.000.000,00	12.860.000.000,00	12.860.000.000,00	13.860.000.000,00	15.860.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	7.860.000.000,00	11.860.000.000,00	12.860.000.000,00	12.860.000.000,00	13.860.000.000,00	15.860.000.000,00
BELANJA TRANSFER	371.486.081.258,00	480.017.065.545,00	508.389.495.488,00	511.735.396.760,00	514.955.023.591,00	517.995.942.373,00
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**))	15.766.568.258,00	33.114.330.000,00	36.269.982.488,00	39.615.883.760,00	42.835.510.591,00	45.876.429.373,00

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	13.835.268.818,00	30.106.100.000,00	32.936.709.998,00	35.895.980.998,00	38.715.915.098,00	41.351.662.767,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.931.299.440,00	3.008.230.000,00	3.333.272.490,00	3.719.902.762,00	4.119.595.493,00	4.524.766.606,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	355.719.513.000,00	446.902.735.545,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	355.719.513.000,00	446.902.735.545,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)	(33.957.548.772,00)	(39.100.000.000,00)	(5.500.000.000,00)	(72.100.000.000,00)	(21.500.000.000,00)	(21.500.000.000,00)
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan	51.957.548.772,00	75.000.000.000,00	55.000.000.000,00	95.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	51.957.548.772,00	75.000.000.000,00	55.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Pencairan dana cadangan	-	-	-	50.000.000.000,00	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000,00	35.900.000.000,00	49.500.000.000,00	22.900.000.000,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan Daerah	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	18.000.000.000,00	10.900.000.000,00	24.500.000.000,00	22.900.000.000,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	33.957.548.772,00	39.100.000.000,00	5.500.000.000,00	72.100.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021)

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 7 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengelolaan pendidikan

Program ini diarahkan pada pemberian Bantuan Operasional Sekolah, sehingga sekolah dapat memenuhi sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Kasa (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP.

b. Program pengembangan kurikulum

Program ini diarahkan pada penyusunan muatan lokal yang akan disampaikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Muatan lokal diperlukan agar siswa dapat mengetahui dan memahami apa saja kearifan lokal yang ada, sehingga bisa dilestarikan dan dipraktekkan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan.

c. Program pendidik dan tenaga kependidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan pamong budaya serta pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SD dan SMP. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Presentase Pendidik bersertifikat.

d. Program pengendalian perizinan pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan di Kabupaten Kendal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP.

2. Kesehatan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rata-rata capaian SPM (Standar Pelayanan Minimum).

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada penyebaran dan pemenuhan tenaga kesehatan yang merata disetiap fasilitas kesehatan dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat serta peningkatan pelayanan kefarmasian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi pembinaan Mutu makanan dan Minuman dan Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi sesuai standar

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melaksanakan hidup bersih dan sehat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % Rumah Tangga PHBS.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada manajemen sumber daya air sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan permasalahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik dan Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak.

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak dan Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) Aman.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melaksanakan hidup bersih dan sehat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendataan Bangunan Gedung Milik Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan, Persentase SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan dan Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan.

f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungan yang telah diatur dalam RTRW. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada peningkatan jalan kabupaten, terutama yang menuju pada ruas-ruas strategis yang mendukung pariwisata. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada pembinaan tenaga kerja dibidang jasa konstruksi dalam meningkatkan kapasitasnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana dan relokasi program pemerintah daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten/kota dan Persentase Pengembangan Perumahan Berijin.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang berada diluar kawasan kumuh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik dan Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum).

e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada pembinaan pengembang perumahan dan kawasan permukiman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % pengembang perumahan dan kawasan permukiman yang bersertifikat.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada pengendalian gangguan trantibum yang dilakukan oleh masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, % pelanggaran Perda/perkada yang diselesaikan, Persentase petugas Linmas di Kabupaten per RT, % PPNS yang dibina

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar pelayanan Minimal kebakaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi, Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

6. Sosial.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan peran serta PSKS.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada penanganan korban kekerasan warga negara migran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada pelayanan terhadap PPKS yang berada diluar panti sosial. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PPKS Fakir Miskin dan anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada pemenuhan pemenuhan sandang dan pangan korban bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase korban bencana ditangani.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada pemenuhan fasilitas yang harus disediakan pada makam pahlawan sesuai dengan standar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah, diharapkan seluruh kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan tenaga kerja daerah dapat terlaksana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada penyelesaian sengketa terkait perburuhan, sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada implementasi PUG dalam dokumen perencanaan OPD, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di OPD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase OPD yang mengimplementasikan PUG.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kekerasan perempuan yang ditangani.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengelolaan data pilah gender disetiap OPD, dengan data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih responsif gender. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang memiliki data pilah gender.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan kabupaten layak anak ditingkat kecamatan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kecamatan layak anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada penanganan anak yang menjadi korban kekerasan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kekerasan pada anak yang ditangani.

3. Pangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan bahan pangan pada lumbung pangan yang menjadi cadangan pangan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase lumbung pangan aktif.

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan sumber protein dan energi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Ketersediaan protein dan Angka Ketersediaan Energi.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan desa rawan pangan baik yang disebabkan karena akses memperoleh pangan yang sulit maupun karena bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan desa rawan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada pengawasan pangan utamanya pangan segar yang beredar di pasar, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan pangan yang beredar layak untuk dikonsumsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pangan yang aman dikonsumsi.

4. Pertanian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada kepastian bagi masyarakat yang tanahnya menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mendapatkan haknya tepat waktu. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu.

b. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada asset pemerintah daerah yang berupa tanah telah memiliki dokumen yang diperlukan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tanah Pemda yang bersertifikat.

5. Lingkungan hidup;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyediaan dokumen lingkungan hidup yang berkualitas. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pemantauan kualitas air dan udara untuk memastikan tingkat pencemaran yang terjadi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan pemantauan kualitas air, Cakupan pemantauan kualitas udara dan Presentase kampung iklim yang terbentuk.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pemeliharaan RTH, sehingga dapat menjadikan lingkungan yang asri. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Presentase RTH yang terpelihara dengan baik.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan limbah B3, sehingga tidak mencemari lingkungan

disekitarnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyiapan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, hal ini dimulai dari sekolah dan kelompok masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten dan Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan PBLH.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini merupakan penghargaan pada sekolah dan individu yang dinilai peduli terhadap lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase sekolah adiwiyata tingkat kabupaten dan Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah / Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk memastikan setiap aduan masyarakat terkait kerusakan lingkungan ditindaklanjuti. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengolahan sampah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Timbulan sampah yang ditangani, Persentase cakupan area pelayanan persampahan dan Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu indeks pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam perencanaan yang disusun oleh OPD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % OPD yang memanfaatkan data dukcapil, % kelancaran sistem adminduk dan % MoU pelayanan kependudukan yang disepakati.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % ketersediaan profil Kependudukan dan catatan sipil.

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan dan pemantauan sarana dan prasarana didesa dalam pelayanan terhadap masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi kerjasama antar desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada pembinaan administrasi desa baik dalam perencanaan maupun penganggaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik dan Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada pembinaan BUMDes sehingga bisa mandiri dan bersaing dengan usaha lainnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dan Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha.

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pembatasan dan pengurangan pernikahan diusia dini. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penurunan usia pernikahan dini.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Program ini diarahkan pada penurunan masyarakat yang tidak terlayani dalam pemenuhan alat kontrasepsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu unmeet need.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan keluarga. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina.

9. Perhubungan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase terminal penumpang tipe c sesuai standar, Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan, Persentase pemenuhan kebutuhan APILL, Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR dan Persentase realisasi pendapatan parkir.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % pemenuhan pelabuhan sesuai standar.

10. Komunikasi dan informatika;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi publik terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikemas secara menarik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada penyediaan pelayanan publik secara online dengan menyiapkan akses internet di setiap OPD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan % layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada pemberian layanan perizinan terkait dengan usaha simpan pinjam. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan.

b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada pengawasan koperasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase koperasi/KSP yang diawasi.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP, sehingga akan memberikan rasa aman pada masyarakat yang memiliki simpanan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai

d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus koperasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian.

e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada pemberdayaan koperasi dalam mengelola usahanya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase koperasi yang dilakukan pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % usaha mikro yang diberdayakan.

g. Program Pengembangan Umkm

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % Usaha mikro yang dikembangkan.

12. Penanaman modal;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen investasi Kabupaten Kendal untuk menarik investor. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase dokumen yang mendukung investasi di Kabupaten Kendal.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada promosi investasi untuk menarik minat investor menanamkan modal di Kabupaten Kendal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % calon investor yang memiliki kepedulian investasi.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan prima dalam perizinan penanaman modal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Lama waktu penyelesaian pelayanan perizinan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memberikan laporan penanaman modal yang telah dilakukan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

Persentase investor/pelaku usaha berijin efektif yang melaksanakan pelaporan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyediaan data perizinan dan non perizinan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola sisten informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga;

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator peningkatan partisipasi pemuda.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan atlet secara berjenjang dalam rangka pengembangan cabang olahraga prestasi tingkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi cabang olahraga di daerah.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kepramukaan tingkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan gerakan kepramukaan.

14. Statistik;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Statistik Sektoral**. Pelaksanaan program ini untuk mencapai indikator persentase ketersediaan data dan informasi statistik yang dirilis/ diunggah perangkat daerah ke portal data kendal.

15. Persandian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan aplikasi persandian.

16. Kebudayaan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan untuk mengembangkna kebudayaan daerah dan mencapai indikator terlaksananya pelestarian cagar budaya daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program pengembangan dan pembinaan kesenian tradisional dalam masyarakat. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase kelompok kesenian tradisional yang dibina (%).

c. Program pembinaan sejarah

Program ini dilakanakan untuk melestarikan dan pembinan sejarah lokal. Program ini dilaksnaakan untuk mencapai indikator jumlah sejarah lokal yang dilestarikan.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya

Program ini diarahkan untuk melestarikan dan memelihara benda peninggalan, situs dan Kawasan cagar budaya. Tujuan program mencapai indikator persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya dilestarikan (%).

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini dilaksanakan untuk mengembangkan perlindungan koleksi benda sejarah/ warisan budaya yang dilindungi. Pelaksanaan program untuk mencapai persentase koleksi benda sejarah yang dilindungi (%).

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan minat baca dan pembinaan perpustakaan secara aktif. Indikator program yang akan dicapai adalah persentase perpustakaan aktif (%).

18. Kearsipan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program pembinaan dan pengelolaan arsip secara baku. Program ini untuk mencapai indikator persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku (%).

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan arsip penting dan penyelamatan arsip. Pelaksanaan program untuk mencapai indikator persentase arsip statis yang dialihmediakan.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan arsip tertutup oleh pihak yang berkepentingan. Pelaksanaannya untuk mencapai indikator persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan (%).

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program dilaksanakan dalam upaya meningkatkan potensi dan pembinaan nelayan perikanan tangkap untuk nelayan kecil/tradisional. Program ini untuk mencapai indikator produksi perikanan tangkap nelayan.

b. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kelompok pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional, baik di tambak atau kolam ikan. Program dilaksanakan untuk mencapai indikator produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat. Indikator capaian adalah tingkat konsumsi ikan/ kapita per tahun.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi wisata unggulan daerah dan daya Tarik wisata. Program ini untuk mencapai indikator persentase PAD dari sektor pariwisata.

b. Program Pemasaran pariwisata

Program ini dilaksanakan dalam rangka promosi dan peninaktan jumlah kunjungan wisatawan di DTW. Program ini untuk mencapai

indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan di seluruh DTW Kabupaten Kendal (%).

c. Program pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI

Program ini diarahkan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan SDM pariwisata melalui pelatihan SDM pariwisata, pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang pariwisata; pengembangan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi pelaku ekonomi kreatif. Indikator program ini adalah persentase pelaku ekonomi kreatif yang berkembang (%).

d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan keterampilan SDM pariwisata melalui pelatihan SDM pariwisata, pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif. Indikator program ini adalah persentase tenaga pariwisata dan ekraf yang tersertifikasi.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan bagi pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dengan bibit unggul dan tanaman hortikultura dengan varietas bibit unggul. Indikator program ini adalah : (1) persentase luas tanaman pangan yang menggunakan bibit unggul; (2) persentase luas tanaman perkebunan yang menggunakan bibit unggul dan (3) persentase luas tanaman hortikultura yang menggunakan bibit unggul.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan lahan pertanian yang menamatkan layanan pengairan dari sumber-sumber air (irigasi, embung, dam parit longstorage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan. Indikator program ini adalah : (1) luas lahan pertanian yang mendapatkan pengairan dan (2) luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (Ha).

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan hama penyakit ternak ruminansia. Indikator program ini adalah angka morbiditas ternak ruminansia.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi bencana pertanian yang mengakibatkan dampak ekonomi dan sosial bagi usaha pertanian. Indikator keberhasilan program ini adalah persentase bencana pertanian yang ditangani.

e. Program Perijinan Usaha Pertanian

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan usaha dan menumbuhkan pembinaan pelaku usaha pertanian yang potensial di daerah. Indikator program ini adalah persentase rekomendasi perijinan usaha pertanian (%).

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan kapasitas petani dan kelompok tani yang terampil dan mumpuni. Indikator program ini adalah persentase cakupan kelompok tani yang aktif.

4. Energi dan sumber daya mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan. Program ini dilaksanakan dalam pengembangan energi baru baik dari sumber alam maupun sumber energi buatan. Indikator program ini adalah : (1) persentase energi perbarukan yang diawasi dan (2) Penatausahaan ijin pemanfaatan langsung panas bumi di daerah.

5. Perdagangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perijinan dan Paendaftaran Perusahaan

Program ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha untuk memperoleh rekomendasi izin sesuai dengan peraturan perundangan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan), dengan indikator adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi perijinan usaha yang sesuai.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional sebagai pelayanan bagi pedagang dan pelaku usaha kecil/pedagang. Indikator program ini adalah persentase pasar yang memiliki infrastruktur memadai.

c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini dilaksanakan dengan tujuan menjaga stabilitas harga untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama pada Hari Raya dan Natal tahun Baru di masyarakat. Indikator dari program ini adalah persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tahun berjalan.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor dari produk daerah dan meningkatkan hasil ekspor. Indikator dari program ini adalah persentase pertumbuhan ekspor/ tahun.

e. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen

Program pelayanan pengukuran, perlindungan konsumen dan standarisasi UTTP. Indikator program ini adalah persentase UTTP yang ditera/tera ulang yang pada pelaku usaha kecil sesuai kewenangan daerah.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini sebagai upaya memperluas promosi dan pemasaran dari produk UMKM dari kabupaten Kendal. Indikator dari program ini adalah persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dan pemasaran.

6. Perindustrian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini bertujuan dalam rangka menyiapkan RIPIK sampai dengan ditetapkannya Perda tentang rencana Pembangunan Industri. Indikator program ini adalah persentase terselesaikannya RIPIK dan ditetapkannya Perda tentang RIPIK.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan usaha perindustrian dan peningkatan penanaman modal pada usaha industri

kecil. Indikator dari program ini adalah persentase IKM yang diusulkan mendapatkan Ijin Usaha Industri (IUI).

c. Program Pengelolaan SIM Industri Nasional

Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi terpadu tentang industri secara nasional dan terintegrasi. Indikator dari program ini adalah persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini.

7. Transmigrasi.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program ini ditujukan untuk menyiapkan lokasi transmigrasi yang dapat menerima calon transmigran. Indikator program ini adalah persentase ketersediaan Kawasan transmigrasi yang ditetapkan sebagai Kawasan penerima transmigran.

b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini dilaksanakan dalam upaya menyiapkan keterampilan bagi calon transmigran dilatih dan siap ditempatkan di lokasi. Indikator dari program ini adalah persentase calon transmigran yang memiliki kompetensi.

D. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal yang dilayani oleh Sekretariat Daerah

Pelaksanaan program ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : persentase pemenuhan kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran, persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga; persentase kebutuhan OPD yang difasilitasi protokoler dan dokumentasi pada kegiatan pimpinan daerah atau tamu daerah dan persentase terpenuhinya fasilitas protokol dan komunikasi pimpinan daerah.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan bantuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial kepada kelompok keagamaan dan pembinaan tertib administrasi bagi

kecamatan dan kelurahan. Indikator tujuan ini adalah persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi; persentase kelurahan dan kecamatan yang tertib administrasi; persentase produk hukum yang difasilitasi; persentase kerjasama antar daerah yang diimplementasikan dan persentase BUMD yang difasilitasi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Pelaksanaan program ini adalah untuk mencapai indikator persentase pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pelaksanaan program ini ditujukan agar pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD secara lengkap. Indikator dari program ini adalah persentase kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terfasilitasi.

3. Perencanaan Pembangunan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan perencanaan dan evaluasi yang sesuai peraturan perundangan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase pencapaian realisasi target program tahunan; persentase kesesuaian RPKD dengan RPJMD; Persentase kesesuaian Renja dengan RKPD; persentase kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dengan APBD; dan persentase kesesuaian Renja dengan Renstra PD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan).

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah. Indikator capaian dalam program ini adalah persentase indikator OPD dibawah bidang PPM; persentase realisasi indikator OPD dibawah bidang Perekonomian; persentase realisasi indikator OPD dibawah bidang rumpun SDA; persentase

realisasi OPD dibawah rumpun infrastruktur dan persentase realisasi OPD dibawah rumpun kewilayahan.

4. Keuangan Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikeator pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut : persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS; persentase kesesuaian pelaporan keuangan tepat waktu (kepada Menteri Keuangan, KPPN, KPP dan Taspen); persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan; persentase system keuangan yang terintegrasi;

b. Program Pengelolaan BMD

Program ini ditujukan untuk mencapai persentase pengelolaan aset daerah yang dikelola dengan baik.

c. Program pengelolaan pendapatan daerah

Program ini dilaksanakan dengan indikator adalah persentase pertumbuhan WP baru; persentase pertumbuhan pajak daerah per tahun; persentase realisasi pajak daerah.

5. Kepegawaian Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**. Pelaksanaan program ini ditujukan agar pengelolaan manajemen kepegawaian daerah yang semakin baik dan professional. Untuk mencapaian dirumuskan indikator sebagai berikut: persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan, persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang terupdate; persentase ASN menyusun SKP dan penilaian tepat waktu; tingkat kedisiplinan ASN; persentase struktur jabatan ASN yang terisi dan pesentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi dan persentase jabatan struktural yang dievaluasi.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program pengembangan SDM Aparatur**. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan SDM ASN yang professional. Dengan indikator persentase ASN yang direncanakan mengikuti pengembangan kompetensi dan pesentase ASN yang lulus diklat pra jabatan/ latsar dan diklat kepemimpinan.

7. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan riset dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah; serta kegiatan perekayasaan, penerapan, dan pelayanan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan RKPD.

8. Inspektorat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah yang secara efektif. Indikator program ini adalah persentase penyelenggaraan pengawasan di daerah.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikator nilai PMPRB TPI.

9. Kecamatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator nilai IKM.

b. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pelaksanaan program ini ditujukan meningkatkan musrenbang dalam perencanaan pembangunan desa dan kelurahan yang dibina dan menunjukkan peningkatan semakin baik. Indikator dari program ini adalah persentase rata-rata usulan yang terakomodir dalam perencanaan; persentase sarana dan prasarana kelurahan sesuai ketentuan; persentase kelembagaan kelurahan yang dibina.

c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertuban Umum

Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat. Dengan indikator persentase koordinator trantibum yang dilaksanakan.

d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Pelaksanaan dari program ini adalah dalam rangka mencapai indikator prosentase kelompok masyarakat perangkat desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi bagi pemeritah desa, dengan indikator capaian persentase desa yang uang memiliki APBDes tepat waktu.

10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

program ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

program ini dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat dalam peran politik dan meningkatkan partai politik.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham terhadap tujuan dan fungsi ormas.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini difokuskan dalam rangka meningkatkan Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini difokuskan untuk meningkatkan Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaaan dan deteksi dini.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

		URAIAN					TAHUN (Rupiah)													
				2021	2022	2023	2024		2025		2026									
		PENDAPATAN DAERAH		2.278.236.519.171	2.398.503.775.879	2.440.917.666.527	248.952.478.543		2.535.875.206.109		2.581.943.213.844									
			PENDAPATAN ASLI DAERAH	415.542.060.688	565.639.024.396	608.052.915.044	656.660.033.947		703.010.454.626		749.078.462.361									
			PENDAPATAN TRANSFER	1.768.204.458.483	1.738.374.751.483	1.738.374.751.483	1.738.374.751.483		1.738.374.751.483		1.738.374.751.483									
		LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	94.490.000.000	94.490.000.000	94.490.000.000	94.490.000.000		94.490.000.000		94.490.000.000										
BELANJA DAERAH			2.312.194.067.943	2.437.603.775.879	2.446.417.666.527	256.162.478.543		2.557.375.206.109		2.603.443.213.844										
KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.391.660.499.383		1.406.309.036.873		1.414.116.933.130		1.432.910.585.280		1.448.669.683.080		1.468.301.204.530		1.486.967.942.276		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN					587.362.910.508		586.725.448.533		595.535.187.930		601.250.706.650		605.004.095.680		605.266.805.230		3.581.145.154.531		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	587.362.910.508	100.00	586.725.448.533	100.00	595.535.187.930	100.00	601.250.706.650	100.00	605.004.095.680	100.00	605.266.805.230	100.00	3.581.145.154.531	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					184.427.226.105		185.348.897.000		180.227.000.000		177.079.075.000		174.552.000.000		174.727.000.000		1.076.361.198.105		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP	Jumlah siswa PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP dibagi Jumlah penduduk usia 5 -18 tahun dikalikan 100.	%	87,62	87,62	167.145.813.750	87,65	170.411.498.000	87,69	165.197.000.000	87,7	162.059.000.000	87,7	159.502.000.000	87,72	159.677.000.000	87,72	983.992.311.750	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	Kurikulum muatan lokal per Satuan Pendidikan yg ditetapkan dibanding muatan lokal yg ada di Satuan Pendidikan X 100	%	12,95	13,00	18.572.500	13,20	6.778.000	13,35	50.000.000	13,50	55.000.000	13,65	60.000.000	13,80	60.000.000	13,80	250.350.500	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Bersertifikat	Jumlah pendidik (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik (Negeri dan Swasta) dikali 100.	%	56,66	56,70	17.259.102.355	56,80	14.919.671.000	56,83	14.950.000.000	56,86	14.950.000.000	56,87	14.950.000.000	56,89	14.950.000.000	56,89	91.978.773.355	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP	Jumpal Rekomendasi Izin Pendirian PAUD, SD dan SMP dibagi Jumlah lembaga pengelola PAUD, SD dan SMP yang mengajukan rekomendasi dikalikan 100.	%	NA	70.00	3.737.500	72.00	10.950.000	75,00	30.000.000	76.00	15.075.000	79.00	40.000.000	80,00	40.000.000	80,00	139.762.500	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					464.265.120.180		484.456.415.820		490.298.259.300		502.687.978.780		505.822.112.510		520.226.830.780		2.967.756.717.370		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	332.968.727.203	100.00	316.235.334.843	100.00	318.241.838.300	100.00	358.114.579.780	100.00	353.349.864.190	100.00	345.127.778.078	100.00	2.024.038.122.394	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	Rata-rata pencapaian 12 SPM Kesehatan	%	100.00	100.00	99.404.917.977	100.00	165.172.224.977	100.00	167.993.765.000	100.00	140.104.477.000	100.00	147.556.435.320	100.00	169.691.658.702	100.00	889.923.478.976	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Proporsi puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah puskesmas dgn nakes sesuai standar/jumlah puskesmas X 100	%	60,00	60.00	28.351.528.000	65.00	650.000.000	67,00	1.370.000.000	72.00	1.507.000.000	75.00	1.657.700.000	75.00	1.823.470.000	75.00	35.359.698.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Proporsi pembinaan Mutu makanan dan minuman	jumlah PIRT yg dibina/jumlah seluruh PIRT terdaftar x 100	%	10,00	10,00	746.033.000	10,00	188.856.000	10,90	392.656.000	11,70	431.922.000	12,50	475.113.000	13,30	522.624.000	13,30	2.757.204.000	
		Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi sesuai standar	jumlah fasyankes dgn pelayanan farmasi sesuai standar/jumlah fasyankes yg ada x 100	%	80,00	80,00		88,80		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS	Jumlah Rumah Tangga didata dengan PHBS sesuai standar/jumlah Rumah Tangga yg di lakukan pendataan PHBS	%		80,00	2.793.914.000	85,00	2.210.000.000	86,00	2.300.000.000	87,00	2.530.000.000	88,00	2.783.000.000	90,00	3.061.300.000	90,00	15.678.214.000	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERTANAHAN						26.233.362.073		22.321.600.000		23.845.000.000		23.845.000.000		24.295.000.000		25.805.000.000		146.344.962.073	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan x 100	%	100.00	100.00	26.233.362.073	100.00	22.321.600.000	100.00	23.845.000.000	100.00	23.845.000.000	100.00	24.295.000.000	100.00	25.805.000.000	100.00	146.344.962.073	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						73.105.477.207		79.476.783.740		75.100.852.410		77.089.059.960		85.213.718.420		86.369.080.350		476.354.972.087	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	Jumlah infrastruktur daerah irigasi dalam kondisi baik / jumlah daerah irigasi kewenangan kab/kota x 100	%	40,86	41,11	9.944.091.866	44,02	19.841.283.490	44,75	14.735.000.000	45,48	14.185.000.000	46,21	17.170.000.000	46,94	17.535.000.000	46,94	93.410.375.356	
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luasan wilayah banjir dan tergenang / luas wilayah kabupaten x 100	%	19,14	18,19		17,18		16,21		15,19		14,23		13,83		13,83		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak / Jumlah total rumah tangga x 100	%	93,35	94,93	7.943.239.000	96,11	8.460.383.250	97,30	4.450.000.000	98,48	5.050.000.000	99,67	4.450.000.000	100.00	7.325.000.000	100.00	37.678.622.250	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak / Jumlah total rumah tangga x 100	%	91,00	91,00	6.296.176.000	91,04	5.922.117.000	91,04	5.600.000.000	91,13	13.600.000.000	91,17	7.450.000.000	91,22	7.650.000.000	91,22	46.518.293.000	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) Aman	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) aman / Jumlah total rumah tangga x 100	%	0,62	0,82		0,93		1,09		1,28		1,44		1,55		1,55		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang jaringan drainase perkotaan dalam kondisi baik / total Panjang jaringan drainase perkotaan x 100	%	75,13	75,87	1.374.700.000	76,70	2.350.000.000	78,15	3.500.000.000	79,26	3.500.000.000	80,35	3.300.000.000	81,39	2.550.000.000	81,39	16.574.700.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan	Jumlah PBG yang rekomendasi teknisnya diterbitkan/ jumlah pemohon PBG X 100	%	83,00	84,00	2.267.318.000	85,00	4.425.000.000	86,00	5.875.000.000	87,00	4.900.000.000	88,00	5.425.000.000	90,00	5.950.000.000	90,00	28.842.318.000	
		Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	Jumlah SLF yang diterbitkan/ jumlah pemohon SLF X 100	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata	Jumlah bangunan/lingkungan/kawas an yang ditingkatkan / tertata dibagi rencana bangunan/ lingkungan/ kawasan yang akan ditingkatkan dikali 100	%	100.00	100.00	65.600.000	100.00	450.000.000	100.00	1.075.000.000	100.00	575.000.000	100.00	1.075.000.000	100.00	575.000.000	100.00	3.815.600.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah total panjang jalan kabupaten x 100	%	67,02	68,45	42.629.762.941	69,91	32.116.000.000	70,58	33.965.852.410	71,17	29.779.059.960	71,94	40.593.718.420	73,11	39.084.080.350	73,11	218.168.474.081	
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah total jembatan kabupaten (sesuai SK Bupati) x 100	%	94,27	94,71		95,59		96,92		97,80		98,68		99,56		99,56		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analis / target jumlah tenaga jasa konstruksi yang akan dilatih x 100	%	28,94	34,11	527.788.400	47,03	882.000.000	59,95	1.520.000.000	72,87	1.370.000.000	85,79	1.520.000.000	98,71	1.420.000.000	98,71	7.239.788.400	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	Jumlah penyimpangan pemanfaatan ruang / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100	%	20,00	20,00	2.056.801.000	18,00	5.030.000.000	16,00	4.380.000.000	14,00	4.130.000.000	12,00	4.230.000.000	10,00	4.280.000.000	10,00	24.106.801.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						23.629.599.000		17.971.741.400		18.462.451.440		18.812.002.880		19.752.603.030		20.345.181.120		118.973.578.870	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100,00	100,00	4.571.180.000	100,00	5.303.521.400	100,00	5.462.627.040	100,00	5.735.758.390	100,00	6.022.546.310	100,00	6.203.222.700	100,00	33.298.855.840	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100	%	100,00	100,00	3.033.020.000	100,00	3.283.420.000	100,00	3.349.088.400	100,00	3.416.070.170	100,00	3.586.873.680	100,00	3.694.479.890	100,00	20.362.952.140	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilita Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan +Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi Kreteria Penerima Pelayanan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-		
		Persentase Pengembangan Perumahan Berjin	Jumlah pengembang perumahan berjin / jumlah seluruh pengembang perumahan x 100	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas kawasan kumuh x 100%	%	74,82 (SK Lama)	0,74 (SK baru)	15.827.399.000	1,48	1.560.800.000	2,23	1.592.016.000	2,97	1.223.856.320	3,71	1.285.049.140	4,45	1.323.600.610	4,45	22.812.721.070	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah RTLH yang diberi bantuan dan peningkatan rumah swadaya	%	13,09	12,72	-	12,39	7.004.000.000	12,05	7.214.120.000	11,72	7.574.826.000	11,39	7.953.567.300	11,06	8.192.174.320	11,06	37.938.687.620	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik	Jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU dibagi Jumlah Perumahan pada kurun waktu tertentu x 100%	%	100,00	100,00	198.000.000	100,00	800.000.000	100,00	824.000.000	100,00	840.480.000	100,00	882.504.000	100,00	908.979.120	100,00	4.453.963.120	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Perumahan memiliki PSU dalam kondisi baik / Jumlah seluruh perumahan x 100%	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi	jumlah pengembang yang bersertifikasi dibagi jumlah pengembang x 100%	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						24.227.591.710		22.401.268.960		22.863.094.190		23.910.153.360		25.512.450.270		26.788.072.790		145.702.631.280		
1.05.0.00. 0.00.01.0 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)						17.625.706.520		15.693.164.960		15.953.747.070		16.519.574.580		17.252.342.560		18.114.959.690		101.159.495.380		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	55.924.930.610	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan / jumlah keseluruhan gangguan trantibum x 100	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	17.336.127.770	
		Cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	Jumlah linmas per RT se Kab. Kendal	Rasio	1,40	1,40	-	1,40	-	1,40	-	1,40	-	1,40	-	1,40	-	1,40	-	-	
		Persentase pelanggaran Perda/perkada yang diselesaikan	Perbandingan perda yang ditegakkan dengan perda yang mengandung sanksi	%	83,00	83,00	-	83,00	-	83,00	-	83,00	-	83,00	-	87,00	-	87,00	-	-	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	27.898.437.000	
		Persentase Kelompok Balakar per Kecamatan	Jumlah kelompok balakar dibagi jumlah kecamatan kali seratus	%	0.00	0.00	-	50.00	-	50.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	
1.05.0.00. 0.00.02.0 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)						6.601.885.190		6.708.104.000		6.909.347.120		7.390.578.780		8.260.107.710		8.673.113.100		44.543.135.900		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	26.143.068.970	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah desa/kelurahan yang memperoleh layanan tangguh bencana yang dibentuk dibagi jumlah desa kategori risiko tinggi (73 desa/kelurahan)	%	6,85	2,74	-	6,85	-	6,85	-	6,85	-	6,85	-	6,85	-	3699	-	18.400.066.930	
		Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi dibagi jumlah lokasi terdampak bencana	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dibagi jumlah korban bencana	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						8.409.212.600		7.606.881.420		7.785.087.860		8.236.608.650		8.517.703.170		8.773.234.260		49.328.727.960		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	38.368.365.960	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan peran serta PSKS	jumlah PSKS yang mampu bekerja sesuai fungsinya dibagi dengan jumlah PSKS X 100%	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	1.502.400.000	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	Jumlah PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan/jumlah PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan x 100	%	0,00	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	60.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti X 100 % Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang Pengemis	%		100.00	907.494.000	100.00	495.600.000	100.00	423.000.000	100.00	583.000.000	100.00	693.000.000	100.00	705.000.000	100.00	3.807.094.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS fakir miskin (rentan resiko sosial dan miskin) + persentase PMKS anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial / 2	%	100.00	100.00	401.868.000	100.00	490.000.000	100.00	690.000.000	100.00	695.000.000	100.00	695.000.000	100.00	725.000.000	100.00	3.696.868.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam Satu Tahun Anggaran dibagi Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Kabupaten/ Kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	%	100.00	100.00	234.000.000	100.00	190.000.000	100.00	180.000.000	100.00	270.000.000	100.00	270.000.000	100.00	270.000.000	100.00	1.414.000.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan / Jumlah standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan x 100	%		60.00	30.000.000	75.00	130.000.000	80,00	80.000.000	85.00	80.000.000	90.00	80.000.000	95.00	80.000.000	95.00	480.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						215.765.766.974		202.501.895.088		199.993.831.760		208.463.518.770		214.009.640.526		222.565.441.725		1.263.300.094.843	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						10.224.594.954		9.456.000.000		9.862.075.400		10.361.367.880		10.609.181.200		10.927.457.370		61.440.676.804	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	7.400.258.454	100.00	7.480.230.000	100.00	7.555.032.400	100.00	7.932.783.880	100.00	8.091.739.200	100.00	8.333.679.570	100.00	46.793.723.504	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang dilaksanakan di Kabupaten	%	2,00	4,00	-	6,00	30.000.000	8,00	30.900.000	10,00	31.518.000	14,00	33.094.000	16,00	34.087.000	16,00	159.599.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan ----- Jumlah tenaga kerja	Rp/Orang	867.660,70	867.660,70	1.567.086.500	867.660,70	1.200.000.000	867.660,70	1.508.000.000	867.660,70	1.613.560.000	867.660,70	1.661.967.000	867.660,70	1.702.328.800	867.660,70	9.252.942.300	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/ Jumlah tenaga kerja keseluruhan	%	19,00	20,00	-	25,00	-	30,00	-	35,00	-	40,00	-	45,00	-	45,00	-	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan/Jumlah pencari kerja yang terdaftar	%	51,07	55,00	962.895.000	58,00	415.770.000	60,00	428.243.000	63,00	436.808.000	65,00	458.648.000	68,00	472.408.000	68,00	3.174.772.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/ Jumlah Perusahaan	%		50,00	294.355.000	55,00	330.000.000	60,00	339.900.000	63,00	346.698.000	65,00	363.733.000	68,00	384.954.000	68,00	2.059.640.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5.510.338.630		5.667.808.420		5.751.681.840		6.683.681.630		7.773.681.630		8.275.007.570		39.662.199.720		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	5.510.338.630	-	5.667.808.420	-	5.751.681.840	-	6.683.681.630	-	7.773.681.630	-	8.275.007.570	-	39.662.199.720	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.673.442.000		1.121.112.000		1.204.165.000		1.184.165.000		1.255.000.000		1.255.000.000		7.692.884.000		
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase OPD yang Mengimplemetasikan PUG	Jumlah OPD yang mengumpulkan PPRG / jumlah OPD x 100%	%		50,00	557.810.000	-	315.460.000	-	330.000.000	-	328.000.000	-	340.000.000	-	340.000.000	-	2.211.270.000		PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Jumlah korban kekerasan yang tertangani/jml korban kekerasan yang dilaporkan X 100%	%	100.00	100.00	529.010.000	-	262.870.000	-	269.165.000	-	269.165.000	-	270.000.000	-	270.000.000	-	1.870.210.000		
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina	jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina dibagi jumlah seluruh Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terdaftar X 100%	%	100.00	100.00	89.017.000	-	89.017.000	-	105.000.000	-	100.000.000	-	105.000.000	-	105.000.000	-	593.034.000		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data pilah gender	Jumlah OPD yang mengumpulkan Data Pilah kuantitatif di bagi jumlah OPD X 100 %	%			185.325.000	-		-		-		-		-		-	185.325.000		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan yang lounching layak anak di bagi jumlah kecamatan x 100%	%	60,00	45,00	242.280.000	-	60,00	-	65,00	-	70,00	-	100,00	-	100,00	-	750.855.000		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase kekerasan pada anak yang ditangani	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang di tangani instansi tingkat Kabupaten / kota yang di dampingi X 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	%	100.00	100.00	70.000.000	-	382.190.000	-	400.000.000	-	390.000.000	-	420.000.000	-	420.000.000	-	2.082.190.000		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN, PERTANIAN						20.182.122.440		20.923.203.480		21.132.435.520		22.189.057.290		22.410.947.860		22.859.166.820		129.696.933.410		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	20.182.122.440	-	20.923.203.480	-	21.132.435.520	-	22.189.057.290	-	22.410.947.860	-	22.859.166.820	-	129.696.933.410	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.393.856.500		2.055.950.000		2.095.128.500		2.284.362.710		2.398.581.046		2.470.538.265		12.698.417.021		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan aktif	Jumlah lumbung pangan aktif / jumlah lumbung pangan x 100%	%	10,00	10,00	543.910.000	-	1.125.000.000	-	1.136.250.000	-	1.249.875.000	-	1.312.368.756	-	1.351.739.805	-	6.719.143.561	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	Ketersediaan beras kotor : (jumlah penduduk x konsumsi beras)	%	125,72	128,00	736.499.000	-	684.850.000	-	705.395.500	-	775.935.050	-	814.732.000	-	839.173.755	-	4.556.585.305		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						92.380.000		196.100.000		201.983.000		206.022.660		216.323.790		222.813.505		1.135.622.955	
		Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	(Daerah rentan rawan pangan yang tertangani : daerah rentan rawan pangan) x 100%	%	52,72	50,10	-	52,72	-	53,56	-	54,39	-	55,23	-	56,07	-	56,07	-	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						21.067.500		50.000.000		51.500.000		52.530.000		55.156.500		56.811.200		287.065.200	
		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi melalui uji lab dibagi jumlah sampel pangan segar yang di uji x 100%	%	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	90,00	-	90,00	-	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						413.676.000		970.000.000		875.000.000		875.000.000		875.000.000		1.275.000.000		5.283.676.000	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						-		-		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		300.000.000	
		Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penyelesaian ganti rugi dan santunan dibagi Jumlah bidang tanah yang harus dilakukan penyelesaian ganti rugi dan santunan x 100%	%	0,00	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						413.676.000		970.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		1.200.000.000		4.983.676.000	
		Jumlah bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat	Jumlah Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikasi	Bidang	565,00	635,00	-	735,00	-	845,00	-	955,00	-	1.065,00	-	1.285,00	-	1.285,00	-	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						22.097.316.710		22.560.000.000		23.586.200.000		24.646.742.500		25.481.485.730		29.245.930.300		147.617.675.240	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.054.618.683		12.060.000.000		13.051.300.000		13.164.742.000		12.943.485.000		15.566.930.000		79.841.075.683	
		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						43.659.000		355.000.000		468.000.000		510.000.000		975.000.000		1.080.000.000		3.431.659.000	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang tersedia/ jumlah dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang harus disusun X 100	%	0,00	70,00	-	72,00	-	74,00	-	76,00	-	78,00	-	80,00	-	80,00	-	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						418.748.000		400.000.000		1.002.000.000		1.009.000.000		1.142.000.000		1.535.000.000		5.506.748.000	
		Cakupan pemantauan kualitas air	Jumlah sungai yang terpantau kualitas airnya/ Jumlah sungai yang harus dipantau kualitas airnya X 100	%	0,00	50,00	-	60,00	-	70,00	-	80,00	-	90,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan pemantauan kualitas udara	Jumlah peruntukan lokasi yang terpantau kualitas udaranya/ Jumlah peruntukan lokasi yang harus dipantau kualitas udaranya X 100	%	0,00	50,00	-	50,00	-	70,00	-	80,00	-	90,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						1.280.670.000		1.395.000.000		1.545.000.000		1.631.000.000		1.749.000.000		1.997.000.000		9.597.670.000	
		Persentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik	jumlah KEHATI (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik dibagi jumlah KEHATI yang ada X 100	%	0,72	17,59	-	18,07	-	18,56	-	19,04	-	19,52	-	20,00	-	20,00	-	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						37.845.000		40.000.000		62.000.000		149.000.000		162.000.000		183.000.000		633.845.000	
		Persentase dokumen persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang disetujui	Jumlah persetujuan teknis pengelolaan limbah b3 yang disetujui / jumlah dokumen pengelolaan B3 yang diajukan x 100%	%	72,00	72,00	-	74,00	-	74,00	-	78,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						449.178.000		100.000.000		125.000.000		590.000.000		630.000.000		675.000.000		2.569.178.000	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dibagi jumlah penanggungjawab usaha dan/kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota— 100 %	%	30,00	35,00	-	40,00	-	45,00	-	50,00	-	55,00	-	60,00	-	60,00	-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang dibina	Jumlah kelompok masyarakat yang didampingi pelaksanaan PBLH/ rencana jumlah Pendampingan PBLH X 100	%	0.00	0.00	49.275.000	10.00	150.000.000	10.00	172.000.000	10.00	220.000.000	15.00	245.000.000	15.00	280.000.000	15.00	1.116.275.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten dibagi yang diusulkan X 100	%	0,00	-	-	-	-	20,00	20.000.000	25,00	25.000.000	30,00	30.000.000	30,00	35.000.000	30,00	110.000.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ jumlah pengaduan lingkungan hidup yang masuk X 100	%	0.00	-	-	-	-	50,00	27.000.000	60,00	36.000.000	70,00	43.000.000	80,00	62.000.000	80,00	168.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	Jumlah timbulan sampah yang ditangani (ton)	ton	30.345,00	32.850,00	6.763.323.027	33.580,00	8.060.000.000	35.040,00	7.113.900.000	36.136,00	7.312.000.500	37.595,00	7.562.000.730	38.653,00	7.832.000.300	38.653,00	44.643.224.557	
		Persentase sampah yang dikelola	Jumlah sampah yang dikelola dibagi jumlah sampah yang ditimbulkan X 100	%	20,50	21,95	-	22,29	-	23,11	-	23,67	-	24,47	-	25,00	-	25,00	-	
		Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pengangkutan sampah	desa/kel	90,00	92,00	-	95,00	-	100,00	-	103,00	-	106,00	-	108,00	-	108,00	-	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					13.490.058.280	12.819.202.280	13.155.670.360	13.813.453.880	14.114.544.580	14.537.980.920	81.930.910.300								
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	12.319.412.280	100.00	12.066.031.480	100.00	11.695.670.360	100.00	12.181.453.880	100.00	12.069.544.580	100.00	12.197.980.920	100.00	72.530.093.500	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KK	Perbandingan jumlah keluarga mempunyai Kartu Keluarga terhadap jumlah seluruh keluarga dalam Kabupaten	%	99,31	99,40	285.792.000	99,50	267.400.000	99,60	505.000.000	99,70	650.000.000	99,80	830.000.000	99,90	920.000.000	99,90	3.458.192.000	
		Persentase kepemilikan KTP elektronik	Perbandingan jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun keatas	%	99,79	99,81	-	99,83	-	99,85	-	99,87	-	99,89	-	99,91	-	99,91	-	
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	Perbandingan anak usia 0- 17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki KIA terhadap jumlah anak usia 0-17	%	33,09	34,00	-	35,00	-	36,00	-	37,00	-	38,00	-	39,00	-	39,00	-	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun)	Perbandingan jumlah anak 0- 18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran terhadap keseluruhan jumlah anak usia 0 -18	%	95,67	96,00	59.046.000	96,50	159.046.000	97,00	335.000.000	97,50	350.000.000	98,00	360.000.000	98,50	360.000.000	98,50	1.623.092.000	
		Persentase Penerbitan akta kematian	Perbandingan jumlah akta kematian yang diterbitkan terhadap keseluruhan jumlah kematian yang dilaporkan	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
		Persentase Kapemilikan dokumen Perkawinan	Perbandingan dokumen perkawinan yang diterbitkan terhadap keseluruhan jumlah perkawinan	%	99,31	99,40	-	99,50	-	99,60	-	99,70	-	99,80	-	99,90	-	99,90	-	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan database kependudukan dibagi jumlah seluruh lembaga pemerintah x 100	%	2,00	2,00	809.083.000	10,00	309.999.800	15,00	580.000.000	20,00	595.000.000	25,00	800.000.000	28,00	980.000.000	28,00	4.074.082.800	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		Persentase Sistem Informasi Kependudukan yang diperbarui	Sistem informasi kependudukan yang diperbarui dibandingkan dengan seluruh Sistem Informasi Kependudukan x 100%	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten	Persentase tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						13.449.724.400		17.194.879.990		13.384.894.090		14.026.227.910		14.359.959.100		14.790.757.880		87.206.443.370		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	42.157.345.410	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki sarpras dalam kondisi baik (jalan, kantor)	Perbandingan jumlah desa dengan sarana prasarana kondisi baik terhadap seluruh desa	%	65,00	67,00	-	69,00	-	71,00	-	73,00	-	74,00	-	75,00	-	75,00	-	12.379.448.300	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang memiliki Kerjasama	Perbandingan jumlah desa yang memiliki kerjasama terhadap seluruh desa	%	0.00	0.00	-	3.01	-	3.38	-	4.51	-	4.51	-	4.51	-	4.51	-	2.225.390.370	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan RPJMDES, RKPDES, APBDES	Perbandingan desa yang mempunyai RPJMDES, RKPDES, dan APBDES terhadap keseluruhan desa	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	27.667.056.510	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelembagaan desa yang dibina (RT,RW,PKK,Posyandu,karangtaruna)	Perbandingan kelembagaan desa yang dibina terhadap seluruh lembaga desa	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	2.777.202.780	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						8.854.794.000		8.536.163.000		8.569.518.000		8.531.250.000		7.682.183.000		7.682.183.000		49.856.091.000		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan usia pernikahan dini	(Pernikahan dini tahun n-1 dikurangi pernikahan dini tahun n) dibagi pernikahan dini tahun n-1 x 100%	%		20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	767.974.000	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	15,77	15,00	-	14,00	-	13,00	-	12,00	-	11,00	-	10,00	-	10,00	-	42.830.157.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	presentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan yang dibina	%	60,00	60,00	-	60,00	-	65,00	-	70,00	-	75,00	-	80,00	-	80,00	-	6.257.960.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						46.057.965.170		44.552.993.580		45.118.997.520		47.438.438.160		48.626.815.150		49.311.809.420		281.107.019.000		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	195.424.139.144	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan	Jumlah rambu jalan yang terpasang/ jumlah rambu-rambu yang harus tersedia X 100	%	70,00	70,00	-	75,00	-	80,00	-	85,00	-	90,00	-	95,00	-	95,00	-	74.252.369.856	
		Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	Jumlah kendaraan (angkutan penumpang dan barang) yang lulus KIR pada tahun n dibagi jumlah kendaraan (angkutan penumpang dan barang) yang harus melaksanakan uji pada tahun n dikali 100	%		75.00	-	80.00	-	82,00	-	83,00	-	84,00	-	85,00	-	85,00	-		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Persentase terminal penumpang tipe c sesuai standar	Jumlah terminal tipe C sesuai standar dibagi jumlah terminal tipe c dikali 100	%	80.00	80.00	-	85.00	-	90.00	-	95.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
		Persentase ketersediaan aplikasi penerbitan rekam online	Jumlah Aplikasi penerbitan rekam dalam kondisi baik dibagi jumlah aplikasi penerbitan rekam x100%	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
		Persentase Prasarana jalan dalam kondisi baik	Jumlah sarpras dalam kondisi baik dibagi jumlah sarpras x 100%	%	79,17	79,17	-	84.00	-	84,62	-	85,19	-	85,71	-	89,29	-	89,29	-	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						3.448.210.000		1.140.400.000		1.710.400.000		1.710.400.000		1.710.700.000		1.710.400.000		11.430.510.000	
		Persentase pemenuhan pelabuhan sesuai standar	Jumlah pemenuhan pelabuhan sesuai standarr dibagi jumlahpemenuhan pelabuhan yang harus dipenuhi dikali 100	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
		Persentase angkutan laut dalam kondisi baik	Jumlah angkutan laut dalam kondisi baik dibagi jumlah angkutan laut x 100%	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						6.196.674.302		7.128.985.997		6.859.674.070		7.291.502.610		7.451.433.060		7.490.255.900		42.418.525.939	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.196.674.302		7.128.985.997		6.859.674.070		7.291.502.610		7.451.433.060		7.490.255.900		42.418.525.939	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						3.711.626.648		8.273.738.003		5.482.551.930		5.806.834.690		6.078.659.310		6.253.539.240		35.606.949.821	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						850.078.000		2.979.707.002		2.661.900.000		2.771.340.160		2.914.145.000		3.037.289.500		15.214.459.662	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)	Nilai SKM terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah = (Total nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x Nilai penimbang	Score	N/A	67,00	-	69,00	-	70,00	-	72,00	-	74,00	-	76,00	-	76,00	-	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						2.861.548.648		5.294.031.001		2.820.651.930		3.035.494.530		3.164.514.310		3.216.249.740		20.392.490.159	
		Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh PD yang membidangi urusan Kominfo	(Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	%	41,31	45,00	-	50,00	-	55,00	-	65,00	-	70,00	-	75,00	-	75,00	-	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	(Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik) x 100%	%	19,77	20,90	-	22,03	-	23,16	-	24,29	-	25,42	-	26,55	-	26,55	-	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						9.223.358.970		8.262.245.538		8.448.316.000		9.016.831.800		9.226.751.540		9.608.004.090		53.785.507.938	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.575.160.970		5.814.183.538		5.873.230.000		6.284.186.883		6.400.720.021		6.762.334.885		36.709.816.297	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						-		30.000.000		35.000.000		37.500.000		40.000.000		42.500.000		185.000.000	
		Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan	jumlah koperasi yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi jumlah koperasi	%	78.00	78.00	-	79.00	-	79.00	-	80.00	-	80.00	-	80.00	-	80.00	-	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						395.015.000		150.000.000		165.000.000		230.000.000		255.000.000		270.000.000		1.465.015.000	
		Persentasi koperasi/KSP yang diawasi	jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	%	20,00	20,00	-	22,00	-	25,00	-	27,00	-	30,00	-	32,00	-	32,00	-	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						26.100.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		171.100.000	
		Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai	Jumlah koperasi dan BPR/LKM yang mendapatkan penilaian	%	40,00	45,00	-	50,00	-	55,00	-	60,00	-	65,00	-	70,00	-	70,00	-	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						877.087.000		160.000.000		175.000.000		274.720.000		283.000.000		288.000.000		2.057.807.000	
		Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	jumlah koperasi yang anggotanya pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	40,00	45,00	-	50,00	-	55,00	-	60,00	-	65,00	-	70,00	-	70,00	-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENGABUNGAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan	%	10.00	10.00	52.588.000	10.00	95.000.000	10.00	50.086.000	10.00	109.924.917	10.00	103.031.519	10.00	105.169.205	10.00	515.799.641	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	%	10,00	12,00	1.619.392.500	20,00	1.328.062.000	22,00	1.370.000.000	30,00	1.325.500.000	32,00	1.330.000.000	40,00	1.360.000.000	40,00	8.332.954.500	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang dikembangkan	Jumlah Usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil	%	10,00	12,00	678.015.500	20,00	660.000.000	22,00	750.000.000	30,00	725.000.000	32,00	785.000.000	40,00	750.000.000	40,00	4.348.015.500	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						8.427.945.410		7.920.112.800		8.157.716.180		8.565.601.990		8.854.406.800		9.120.039.000		51.045.822.180	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	6.719.831.510	100.00	6.448.233.700	100.00	6.549.716.180	100.00	6.800.601.990	100.00	7.027.906.800	100.00	7.115.039.000	100.00	40.661.329.180	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen yang mendukung investasi di Kabupaten Kendal	Jumlah dokumen pendukung investasi yang disusun dibagi jumlah dokumen pendukung investasi yang direncanakan dikalikan 100%	%	100.00	100.00	96.420.000	100.00	166.420.000	100.00	172.500.000	100.00	150.000.000	100.00	160.000.000	100.00	170.000.000	100.00	915.340.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang memiliki kepeminatan investasi	Jumlah calon investor yang menyatakan kepeminatan investasi pada event promosi dibagi jumlah calon investor yang hadir di event promosi dikalikan 100%	%	80.00	80.00	622.125.000	80.00	411.345.000	80.00	432.500.000	80.00	487.500.000	80.00	520.000.000	80.00	667.500.000	80.00	3.140.970.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perizinan dan Non perizinan yang memenuhi ketentuan	jumlah permohonan perizinan yang sesuai ketentuan dibagi jumlah permohonan perizinan dan nonperizinan yang masuk kali 100%	%	90,00	90,00	575.164.100	90,00	559.164.100	92,00	662.500.000	92,00	777.500.000	94,00	790.000.000	94,00	802.500.000	94,00	4.166.828.200	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor/pelaku usaha berjin efektif yang melaksanakan pelaporan penanaman modal	Jumlah investor/pelaku usaha berjin efektif yang melaksanakan pelaporan penanaman modal dibagi jumlah investor/pelaku usaha berjin efektif kali 100 %	%	100.00	100.00	297.944.800	100.00	202.012.000	100.00	205.500.000	100.00	210.000.000	100.00	216.500.000	100.00	222.500.000	100.00	1.354.456.800	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan nonperizinan yang dikelola sisten informasi penanaman modal	Jumlah data yang dikelola sistem tahun ini ditambah data tahun tahun sebelumnya dibagi jumlah data yang ada di sistem dikalikan 100 %	%	100.00	100.00	116.460.000	100.00	132.938.000	100.00	135.000.000	100.00	140.000.000	100.00	140.000.000	100.00	142.500.000	100.00	806.898.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA						8.985.837.780		9.309.204.000		10.571.580.120		10.608.562.130		10.970.000.000		11.147.631.110		61.592.815.140	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	8.985.837.780	100.00	9.309.204.000	100.00	10.571.580.120	100.00	10.608.562.130	100.00	10.970.000.000	100.00	11.147.631.110	100.00	61.592.815.140	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						16.997.300.000		7.535.000.000		7.085.000.000		6.140.000.000		6.460.000.000		6.600.000.000		50.817.300.000	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi sosial kemasyarakatan di kota/ jumlah pemuda di kota x 100%	%	15,11	15,49	1.543.750.000	15,72	1.255.000.000	15,94	1.715.000.000	16,16	1.635.000.000	16,38	1.640.000.000	16,60	1.590.000.000	16,60	9.378.750.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina (KONI dan Dispora) dibagi jumlah cabang olahraga prestasi dikali 100	%	100.00	100.00	15.253.550.000	100.00	6.080.000.000	100.00	5.120.000.000	100.00	4.305.000.000	100.00	4.570.000.000	100.00	4.760.000.000	100.00	40.088.550.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENGANGKUTAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan gerakan pramuka kwartir cabang	Jumlah Gerakan Pramuka kwartir cabang yang dibina dibagi seluruh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang di Kabupaten x 100	%	100.00	100.00	200.000.000	100.00	200.000.000	100.00	250.000.000	100.00	200.000.000	100.00	250.000.000	100.00	250.000.000	100.00	1.350.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					165.635.000		135.500.000		219.565.000		226.543.250		233.870.410		238.486.520		1.219.600.180		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal	(Jumlah data dan informasi statistik sektoral yang dirilis atau diunggah PD ke Portal Data Kendal / Jumlah data dan informasi statistik sektoral) x 100%	%	N/A	95,00	165.635.000	95,00	135.500.000	100,00	219.565.000	100,00	226.543.250	100,00	233.870.410	100,00	238.486.520	100,00	1.219.600.180	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					303.382.000		369.376.000		680.457.280		579.480.140		599.454.150		612.037.780		3.144.187.350		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	(Jumlah sistem elektronik (SE) yang menerapkan system manajemen keamanan informasi (SMKI) dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian / Jumlah sistem elektronik (SE)) x 100%	%	22,84	30,00	303.382.000	40,00	369.376.000	50,00	680.457.280	60,00	579.480.140	75,00	599.454.150	85,00	612.037.780	85,00		3.144.187.350
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.783.810.000		720.701.000		1.054.000.000		1.149.000.000		1.150.000.000		1.245.000.000		8.102.511.000		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan (penyediaan, penayaan keberagaman)	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan di tahu berjalan dibagi seluruh kebudayaan yang direncanakan dikembangkan di tahun berjalan x 100%	%	100.00	100.00	1.476.775.000	100.00	408.000.000	100.00	425.000.000	100.00	425.000.000	100.00	425.000.000	100.00	425.000.000	100.00	3.584.775.000	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan ditahun berjalan dibagi seluruh kesenian tradisional yang direncanakan dikembangkan ditahun berjalan x 100%	%	100.00	100.00	263.812.500	100.00	115.601.000	100.00	126.000.000	100.00	126.000.000	100.00	126.000.000	100.00	160.000.000	100.00	917.413.500	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah tim ahli cagar budaya	Jumlah tim ahli cagar budaya	orang	0.00	0.00	186.650.000	0.00	36.500.000	0.00	133.000.000	0.00	138.000.000	5.00	139.000.000	5.00	155.000.000	5.00	788.150.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan di tahun berjalan dibagi seluruh cagar budaya yang direncanakan dilestarikan di tahun berjalan x 100%	%	100.00	100.00	424.572.500	100.00	87.600.000	100.00	295.000.000	100.00	360.000.000	100.00	360.000.000	100.00	405.000.000	100.00	1.932.172.500	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat dibagi seluruh kegiatan museum yang direncanakan melibatkan masyarakat x 100%	%	100.00	100.00	432.000.000	100.00	73.000.000	100.00	75.000.000	100.00	100.000.000	100.00	100.000.000	100.00	100.000.000	100.00	880.000.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN					5.008.256.780		5.329.719.000		4.846.204.950		5.088.515.200		5.342.940.960		5.503.231.540		31.118.868.430	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	5.008.256.780	100.00	5.329.719.000	100.00	4.846.204.950	100.00	5.088.515.200	100.00	5.342.940.960	100.00	5.503.231.540	100.00		31.118.868.430
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					10.308.821.000		1.315.000.000		1.478.000.000		1.551.900.000		1.629.495.000		1.678.379.000		17.961.595.000		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan aktif	Jumlah perpustakaan aktif/semuruh perpustakaan x 100	%	60.00	60.00	10.308.821.000	65.00	1.315.000.000	65.00	1.478.000.000	70.00	1.551.900.000	70.00	1.629.495.000	75.00	1.678.379.000	75.00	17.961.595.000	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PERPUSTAKAAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						305.230.000		345.000.000		375.000.000		405.000.000		425.250.000		438.006.000		2.293.486.000		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	Perangkat daerah yang sudah melaksanakan pengolahan arsip secara baku / jumlah seluruh OPD x100%	%	26,00	26,00	-	30,00	-	33,00	-	36,00	-	39,00	-	42,00	-	42,00	-	1.683.719.000	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KEARSIPAN
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional pasal 40 dan pasal 59 Undang undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan	T= (a+i+s+j) / 4 T = Tingkat ketersediaan arsip, a=Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, i=Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, s=Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j=Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	75,75	75,85	-	75,95	-	76,05	-	76,15	-	76,25	-	76,35	-	76,35	-	-	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip statis yang dialihmediakan	Arsip statis yang dialihmediakan pertahun /Jumlah arsip statis x 100%	%	6,76	6,76	-	6,76	-	6,76	-	6,76	-	6,76	-	6,76	-	6,76	-	497.745.000	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	T=(m+b+g+a+c+i) / 6 T=Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban. M=Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b=Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g=Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah	%	91,66	91,68	-	91,70	-	91,72	-	91,73	-	91,74	-	91,75	-	91,75	-	-	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan	Jumlah ijin arsip tertutup yang dikeluarkan / jumlah arsip tertutup X 100	%	50.00	50.00	-	55.00	-	55.00	-	55.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	112.022.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						52.659.642.904		47.629.292.132		47.001.515.520		49.091.252.790		50.857.301.304		52.083.838.715		299.322.843.365		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						9.064.706.134		8.674.255.832		8.882.093.730		9.326.198.410		9.792.508.330		10.086.283.590		55.826.046.026		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	33.527.710.936	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap se Kabupaten Kendal pada tahun tertentu	kg	3.801.077,00	4.190.687,00	-	4.400.222,00	-	4.620.233,00	-	4.851.244,00	-	5.093.807,00	-	5.348.497,00	-	2.850.469.000,00	-	10.428.792.150	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya se-Kabupaten Kendal pada tahun tertentu	kg	22.509.480,00	23.139.000	-	23.786.000	-	24.453.000,00	-	25.140.000,00	-	25.848.000	-	26.577.000	-	148.943.000,00	-	9.550.840.820	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan penduduk	Rerata konsumsi ikan per kapita per tahun	kg/kap/th	30,92	32,50	-	34,10	-	35,80	-	37,60	-	39,50	-	41,40	-	41,40	-	2.318.702.120	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3.283.032.500		1.990.000.000		2.860.000.000		2.830.000.000		2.936.632.150		3.030.000.000		16.929.664.650		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah	Rp	546.551,02	1.093.102,00	-	2.441.600,00	-	2.630.200,00	-	2.819.800,00	-	3.084.400,00	-	3.399.000,00	-	15.468.102,00	-	7.831.728.500	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Kunjungan wisata tahun N - Jumlah kunjungan Tahun N-1 / Jml Kunjungan wisata Tahun N-1 x 100%	%	-63,24	5,84	-	5,60	-	5,98	-	5,95	-	6,06	-	6,06	-	6,06	-	2.580.325.000	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan/ jumlah pelaku ekraf yang ada x 100%	%	6,00	6,00	-	12,00	-	18,00	-	24,00	-	30,00	-	36,00	-	36,00	-	2.513.750.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf yang tersertifikasi		%	N/A	3,00	1.177.229.000	6,00	280.000.000	6,00	610.000.000	6,00	615.000.000	6,00	651.632.150	6,00	670.000.000	31,00	4.003.861.150	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						12.882.759.370		10.244.559.000		10.371.798.120		10.890.388.030		11.434.907.234		11.777.954.655		67.602.366.409	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul	Luasan tanaman padi, jagung yang menggunakan varietas benih unggul / Luasan tanaman pangan x 100%	%	94,46	85,00	1.502.531.000	85,50	2.110.691.000	86,00	2.174.011.730	86,50	2.282.712.320	87,00	2.396.847.930	87,50	2.468.753.370	87,50	12.935.547.350	
		Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	Luasan tanaman bawang merah dan cabai yang menggunakan varietas benih unggul/ Luasan hortikutura x 100%	%	70,73	71,23		71,73		72,23		72,73		73,23		73,73		73,73		
		Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	Luasan tanaman kopi yang menggunakan varietas bibit unggul/ Luasan tanaman perkebunan x 100%	%	69,17	69,37		69,57		69,77		69,97		70,17		70,37		70,37		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	22.666,00	22.666,00		22.666,00		22.666,00		22.666,00		22.666,00		22.666,00		22.666,00		
		Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber- sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam part, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Luasan lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam part, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Ha	4.384,00	1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00		12.484,00		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Upaya pengendalian penyakit hewan yang menular = (Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan - Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun sebelumnya) : (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan tahun sebelumnya)	%	0,56	0,2	814.321.000	0,01	953.465.000	0,01	972.534.300	0,01	1.021.161.020	0,008	1.072.219.068	0,008	1.104.385.640	0,008	5.938.086.028	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulungan bencana OPT	Rerata dari persentase luas areal pengendalian dan penanggulungan bencana OPT padi, jagung, bawang merah, cabai, kopi = Rerata (luasan yang dikendalikan : luasan yang terserang) x 100%	%	86,62	87,67	119.735.000	88,23	124.103.000	89,62	127.826.090	90,24	134.217.390	90,90	140.928.264	91,58	145.156.120	91,58	791.965.864	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif	(Jumlah kelompok tani aktif : total kelompok tani) x 100%	%	82,00	84,00	1.522.007.825	85,00	1.486.000.000	86,00	1.515.720.000	87,00	1.591.506.000	88,00	1.671.081.300	89,00	1.721.213.740	89,00	9.507.528.865	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						50.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000		57.750.000		59.482.500		322.232.500	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase energi terbarukan yang diawasi	jumlah energi terbarukan yang diawasi	%	2,00	2,00	50.000.000	2,00	50.000.000	2,00	50.000.000	2,00	55.000.000	2,00	57.750.000	2,00	59.482.500	2,00	322.232.500	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						26.130.510.900		24.605.247.300		22.530.393.670		23.656.913.350		24.175.862.590		24.701.138.470		145.800.066.280	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100,00	100,00	16.105.761.685	100,00	15.650.552.300	100,00	15.657.560.000	100,00	15.657.560.000	100,00	15.657.551.000	100,00	15.657.551.000	100,00	94.386.535.985	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang layak fungsi	Jumlah pasar yang layak fungsi dibagi jumlah pasar yang ada x 100%	%	7,69	15,38	9.539.537.000	23,07	7.741.000.000	30,76	5.001.138.670	38,45	6.061.658.350	38,45	6.526.616.590	38,45	6.993.000.470	38,45	41.862.951.080	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan barang pokok dan penting	Ketersediaan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	%	150,00	150,00	80.817.215	150,00	100.000.000	150,00	130.000.000	150,00	145.000.000	150,00	145.000.000	150,00	145.000.000	150,00	745.817.215	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp							
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan produk unggulan ekspor	Peningkatan nilai ekspor setiap tahunnya	%	5.00	5.00	243.487.500	-	5.00	945.000.000	-	5.00	845.000.000	-	5.00	894.000.000	-	5.00	945.000.000	-	995.000.000	-	3000	4.867.487.500		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP Bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalanndibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota kali 100 %	%	50,00	70,00	160.907.500	-	90,00	168.695.000	-	95,00	146.695.000	-	96,00	148.695.000	-	100,00	151.695.000	-	100,00	-	100,00	#VALUE!		937.274.500
3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penyelenggaraan dagang yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	%		0.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	750.000.000	-	100.00	750.000.000	-	100.00	750.000.000	-	100.00	-	100.00	3.000.000.000		-
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.110.554.000		1.940.000.000		2.182.000.000		2.195.000.000		2.315.000.000		2.280.000.000		12.022.554.000							
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	jumlah indikator pembangunan RPIK	%	80.00	80.00	1.015.254.000	-	85.00	1.840.000.000	-	85.00	2.022.000.000	-	90.00	1.935.000.000	-	95.00	2.055.000.000	-	100.00	-	100.00	10.887.254.000	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
		Persentase sentra industri yang dikembangkan	jumlah sentra industri yang dikembangkan	%	80.00	80.00	-	85.00	-	85.00	-	90.00	-	95.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-		
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah pertambahan industri kecil dan menengah	%		0.00	-	40.00	-	50.00	-	60.00	-	70.00	-	80.00	-	80.00	-	80.00	-	80.00	-	-		
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang diusulkan mendapatkan izin Usaha Industri (IUI)	Jumlah IKM yang memperoleh kesempatan ijin usaha	%	20.00	20.00	95.300.000	-	20.00	100.000.000	-	30.00	110.000.000	-	40.00	210.000.000	-	50.00	210.000.000	-	60.00	-	60.00	935.300.000		-
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	jumlah tersedianya pengolahan dan analisis data industri	%	20.00	20.00	-	20.00	-	30.00	-	40.00	50.000.000	-	50.00	50.000.000	-	60.00	50.000.000	-	60.00	-	60.00	200.000.000	-	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						138.080.000		125.230.000		125.230.000		137.753.000		144.641.000		148.979.500		819.913.500							
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan calon transmigran	jumlah lokasi penempatan transmigran/jumlah lokasi calon transmigran yang disurvei x 100%	%	75.00	75.00	68.080.000	-	75.00	50.000.000	-	75.00	50.000.000	-	75.00	55.000.000	-	75.00	57.750.000	-	75.00	-	75.00	340.312.500	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	jumlah transmigran yang diberangkatkan/jumlah calon transmigran yang mendaftar x 100%	%	50.00	50.00	70.000.000	-	50.00	75.230.000	-	50.00	75.230.000	-	50.00	82.753.000	-	50.00	86.891.000	-	50.00	-	50.00	479.601.000		-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						115.457.114.662		124.047.802.850		126.757.848.250		183.442.478.850		144.825.605.970		149.170.374.150		843.701.224.732							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						55.457.114.662		55.847.802.850		56.655.619.750		109.835.138.920		65.326.895.860		67.286.702.740		410.409.274.782							
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki nilai SKM B	Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SKM B dibagi seluruh OPD yang dinilai x 100%	%	96,00	96,5	47.162.917.484	-	97,00	46.304.760.850	-	97,50	46.730.856.070	-	98,00	49.067.398.870	-	98,50	51.520.768.810	-	99,00	-	99,00	293.853.093.964	SEKRETARIAT DAERAH	
		Persentase OPD yang difasilitasi dalam implementasi RB	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam implementasi RB dibagi seluruh OPD x 100%	%	16,667	16,667	-	33,00	-	33,33	-	50,00	-	66,67	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-		
		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		-		
		Persentase terpenuhinya fasilitas protokol dan komunikasi pimpinan daerah	Jumlah kegiatan protokol dan komunikasipimpinan yang difasilitasi dibagi dengan jumlah kegiatan yang diusulkan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		-		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kecamatan dan Kelurahan tertib administrasi	umlah kecamatan dan kelurahan tertib administrasi dibagi jumlah kecamatan dan kelurahan	%	100,00	100,00	5.484.805.553		100,00	6.668.042.000		100,00	6.934.763.680		100,00	57.628.240.050		100,00	10.509.652.050		100,00		100,00	98.050.444.943	-	
		Persentase kerjasama yg terimplementasi secara efektif	jumlah dokumen kerjasama yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah kerja sama yang direncanakan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		-		

KODE	PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		Persentase raperda yang diusulkan ke propempera	jumlah raperda yang diusulkan ke propempera dibagi dengan jumlah usulan propempera	%	140,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-		
		Persentase terselenggaranya koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat		%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2.809.391.625		2.875.000.000		2.990.000.000		3.139.500.000		3.296.475.000		3.395.369.250		18.505.735.875		
		Persentase kegiatan pembangunan yang tidak mengalami keterlambatan dim pelaksanaan	jumlah kegiatan pembangunan yang tidak mengalami keterlambatan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		-	
		Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD	(jumlah deviden tahun n dikurangi n-1) dibagi deviden n-1 kali 100	%	0,65	1,00	-	2,00	-	2,00	-	2,5	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	-	
		Persentase Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP	Jumlah Belanja pengadaan yang diumumkan pada SIRUP dibagi dengan jumlah belanja	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		-	
4.02	SEKRETARIAT DPRD							60.000.000.000		68.200.000.000		70.102.228.500		73.607.339.930		79.498.710.110		81.883.671.410		433.291.949.950	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100,00	100,00	36.780.990.000	-	41.288.574.875	-	41.762.839.750	-	43.248.356.305	-	43.299.330.000	-	43.389.318.250	-	249.769.409.180	-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						23.219.010.000		26.911.425.125		28.339.388.750		30.358.983.625		36.199.380.110		38.494.353.160		183.522.540.770		
		Jumlah produk hukum yang dibahas sesuai kebutuhan	Jumlah produk hukum yang dibahas sesuai kebutuhan	perda	18,00	17,00	-	17,00	-	16,00	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-	-	
		Persentase dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Perbandingan dukungan Sekretariat DPRD yang sudah dilaksanakan terhadap kebutuhan dukungan Sekretariat DPRD atas pelaksanaan tupoksi DPRD	%	N/A	80,00	-	81,00	-	82,00	-	83,00	-	84,00	-	85,00	-	85,00	-	-	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							435.360.613.212		548.658.009.736		551.460.198.140		573.511.822.880		582.576.049.190		590.992.320.950		3.282.559.014.108	
5.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							6.809.178.740		6.179.745.010		6.503.339.910		6.933.673.890		7.280.357.600		7.498.768.320		41.205.063.470	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	Persen	100,00	100,00	6.809.178.740	-	6.179.745.010	-	6.503.339.910	-	6.933.673.890	-	7.280.357.600	-	7.498.768.320	-	41.205.063.470	-	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN							2.687.721.750		2.383.560.450		2.383.316.580		2.797.765.980		3.227.654.270		3.268.955.200		16.748.974.230	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan program dalam RPJMD dibagi seluruh program dalam RKPD x 100%	%	100,00	100,00	1.502.044.000	-	1.360.342.700	-	1.369.170.120	-	1.527.204.870	-	1.758.565.110	-	1.913.793.370	-	9.431.120.170	-	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Pemerintahan & Pembangunan Manusia	jumlah realisasi indikator Program yang tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi dengan jumlah indikator Program di OPD yang didampingi	%	62,15	76,15	-	78,64	-	82,69	-	90,38	-	96,15	-	98,07	-	98,07	-	-	
		Persentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian	jumlah realisasi indikator Program yang tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi dengan jumlah indikator Program di OPD yang didampingi	%	62,50	61,00	-	75,76	-	81,80	-	90,91	-	93,94	-	96,97	-	96,97	-	-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Persentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun SDA (Sumber Daya Alam)	jumlah realisasi indikator Program yang tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi dengan jumlah indikator Program di OPD yang didampingi	%	62,50	68,16	-	72,72	-	77,27	-	81,81	-	86,36	-	90,96	-	90,96	-	
		Persentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Infrastruktur & kewilayahan	jumlah realisasi indikator Program yang tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi dengan jumlah indikator Program di OPD yang didampingi	%	62,50	60,6	-	73,33	-	79,63	-	83,33	-	88,89	-	90,74	-	90,74	-	
5.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN						411.173.115.430		525.227.208.760		527.379.841.320		547.440.489.580		554.987.363.530		562.541.803.420		3.128.749.822.040	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	jumlah kegiatan di APBD sesuai dengan KUA PPAS di bagi jumlah kegiatan APBD x 100%	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase pelaporan keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP dan Taspen) dibagi jumlah laporan keuangan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	jumlah OPD yang memiliki laporan keuangan sesuai standar keuangan dibagi dengan jumlah OPD	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase sistem keuangan yang terintegrasi	Sistem keuangan yang telah terintegrasi dengan Smda Keuangan Dibagi sistem keuangan yang seharusnya terintegrasi dengan (BLUD, BOS, PENDAPATAN, ASET)	%	50,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	jumlah aset daerah yang teraudit tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 kali 100%	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan WP baru	(jumlah WP n - jumlah WP n-1) / jumlah WP n-1 x 100%	%		10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	
		Persentase pertumbuhan pajak pertahun	(jumlah pajak n - jumlah pajak n-1) / jumlah pajak n-1 x 100%	%		5,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	
		Nilai IKM	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	nilai	86,94	86,94	-	86,94	-	86,94	-	86,94	-	86,94	-	86,94	-	86,94	-	
		Persentase realisasi Pajak Daerah	Jumlah realisasi pajak dibagi Target pajak X 100%	%		100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
5.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						7.375.540.599		6.998.472.903		7.138.442.360		7.852.286.600		8.244.900.930		8.492.247.960		46.101.891.352	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN						2.809.351.673		2.184.264.143		2.202.690.560		2.378.905.800		2.497.851.090		2.572.786.620		14.645.849.886	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang ter update	Jumlah PNS dengan data kepegawaian yang terupdate di bagi jumlah PNS x 100 %	%	58,02	61,00	-	70,00	-	75,00	-	80,00	-	85,00	-	90,00	-	90,00	-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah dikali 100%	%	207,23	210.00		210.00		215,00		215.00		220.00		225.00		225.00		
		Tingkat Kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang tidak menerima hukuman dikurangi di bagi jumlah total ASN pada tahun berjalan x 100%	%	97.00	97,30		97,60		97,90		98,20		98,50		98,80		98,80	#VALUE!	
		Persentase ASN menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu	Jumlah PNS yang menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu di bagi jumlah PNS x 100 %	%	55,00	60.00		65.00		70,00		80.00		85.00		90.00		90.00		
		Persentase jabatan struktural yang dievaluasi	Jumlah jabatan struktural yang dievaluasi di bagi jumlah jabatan struktural yang terisi x 100 %	%	80,00	82.00		85.00		87,00		90.00		95.00		100.00		100.00		
		Persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan	Jumlah penempatan ASN yang sesuai dengan peta jabatan di bagi seluruh jumlah ASN di peta jabatan x 100 %	%	55,00	60.00		62.00		65,00		70.00		75.00		80.00		80.00		
		Persentase struktur jabatan ASN yang terisi	Jumah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100 %	%	87,60	80.00		82.00		85,00		87.00		87.00		88.00		88.00		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%	%	8,08	8,09		8,09		8,10		8,11		8,12		8,13		8,13		
		Persentase ASN yang lulus Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibagi Jumlah ASN yang lulus Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di kali 100 %	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
5.04		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.636.258.020		4.082.275.470		4.268.034.750		4.310.715.100		4.440.036.550		4.573.237.650		25.310.557.540	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%	%	23,20	23,21		23,22		23,23		23,24		23,25		23,26		23,26		PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan	Jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi dibagi Jumlah ASN yang direncanakan mengikuti pengembangan kompetensi teknis x 100 %	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Persentase ASN yang lulus lat prajabatan/latsar dan lat kepemimpinan	Jumlah ASN yang lulus latsar ditambah latpim dibagi jumlah ASN yang mengikuti latsar dan latpim x 100 %	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
5.05		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					869.447.000		1.602.483.000		1.584.532.660		1.797.985.930		1.897.885.220		2.044.521.780		9.796.855.590	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					869.447.000		1.602.483.000		1.584.532.660		1.797.985.930		1.897.885.220		2.044.521.780		9.796.855.590	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		Persentase jenis kelibangan utama yang diimplementasikan	jumlah jenis kelitbangan utama yang diimplementasikan dibagi jumlah jenis kelitbangan utama (7) dikali 100 persen	%	N/A	42,86		57,14		71,43		71,43		85,71		85,71		85,71		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENGANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						15.478.281.400		16.153.426.150		16.274.246.200		17.963.699.170		18.659.224.640		19.219.001.380		103.747.878.940	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						15.478.281.400		16.153.426.150		16.274.246.200		17.963.699.170		18.659.224.640		19.219.001.380		103.747.878.940	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	14.971.692.400	100.00	15.309.526.150	100.00	14.409.246.200	100.00	14.398.699.170	100.00	15.084.224.640	100.00	15.514.001.380	100.00	89.687.389.940	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tercapainya penyelenggaraan pengawasan di daerah	Jumlah obrik yang diawasi dibagi obrik yang harus diawasi x 100%	%	100.00	100.00	443.954.000	100.00	501.900.000	100.00	1.390.000.000	100.00	2.590.000.000	100.00	2.670.000.000	100.00	2.770.000.000	100.00	10.365.854.000	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi dibagi target pendampingan dan asistensi x 100%	%	100.00	100.00	62.635.000	100.00	342.000.000	100.00	475.000.000	100.00	975.000.000	100.00	905.000.000	100.00	935.000.000	100.00	3.694.635.000	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN						78.454.559.166		84.415.113.054		82.648.756.900		87.260.654.690		87.847.896.030		90.483.332.910		511.110.312.750	
7.01	KECAMATAN						78.454.559.166		84.415.113.054		82.648.756.900		87.260.654.690		87.847.896.030		90.483.332.910		511.110.312.750	
	KECAMATAN KENDAL						28.849.982.040		23.791.888.000		23.944.373.590		25.859.923.480		26.377.121.950		27.168.435.610		155.991.724.670	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	22.755.042.000	100	20.912.834.000	100	21.065.319.590	100	22.980.869.480	100	23.498.067.950	100	24.289.381.610	100	135.501.514.630	KECAMATAN KENDAL
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	90	90	150.000.000	90	175.000.000	90	175.000.000	90	175.000.000	90	175.000.000	90	175.000.000	90	1.025.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	80	80	5.575.000.000	80	2.350.388.040	80	2.350.388.040	80	2.350.388.040	80	2.350.388.040	80	2.350.388.040	80	17.326.940.200	
		Presentase kelurahan tertib administrasi	jumlah kelurahan tertib administrasi / jumlah kelurahan se Kecamatan Kendal x 100	%		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100	244.552.000	100	353.665.960	100	353.665.960	100	353.665.960	100	353.665.960	100	353.665.960	100	2.012.881.800	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	90,00	90,00	125.388.040	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	KECAMATAN PATEBON						2.545.457.630		2.704.835.300		2.840.077.060		3.067.283.230		3.220.647.390		3.317.266.810		17.695.567.420	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.361.474.530	100	2.511.569.300	100	2.636.677.060	100	2.770.663.230	100	2.907.947.390	100	2.997.566.810	100	16.185.898.320	KECAMATAN PATEBON
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	85,00	92.28	55.460.000	93.00	28.620.000	93.00	32.200.000	95.00	59.420.000	95.00	66.000.000	95.00	66.000.000	95.00	307.700.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	50,00	55.00	25.248.000	60.00	25.800.000	60.00	27.000.000	63.00	27.000.000	65.00	31.500.000	65.00	33.000.000	65.00	169.548.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						81.350.000		84.950.000		85.200.000		85.200.000		86.200.000		87.200.000		510.100.000	
		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	80.00	80.00	-	85.00	-	85.00	-	85.00	-	85.00	-	85.00	-	85.00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						10.300.100		13.400.000		14.000.000		14.000.000		15.000.000		15.500.000		82.200.100	
		Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	80,00	85.00	-	85.00	-	85.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						11.625.000		40.496.000		45.000.000		111.000.000		114.000.000		118.000.000		440.121.000	
		Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
KECAMATAN PEGANDON						2.608.635.390		2.692.432.360		2.827.053.980		3.053.218.300		3.205.879.210		3.302.055.590		17.689.274.830		KECAMATAN PEGANDON
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						7.300.000		12.768.000		13.406.400		14.478.910		15.202.860		15.658.940		78.815.110	
		Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	75.00	75.00	-	75.00	-	75.00	-	75.00	-	75.00	-	75.00	-	75.00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						29.830.000		43.310.000		45.475.500		49.113.540		51.569.220		53.116.290		272.414.550	
		Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	20,00	30.00	-	35.00	-	40.00	-	45.00	-	50.00	-	60.00	-	60.00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						97.060.000		89.100.000		93.555.000		101.039.400		106.091.370		109.274.110		596.119.880	
		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						4.500.000		17.307.000		18.172.350		19.626.140		20.607.440		21.225.670		101.438.600	
		Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						6.850.000		70.160.000		73.668.000		79.561.440		83.539.510		86.045.710		399.824.660	
		Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
KECAMATAN WELERI						2.856.724.560		2.860.816.570		3.003.857.400		3.244.165.990		3.406.374.290		3.508.565.520		18.880.504.330		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	KECAMATAN WELERI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.000.000		2.664.000		2.797.200		3.020.980		3.172.020		3.267.190		15.921.390	
		Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	0,23	50.00	6.540.000	50.00	39.745.000	50.00	41.732.250	50.00	45.070.830	50.00	47.324.370	50.00	48.744.100	50.00	229.156.550	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	75.600.000	100.00	82.800.000	100.00	86.940.000	100.00	93.895.200	100.00	98.589.960	100.00	101.547.660	100.00	539.372.820	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	-	100.00	7.655.000	100.00	8.037.750	100.00	8.680.770	100.00	9.114.810	100.00	9.388.250	100.00	42.876.580	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	1.540.000	100.00	10.656.000	100.00	11.188.800	100.00	12.083.904	100.00	12.688.100	100.00	13.068.744	100.00	61.225.548	
	KECAMATAN GEMUH					2.695.125.910	2.756.816.230	2.894.657.050	3.126.229.610	3.282.541.090	3.381.017.320	18.136.387.210								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.569.265.910	100	2.604.717.230	100	2.734.953.100	100	2.953.749.344	100	3.101.436.810	100	3.194.479.912	100	17.158.602.306	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%		90.00	16.361.000	90.00	23.000.000	90.00	24.150.000	90.00	26.082.000	90.00	27.386.100	90.00	28.207.683	90.00	145.186.783	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%		80.00	32.624.000	80.00	26.199.000	80.00	27.508.950	80.00	29.709.666	80.00	31.195.150	80.00	32.131.004	80.00	179.367.770	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%		90.00	61.850.000	90.00	76.250.000	90.00	80.062.500	90.00	86.467.500	90.00	90.790.875	90.00	93.514.601	90.00	488.935.476	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%		85.00	6.650.000	85.00	6.650.000	85.00	6.982.500	85.00	7.541.100	85.00	7.918.155	85.00	8.155.700	85.00	43.897.455	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	8.375.000	100.00	20.000.000	100.00	21.000.000	100.00	22.680.000	100.00	23.814.000	100.00	24.528.420	100.00	120.397.420	
	KECAMATAN CEPIRING					2.961.309.930	2.986.347.430	3.145.664.800	3.397.317.990	3.567.183.890	3.674.199.410	19.732.023.450								KECAMATAN CEPIRING
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.795.176.430	100	2.832.917.430	100	2.974.563.300	100	3.212.528.370	100	3.373.154.790	100	3.474.349.430	100	18.662.689.750	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	80.00	80.00	2.350.000	83.00	2.000.000	87.00	2.100.000	90.00	2.268.000	93.00	2.381.400	97.00	2.452.840	97.00	13.552.240	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENGANGKUTAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	50.00	50.00	58.497.500	50.00	51.630.000	50.00	54.211.500	50.00	58.548.420	50.00	61.475.840	50.00	63.320.120	50.00	347.683.380	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	75,00	77.00	89.201.000	80.00	87.400.000	83,00	91.770.000	85.00	99.111.600	90.00	104.067.180	95.00	107.189.200	95.00	578.738.980	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	72,00	75.00	-	82.00	-	85,00	10.000.000	89.00	10.800.000	91.00	11.340.000	96.00	11.680.200	96.00	43.820.200	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	16.085.000	100.00	12.400.000	100.00	13.020.000	100.00	14.061.600	100.00	14.764.680	100.00	15.207.620	100.00	85.538.900	
KECAMATAN KALIWUNGU							3.268.374.830		3.002.186.430		3.152.292.750		3.404.479.410		3.574.703.380		3.681.944.480		20.083.981.280	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	3.144.064.830	100	2.744.563.430	100	2.883.982.750	100	3.130.419.410	100	3.297.793.380	100	3.400.964.480	100	18.601.808.280	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	77,00	80.00	-	83.00	13.470.000	87,00	20.500.000	90.00	21.750.000	93.00	22.000.000	97.00	23.500.000	97.00	101.220.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	50.00	50.00	45.055.000	50.00	57.528.000	50.00	58.600.000	50.00	61.150.000	50.00	62.600.000	50.00	64.250.000	50.00	349.183.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	75,00	77.00	63.450.000	80.00	88.240.000	83,00	89.760.000	85.00	90.260.000	90.00	90.760.000	95.00	91.010.000	95.00	513.480.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	72,00	75.00	8.090.000	82.00	67.000.000	85,00	67.950.000	89.00	69.350.000	91.00	69.950.000	96.00	70.550.000	96.00	352.890.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	7.715.000	100.00	31.385.000	100.00	31.500.000	100.00	31.550.000	100.00	31.600.000	100.00	31.650.000	100.00	165.400.000	
KECAMATAN BRANGSONG							2.477.148.060		2.622.261.000		2.753.374.050		2.973.643.970		3.122.326.170		3.215.995.960		17.164.749.210	KECAMATAN BRANGSONG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.394.848.060	100	2.443.711.000	100	2.565.896.550	100	2.771.168.270	100	2.909.726.680	100	2.997.018.490	100	16.082.369.050	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	79,00	80,00	-	83,00	-	85,00	-	87,00	-	89,00	-	90,00	-	90,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	50,00	53,00	-	55,00	-	56,00	-	58,00	-	59,00	-	60,00	-	60,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	73,00	75,00	-	77,00	-	81,00	-	83,00	-	85,00	-	87,00	-	87,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	70,00	73,00	-	76,00	-	79,00	-	80,00	-	83,00	-	85,00	-	85,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
						2.977.838.180	-	2.935.084.000	-	3.091.838.200	-	3.339.185.260	-	3.506.144.520	-	3.611.328.850	-	19.461.419.010	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	KECAMATAN BOJA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	61,29	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	66,67	75,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%		100,00	-	100,00	-	100,00	-	100	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%		100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
						33.140.000	-	15.823.000	-	16.614.150	-	17.943.280	-	18.840.450	-	19.405.660	-	121.766.540	-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
KECAMATAN LIMBANGAN							2.670.038.820		2.735.822.640		2.882.613.770		3.113.222.870		3.268.884.020		3.366.950.540		18.037.532.660	KECAMATAN LIMBANGAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.486.871.820	100	2.538.591.640	100	2.620.796.819	100	2.816.766.819	100	3.074.674.020	100	3.172.740.540	100	16.710.441.658	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100	100	10.422.000	100	10.422.000	100	92.606.951	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	188.450.951	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	10,00	33	96.435.000	40	30.623.000	40	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	427.058.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100	76.310.000	100	94.210.000	100	94.210.000	100	94.210.000	100	94.210.000	100	94.210.000	100	547.360.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100	100	-	100	61.976.000	100	-	100	102.246.051	100	-	100	-	100	164.222.051	
KECAMATAN SINGOROJO							2.612.162.587		2.713.834.412		2.849.526.130		3.077.488.220		3.231.362.630		3.328.303.510		17.812.677.489	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.516.166.287	100	2.521.298.412	100	2.647.363.330	100	2.859.152.400	100	3.002.110.010	100	3.092.173.320	100	16.638.263.759	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100.00	100.00	8.534.000	100.00	13.000.000	100.00	13.650.000	100.00	14.742.000	100.00	15.479.100	100.00	15.943.470	100.00	81.348.570	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	80.00	80.00	20.747.500	80.00	57.500.000	80.00	60.375.000	80.00	65.205.000	80.00	68.465.250	80.00	70.519.210	80.00	342.811.960	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	63.376.800	100.00	72.036.000	100.00	75.637.800	100.00	81.688.820	100.00	85.773.270	100.00	88.346.460	100.00	466.859.150	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	-	100.00	11.000.000	100.00	11.550.000	100.00	12.474.000	100.00	13.097.700	100.00	13.490.630	100.00	61.612.330	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	90.00	90.00	3.338.000	90.00	39.000.000	90.00	40.950.000	90.00	44.226.000	90.00	46.437.300	90.00	47.830.420	90.00	221.781.720	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
KECAMATAN SUKOREJO						2.427.931.600		2.563.900.000		2.692.095.000		2.907.462.600		3.052.835.730		3.144.420.800		16.788.645.730	KECAMATAN SUKOREJO	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.292.021.600	100	2.355.982.000	100	2.473.781.100	100	2.671.683.590	100	2.805.267.770	100	2.889.425.800	100		15.488.161.860
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100	100	1.200.000	100	2.736.000	100	2.872.800	100	3.102.620	100	3.257.760	100	3.355.490	100		16.524.670
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	30,00	32	13.110.000	34	17.460.000	36,00	18.333.000	38	19.799.640	40	20.789.620	42	21.413.310	42		110.905.570
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100	90.490.000	100	91.620.000	100	96.201.000	100	103.897.080	100	109.091.930	100	112.364.690	100		603.664.700
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100	-	100	2.280.000	100	2.394.000	100	2.585.520	100	2.714.800	100	2.796.240	100		12.770.560
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100	100	31.110.000	100	93.822.000	100	98.513.100	100	106.394.150	100	111.713.850	100	115.065.270	100		556.618.370
KECAMATAN PATEAN						2.426.349.595		2.669.126.000		2.812.582.300		3.037.588.880		3.189.468.330		3.285.152.380		17.420.267.485	KECAMATAN PATEAN	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.306.749.595	100	2.388.326.000	100	2.399.182.300	100	2.512.088.880	100	2.644.018.330	100	2.631.252.380	100		14.881.617.485
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100.00	100.00	3.800.000	100.00	24.000.000	100.00	53.000.000	100.00	76.500.000	100.00	81.750.000	100.00	86.000.000	100.00		325.050.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	85,00	90.00	33.900.000	90.00	75.000.000	90.00	85.000.000	90.00	91.000.000	90.00	98.000.000	90.00	105.000.000	90.00		487.900.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	73.700.000	100.00	114.800.000	100.00	125.000.000	100.00	139.500.000	100.00	140.700.000	100.00	141.900.000	100.00		735.600.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	41.900.000	100.00	61.000.000	100.00	65.000.000	100.00	69.500.000	100.00	237.400.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENGANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	90,00	100.00	8.200.000	100.00	67.000.000	100.00	108.500.000	100.00	157.500.000	100.00	160.000.000	100.00	251.500.000	100.00	752.700.000	
	KECAMATAN PAGERUYUNG						2.389.357.770		2.674.870.000		2.808.613.500		3.033.302.580		3.184.967.710		3.280.516.740		17.371.628.300	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.241.760.770	100	2.493.700.000	100	2.618.385.000	100	2.827.855.800	100	2.969.248.590	100	3.058.326.050	100	16.209.276.210	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100.00	100.00	7.734.000	100.00	15.500.000	100.00	16.275.000	100.00	17.577.000	100.00	18.455.850	100.00	19.009.530	100.00	94.551.380	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Keseepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	30,00	33.00	35.375.000	35.00	37.520.000	37,00	39.396.000	39.00	42.547.680	40.00	44.675.060	42.00	46.015.320	42.00	245.529.060	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	75.600.000	100.00	82.800.000	100.00	86.940.000	100.00	93.895.200	100.00	98.589.960	100.00	101.547.640	100.00	539.372.800	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	10.528.000	100.00	19.350.000	100.00	20.317.500	100.00	21.942.900	100.00	23.040.050	100.00	23.731.250	100.00	118.909.700	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	18.360.000	100.00	26.000.000	100.00	27.300.000	100.00	29.484.000	100.00	30.958.200	100.00	31.886.950	100.00	163.989.150	
	KECAMATAN PLANTUNGAN						2.483.986.000		2.745.957.400		2.893.255.270		3.124.715.690		3.280.951.480		3.379.380.020		17.908.245.860	KECAMATAN PLANTUNGAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.359.616.000	100	2.528.319.800	100	2.654.735.790	100	2.867.114.650	100	3.010.470.390	100	3.100.784.500	100	16.521.041.130	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	80,00	90	3.630.000	92	11.090.000	94,00	11.644.500	96	12.576.060	98	13.204.860	100	13.601.010	100	65.746.430	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Keseepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	10,00	15.00	31.934.000	20.00	48.598.000	30,00	51.027.900	45.00	55.110.130	65.00	57.865.640	75.00	59.601.610	75.00	304.137.280	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	90.00	90.00	80.346.000	92.00	114.598.000	94,00	120.327.900	96.00	129.954.130	98.00	136.451.840	100.00	140.545.390	100.00	722.223.260	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%						20,00	10.000.000	60.00	10.800.000	80.00	11.340.000	100.00	11.680.200	100.00	43.820.200	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	80,00	90.00	8.460.000	92.00	43.351.600	94,00	45.519.180	96.00	49.160.720	98.00	51.618.750	100.00	53.167.310	100.00	251.277.560	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENGANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
KECAMATAN ROWOSARI							2.539.299.750		2.736.366.570		2.873.184.900		3.103.033.690		3.258.191.670		3.355.937.430		17.866.014.010	KECAMATAN ROWOSARI		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.436.711.750	-	100	-	2.608.016.570	100	-	100	2.957.490.790	-	3.105.365.330	-	3.198.526.290		-	17.044.528.130
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100.00	100.00	1.947.000	-	100.00	-	2.820.000	100.00	-	100.00	-	3.357.770	-	3.458.510	-		17.742.160	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	30,00	35,00	12.147.000	-	45,00	-	19.400.000	50,00	-	60,00	-	70,00	-	80,00	-		120.808.750	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	84.972.000	-	100.00	-	87.440.000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		574.734.020	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	-	-	100.00	-	11.460.000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		64.188.840	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	3.522.000	-	100.00	-	7.230.000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		44.012.110	
KECAMATAN KANGKUNG							2.622.893.460		2.655.172.000		2.787.930.600		3.010.965.050		3.161.513.300		3.256.358.700		17.494.833.110	KECAMATAN KANGKUNG		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.509.958.460	-	100	-	2.448.772.000	100	-	100	-	100	-	100	-		16.225.826.735	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100.00	100.00	-	-	100.00	-	3.600.000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		20.164.036	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	2,00	5,00	16.635.000	-	40,00	-	45.000.000	45,00	-	50,00	-	55,00	-	60,00	-		268.685.445	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	82.800.000	-	100.00	-	97.800.000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		630.589.634	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	-	-	100.00	-	20.000.000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		112.022.420	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	13.500.000	-	100.00	-	40.000.000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		237.544.840	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
KECAMATAN RINGINARUM							2.159.916.380		2.244.500.000		2.356.725.000		2.545.263.000		2.672.526.150		2.752.701.930		14.731.632.460	KECAMATAN RINGINARUM
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	1.826.491.380	100	1.906.800.000	100	1.994.025.000	100	2.157.563.000	100	2.259.826.150	100	2.315.001.930	100	12.459.707.460	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100	100	121.620.000	100	147.000.000	100	172.000.000	100	197.000.000	100	222.000.000	100	247.000.000	100	1.106.620.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	25	25	87.595.000	26	57.500.000	27,00	57.500.000	29	57.500.000	31	57.500.000	33	57.500.000	33	375.095.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100	50.400.000	100	64.800.000	100	64.800.000	100	64.800.000	100	64.800.000	100	64.800.000	100	374.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani / kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100	20.500.000	100	13.400.000	100	13.400.000	100	13.400.000	100	13.400.000	100	13.400.000	100	87.500.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100	100	53.310.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	328.310.000	
KECAMATAN NGAMPEL							2.466.344.070		2.515.940.000		2.641.737.000		2.853.075.960		2.995.729.760		3.085.601.650		16.558.428.440	KECAMATAN NGAMPEL
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.312.207.070	100	2.393.317.000	100	2.512.983.000	100	2.714.020.960	100	2.849.722.760	100	2.935.213.650	100	15.717.464.440	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100.00	100.00	5.984.000	100.00	5.318.000	100.00	5.584.000	100.00	6.031.000	100.00	6.332.000	100.00	6.522.000	100.00	35.771.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	50.00	50.00	59.218.000	50.00	15.253.000	50.00	16.016.000	50.00	17.297.000	50.00	18.162.000	50.00	18.707.000	50.00	144.653.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	83.358.000	100.00	95.124.000	100.00	99.880.000	100.00	107.871.000	100.00	113.264.000	100.00	116.662.000	100.00	616.159.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	5.577.000	100.00	6.928.000	100.00	7.274.000	100.00	7.856.000	100.00	8.249.000	100.00	8.497.000	100.00	44.381.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN							2.415.682.604		11.806.956.712		7.397.304.550		5.989.088.910		3.288.543.360		3.387.199.660		34.284.775.796	KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100	100	2.260.632.604	-	100	-	11.596.956.712	-	100	-	5.773.628.910	-	100	-	3.154.179.670		-	33.045.512.806
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jml pelimpahan wewenang yg dilaksanakan / semua pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat x 100	%	100.00	100.00	8.810.000	-	100.00	-	15.000.000	-	100.00	-	17.010.000	-	100.00	-	18.396.315		-	92.826.815
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Total usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten/ Total Usulan Masyarakat Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan x 100	%	3,00	10,00	48.200.000	-	45,00	-	70.000.000	-	50,00	-	73.500.000	-	55,00	-	83.349.000		-	85.849.470
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani / jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100.00	100.00	73.440.000	-	100.00	-	85.000.000	-	100.00	-	89.250.000	-	100.00	-	101.209.500		-	104.245.785
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu/seluruh jml desa x 100	%	100.00	100.00	24.600.000	-	100.00	-	40.000.000	-	100.00	-	21.000.000	-	100.00	-	22.680.000		-	23.814.000
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						7.357.590.270		7.889.200.000		8.164.333.640		8.980.767.000		9.929.805.350		10.627.699.510		52.949.395.770			
8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.357.590.270		7.889.200.000		8.164.333.640		8.980.767.000		9.929.805.350		10.627.699.510		52.949.395.770			
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Realisasi ketercapaian penunjang urusan dibanding target penunjang urusan	%	100.00	100.00	2.513.231.270	-	100.00	-	3.900.800.000	-	100.00	-	4.017.824.000	-	100.00	-	4.419.606.400	-	4.640.586.720	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan		%	75,00	77,00	567.990.000	-	79,00	-	618.000.000	-	81,00	-	648.900.000	-	83,00	-	713.790.000	-	749.479.500	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik		%	75,00	77,00	2.283.474.000	-	79,00	-	2.065.518.000	-	81,00	-	2.127.483.540	-	83,00	-	2.340.231.890	-	2.457.243.490	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham terhadap tujuan dan fungsi ormas		%	75,00	77,00	412.400.000	-	79,00	-	268.982.000	-	81,00	-	282.431.100	-	83,00	-	310.674.210	-	476.207.910	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa		%	75,00	77,00	42.725.000	-	79,00	-	332.000.000	-	81,00	-	348.600.000	-	83,00	-	383.460.000	-	552.633.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini		%	75,00	77.00	1.537.770.000	79.00	703.900.000	81,00	739.095.000	83.00	813.004.500	85.00	1.053.654.730	87.00	1.254.264.360	87.00	6.101.688.590	
	TOTAL						2.312.194.067.943		2.437.603.775.879		2.446.417.666.527		2.561.624.785.430		2.557.375.206.109		2.603.443.213.844		14.918.658.715.732	

**BAB VIII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

**Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kendal**

**Indikator Kinerja Kunci per
Urusan Kabupaten Kendal**

**Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal**

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kendal selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1, sedangkan indikator kinerja kunci Kabupaten Kendal disajikan dalam Tabel 8.2.

Untuk indikator urusan perangkat daerah per aspek, sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah, sedangkan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian urusan Perangkat Daerah.



Tabel 8.1

Indikator Kinerja Tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kendal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Misi I: Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).									
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	-1,53	2,5-3,2	4,28-5,5	5,33-5,64	5,38-5,70	5,43-5,76	5,49-5,82	5,49-5,82
2.	Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,036	0,26	0,43	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45
3.	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,56	7,14	6,73	5,63	5,43	5,23	5,15	5,15
4.	Angka Kemiskinan	%	9,99	9,89-9,79	9,79-9,59	9,59-9,39	9,39-9,19	9,19-8,89	8,89-8,69	8,89-8,69
5.	Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,1	3,1	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,6
	Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0									
6.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	72,29	72,61	73,61	74,61	75,61	76,61	77,61	77,61
7.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	92,85	92,95	93,05	93,1	93,2	93,3	93,4	93,4
	Misi III: Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan									
8.	Angka kriminalitas	Per 100.000 penduduk	151	150	149	148	147	146	145	145
9.	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10.	Indek Desa Membangun	indeks	0,7095	0,7190	0,7205	0,7220	0,7235	0,7250	0,7265	0,7265
Misi IV: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan										
11.	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	%	80,212	80,158	80,908	82,050	83,198	84,344	85,490	85,490
12.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,78	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82
13.	IRBI (Indek Resiko Bencana)	Indeks	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.										
14.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,39	64,41	66,35	67,75	68,32	69,2	69,5	69,5
15.	Nilai SAKIP	nilai	66,31	68,55	70,55	72,55	75,55	77,55	80,10	80,10
16.	Indeks SPBE	indeks	3,76	2,76	3,13	3,43	3,75	3,91	3,91	3,91



Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Urusan Kabupaten Kendal

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan											
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	%	87,66	100	100	100	100	100	100	100	Pendidikan
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pendidikan pada sekolah dasar	%	94,56	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Pendidikan pada sekolah menengah pertama	%	73,88	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	kesetaraan	%	18,17	100	100	100	100	100	100	100	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk	Per 1000 Penduduk	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,85	0.85	Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Cakupan rumah sakit terakreditasi minimal strata utama di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	80	80	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	92.56	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	98.40	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	99.58	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	68.44	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	%	23.24	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan orang usia 15–29 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	36.81	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	34.93	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	13.35	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	32.73	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	61.67	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	29,79	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	30,87	100	100	100	100	100	100	100	
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Perbandingan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dibanding Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/kota	%	19,14	18,19	17,18	16,21	15,19	14,23	13,83	13,83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas Irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pelihara dibanding luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73,00	75,45	75,45	
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM JP	%	93,35	94,93	96,11	97,30	98,48	99,67	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	dan BJP terlindungi dibanding jumlah total rumah tangga										
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	91,62	91,82	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77	92,77	
5.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah IMB (PBG) yang rekomendasi teknisnya diterbitkan dibanding jumlah pemohon IMB (PBG)	%	54,82	85,29	85,5	86	86,5	87	88	88	
6.	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	Total Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang berbanding dengan Total Panjang Jalan Kabupaten	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78	
7.	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Prosentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analis dibanding tenaga jasa konstruksi yang dilatih	%	28,94	34,11	47,03	59,95	72,87	85,79	98,71	98,71	
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase kecelakaan kerja pada proyek Pemda	%	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman												
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas total kawasan kumuh dibawah 10 ha x 100	%	74,82 (SK Lama)	0,74 (SK baru)	1,48	2,23	2,97	3,71	4,45	4,45	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah RTLH yang diberi bantuan dan peningkatan rumah swadaya	%	13,09	12,72	12,39	12,05	11,72	11,39	11,06	11,06	
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Perumahan memiliki PSU dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Penyelesaian gangguan trantibum yang ditemukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana	%	6,85	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Korban kebakaran yang dapat ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti -----X 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%	50	100	100	100	100	100	100	100	Sosial
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kcbutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di	%	2	4	6	8	10	14	16	16	Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		kabupaten/kota										
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	%	19	20	25	30	35	40	45	45	
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan ----- Jumlah tenaga kerja	Rp/Ora ng	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan	%	0	50	55	60	63	65	68	68	
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan --- ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	%	51,07	55	58	60	63	65	68	68	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
1.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingix 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan -----X 100.000 Jumlah penduduk perempuan	/100.000 penduduk perempuan	4,96	20	20	20	20	20	20	20	
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan												
1	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	Permentan No. 11 / Permentan / KN. 130 / 4 / 2018 Tentang penetapan jumlah cadangan beras (konversi dari gabah) = 80% x cadangan beras provinsi x (jumlah penduduk Kendal / jumlah penduduk Jawa Tengah)	%	4,85	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,90	Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka yang menunjukkan kualitas kinerja pengelolaan LH di suatu daerah dalam 1 tahun berdasarkan perhitungan IKA, IKU dan IKTL	nilai	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82	Lingkungan Hidup
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase penanganan sampah dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan daur ulang sampah.	%	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase berkurangnya penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	35	40	45	50	55	60	60	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Kab/Kota											
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
1.	Perekaman KTP elektronik	Perbandingan jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun keatas.	%	99,79	99,81	99,83	99,85	99,87	99,89	99,91	99,91	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Perbandingan anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki KIA terhadap jumlah anak usia 0-17	%	33,09	34	35	36	37	38	39	39	
3.	Kepemilikan akta kelahiran	Perbandingan jumlah anak 0- 18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran terhadap keseluruhan jumlah anak usia 0 -18	%	95,67	96	96,5	97	97,5	98	98,5	98,5	
4.	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	Perbandingan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan terhadap jumlah keseluruhan OPD di Kabupaten	%	4	10,7	10,2	20,41	30,61	40,82	44,9	44,9	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta memiliki kemampuan mengelolanya dan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan	%	4,51	4,88	5,63	6,76	7,89	9,02	10,15	10,15	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. <i>Jumlah Desa Mandiri tahun ini - Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) / Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) x 100 %</i>										
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana												
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)		Indeks	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern -----x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	%	65	69	69	70	70	71	71	71	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani -----x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	%	15,77	15	14	13	12	11	10	10	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan												
1.	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan:	%	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		IK1 (Angkutan Jalan a. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP) b. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu										
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi jumlah OPD	%	41,31	45	50	55	65	70	75	75	Komunikasi dan Informatika
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan	%	19,77	20,90	22,03	23,16	24,29	25,42	26,55	26,55	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk	%	51,48	54	61	63	65	67	70	70	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
1.	Persentase Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi kali 100 %	%	78	78	78,4	78,8	79,2	79,6	80	80	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan kali 100 %	%	4,8	5,1	5,7	5,9	6,1	6,2	6,4	6,4	
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
1.	Nilai realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi	Rp Trilyun	3,146	1,61	2,5	2,75	3	3,3	3,6	16,76	Penanaman Modal
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga											
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada kegiatan ekonomi mandiri/ jumlah pemuda dikota x 100%	%	0,44	0,88	0,92	0,97	1,01	1,06	1,10	1,10	Pemuda dan Olahraga
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi sosial kemasyarakatan di kota/ jumlah pemuda di kota x 100%	%	15,11	15,49	15,72	15,94	16,16	16,38	16,60	16,60	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik											
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi jumlah OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai perarea keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian	skor	N/A	130	150	175	200	225	250	250	Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												
1.	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	budaya lokal yang dilestarikan dibagi total budaya lokal x 100	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan
2.	Persentase cagar budaya yang diselestarikan	Cagar budaya yang dilestaikan dibagi total cagar budaya	%	3	100	100	100	100	100	100	100	
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan												
1.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Dilakukan dengan metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca.	%	40,37	40,37	40,50	40,80	41,00	41,30	41,50	41,50	Perpustakaan
2.	Indeks Pmbangunan Literasi Masyarakat	Pengukuran terhadap usaha pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi mayarakat. Formulasi Indikatornya : 1. Pemerataan Layanan;	%	7,7	7,9	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,0	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		2. Ketercukupan Koleksi; 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat; 5. Jumlah Perpustakaan Ber-SNP 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan; 7. Anggota Perpustakaan;										
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahanakuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15	76,25	76,35	76,35	Kearsipan
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari	%	91,66	91,68	91,70	91,72	91,73	91,74	91,75	91,75	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK										
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan											
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya	kg	26.310.557	27.329.687	28.186.222	29.073.233	29.991.244	30.941.807	31.925.497	177.447.690	Kelautan dan Perikanan
2	Angka Konsumsi Ikan	Rerata konsumsi ikan per kapita per tahun	Kg/kap /th	30,92	32,5	34,1	35,8	37,6	39,5	41,4	41,4	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
1	PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah	Rp	546.551.020	1.093.102.000	2.441.600.000	2.630.200.000	2.819.800.000	3.084.400.000	3.399.000.000	15.468.102.000	Pariwisata
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produksi pertanian (padi) dibagi luas panen	Ku/ha	54,25	54,75	55,25	55,75	56,25	56,75	57,25	57,25	Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Produksi pertanian (jagung) dibagi luas panen	Ku/ha	68,19	68,69	69,19	69,69	70,19	70,69	71,19	71,19	
		Produksi pertanian (bawang merah) dibagi luas panen	Ku/ha	93,35	93,60	93,85	94,10	94,35	94,60	94,85	94,85	
		Produksi pertanian (cabe) dibagi luas panen	Ku/ha	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	70,50	
		Produksi pertanian (kopi) dibagi luas panen	Ku/ha	7,34	7,44	7,55	7,66	7,77	7,88	7,99	7,99	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Upaya pengendalian penyakit hewan yang menular	%	0,56	0,2	0,01	0,01	0,01	0,008	0,008	0,008	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												
1	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota kali 100%	%	19,18	50	70	90	95	96	100	100	Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian												
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) kali 100%	%	0,00	0,00	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	Perindustrian
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian												
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas -----X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	%	207,23	210	210	215	215	220	225	225	Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	kesehatan)											
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8,08	8,09	8,09	8,1	8,11	8,12	8,13	8,13	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan												
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensiX 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,2	23,21	23,22	23,23	23,24	23,25	23,26	23,26	Pendidikan dan Pelatihan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan												
1	Maturitas SPIP	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian internal	level	3	3	3	3	3	3	3	3	Pengawasan
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang harus dimiliki APIP untuk mewujudkan peran APIP secara efektif	level	3	3	3	3	3	3	3	3	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan												
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasiX 100% total belanja APBD dikurangi satu	%	-9,53	-12,20	-20,05	-21,68	-25,44	-25,72	-27,37	-27,37	Keuangan
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi -----	%	6,92	-7,53	-26,83	-26,69	-26,88	-26,44	-25,64	-25,64	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	dalam APBD	-----X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu										
3	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses invcntarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	%	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	Nilai realisasi SiLPA ----- -----X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya	%	7,15	7,89	7,02	6,24	5,55	4,94	4,39	4,39	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah												
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- -----x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	%		100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- -----X 100% total belanja langsung	%		75	76	77	78	79	80	80	

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
1.	APS Dikdas	Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar / jumlah penduduk berusia 7-15 tahun x 100%	%	94,56	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										
1.	AKI	Jumlah kasus kematian ibu hamil/jumlah kelahiran x 100.000 penduduk	AKI / 100.000 Penduduk	115,8	110	82	81	80,9	80,8	80,7	80,7
2.	AKB	Jumlah bayi meninggal/jumlah kelahiran hidup x 1.000 kelahiran hidup	AKB / 1000 Kelahiran Hidup	10,04	10	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,5
3.	Prevalensi Stunting	Jumlah kasus stunting pada balita/jumlah total balita x 100%	%	17,53	15	14,6	14,2	13,8	13,4	13,4	13,4
4.	Capaian SPM	Rata-rata pencapaian 12 SPM Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.	Persentase luas daerah irigasi kondisi baik	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100%	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73,00	75,45	75,45
2.	Persentase jalan kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang/ total panjang jalan kabupaten x 100%	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang jaringan drainase perkotaan dalam kondisi baik / total panjang jaringan drainase perkotaan x 100%	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	81,39
4.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Jumlah komulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM JP dan BJP terlindungi di dalam kabupaten / Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten x 100%	%	93,35	95,35	96,60	97,64	98,84	100,00	100,00	100,00
5	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh pelayanan SPALD / jumlah rumah tangga x 100%	%	91,62	91,82	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77	92,77
6	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatannya sesuai RTRW / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100%	%	80	80	82	84	86	88	90	90
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x100%	%	84,8	85,15	85,2	85,22	85,24	85,26	85,28	85,28
2.	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	Penanganan kawasan kumuh yang dilakukan berdasarkan luasan yang telah ditetapkan	%	74,82 (SK Lama)	0,74 (SK Baru)	1,48	2,23	2,97	3,71	4,45	4,45
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah	desa/kel	5	7	11	16	21	26	31	31
3.	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (respon time)	Jumlah kebakaran yang ditangani sesuai standar dibagi jumlah kasus kebakaran x 100%	Persen	97,44	97,44	97,44	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
1.	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti / Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan x 100%	%	65,92	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72	72,72
2	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi / Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga keseluruhan x 100%	%	26,53	26,53	33,33	40,14	46,94	53,74	53,74	53,74
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											
1.	Presentase penyerapan tenaga kerja	Jumlah pencari tenaga kerja yang terserap dibagi jumlah calon tenaga kerja x 100%	%	19	20	25	30	35	40	45	45
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi / jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x 100.000	/100.000 penduduk perempuan	20	20	20	20	20	20	20	20
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
1	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	Permentan No. 11 / Permentan / KN. 130 / 4 / 2018 Tentang penetapan jumlah cadangan beras (konversi dari gabah) = 80% x cadangan beras provinsi x (jumlah penduduk Kendal / jumlah penduduk Jawa Tengah)	%	4,85	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,90
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
1.	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	Jumlah bidang tanah milik pemda yang bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah milik pemda x 100%	%	42,01	47,21	56,13	65,06	73,98	82,9	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
1.	Indeks kualitas air	Jumlah titik pantau air sesuai dengan baku mutu dibagi jumlah titik pantau air x 100	Indeks	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,74
2.	Indeks kualitas udara	Jumlah titik pantau udara sesuai baku mutu dibagi jumlah titik pantau udara x 100	Indeks	75,16	72,7	72,79	72,88	72,96	73,06	73,15	73,15
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Jumlah KEHATI (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik dibagi jumlah KEHATI yang ada x 100	Indeks	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93	43,93
4.	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	Jumlah sampah yang dikelola dibagi jumlah sampah yang ditimbulkan x 100%	%	75,00	80,00	85,00	95,00	100,00	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1.	Persentase penduduk yang memiliki administrasi lengkap	Jumlah penduduk yang memiliki administrasi lengkap (KTP, KK, Akte Kelahiran) dibagi jumlah penduduk x 100%	%	99,79	99,81	99,83	99,85	99,87	99,89	99,91	99,91
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta memiliki kemampuan mengelolanya dan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (Jumlah Desa Mandiri tahun ini - Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) / Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) x 100 %	%	4,51	4,88	5,63	6,76	7,89	9,02	10,15	10,15
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana										
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur	Indeks		2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	65	69	69	70	70	71	71	71
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	15,77	15	14	13	12	11	10	10

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
1.	Persentase jaringan jalan yang memiliki trayek	Jumlah jaringan jalan yang memiliki trayek dibagi jumlah jaringan jalan x 100%	%	73	73	74	74	75	75	76	76
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi										
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks domain kebijakan internal SPBE merupakan tingkat kematangan aspek 1 (Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE) PermenPANRB 59 th 2020	Skor	3,41	2,6	3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2.	Indeks Domain Tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 2 (Perencanaan Strategis SPBE), aspek 3 (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan aspek 4 (Penyelenggara SPBE) PermenPANRB 59 th 2020	Skor	3,43	2,6	2,9	3	3,5	3,8	3,8	3,8
3.	Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks domain manajemen SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE), dan aspek 6 (Pelaksanaan Audit TIK) PermenPANRB 59 th 2020	Skor	NA	1	2	2	3	3	3	3
4.	Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks domain layanan SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 7 (Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan aspek 8 (Layanan Publik Berbasis Elektronik)	Skor	4,03	3,52	3,7	4,2	4,26	4,44	4,44	4,44

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	PermenPANRB 59 th 2020 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik merupakan rata-rata dari tingkat penilaian tahap 1 (informasi wajib berkala/ website), tahap 2 (SAQ/ Kuesioner Penilaian Mandiri yang terdiri dari : 1. Mengumumkan Informasi Publik, 2. Menyediakan Informasi Publik, 3. Pelayanan Informasi Publik, dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik), tahap 3 (verifikasi atas SAQ), tahap 4 (Uji publik penetapan peringkat) Per Komisi Informasi 5 th 2016	Skor	88,8	88,8	89	89,5	90	90,5	91	91
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset / jumlah seluruh koperasi x 100%	%	78	78	78,4	78,8	79,2	79,6	80	80
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	%	4,8	5,1	5,7	5,9	6,1	6,2	6,4	6,4
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
1.	Jumlah Investor baru	Jumlah investor baru yang masuk Kabupaten Kendal	investor	903	432	650	715	786	864	950	4.397,00
2.	Nilai IKM	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	skor	83,33	83	83,6	84	84	85	85	85

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x 100%	%	0,44	0,88	0,92	0,97	1,01	1,06	1,1	1,1
2.	Jumlah atlet olah raga yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	Jumlah atlet olah raga yang berprestasi	atlet	35	100	120	130	140	150	160	160
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
1.	Prosentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	Jumlah perangkat daerah dengan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia / jumlah perangkat daerah x 100%	Prosen	NA	10	15	25	40	50	70	70
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
2.	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi merupakan rata-rata dari tingkat kelengkapan dan kematangan area 1 (tata kelola KAMI), area 2 (pengelolaan resiko KAMI), area 3 (kerangka kerja KAMI), area 4 (pengelolaan aset informasi), area 5 (teknologi dan KAMI), dan area 6 (suplemen) Permendagri 18 th 2020	Skore	N/A	130	150	175	200	225	250	250

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan										
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase benda dan tak benda cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan										
1.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat digunakan untuk mengukur nilai tingkat kegearan membaca masyarakat pada usia membaca (umur 15 - 69 tahun) dengan menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel/indikator utama seperti : 1. I dikator Frekuensi membaca per minggu, 2. Indikator durasi membaca/ lama membaca per hari, 3. Indikator jumlah bahan bacaan yang ditamatkan per tahun. Rumus Nilai tingkat membaca = ((Total score / Jumlah Responden)/5)x100%	%	40,37	40,37	40,50	40,80	41,00	41,30	41,50	41,50
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan										
1.	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan terpelihara	Untuk menghitung persentase arsip daerah yang dilestarikan dan terpelihara adalah dengan menghitung jumlah arsip di 4 Depo yaitu : 1. arsip teratur / sudah diolah = 136.257 berkas = 2,725 m1 2. arsip acak/belum diolah =355,8 m1 3. seluruh arsip dipelihara di di fumigasi serta dilakukan pengamanan dan perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		dari bencana (banjir/ kebakaran/ pencurian/ kerusakan)									
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan											
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya	kg	26.310.557	27.329.687	28.186.222	29.073.233	29.991.244	30.941.807	31.925.497	31.925.497
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
1	persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Kunjungan wisata tahun N - Jumlah kunjungan Tahun N-1 / Jml Kunjungan wisata Tahun N-1 x 100%	%	-63,24	5,84	5,6	5,98	5,95	6,06	6,06	6,06
2	Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan/ jumlah pelaku ekraf yang ada x 100%	%	6	6	12	18	24	30	36	36
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produksi pertanian (padi) dibagi luas panen	Ku/ha	54,25	54,75	55,25	55,75	56,25	56,75	57,25	57,25
		Produksi pertanian (jagung) dibagi luas panen	Ku/ha	68,19	68,69	69,19	69,69	70,19	70,69	71,19	71,19
		Produksi pertanian (bawang merah) dibagi luas panen	Ku/ha	93,35	93,60	93,85	94,10	94,35	94,60	94,85	94,85
		Produksi pertanian (cabe) dibagi luas panen	Ku/ha	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	70,50
		Produksi pertanian (kopi) dibagi luas panen	Ku/ha	7,34	7,44	7,55	7,66	7,77	7,88	7,99	7,99
2	Produksi daging sapi	Jumlah daging sapi	ton	908	973	994	1.014	1.034	1.054	1.074	1.074
3	Produksi daging ayam ras	Jumlah daging ayam ras	ton	14.931	15.180	15.300	15.450	15.600	15.850	16.000	16.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan											
1	Persentase pasar yang layak fungsi	Jumlah pasar yang layak fungsi dibagi jumlah pasar yang ada x 100%	%	0	7,69	15,38	23,07	30,76	38,46	46,15	46,15

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting	Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting / total barang pokok dan barang penting x 100%	%	148	150	150	150	150	150	150	150
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian											
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) kali 100%	%	0	0	20	40	50	60	70	70
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian											
1	Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja	Nilai Dimensi Disiplin + Dimensi Kinerja + Dimensi Kualifikasi IP ASN	Skor	42,66	42,66	42,67	42,7	42,72	42,72	42,72	42,72
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan											
1	Dimensi Kompetensi	Nilai Kompetensi IP ASN	Skor	32,62	33	33,62	34	34	35	36	36
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan											
1	Nilai PMPRB			B	B	B	B	B	B	B	B
2	Nilai rata-rata SAKIP OPD yang dievaluasi	Jumlah nilai total SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi/total Perangkat Daerah yang dievaluasi	Nilai	66,31	68,55	70,25	72,25	73,55	75,55	77,55	77,55
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan											
1	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Seperangkat dimensi terdiri dari enam dimensi yakni (1) Kesesuaian dokumen	rentang IPKD	0	79,325	79,326	79,327	79,328	79,329	79,330	79,330

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		perencanaan dan penganggaran, (2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).									
2	KFD (Kapasitas Fiskal daerah)	Kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu	rentang IKFD	0,733	0,800	0,8500	0,900	0,900	0,950	1,000	1,000
3	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	Realisasi PAD dibagi realisasi keseluruhan pendapatan dikalikan 100%	%	21	16	19,66	19,93	20,13	20,52	21,10	21,10
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan											
1.	Nilai Perencanaan Dalam Sakip	Jumlah skor nilai perencanaan dalam sakip kabupaten	Skor	22,52	22,77	23,01	23,26	23,50	23,75	24,00	24,00
2.	Persentase realisasi sasaran pembangunan	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang tercapai / jumlah indikator x 100%	%	62,5	60,6	75,76	81,80	90,91	93,94	96,97	96,97
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan											
1.	Indek Inovasi Daerah	Jumlah skor inovasi di daerah	kategori	Sangat Inovatif (4239)	Inovatif (30)	Inovatif (32)	Inovatif (34)	Inovatif (36)	Inovatif (38)	Inovatif (40)	Inovatif (40)
2	Persentase penelitian dan pengembangan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang	%	NA	NA	5	10	15	20	25	25

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	yang diimplementasikan	dilaksanakan / jumlah penelitian dan pengembangan yang tersedia dalam SIJELI x 100%									
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat daerah											
1.	Nilai Komponen pelaporan SAKIP	Nilai LHE (Komponen pelaporan)	Nilai	9	9,17	9,33	9,50	9,67	9,83	10	10
2.	Nilai penataan dan Penguatan Organisasi	Jumlah nilai penataan organisasi berbasis kinerja ditambah nilai penyederhanaan organisasi ditambah nilai hasil evaluasi kelembagaan	Nilai	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,5
3	Indek Tata Kelola PBJ	Indikator pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ untuk menghasilkan skor dan predikat penilaian di antaranya 100=sangat baik, > 80 s.d 99 = baik, > 60 s.d 80 = cukup, dan ≤ 60 = kurang	indek	30	40	50	60	70	80	80	80
4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Komponen kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dalam reformasi birokrasi	Nilai	70,66	72,21	73,76	75,31	76,86	78,41	79,96	79,96
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD											
1.	Indeks IKM (DPRD)	Jumlah anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD/Jumlah anggota DPRD x 100%	indeks	60	65	70	75	80	80	80	80
KECAMATAN KENDAL											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	75,57	70	71	72	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari	Skor	83	83,12	85	87	88	89	90	90

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		layanan pemerintah)									
KECAMATAN PATEBON											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	69,15	69,75	70	74	75	80	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	80	90,28	91	92	93	94	95	95
KECAMATAN PEGANDON											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	64,05	69,76	70	73	75	77	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	82,9	84,82	85	85,25	85,50	86	87	87
KECAMATAN WELERI											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	72,37	73	74	75	76	78	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	85,39	80,47	82	84	86	88	90	90
KECAMATAN GEMUH											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	71,64	72	72,5	73	73,5	74	75	75
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	87,905	88	88,5	89	89,5	91	91	91
KECAMATAN CEPIRING											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	83	84	85	87	88	89	90	90
KECAMATAN KALIWUNGU											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	62,79	70,03	71	73	75	77	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	91,18	95,55	96	96	96	96	96	96
KECAMATAN BRANGSONG											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	70	71	72	74	75	77	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat	Skor	79	80	83	85	87	89	90	90

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Masyarakat (IKM)	(kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)									
KECAMATAN BOJA											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	69	71	73	75	77	79	81	81
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	90	92	92	93	93	93	94	94
KECAMATAN LIMBANGAN											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	62,17	64	64,5	65	65	65	65	65
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	92,83	93	94	95	96	97	97	97
KECAMATAN SINGOROJO											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	71,18	71,2	71,3	71,4	71,5	71,8	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	91,19	91,2	91,5	91,7	91,9	92,1	92,2	92,2
KECAMATAN SUKOREJO											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	70,51	75,39	79,15	80,05	80,72	80,91	81,35	81,35
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	82,49	82,03	83,57	83,94	84,17	84,47	85,71	85,71
KECAMATAN PATEAN											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	63	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	82	84	85	87	88	89	90	90
KECAMATAN PAGERUYUNG											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	70,22	71	71,5	72	73	74	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	82	83	84	85	85,5	86	86,5	86,5
KECAMATAN PLANTUNGAN											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	60,86	61	62,5	63,5	65	66,5	68	68
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat	Skor	84,53	84,6	84,61	84,62	84,63	84,64	84,65	84,65

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Masyarakat (IKM)	(kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)									
KECAMATAN ROWOSARI											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	70,22	71	71,5	72	73	74	76	76
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	84	86	87	88	89	90	91	91
KECAMATAN KANGKUNG											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	78,76	79	79,5	80	80,5	81	82	82
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	87,55	88	88,5	89	89,5	90	91	91
KECAMATAN RINGINARUM											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	80	83	84	85	86	87	87	87
KECAMATAN NGAMPEL											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61,73	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	88,83	84	85	87	88	89	90	90
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	68,13	68,63	69,13	69,63	70,13	70,63	71,13	71,13
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	87,67	86,25	86,85	87,45	88,05	88,65	89,25	89,25
Urusan Pemerintahan Umum											
1.	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Jumlah kejadian konflik sosial yang ditangani / jumlah kejadian konflik sosial x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB IX PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal yang penyusunannya berpedoman pada arah dan kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025. RPJMD ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

RPJMD ini menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD, Penyusunan Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2021 – 2026.

Pencapaian target indikator kinerja daerah merupakan serangkaian pencapaian indikator program-program prioritas yang termuat dalam RPJMD ini dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat secara sinergis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Kendal berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah, maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Kendal (yang baru). RKPD Tahun 2027 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari RPJMD Kabupaten Kendal (yang baru). Selanjutnya RKPD dimaksud dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.

9.2 Kaidah Pelaksanaan.

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pendanaan dan waktu pelaksanaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal agar melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPJMD sebaik-baiknya;
2. Semua perangkat daerah Kabupaten Kendal berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan di Kabupaten Kendal;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, maka Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan di Kabupaten Kendal berkewajiban menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah secara berkala;
5. RPJMD Kabupaten Kendal menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kendal setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi, misi dan program/ kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Kendal.

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO